



BAPPEDA
KOTA SAMARINDA

RPJMD

KOTA SAMARINDA

2016 - 2021





WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah kota samarinda yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 1. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 3. penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. Visi dan Misi;
- d. strategi pembangunan Daerah;

- e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
- f. program Pembangunan Daerah; dan
- g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:

- BABI : PENDAHULUAN
- BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BABIV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BABVI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BABVIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BABIX : INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BABX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah “TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.
- (2) Misi RPJMD meliputi:
- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
 - b. memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan kota samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
 - c. mewujudkan ruang kota yang layak huni;
 - d. memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
 - e. mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, serta berdaya saing nasional dan internasional; dan

- f. mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota samarinda yang harmoni,berbudaya dan religius.

BAB V INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Indikator makro Pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD yang harus dicapai pada akhir periode lima tahun.
- (2) Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan ekonomi 6 ± 1 persen;
 - b. pertumbuhan penduduk 1,51 persen ;
 - c. indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 80,34;
 - d. tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,0-3,5 persen;
 - e. tingkat kemiskinan sebesar 3,67 persen;
 - f. tingkat inflasi sebesar 4-5 persen;dan
 - g. pendapatan perkapita sebesar 75,6 juta/tahun.
- (3) Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Walikota berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016

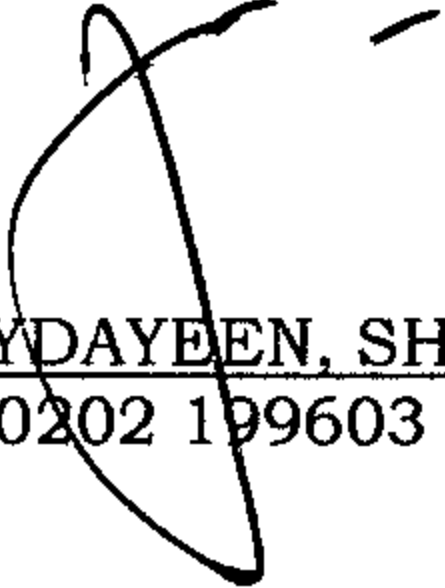
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


A. FYDAYEEN, SH
NIP. 19700202 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan di Kota Samarinda.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya, yaitu pada tahun 2021. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Walikota/Wakil Walikota periode 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015 dan selanjutnya Walikota/Wakil Walikota terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2016-2021 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka menengah berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang dengan memerhatikan keseimbangan berbagai aspek pembangunan.

Pasal 3

Angka 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk Periode 5 (lima) Tahun.

Angka 3 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-43
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-69
2.5. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2011-2015	II-78
2.6. Evaluasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal	II-88
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.3. Kerangka Pendanaan	III-19
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-22
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-6
5.3. Agenda Prioritas	V-13
5.4. Tujuan dan Sasaran	V-30
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan	VI-4
6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	VI-13
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
7.1. Program Pembangunan Daerah (<i>Dedicated Program</i>)	VII-1
7.2. Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan SKPD kepada Masyarakat	VII-27
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN	VIII-1



BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1. Pedoman Transisi	X-1
	10.2. Kaidah Pelaksanaan	X-2





DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 2.1.	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda	II-4
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah Kota Samarinda, Tahun 2014	II-5
Tabel 2.3.	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda, Tahun 2014	II-6
Tabel 2.4.	Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda, Tahun 2014	II-7
Tabel 2.5.	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, 2015	II-8
Tabel 2.6.	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	II-9
Tabel 2.7.	Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015	II-10
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2015 Hasil Proyeksi	II-10
Tabel 2.9.	Luas Baku dan Persentase Penggunaan Tanah Kota Samarinda, 2014	II-11
Tabel 2.10.	Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda	II-12
Tabel 2.11.	Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda	II-13
Tabel 2.12.	Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda	II-14
Tabel 2.13.	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011	II-15
Tabel 2.14.	Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-17
Tabel 2.15.	Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda	II-19
Tabel 2.16.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2015	II-22
Tabel 2.17.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2015	II-22
Tabel 2.18.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2015	II-24
Tabel 2.19.	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2011 – 2015	II-24
Tabel 2.20.	PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015	II-25
Tabel 2.21.	Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2011-2015 (Persen)	II-27
Tabel 2.22.	Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Samarinda, 2015	II-30
Tabel 2.23.	PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2011-2015	II-31
Tabel 2.24.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2009-2014	II-32
Tabel 2.25.	Distribusi Pendapatan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2010 - 2015 (persen)	II-34
Tabel 2.26.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015	II-36
Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota	II-36
Tabel 2.28.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kota Samarinda	II-37
Tabel 2.29.	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)	II-38
Tabel 2.30.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur	



	Tahun 2011–2015 (Tahun)	II-40
Tabel 2.31.	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Samarinda, Tahun 2015	II-42
Tabel 2.32.	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2011-2015	II-43
Tabel 2.33.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Samarinda, 2011-2015	II-45
Tabel 2.34.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Samarinda, 2011-2015	II-46
Tabel 2.35.	Perkembangan Angka Pendidikan Ditamatkan (APT) Kota Samarinda, 2011-2014 (persen)	II-47
Tabel 2.36.	Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2014/2015	II-48
Tabel 2.37.	Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2010-2014	II-48
Tabel 2.38.	Statistik Tenaga Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2014	II-49
Tabel 2.39.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Samarinda, 2011-2015	II-50
Tabel 2.40.	Bayi Gizi Buruk Kota Samarinda 2011-2015	II-50
Tabel 2.41.	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014	II-51
Tabel 2.42.	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan	II-52
Tabel 2.43.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2010-2014	II-52
Tabel 2.44.	Rasio Tempat Ibadah Kota Samarinda, 2011-2015	II-53
Tabel 2.45.	Luas Tempat Pemakaman Umum Kota Samarinda, 2011-2015	II-54
Tabel 2.46.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk Kota Samarinda, 2011-2015	II-55
Tabel 2.47.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014	II-55
Tabel 2.48.	Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh	II-57
Tabel 2.49.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Samarinda, 2011-2014	II-58
Tabel 2.50.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2009-2014	II-59
Tabel 2.51.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Kota Samarinda, 2011-2015	II-59
Tabel 2.52.	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Samarinda, 2013-2015	II-60
Tabel 2.53.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Samarinda, 2011-2015	II-61
Tabel 2.54.	Jumlah Peserta Program KB Aktif Kota Samarinda, 2011-2015	II-62
Tabel 2.55.	Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera Kota Samarinda, 2011-2015	II-62
Tabel 2.56.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2015	II-64
Tabel 2.57.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2013–2015 Kabupaten/Kota	II-64
Tabel 2.58.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015	II-65
Tabel 2.59.	Perkembangan Produksi Batubara Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)	II-68



Tabel 2.60.	Angka Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014	II-70
Tabel 2.61.	Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2010-2014	II-71
Tabel 2.62.	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014	II-72
Tabel 2.63.	Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014	II-72
Tabel 2.64.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014	II-73
Tabel 2.65.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014	II-74
Tabel 2.66.	Angka kriminalitas masuk dan diselesaikan Kota Samarinda, 2015	II-75
Tabel 2.67.	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2011-2015	II-77
Tabel 2.68.	Capaian Misi 1 Menciptakan dan meningkatkan fasilitas umum dan utilitas penunjang sector industri, perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolitan	II-79
Tabel 2.69.	Capaian Misi 2 penanggulangan persoalan banjir secara tuntas dan menyeluruh	II-81
Tabel 2.70.	Capaian Misi 3 penanggulangan persoalan kebakaran secara tuntas dan menyeluruh	II-82
Tabel 2.71.	Capaian Misi 4 Penciptaan dan Peningkatan Kehidupan Kesehatan Masyarakat	II-83
Tabel 2.72.	Capaian Misi 5 Mengembangkan Sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Yang Professional dan Religious	II-84
Tabel 2.73.	Capaian Misi 6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Income Perkapita Masyarakat Kota Samarinda ke Tingkat Pertumbuhan Yang Lebih Tinggi Dalam Setiap Tahun	II-85
Tabel 2.74.	Capaian Misi 7 Peningkatan Kehidupan Beragama, Pemuda dan Olahraga Serta Sosial Budaya Yang Lebih Dinamis dan Kondusif Sehingga Tercipta Iklim Kehidupan Yang Lebih Produktif	II-86
Tabel 2.75.	Capaian Misi 8 Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah	II-87
Tabel 2.76.	Capaian Misi 9 peningkatan good government dan pemerintah kota yang dinamis	II-88
Tabel 2.77.	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Samarinda Tahun 2015	II-89
Tabel 3.1.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Rupiah)	III-2
Tabel 3.2.	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-3
Tabel 3.3.	Pertumbuhan Realisasi APBD (Rupiah)	III-4
Tabel 3.4.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel 3.5.	Rata-rata Pertumbuhan Rincian Realisasi Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-7
Tabel 3.6.	Proporsi Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-8
Tabel 3.7.	Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Samarinda 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-9
Tabel 3.8.	Rasio Lancar Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-11
Tabel 3.9.	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Juta Rupiah)	III-12
Tabel 3.10.	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva (Juta Rupiah)	III-13
Tabel 3.11.	Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Juta Rupiah)	III-14



Tabel 3.12.	Rasio Perputaran Total Aktiva (Juta Rupiah)	III-14
Tabel 3.13.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015	III-16
Tabel 3.14.	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Samarinda (Juta Rp)	III-16
Tabel 3.15.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Samarinda (Juta Rp)	III-17
Tabel 3.16.	SILPA Kota Samarinda Tahun 2013-2015	III-18
Tabel 3.17.	Rasio Kemandirian Keuangan Kota Samarinda	III-19
Tabel 3.18.	Proyeksi Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	III-20
Tabel 3.19.	Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)	III-21
Tabel 3.20.	Proyeksi SILPA Kota Samarinda 2017-2021	III-23
Tabel 3.21.	Proyeksi Kapasitas Riil Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)	III-24
Tabel 3.22.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Samarinda (Juta Rupiah)	III-25
Tabel 4.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015	IV-4
Tabel 4.2.	Nilai LAKIP Kota Samarinda 2011-2014	IV-7
Tabel 4.3.	Rumusan Permasalahan : Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal	IV-8
Tabel 4.4.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015	IV-9
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015	IV-10
Tabel 4.6.	Rumusan Permasalahan: Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional	IV-14
Tabel 4.7.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2011-2015	IV-15
Tabel 4.8.	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011	IV-16
Tabel 4.9.	Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh	IV-16
Tabel 4.10.	Rumusan Permasalahan: Rendahnya Kualitas Penataan Lingkungan Kota Samarinda	IV-17
Tabel 4.11.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015	IV-18
Tabel 4.12.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015	IV-20
Tabel 4.13.	Rumusan Permasalahan: Masih Rendahnya Peranan Perekonomian Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IV-21
Tabel 4.14.	Indikator Sasaran dan Target Capaian Tahap Ketiga (2016-2021) RPJPD 2005-2025	IV-33
Tabel 4.15.	Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Jangka Menengah Kota Samarinda	IV-36
Tabel 5.1.	Keterkaitan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Nasional, Provinsi Kaltim, dan Kota Samarinda	V-27
Tabel 5.2.	Keterkaitan Agenda Prioritas Jangka Menengah Pembangunan Nasional, Provinsi Kaltim, dan Kota Samarinda	V-28
Tabel 5.3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	V-33
Tabel 6.1.	Keterkaitan Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda	VI-9



Tabel 6.2.	Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2023	VI-14
Tabel 6.3.	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	VI-18
Tabel 6.4.	Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda	VI-21
Tabel 6.5.	Potensi Pengembangan Kota Samarinda	VI-29
Tabel 6.6.	Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2019	VI-33
Tabel 7.1.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Agenda Prioritas Walikota Samarinda	VII-3
Tabel 7.2.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan SKPD	VII-27
Tabel 8.1.	Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif Kota Samarinda	VIII-3
Tabel 9.1.	Target Capaian Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2016-2021	IX-2
Tabel 9.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2016-2021	IX-3



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021	I-2
Gambar 1.2.	Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Samarinda	II-3
Gambar 2.2.	Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011	II-16
Gambar 2.3.	Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015	II-21
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015	II-21
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2011-2015	II-28
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, 2015	II-29
Gambar 2.7.	Laju Inflasi Kota Samarinda, 2010-2015	II-30
Gambar 2.8.	Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014	II-33
Gambar 2.9.	Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2010-2014	II-34
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2011-2015	II-35
Gambar 2.11.	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda 2011-2015	II-39
Gambar 2.12.	Harapan Lama Sekolah Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Tahun)	II-41
Gambar 2.13.	Angka Harapan Hidup Kota Samarinda Tahun 2011-2015	II-42
Gambar 2.14.	Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2015	II-44
Gambar 2.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda, 2011-2014	II-63
Gambar 2.16.	Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2014 (ton/ha)	II-66
Gambar 2.17.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-67
Gambar 2.18.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-67
Gambar 2.19.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-69
Gambar 2.20.	Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas Tertangani Kota Samarinda, 2011-2015	II-76
Gambar 4.1.	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kota Samarinda	IV-3
Gambar 4.2.	Kesesuaian Program RKPD dan APBD Kota Samarinda, 2015	IV-5
Gambar 4.3.	Kesesuaian Kegiatan RKPD dan APBD Kota Samarinda, 2015	IV-6
Gambar 4.4.	Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda, 1990-2014	IV-11
Gambar 4.5.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2012-2015	IV-12
Gambar 4.6.	Angka Harapan Hidup Kota Samarinda, Tahun 2011-2015	IV-13
Gambar 4.7.	Laju Inflasi Kota Samarinda, 2005-2015	IV-19
Gambar 4.8.	Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, 2008-2014	IV-20
Gambar 5.1.	Keterkaitan Smart City Principal, Kota Metropolitan, dan Sustainable Development	V-4
Gambar 5.2.	Keterkaitan Elemen Visi Kota Samarinda dengan Pembangunan Berkelanjutan	V-5



Gambar 5.3.	Keterkaitan Elemen Misi dengan Elemen Visi Kota Samarinda	V-12
Gambar 5.4.	Rencana Kebutuhan Pembiayaan untuk Normalisasi Sungai	V-17
Gambar 5.5.	Rencana Kebutuhan Pembiayaan untuk Normalisasi Saluran Banjir	V-18
Gambar 5.6.	Keterkaitan Misi dan Agenda Prioritas Jangka Menengah	V-26
Gambar 5.7.	Skema Keterkaitan antara Visi, Misi, Agenda Prioritas dengan Perumusan Tujuan & Sasaran	V-31
Gambar 6.1.	Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional	VI-1
Gambar 6.2.	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda, Tahun 2016-2021	VI-5
Gambar 6.3.	Peta Pola Ruang Kota Samarinda	VI-32
Gambar 9.1.	Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan Pembangunan dan <i>Good Governance</i>	IX-1





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya di Kota Samarinda, maka dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menggunakan sumber daya di daerah bagi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Untuk maksud tersebut diatas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda harus menyusun RPJMD Kota Samarinda dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

Dalam menyusun RPJMD Kota Samarinda, telah dilakukan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan Teknokratis, Partisipatif, Politik, Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

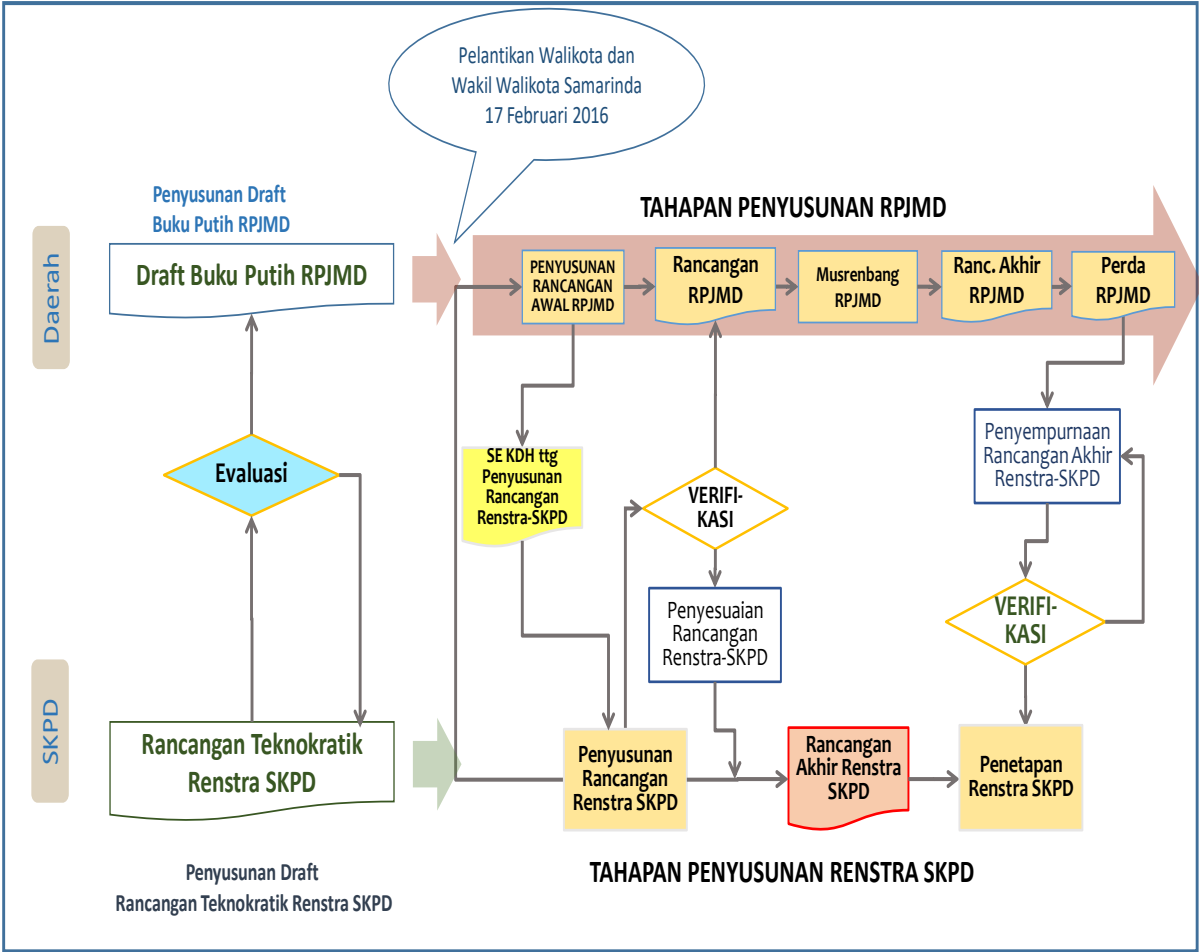
1. Pendekatan Teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan para pakar dan tenaga ahli yang sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD;
2. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan aspirasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen RPJMD ini;
3. Pendekatan politik dilakukan melalui penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang proses pembahasannya dilakukan bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan



program prioritas Walikota dan Wakil Walikota serta inventarisasi masukan dari Musrenbang yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD, baik sebelum maupun sesudah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda H.Syaharie Jaang dan H.Nusyirwan Ismail pada tanggal 17 Februari 2016 dapat dilihat pada gambar 1.1, hal ini dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renstra SKPD. Dasar dokumen perencanaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021





1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

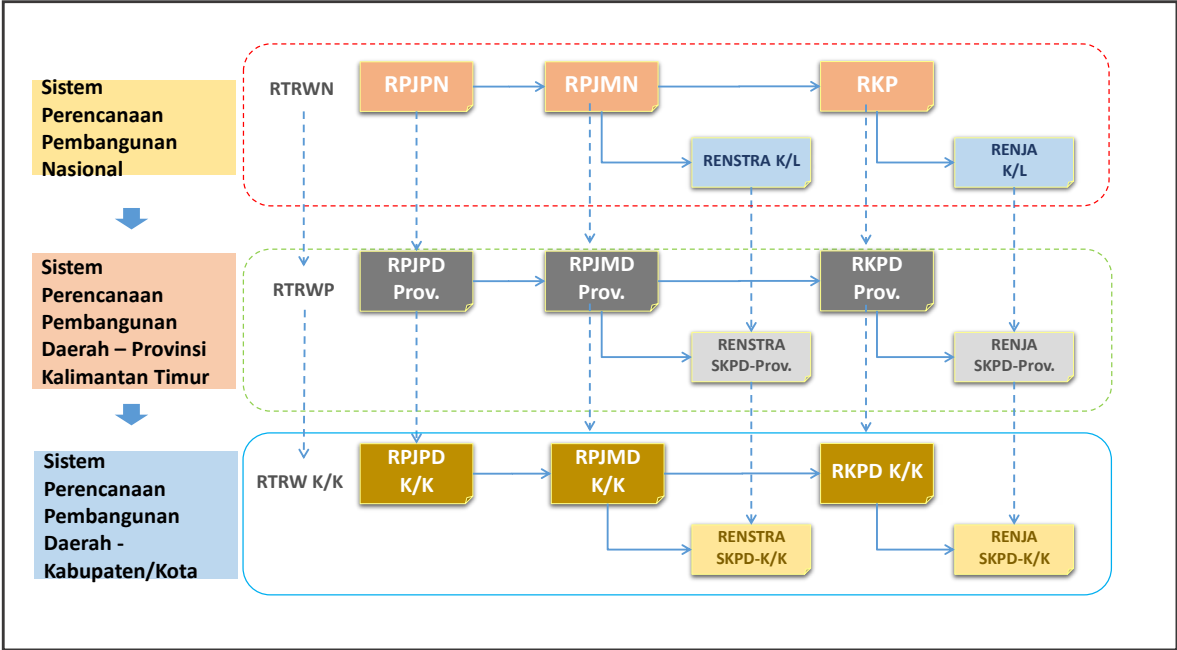
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034; dan
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2.
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 tahap ketiga. RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2011-2015 yang telah





dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Walikota. Secara substantif, isi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kota Samarinda pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi RPJPD Kota Samarinda.

Hubungan Antara RPJMD dan Renstra SKPD Kota Samarinda

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan sektoral yang tidak bisa dipisahkan dengan RPJMD, karena RPJMD merupakan acuan bagi renstra SKPD. Sasaran dan program prioritas RPJMD akan dicapai melalui program/kegiatan Renstra SKPD selama lima tahun mendatang. Implementasi dari RPJMD Kota Samarinda dituangkan didalam Renstra masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Walikota bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran RPJMD, sedangkan Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran renstra SKPD yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala SKPD dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dijabarkan tahun demi tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Walikota dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus dapat dipetakan dengan baik dan spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. SKPD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja SKPD. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antara Walikota dengan para pemangku kepentingan.

Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kota Samarinda

Implementasi RPJMD didasarkan pada rancangan RTRW Kota Samarinda 2014-2034, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kota Samarinda. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang



berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Samarinda dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Samarinda sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
	Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami





permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan dalam lima tahun ke depan disertai isu-isu strategis terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama lima tahun. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan berbagai strategi ke dalam kebijakan umum dalam mencapai sasaran RPJMD. Kebijakan umum diterjemahkan ke dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program prioritas pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda serta pagu anggaran setiap tahunnya pada periode 2016-2021.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah dalam lima tahun ke depan.

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Merupakan simpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 disertai penjelasan tentang kaidah-kaidah bagaimana melaksanakan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan Walikota atau perodesasi RPJMD berakhir.

1.5 Maksud dan Tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah,



masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Samarinda secara berkesinambungan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
2. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dan untuk penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Samarinda;
5. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, asal mula Kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak potensi sumber daya daerah dalam pelaksanaan pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Dalam mencapai target pembangunan daerah perlu adanya pengenalan yang cukup baik terhadap kondisi daerah. Sehingga akan mampu memaksimalkan segala potensi daerah yang ada. Gambaran umum kondisi daerah di Kota Samarinda memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kota Samarinda. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, kota Samarinda hanya terdiri atas 4 kecamatan yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 kecamatan terdiri dari 42 kelurahan. Jumlah kelurahan terus bertambah dengan diterbitkannya “Perda Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah kota Samarinda”; dan mengacu pada “Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan 11 kelurahan baru hasil dari pemecahan/pemekaran dalam wilayah kota Samarinda”, maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat,



maka ditetapkanlah Perda Nomor 02 tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi Kota Samarinda menjadi 10 Kecamatan dengan jumlah kelurahan yaitu 53. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Kota Samarinda kini memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara $117^{\circ}03'00''$ – $117^{\circ}18'14''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}19'02''$ – $00^{\circ}42'34''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km^2 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau.

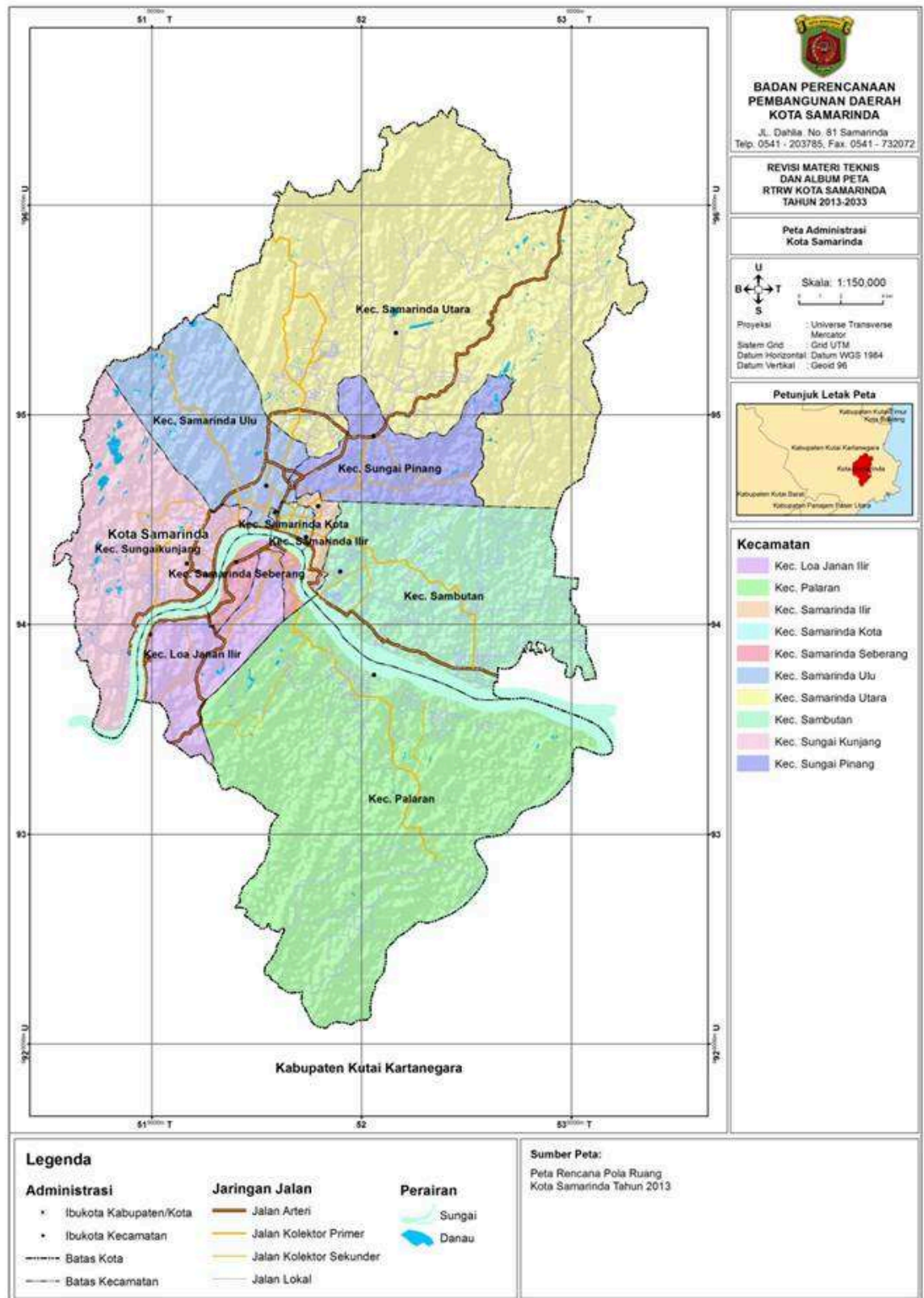
Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini sebagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 Km^2 yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec.Muara Badak (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Barat : Kec. Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara).





Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Samarinda





Tabel 2.1
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1. Palaran	1. Handil Bakti	72,00
	2. Simpang Pasir	65,00
	3. Rawa Makmur	11,89
	4. Bukuan	28,40
	5. Bantuas	44,00
2. Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
	2. Sungai Dama	2,50
	3. Sidodamai	2,87
	4. Sidomulyo	1,40
	5. Pelita	8,92
3. Samarinda Kota	1. Bugis	0,58
	2. Pasar Pagi	0,48
	3. Pelabuhan	0,72
	4. Sungai Pinang Luar	8,85
	5. Karang Mumus	0,49
4. Sambutan	1. Pulau Atas	29,59
	2. Sindang Sari	1,70
	3. Makroman	20,96
	4. Sambutan	31,00
	5. Sungai Kapih	17,70
5. Samarinda Seberang	1. Mesjid	2,53
	2. Mangkupalas	
	3. Tenun Samarinda	
	4. Baqa	2,31
	5. Sungai Keledang	7,65
	6. Gunung Panjang	
6. Loa Janan Ilir	1. Sengkotek	4,95
	2. Simpang Tiga	4,21
	3. Tani Aman	3,92
	4. Harapan Baru	6,33
	5. Rapak Dalam	6,72
7. Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16,90
	2. Loa Bakung	16,59
	3. Teluk Lerong Ulu	1,20
	4. Lok Bahu	3,42
	5. Karang Asam Ulu	2,25
	6. Karang Asam Ilir	1,29
	7. Karang Anyar	1,39
8. Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir	0,69
	2. Jawa	7,68
	3. Dadi Mulya	2,89
	4. Sidodadi	1,37
	5. Gunung Kelua	1,19





KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
(1)	(2)	(3)
	6. Air Hitam	2,65
	7. Air Putih	2,16
	8. Bukit Pinang	3,49
9. Samarinda Utara	1. Lempake	32,83
	2. Sempaja Selatan	40,34
	3. Sempaja Barat	
	4. Sempaja Timur	
	5. Sungai Siring	75,83
	6. Budaya Pampang	
	7. Tanah Merah	22,16
	8. Sempaja Utara	58,36
10. Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,30
	2. Bandara	8,59
	3. Sungai Pinang Dalam	8,97
	4. Mugirejo	10,94
	5. Gunung Lingai	4,36
Kota Samarinda		718,02

2.1.2 Kondisi Topografi

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39 persen berada pada kemiringan kurang dari 2 persen dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15 persen. Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah, sebagian besar luas wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai lebih dari 90 cm yakni seluas 39.833 Ha atau 55,48 persen.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah
Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Kelas Lereng (%)		
<2	19.663,19	27,39
2-15	18.290,88	25,47
15-25	10.630,59	14,81
25-40	11.248,92	15,67
>40	9.348,90	13,02
Perairan	2.617,52	3,65
Kelas Kedalaman (cm)		
<30	-	-
30-60	11.544,13	16,08
60-90	17.805,32	24,80
>90	39.833,03	55,48
Perairan	2.617,52	3,65

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2015



2.1.3 Kondisi Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong ke dalam jenis tanah: Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptiols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah
Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Jenis Tanah		
Aluvial	3.755	5,23
Gambut	17.720	24,68
Assosiasi Podsolik/Listeset	8.990	12,52
Podsolik	41.335	57,57
Lain-lain	3.755	5,23

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2015

2.1.4 Kondisi Fisiografi

Dari sisi fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (fault area) yang mencapai 41,12 persen dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 Km². Kemudian diikuti oleh daerah dataran (plain area) yang sebesar 10.524 Km² atau sebesar 14,66 persen dari luas Kota Samarinda. Sedangkan rawa dan sungai hanya menempati tidak lebih dari 56 Km² atau hanya 7,8 persen dari luas Kota Samarinda.





Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi
Kota Samarinda, Tahun 2014

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Fisiografi		
Lembah Aluvial	9.479	13,20
Daerah Dataran	10.524	14,66
Dataran Berombak	9.636	13,42
Dataran Bergelombang	1.527	2,13
Daerah Patahan	29.526	41,12
Daerah Berbukit	634	0,88
Rawa	218	0,30
Sungai	5.379	7,49
Lain-lain	4.877	6,79

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2015

2.1.5 Kondisi iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kota Samarinda beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kota Samarinda Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kota Samarinda kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2015, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,9⁰C. Suhu udara terendah 22,2⁰C terjadi pada bulan September dan tertinggi 36,0⁰C pada bulan Oktober. Dalam kurun waktu 2011-2014, Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang



relatif tinggi. Namun kondisi berbeda ditunjukkan Pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut Kota Samarinda mengalami kelembaban udara terendah (80%), curah hujan terendah (174,8 mm³), dan penyinaran matahari tertinggi (47%) selama lima tahun terakhir yaitu 2011 hingga 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Kota Samarinda mengalami musim kemarau terhebat selama 2011-2015 yang ditandai dengan rendahnya Hari Hujan (HH) selama 3 bulan berturut-turut yaitu Agustus (7 HH), September (1 HH), dan Oktober (8 HH). Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Samarinda. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai drainase primer dalam rangka pengendalian banjir serta tempat pembuangan air hujan.

Tabel 2.5
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, 2015

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (Mbs)	Kecepatan Angin (Knot)	Curah Hujan (mm ³)	Penyinaran Matahari (%)
	Min (°C)	Max (°C)	Rata-rata (°C)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Januari	23,9	31,7	26,9	83	1.012,8	2,0	344,8	31
2 Februari	24,2	32,0	27,0	83	1.013,1	2,0	193,0	38
3 Maret	24,6	32,6	27,5	81	1.013,4	3,0	197,8	53
4 April	24,5	33,1	27,8	81	1.012,2	4,0	343,7	50
5 Mei	23,5	34,8	27,8	84	1.012,7	3,0	213,5	47
6 Juni	22,8	34,0	27,5	83	1.012,4	4,0	259,2	36
7 Juli	22,4	33,9	27,5	80	1.013,1	4,0	162,7	52
8 Agustus	24,0	35,2	28,0	76	1.013,1	5,0	57,6	61
9 September	22,2	35,2	28,5	75	1.013,4	5,0	0,0	36
10 Oktober	23,2	36,0	28,9	74	1.013,8	5,1	73,2	51
11 November	23,4	35,0	28,4	80	1.012,0	3,8	60,9	49
12 Desember	23,6	35,6	28,6	78	1.012,7	4,6	191,4	58
Rata-Rata 2015	23,5	34,1	27,9	80	1.012,9	4	174,8	47
2014	24,0	34,0	27,7	81	1.011,9	4	210,2	41
2013	24,6	32,2	27,4	83	1.011,5	3	237,8	42
2012	24,6	32,3	28	81	1.010,0	3	202,0	42
2011	23,8	32,9	27,3	82	1.011,3	3	249,2	39

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Samarinda





2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia sangat menyadari potensi wilayahnya yang berdasarkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat dan luasan potensial wilayah pengembangannya. Sebagai Kota yang diperkirakan akan menjadi Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, kota ini hanya memiliki luas kedelapan terkecil di Provinsi Kalimantan Timur yaitu hanya 0.56% atau seluas 71.800 Hektar dari total wilayah Provinsi yaitu 12.726.752 Hektar dan penduduk terbanyak yaitu 23,71% dibandingkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 812.597 jiwa (2015) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yaitu 3.426.638 jiwa. Mengingat luas wilayah yang terbatas, fungsi kota sebagai Ibukota Provinsi, dan jumlah penduduk yang padat mengakibatkan Kota Samarinda perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruangnya.

Tabel 2.6
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Daratan		Kepadatan Penduduk Per Km ²
	Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Paser	11.192,93	8,79	23,64
2. Kutai Barat	15.630,60	12,28	10,64
3. Kutai Kartanegara	26.348,95	20,70	27,62
4. Kutai Timur	31.896,49	25,06	10,31
5. Berau	22.200,33	17,44	9,61
6. Panajam Paser Utara	3.211,55	2,52	52,75
7. Mahakam Ulu	15.315,00	12,03	1,34
8. Balikpapan	561,28	0,44	1.201,72
9. Samarinda	718,00	0,56	1.134,08
10. Bontang	192,56	0,15	1.001,13
Jumlah /Total	127.267,52	100	26,91

Sumber: Kaltim Dalam Angka, 2016



Tabel 2.7
Penyebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015

Kabupaten/Kota	Penyebaran Penduduk (%)			Laju Pertumbuhan Penduduk 2014-2015
	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paser	7,63	7,57	7,65	2,39
2. Kutai Barat	4,4	4,28	4,26	0,65
3. Kutai Kartanegara	20,85	20,69	20,95	2,48
4. Kutai Timur	8,98	9,07	9,34	4,28
5. Berau	6,03	6,00	6,10	2,79
6. Penajam Paser Utara	4,59	4,49	4,50	1,39
7. Mahakam Ulu	0,78	0,76	0,76	0,29
8. Balikpapan	18,14	17,88	17,96	1,73
9. Samarinda	23,84	24,54	23,71	1,96
10. Bontang	4,76	4,72	4,77	2,33
Jumlah	100	100	100	2,24

Sumber: Kaltim Dalam Angka, 2016

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2015 Hasil Proyeksi

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paser	244.111	249.991	256.175	262.301
2. Kutai Barat	143.101	144.018	144.892	145.838
3. Kutai Kartanegara	665.489	683.131	700.439	717.789
4. Kutai Timur	281.594	294.216	306.974	320.115
5. Berau	191.576	197.388	203.223	208.893
6. Penajam Paser Utara	148.034	150.205	152.119	154.235
7. Mahakam Ulu	25.522	25.678	25.894	25.970
8. Balikpapan	583.272	594.322	605.096	615.574
9. Samarinda	764.908	781.015	797.006	812.597
10. Bontang	152.089	155.880	159.614	163.326
Total	3.199.696	3.275.844	3.385.102	3.426.638

Sumber: Kaltim Dalam Angka, 2016

Adapun potensi pengembangan wilayah Kota Samarinda ke depannya dapat mengacu pada kebijakan Penataan Ruang terhadap Kota Samarinda yang dibagi menjadi 3 (tiga) sumber kebijakan yaitu 1) Pemerintah Pusat (RTRW Nasional); 2) Provinsi Kalimantan Timur (RTRW Provinsi); dan 3) RTRW Kota Samarinda.





a. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah salah satu Kota Besar di Provinsi Kalimantan Timur yang tingkat perkembangan kotanya sangat cepat. Sebagai calon Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, tantangan potensi pengembangan Kota Samarinda sangat luar biasa baik terhadap kebutuhan lahan yang terbatas yaitu 718 Km² dan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat sebagai potensi Sumber Daya Manusia dalam rangka menuju Kota Metropolitan dengan basis sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena itu, konsep *Waterfront City Development* yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Kota Samarinda mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing.

Tabel 2.9
Luas Baku dan Persentase Penggunaan Tanah Kota Samarinda, 2014

No.	Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	Lahan Sawah (yang ditanami padi)		
	a. Sawah irigasi	767	1,07
	b. Sawah non irigasi	1.344	1,87
	c. Sementara tidak diusahakan	3.409	4,75
2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah		
	a. Tegal/kebun	4.674	6,51
	b. Ladang/huma	1.823	2,54
	c. Perkebunan	4.840	6,74
	d. Lahan yang sementara tidak diusahakan	5.693	7,93
	e. Lainnya (hutan	8.920	12,40



No.	Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
	rakyat,tambak,kolam/empang dll		
3.	Lahan Bukan Pertanian (Rumah,bangunan dan halaman,hutan negara,rawa-rawa yang tidak ditanami)	40.330	56,17
	Jumlah/Total	71.800	100,00

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

Persentase penggunaan lahan di Kota Samarinda sebagian besar adalah lahan bukan pertanian sebesar 56,17 %, sedangkan lahan pertanian sebesar 43,81 % yang terdiri dari lahan sawah sebesar 7,69 % dan lahan pertanian bukan sawah 36,12 %, Hal ini menandakan bahwa Kota Samarinda masih sedikit pemanfaatan lahan pertanian sawahnya dan perlu ditingkatkan dengan program intensifikasi/ekstensifikasi dengan memberikan prioritas kepada komoditas unggulan pada sektor pertanian yang dikembangkan di Kota Samarinda seperti sawah irigasi, sawah tadah hujan, hortikultura (palawija), dan untuk perkebunan adalah jenis kakao dan kelapa sawit.

Tabel 2.10
Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Jenis Pertanian				
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Hortikultura	Kakao	Kelapa Sawit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu					
3.	Samarinda Ilir					
4.	Samarinda Seberang					
5.	Samarinda Utara	x			x	
6.	Palaran		x	x		x
7.	Sungai Pinang					
8.	Sungai Kunjang		x			
9.	Sambutan	x				
10.	Loa Janan Ilir		x			





Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Komoditas unggulan pada sektor peternakan yang dikembangkan di Kota Samarinda adalah ternak sapi, ternak babi dan ternak unggas seluas 4,301 Hektar. Selanjutnya rumah Pemotongan Unggas (RPU) terletak di Kecamatan Samarinda utara dan Loajanan Ilir, sementara itu lokasi ternak babi dan rumah Pemotongan Hewan Babi keduanya terletak di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara seperti yang terlampir pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda

Komoditas Unggulan								
No.	Kecamatan	Ternak Sapi	Ternak Unggas	RPU	Ternak Babi & RPH	Pasar Hewan	Teaching Farm	Rumah Kemasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Samarinda Kota							
2.	Samarinda Ulu							
3.	Samarinda Ilir							
4.	Samarinda Seberang							
5.	Samarinda Utara	x	x	x	x	x	x	x
6.	Palaran	x	x					
7.	Sungai Pinang							
8.	Sungai Kunjang							
9.	Sambutan	x	x					
10.	Loa Janan Ilir			x				

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034



Tabel 2.12
Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sbr Daya Ikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu				x	
3.	Samarinda Ilir					
4.	Samarinda Seberang	x				
5.	Samarinda Utara	x	x	x		x
6.	Palaran	x		x	x	x
7.	Sungai Pinang		x			
8.	Sungai Kunjang				x	
9.	Sambutan	x	x	x		
10.	Loa Janan Ilir			x		

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

b. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Samarinda. Dalam wilayah Kota Samarinda terdapat beberapa jenis galian yang potensial. Bahan galian yang potensial yang terdapat di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah bahan galian golongan A dan bahan galian golongan C. Untuk bahan galian Golongan A ini khususnya





Minyak Gas (Migas) terdapat di 3 daerah konsensi migas yang masih aktif beroperasi yaitu:

1. Blok Sanga-Sanga PSC Extension Blok I milik VICO Indonesia, meliputi sekitar daerah bagian tengah blok tersebut.
2. Blok Semberah TAC, milik PT. Semberani Persada Oil, terdiri dari lapangan Karang Mumus, Binangat, Palaran dan Sambutan.
3. Blok Sanga-sanga Field TAC, milik PT. Exspan Nusantara, meliputi sebagian daerah Blok Anggana, Muara Tanjung Una dan Louise.

Sementara untuk Tambang batu bara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yang ada di Kota Samarinda, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir dan Sungai Pinang Dalam.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2011) Kota Samarinda menempati peringkat 1 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 94 dan termasuk kelas kerawanan tinggi, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi	Rangking Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda	94	Tinggi	1	39
Balikpapan	89	Tinggi	2	56
Kutai Kartanegara	65	Tinggi	3	175
Pasir	57	Tinggi	4	232
Tarakan	57	Tinggi	5	235
Kutai Barat	51	Tinggi	6	285
Kutai Timur	47	Tinggi	7	308
Nunukan	44	Tinggi	8	345
Bontang	34	Sedang	9	402
Penajam Paser Utara	33	Sedang	10	409



Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi	Rangking Nasional
Malinau	29	Sedang	11	424
Berau	24	Sedang	12	433
Bulungan	24	Sedang	13	434
Tana Tidung	5	Rendah	14	475

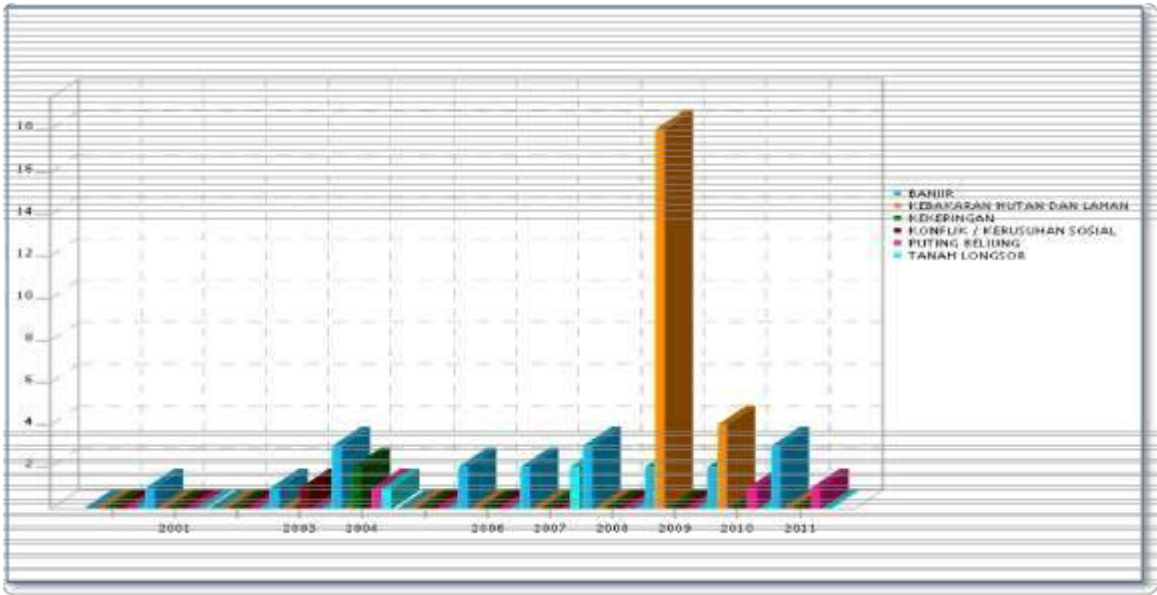
Sumber: Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2013

Dari Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa terdapat banyak kecenderungan kejadian bencana di Kota Samarinda dalam rentang waktu 2000 – 2011 yaitu:

- 1. Bencana banjir terlihat cenderung meningkat.
- 2. Bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat.
- 3. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) cenderung tetap.
- 4. Bencana kekeringan cenderung tetap.
- 5. Bencana tanah longsor dan konflik sosial cenderung tetap.

Secara keseluruhan kejadian bencana banjir merupakan bencana dengan frekuensi dan dampak tertinggi di Kota Samarinda dan cenderung untuk mengalami peningkatan hingga tahun 2011.

Gambar 2.2.
Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda





Tingkat risiko bencana Kota Samarinda didapat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. Kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda seperti yang terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

NO	NAMA BENCANA	TINGKAT RISIKO
(1)	(2)	(3)
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
3	Kekeringan	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko ‘tinggi’. Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang telah memicu urbanisasi memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan sehingga dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selain faktor perumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kota, banjir di Kota Samarinda diakibatkan juga oleh faktor alam yaitu intensitas hujan tinggi, topografi wilayah relatif datar, pasang Sungai Mahakam, dll. Adapun kawasan rawan banjir di Kota Samarinda adalah Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Untuk itu diperlukan ruang evakuasi bencana banjir yaitu 1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang; 2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu; 3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir; 4. Stadion Madya Sempaja



Kecamatan Samarinda Utara; 5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota; 6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang; 7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan; 8. Lapangan KNPI kecamatan Samarinda Seberang. Sementara Kawasan rawan longsor di Kota Samarinda meliputi Kelurahan Selili dan Kelurahan Sidodadi. Ruang evakuasi bencana longsor yaitu di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir dan GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu.

Permasalahan banjir di Kota Samarinda sudah memiliki dampak negatif yang menyebar di berbagai bidang mulai dari perhubungan hingga perekonomian makro daerah. Hal ini menjadikan fenomena banjir di Kota Samarinda merupakan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani ke depannya sebagai bentuk dukungan utama dalam pencapaian target pembangunan.

Infrastruktur dan sanitasi wilayah perkotaan menjadi “kambing hitam” utama dalam daftar penyebab terjadinya bencana banjir. Penataan Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah menyebabkan fungsi-fungsi penyerapan air berkurang, sanitasi lingkungan, permasalahan sampah, hingga pendangkalan sungai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir disamping beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, geografis Kota Samarinda yang berada di hilir, maupun letak wilayah yang berada di tepian Sungai Mahakam.

Bencana banjir di Kota Samarinda merupakan bencana terstruktur yang harus segera diantisipasi dengan pembenahan secara masif dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario master plan penanganan bencana banjir dari tahun 2016 hingga tahun 2035 yang diperkirakan menelan dana hingga mencapai 5,26 triliun dalam jangka waktu 20 tahun. Kegiatan dalam master plan tersebut adalah pembuatan atau perbaikan saluran sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir.

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada Tabel 2.15. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika





urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Tabel 2.15
Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
1	Palaran	9	57,25	4	8	124
2	Samarinda Ilir	7	34,35	7	8	95
3	Samarinda Kota	4	18,00	-	2	51
4	Sambutan	-	-	-	-	-
5	Samarinda Seberang	6	29,70	3	5	84
6	Loa Janan Ilir	4	25,50	2	4	51
7	Sungai Kunjang	5	34,25	4	4	63
8	Samarinda Ulu	4	34,25	3	6	66
9	Samarinda Utara	7	33,75	4	9	87
10	Sungai Pinang	4	19,50	4	8	58
Total		50	286,55	31	54	679

Sumber: Skenario Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari masterplan perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Program dan kegiatan pertama dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisiensikan sanitasi lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km di seluruh Kota Samarinda. Sebagian besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 57,25 Km dan paling pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km.

Kegiatan penanganan bencana banjir kedua adalah pembuatan kolam retensi di beberapa kelurahan. Kolam retensi merupakan kolam yang berfungsi menggantikan peran lahan resapan air yang dijadikan lahan perumahan, perkantoran, maupun lahan tertutup lainnya. Fungsi kolam mini adalah menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem untuk diresapkan ke dalam tanah. Dalam kurun waktu 20 tahun, di Kota Samarinda akan dibangun 31 kolam retensi sebagai antisipasi/pencegahan terjadinya bencana banjir di Kota



Samarinda yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan.

Pengadaan pompa dan penangkap lumpur merupakan dua kegiatan selanjutnya dalam master plan penanganan bencana banjir dimana dalam kurun waktu 20 tahun akan diadakan 54 unit pompa untuk memompa air sebagai salah satu alat penanganan banjir dan 679 unit penangkap lumpur untuk menangkap lumpur sebagai ikutan dampak terjadinya bencana banjir.

Selain keempat kegiatan tersebut di atas, terdapat pula penanganan khusus seperti pembuatan parapet (dinding beton) di Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Sungai Keledang, Sungai Karang Mumus, Bendungan Lempake, dan Sungai Mahakam. Total panjang parapet yang akan dibangun dalam kurun waktu 20 tahun ini sepanjang 46,5 Km. Sedangkan penanganan khusus selanjutnya dalam master plan adalah dilakukannya normalisasi bendungan lempake sebanyak 200.000 m³.

2.1.8 Demografi

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang mencapai 28,92 persen tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta 22,84 persen tenaga kerja di sektor jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 812.597 jiwa dengan kepadatan mencapai 1.134 jiwa/km².

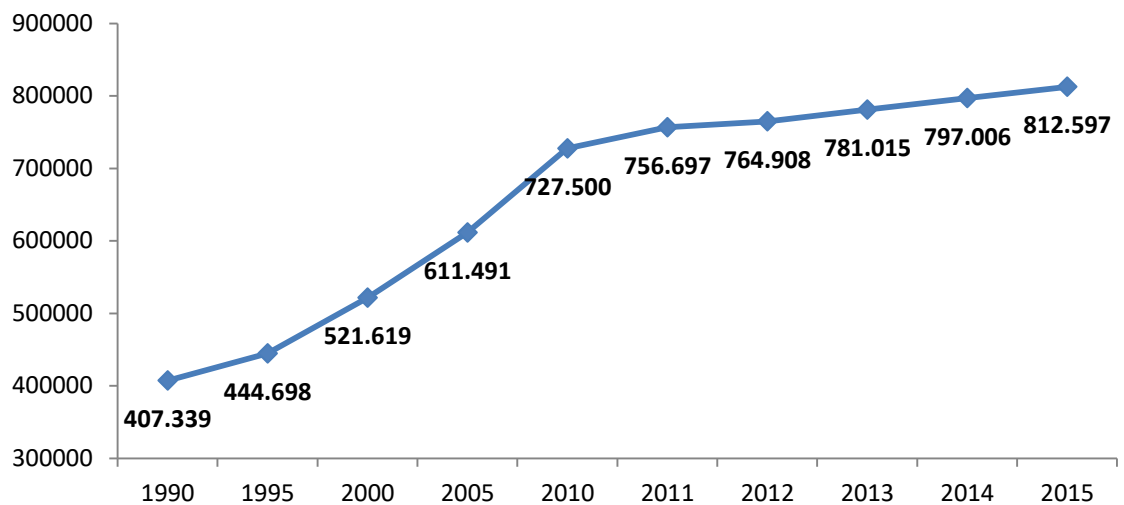
Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 1990-2015, tercatat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,72 persen dari tahun 2009 yang ketika itu masih sebesar 607.675 jiwa menjadi 727.500.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.





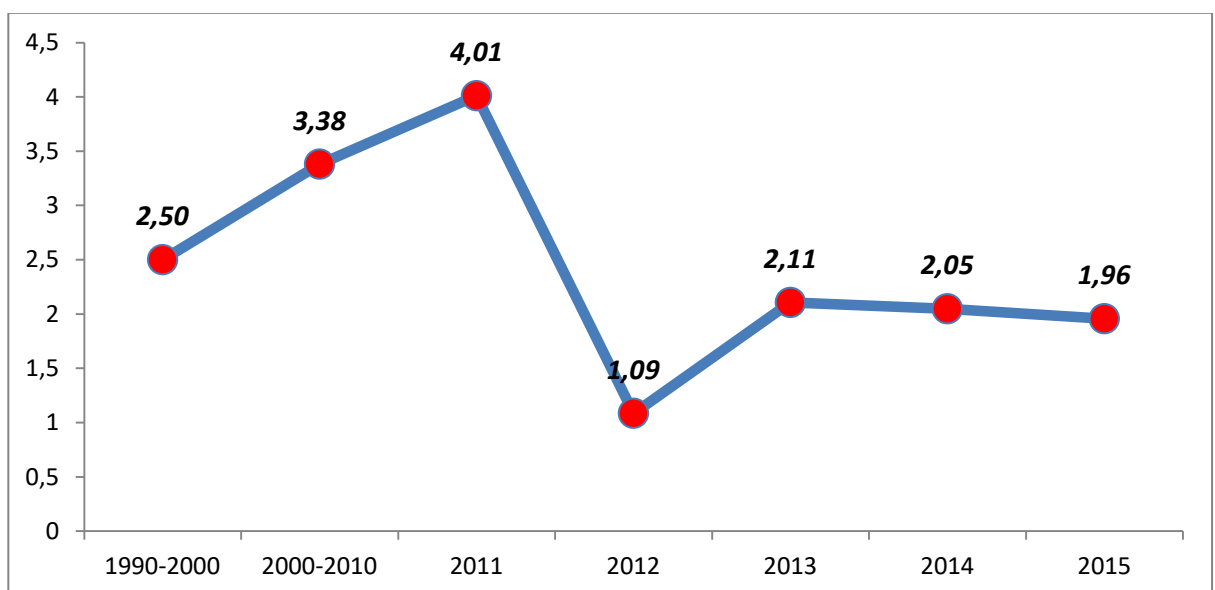
Gambar 2.3.
Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015



Sumber: Data diolah, 2016

Sedangkan secara khusus, angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi sebagai koreksi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Bahkan tercatat di tahun 2013 ada 1 wilayah kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang disebabkan karena adanya perpindahan penduduk antar wilayah dalam kota dan luar kota.

Gambar 2.4.
Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015



Sumber: Data diolah, 2016



Tabel 2.16
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2015

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Palaran	221,31	54.819	248
Samarinda Ilir	17,18	74.012	4.308
Samarinda kota	11,12	36.919	3.320
Sambutan	100,95	48.756	483
Samarinda seberang	12,49	64.262	5.145
Loa janan ilir	26,13	63.280	2.422
Sungai kunjang	43,04	127.384	2.960
Samarinda ulu	22,12	135.814	6.140
Sungai pinang	34,16	106.601	3.121
Samarinda utara	229,52	100.750	439
Kota Samarinda	718,00	812.597	1.132

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Komposisi penduduk Kota Samarinda masih didominasi oleh laki-laki dimana terlihat pada rasio jenis kelamin di Kota Samarinda yang mencapai 107,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki. Berikut rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Samarinda di tabel 2.17.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Palaran	28.486	26.333	54.819	108,18
2	Samarinda Ilir	38.230	35.782	74.012	106,84
3	Samarinda Kota	19.074	17.845	36.919	106,89
4	Sambutan	25.207	23.549	48.756	107,04
5	Samarinda Seberang	33.256	31.006	64.262	107,26
6	Loa Janan Ilir	32.538	30.742	63.280	105,84
7	Sungai Kunjang	65.658	61.726	127.384	106,37
8	Samarinda Ulu	70.106	65.708	135.814	106,69





No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
9	Sungai Pinang	55.005	51.596	106.601	106,61
10	Samarinda Utara	52.581	48.169	100.750	109,16
2015		420.141	392.456	812.597	107,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan memberikan gambaran mengenai potret kehidupan masyarakat Kota Samarinda maupun analisis dan kajian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan mengkaji berbagai indikator yang berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian Kota Samarinda terkait dengan pemberdayaan kehidupan masyarakat. Indikator yang umum dipakai untuk mengkaji perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat perkembangan perekonomian secara makro, laju inflasi untuk melihat pemerataan dan stabilitas harga barang-barang pokok masyarakat (perekonomian mikro), serta tingkat kemiskinan untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi Kota Samarinda baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Setiap nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh “roda perekonomian” Kota Samarinda akan tercatat dalam PDRB sehingga indikator ini memiliki cakupan makro.

PDRB Kota Samarinda memiliki pergerakan positif di setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian Kota Samarinda mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014, nilai PDRB mencapai 46.983.548,22 juta rupiah.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal,



dan entrepreneurship yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak memperhatikan kepemilikan faktor produksi. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Samarinda baik melalui harga yang berlaku maupun harga konstant, baik dengan sektor migas maupun non migas yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.18
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2015

Tahun	PDRB Dengan Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstant Tahun 2010	Berlaku	Konstant Tahun 2010
2011	41.648.707,27	35.535.425,82	35,61	15,71
2012	41.242.817,59	35.711.573,43	-0,97	0,50
2013	44.824.302,00	37.471.853,00	8,68	4,93
2014	48.250.237,00	39.465.873,00	7,64	5,32
2015	51.195.737,00	39.471.679,00	6,10	0,01
Rata-rata Pertumbuhan			11,41	5,29

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, apabila memasukkan unsur migas dengan harga berlaku pada periode waktu 2011-2015, rata-rata tumbuh sebesar 11,41% sedangkan apabila dilihat dengan harga konstant, rata-rata tumbuh sebesar 5,29% per tahun. Umumnya untuk melihat pertumbuhan Ekonomi Daerah harus di lihat dengan harga konstant.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi tanpa migas maka dapat diikuti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2011 – 2015

Tahun	PDRB Tanpa Migas (Jt – Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstant Tahun 2010	Berlaku	Konstant Tahun 2010
2011	41.478.369,96	35.368.618,19	35,38	15,44
2012	41.091.410,08	35.558.898,85	-0,93	0,54
2013	44.679.204,90	37.347.629,62	8,73	5,03
2014	48.092.230,62	39.336.567,60	7,64	5,33
2015	51.112.414,71	39.338.063,03	6,28	0,00
Rata-rata Pertumbuhan			11,42	5,27

Sumber: Data diolah, 2016





Apabila di tinjau dari sisi PDRB tanpa migas, maka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tumbuh sebesar 11,42% dengan harga berlaku dan 5,27% dengan harga konstant.

Kalau di bandingkan dengan pertumbuhan berdasarkan migas maka pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tanpa migas jauh lebih kecil, ada perbedaan nilai pertumbuhan jika PDRB di lihat tanpa migas, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas inilah yang dapat dijadikan rujukan dan analisis karena Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau jasa bukan pula kota pengolah migas, Samarinda dalam visi dan misinya lebih berorientasi pada kota jasa dan perdagangan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektoral sebagai berikut:

Tabel 2.20
PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015

	SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian	547.050,91	548.035,94	603.750,1	626.241,4	679.151,3
B	Pertambangan & Penggalian	8.000.419,26	6.411.151,56	6.726.961,9	6.751.001,2	5.813.555,6
C	Industri Pengolahan	3.056.606,97	3.026.295,36	3.089.481,3	3.162.593,9	3.258.055,5
D	Pengadaan Listrik, Gas	28.462,44	33.846,56	34.892,7	41.307,0	44.833,8
E	Pengadaan Air	47.969,02	49.759,98	54.198,8	57.761,6	60.258,9
F	Konstruksi	6.677.583,34	7.157.874,11	7.531.919,2	8.056.518,6	7.896.632,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.327.134,07	5.568.016,21	5.565.378,6	5.961.489,2	6.096.529,2
H	Transportasi dan Pergudangan	2.174.920,63	2.282.914,45	2.429.132,5	2.583.018,7	2.644.861,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.028.246,59	1.128.184,32	1.189.157,7	1.273.565,7	1.392.315,6
J	Informasi dan Komunikasi	1.098.832,88	1.249.139,57	1.312.909,5	1.421.224,5	1.520.585,4



	SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
K	Jasa Keuangan	2.184.922,36	2.506.413,21	2.836.226,1	3.072.290,6	3.217.562,4
L	Real Estate	830.324,20	908.801,43	1.022.847,1	1.159.908,6	1.208.818,1
M,N	Jasa Perusahaan	269.974,22	304.334,74	328.745,9	345.869,1	333.599,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.436.091,48	2.500.738,26	2.573.373,7	2.641.475,9	2.794.053,3
P	Jasa Pendidikan	754.142,47	927.758,26	1.021.688,8	1.087.730,1	1.200.588,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372.488,14	379.776,03	389.270,4	423.915,5	462.915,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya	700.256,86	728.533,43	761.918,2	799.961,6	847.362,8
	PDRB	35.535.425,82	35.711.573,43	37.471.852,6	39.465.873,2	39.471.679,2

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Struktur ekonomi yang disajikan dari waktu ke waktu memperlihatkan perubahan dan pergeseran sebagai indikator adanya proses pembangunan.

Secara umum, pembentukan perekonomian Kota Samarinda (angka PDRB) secara perlahan dan pasti menuju Kota Pelayanan (Service). Perubahan perekonomian Kota Samarinda tersebut sangat dipengaruhi oleh naik turunnya sektor-sektor tersebut. Terlihat dengan adanya pergeseran kontribusi ekonomi Kota Samarinda dari tahun ketahun, tampak seperti peranan sektor Pembuatan (Manufacture) dan Pertanian (Agriculture) terus mengalami penurunan. Dilihat dari tiga sektor besar, maka tampak adanya pergeseran yang signifikan antara Pertanian (Agriculture), Pembuatan (Manufacture) dan Pelayanan (Service).

Pergeseran terlihat pada peningkatan peranan sektor yang menghasilkan jasa meliputi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa mencatat kontribusi (peranan).





Tabel 2.21
Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2011-2015 (Persen)

Jenis Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian / Agriculture	1,44	1,53	1,61	1,59	1,72
Pembuatan / Manufacture	53,83	48,17	46,53	45,78	43,25
Pelayanan / Service	44,73	50,30	51,85	52,63	55,02

Sumber: Data diolah, 2016

- Sektor Pertanian (Agriculture) meliputi sektor pertanian bahan (tanaman) pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- Sektor Manufacture yang meliputi sektor Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Konstruksi/Bangunan, gas dan air minum.
- Sektor Service meliputi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa.

Peranan sektor Pertanian (Agriculture) dalam perekonomian Kota Samarinda tahun 2015 mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2011 hanya 1,44% menjadi 1,72%. Dapat dikatakan bahwa peranan sektor tersebut tidak signifikan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

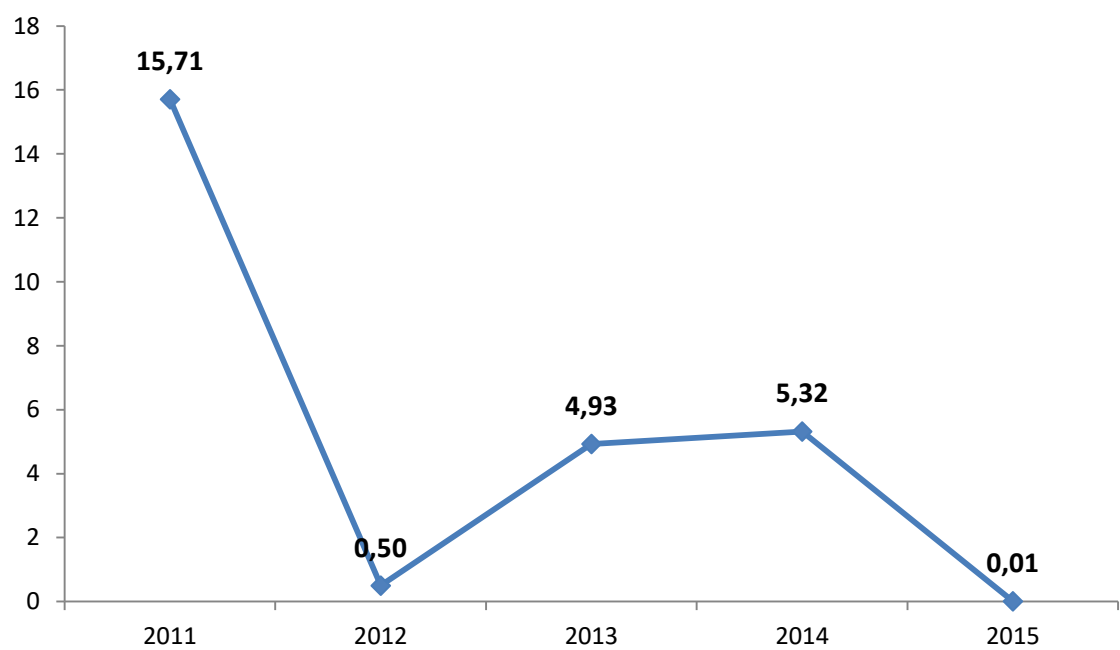
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembandingan antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Sebagai ibukota provinsi yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi maupun Kota Samarinda sendiri, pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda berjalan cukup fluktuatif dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki range pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Peningkatan signifikan pertumbuhan perekonomian terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 15,71 persen. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak bertahan lama



karena pada tahun 2012, terjadi perlambatan ekonomi hingga mencapai 0,50 persen. Pada tahun-tahun setelahnya, terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi hingga pada tahun terakhir Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi hanya 0,01 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh Kota Samarinda saja, namun dirasakan juga oleh Provinsi Kaltim yang mengalami pertumbuhan -1,75% atau dengan kata lain ada penurunan PDRB dari tahun 2014.

Gambar 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2011-2015



Sumber: Data diolah, 2016

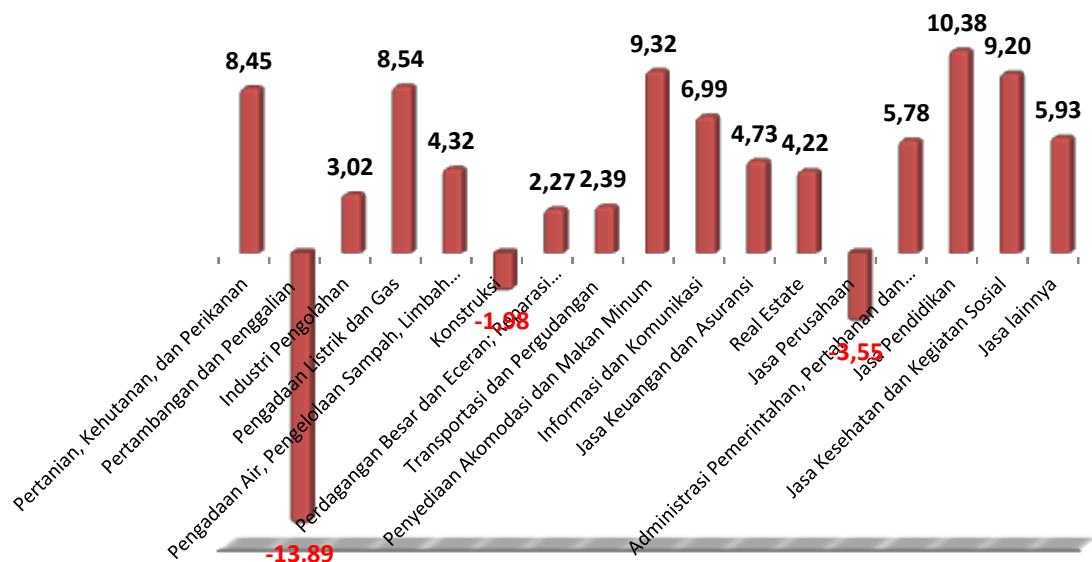
Jika dijabarkan berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar berada pada sektor jasa-jasa (13,81 persen). Sedangkan pada sektor dominan PDRB yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni mencapai 10,91 persen. Selain itu, sektor lain yang cukup tinggi pertumbuhannya dan menjadi sorotan karena perannya dalam menciptakan degradasi lingkungan adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dimana meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ekonomi sektoralnya masih mampu menembus angka 11,26 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi paling kecil dialami pada sektor listrik, gas dan air bersih (0,76 persen), industri pengolahan (1,17 persen), dan konstruksi (2,28persen) yang memiliki pertumbuhan ekonomi jauh di bawah 5 persen.





Gambar 2.6.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Samarinda, 2015



Sumber: Data diolah, 2016

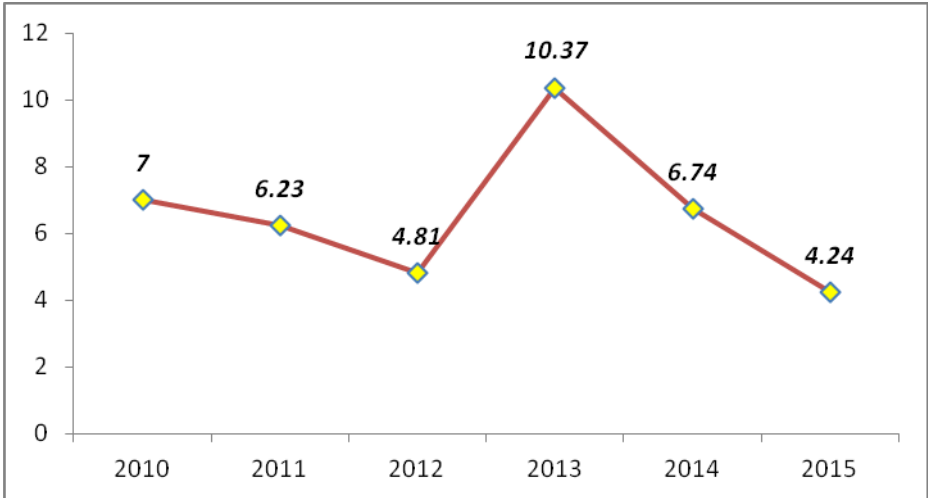
3. Laju Inflasi

Dalam menganalisis pembangunan perekonomian di Kota Samarinda, tidak terlepas dari asumsi mikro terkait stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat terutama bahan pokok. Faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga terutama di perkotaan sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan sekaligus berdampak pada daya beli masyarakat.

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, laju inflasi Kota Samarinda mencapai 4,24 persen dimana pada tahun sebelumnya lebih tinggi yakni mencapai 6,74 persen.



Gambar 2.7.
Laju Inflasi Kota Samarinda, 2010-2015



Sumber: Data diolah, 2016

Penyebab laju inflasi tahun 2015 di Kota Samarinda tertinggi adalah Kelompok Transportasi dan Komunikasi; selanjutnya Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Inflasi Tahun Kalender
Kota Samarinda, 2015

Kelompok	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Bahan Makanan	3,78	5,42	4,67	8,69
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan	9,93	10,88	7,64	10,27
Perumahan	5,88	6,33	1,22	1,86
Sandang	0,89	1,96	-0,22	-0,09
Kesehatan	4,82	4,22	3,09	3,93
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,87	3,83	3,34	4,56
Transport dan Komunikasi	6,57	6,22	-3,37	-1,98
Umum	5,65	6,48	6,87	4,24

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikasi awal dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dimana penghitungan dilakukan dengan membagi seluruh nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini jumlah penduduk Kota Samarinda. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa PDRB per kapita





Kota Samarinda selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai Rp 56.560.618.37 per tahun pada tahun 2014. Angka ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda secara makro setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Rp. Juta)	41.648.707,27	41.242.817,59	44.824.302,00	48.250.237,00	51.195.737,00
Jumlah Penduduk (jiwa)	756.697	764.908	781.015	797.006	812.597
PDRB per kapita (Rp/jiwa)	55.040.137,95	53.918.664,19	57.392.370,18	60.539.364,82	63.002.616,30

Sumber: Data diolah, 2016

5. Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan hingga turun ke angka 11,3 persen pada tahun 2014 padahal sebelumnya pada tahun 1999 mencapai 24 persen secara nasional. Tapi kemudian kecepatan penurunan kemiskinan berkurang karena tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,7 persen dalam dua tahun terakhir adalah yang terkecil sepanjang satu dekade terakhir.

Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup dengan tidak jauh dari batas Rp 11.000 per hari. Hal tersebut menyebabkan kerentanan kemiskinan yang tinggi karena dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa langsung jatuh di bawah garis kemiskinan.

Dari data 2010, separuh dari mereka yang miskin bukan termasuk orang miskin setahun sebelumnya. Seperempat populasi Indonesia jatuh miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun. Situasi menjadi lebih sulit lagi ketika keluarga yang miskin menghabiskan uang sangat sedikit untuk kesehatan dan pendidikan (rata-rata cuma 5 persen). Akhirnya anak-anak yang dihasilkan pun tidak terdidik dan tidak sehat; mereka terancam mewarisi lagi kemiskinan yang sama ke generasi berikutnya.



Ketimpangan konsumsi rumah tangga Indonesia pun telah meningkat sejak tahun 2000. Koefisien Gini, ukuran dari ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi kira-kira 0,41 pada tahun 2013. Kesenjangan antar wilayah pun tidak berkurang. Wilayah timur Indonesia tertinggal di belakang wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama Jawa. Tak heran bila angka ketimpangan konsumsi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur, walau Indonesia mencatat kemajuan yang baik dari sisi pengentasan kemiskinan. Adapun yang dikatakan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan dirasakan juga oleh Kota Samarinda dengan digulirkannya berbagai program secara nasional. Mari kita cermati penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 mencapai 5,21 persen (38.000 jiwa) menjadi 4,31 persen (32.900 jiwa) pada tahun 2011 dan mengalami penurunan sekitar 0,9 persen, kemudian di tahun 2012 mencapai 4,18 persen (32.800 jiwa), pada tahun 2013 naik sebesar 4,63% (36.600 jiwa) kemudian turun pada tahun 2014 sebesar 4,56. Meskipun hal ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan namun pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi ternyata tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 tetap mengalami kenaikan yakni sebanyak 36.650 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya kenaikan penduduk ini didorong oleh banyaknya migran yang tidak memiliki ketrampilan serta pengendalian administrasi kependudukan yang belum maksimal.

Tabel 2.24
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	306.730	337.162	381.614	419.353	460.975	493.763
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	28.970	38.000	32.900	32.800	36.600	36.650
Persentase penduduk miskin	4,84	5,21	4,31	4,18	4,63	4,56
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	95,16	94,79	95,69	95,82	95,37	95,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

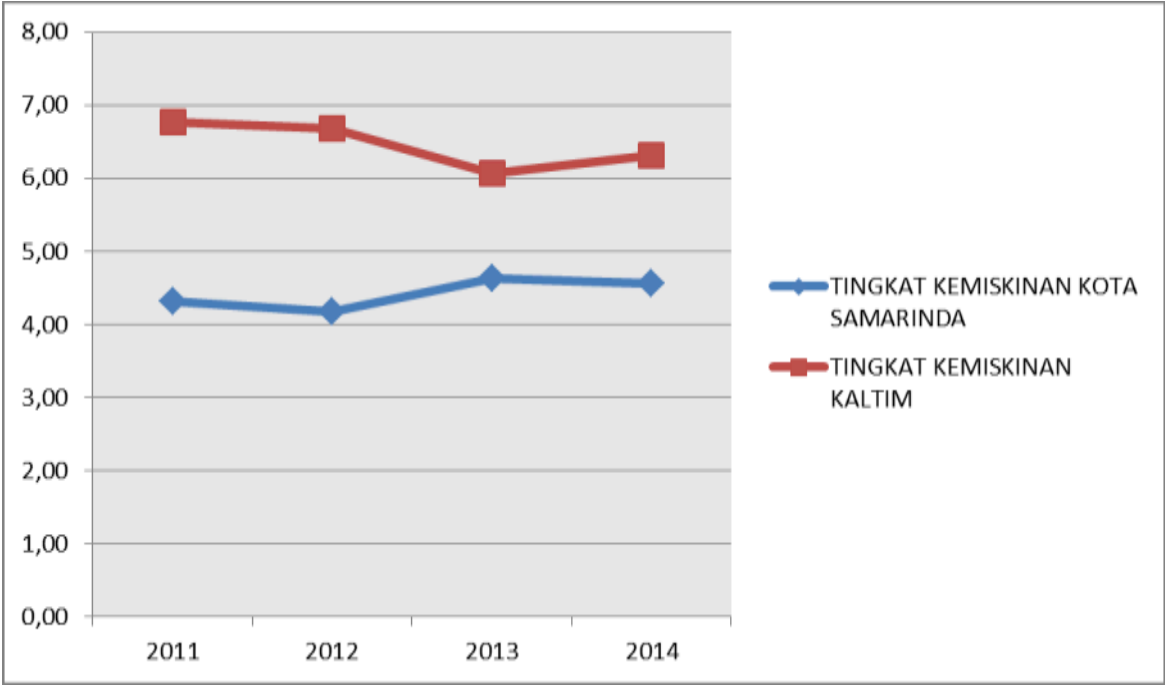




Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakatpun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, dalam kurun waktu enam tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Samarinda masih berada di bawah angka Kalimantan Timur, namun tingkat kemiskinan Kota Samarinda sendiri jika dibandingkan dengan angka provinsi cenderung memiliki pola tetap/stagnan.

Gambar 2.8.
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim, 2015

6. Indeks Gini

Keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan, namun lebih jauh dapat dilihat dari pemerataan pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah Kota Samarinda dalam pemerataan pembangunan adalah indeks gini. Indeks gini merupakan indikator distribusi pendapatan yang mampu menunjukkan ketimpangan pendapatan yang terjadi pada masyarakat. Perhaikan distribusi pendapatan di Kota Samarinda sebagai berikut :



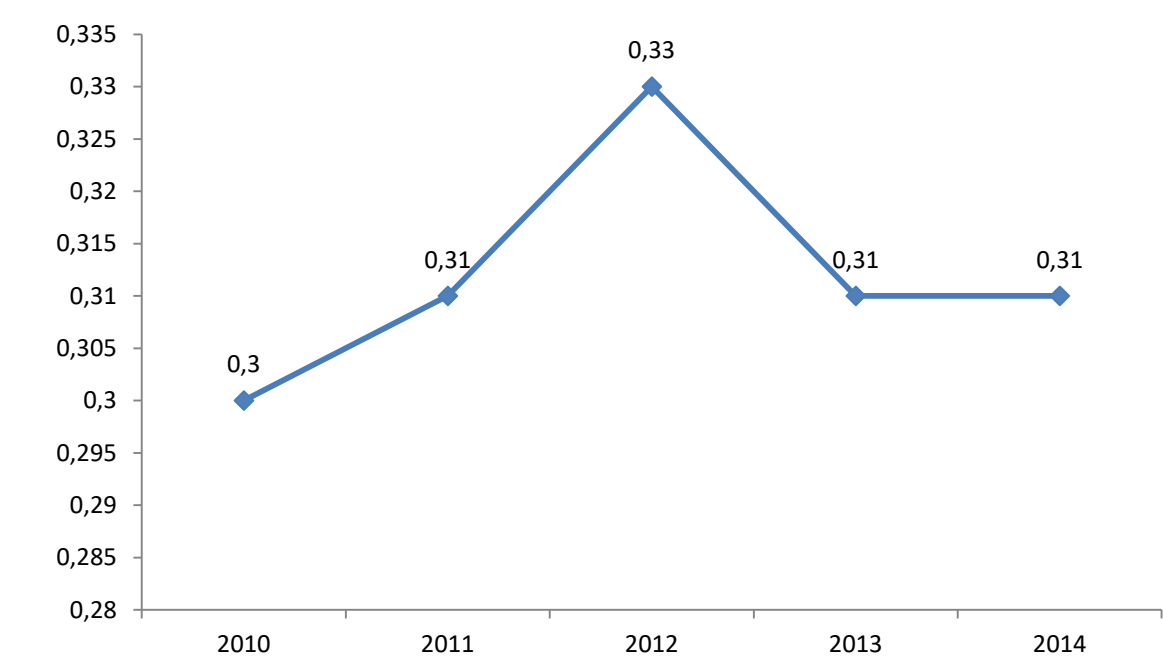
Tabel 2.25
Distribusi Pendapatan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2010 - 2015
(persen)

Golongan	2012	2013	2014
40% pendapatan rendah	42,56	41,10	41,21
40% pendapatan sedang	37,25	37,56	37,13
20% pendapatan tinggi	20,19	21,34	21,66

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati 41,21% dari total pendapatan di Kota Samarinda, begitu juga untuk 40% penduduk berpendapatan sedang dapat menikmati 37,13% dari total pendapatan, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi dapat menikmati 21,66% dari total pendapatan di Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa total pendapatan Kota Samarinda terdistribusi ke seluruh golongan masyarakat, yang artinya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Samarinda tergolong rendah. Ketimpangan yang rendah ini dikuatkan lagi melalui perkembangan indeks gini sebagai berikut :

Gambar 2.9.
Indeks Gini Kota Samarinda Tahun 2010-2014



Sumber: Data diolah, 2016





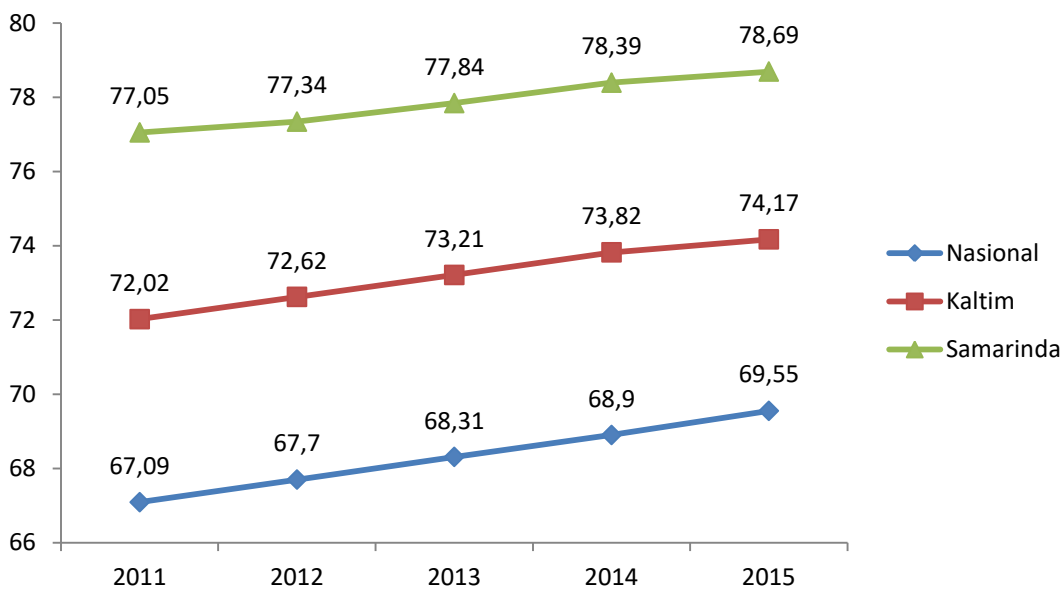
Indeks gini Kota Samarinda dari tahun 2010 sampai 2014 berkisar antara 0,30 sampai 0,31. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Kota Samarinda tergolong rendah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial pada dokumen perencanaan pembangunan daerah akan memberikan gambaran terkait kesejahteraan kehidupan masyarakat di suatu wilayah (dalam hal ini Kota Samarinda). Indikator ultimate impact kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.

Gambar 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2011-2015



Sumber: Data diolah, 2016



Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015

Tahun	IPM
2011	77,05
2012	77,34
2013	77,84
2014	78,39
2015	78,69

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Kabupaten/Kota		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Paser	69,61	69,87	70,30	7	7	7
2. Kutai Barat	68,13	68,91	69,34	8	8	8
3. Kutai Kartanegara	70,71	71,2	71,78	5	5	5
4. Kutai Timur	69,79	70,39	70,76	6	6	6
5. Berau	72,02	72,26	72,72	4	4	4
6. Penajam Paser Utara	68,07	68,6	69,26	9	9	9
7. Mahakam Ulu	63,81	64,32	64,89	10	10	10
8. Balikpapan	77,53	77,93	78,18	3	3	3
9. Samarinda	77,84	78,39	78,69	2	2	2
10. Bontang	78,34	78,58	78,78	1	1	1
Kalimantan Timur	73,21	73,82	74,17	3	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda mengalami peningkatan progresif dari tahun ke tahun hingga mencapai indeks sebesar 78,39 pada tahun 2014. Namun perlu diketahui bahwa IPM ini merupakan angka makro pembangunan secara umum dan perlu tindak lanjut serius dalam pembangunan kesejahteraan manusia secara mikro agar pembangunan daerah berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat kedua setelah IPM Kota Bontang yang mencapai indeks 78,58 pada tahun yang sama.





1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Melek aksara atau Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah dan murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analisis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013
Kota Samarinda

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	428.480	510.714	530.449	551.185	577.756
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	437.626	521.084	541.164	559.238	585.841
3	Angka Melek Huruf	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62
4	Angka Buta Huruf	2,09	1,99	1,98	1,44	1,38

Sumber: Data diolah, 2016



Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi telah menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang sangat luar biasa. Dengan memperhatikan Tabel 2.21 diatas teridentifikasi bahwa Kota Samarinda dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka melek huruf dan berada diatas rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi dan Nasional yaitu mencapai 98,62 persen, sementara data tahun 2013 menunjukkan untuk tingkat Nasional mencapai 94,10 persen dan capaian Provinsi Kaltim 97,95 persen.

Tabel 2.29
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	95,41	96,00	96,70	96,71	97,13
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	95,97	95,97	96,60	96,61	97,12
3. Kutai Kartanegara	96,87	96,87	97,31	98,33	98,34
4. Kutai Timur	95,89	97,28	98,25	99,29	99,32
5. Berau	96,30	97,18	97,20	97,26	97,85
6. PPU	94,93	95,55	95,57	95,77	95,81
7. Balikpapan	98,37	98,76	98,78	98,86	98,99
8. Samarinda	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62
9. Bontang	99,08	99,20	99,21	99,22	99,25
Provinsi Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	96,89	97,05	97,21	97,55	97,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

b. Angka rata-rata Lama Sekolah

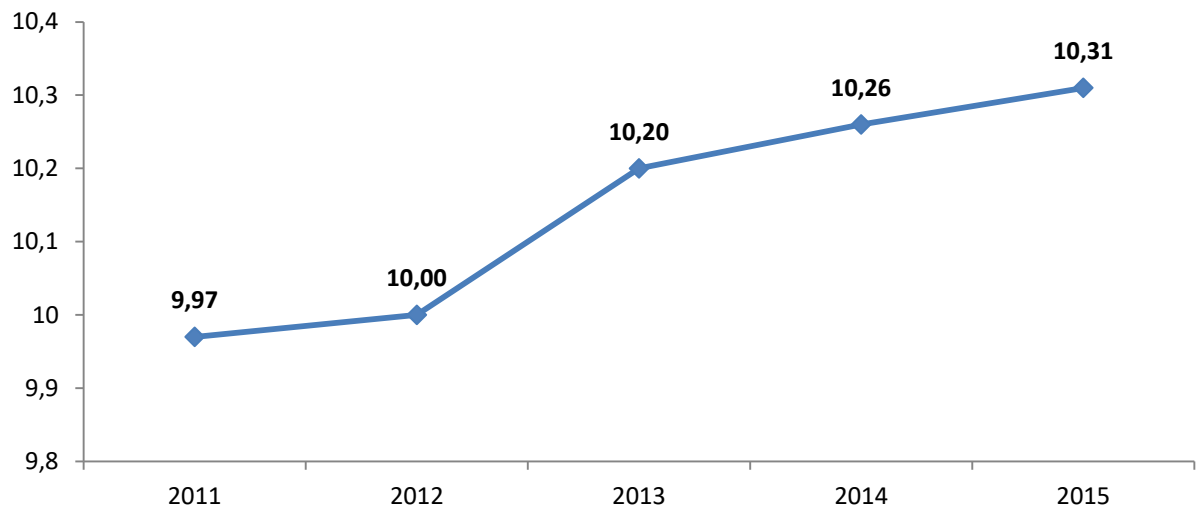
Sesungguhnya Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi





positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

Gambar 2.11.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda 2011-2015



Sumber: Data diolah, 2016

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya diukur dengan angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan tertinggi yang sedang dijalani atau sudah dicapai oleh rata-rata penduduk pada usia 25 tahun ke atas. Pencapaian sangat signifikan dialami pada angka rata-rata lama sekolah Kota Samarinda dimana hingga pada tahun 2015 mencapai 10,31 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 10,31 tahun, dan merupakan suatu ukuran bahwa Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun Pemerintah Kota Samarinda telah terlampaui dan menuju sasaran Wajar 12 tahun. Diharapkan kedepan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bermakna memperkecil angka pengangguran dan tentunya menumbuhkan peningkatan pendapatan pada masyarakat.



Tabel 2.30
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011–2015 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pasir	7,60	7,78	7,96	7,99	8,12
Kutai Barat	7,46	7,53	7,89	7,98	8,02
Kutai Kartanegara	8,13	8,35	8,41	8,46	8,68
Kutai Timur	8,12	8,39	8,56	8,60	8,69
Berau	8,25	8,34	8,52	8,53	8,62
Penajam Paser Utara	7,07	7,09	7,30	7,46	7,59
Mahakam Ulu	-	-	6,86	7,15	7,36
Kota Balikpapan	10,16	10,29	10,39	10,41	10,44
Kota Samarinda	9,97	10,00	10,20	10,26	10,31
Kota Bontang	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38
Kaltim	8,79	8,83	8,87	9,04	9,15

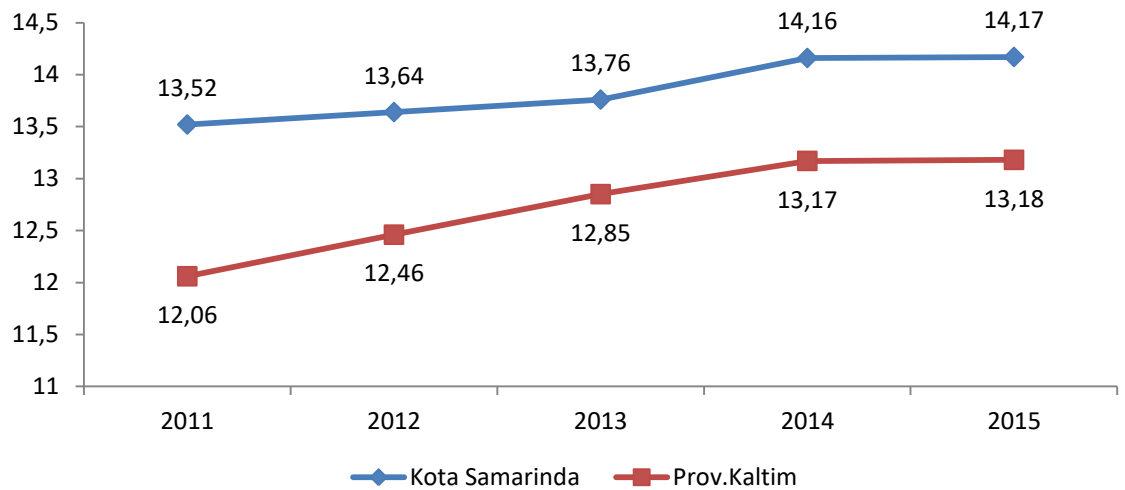
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

Selain melalui rata-rata lama sekolah, dalam mengukur capaian kualitas sumber daya manusia, BPS sejak tahun 2015 mengeluarkan angka Harapan Lama Sekolah. Angka ini dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan yang diharapkan akan dirasakan oleh rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas. Capaian angka harapan lama sekolah di Kota Samarinda mencapai 14,16 tahun (tertinggi di Kaltim), yang artinya rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas mempunyai harapan untuk merasakan pendidikan hingga 14,16 tahun, dan hal ini menunjukkan pendidikan di Kota Samarinda berpeluang melampaui wajar 12 tahun. Perhatikan grafik berikut :





Gambar 2.12.
Harapan Lama Sekolah Kota Samarinda
Tahun 2011–2015 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

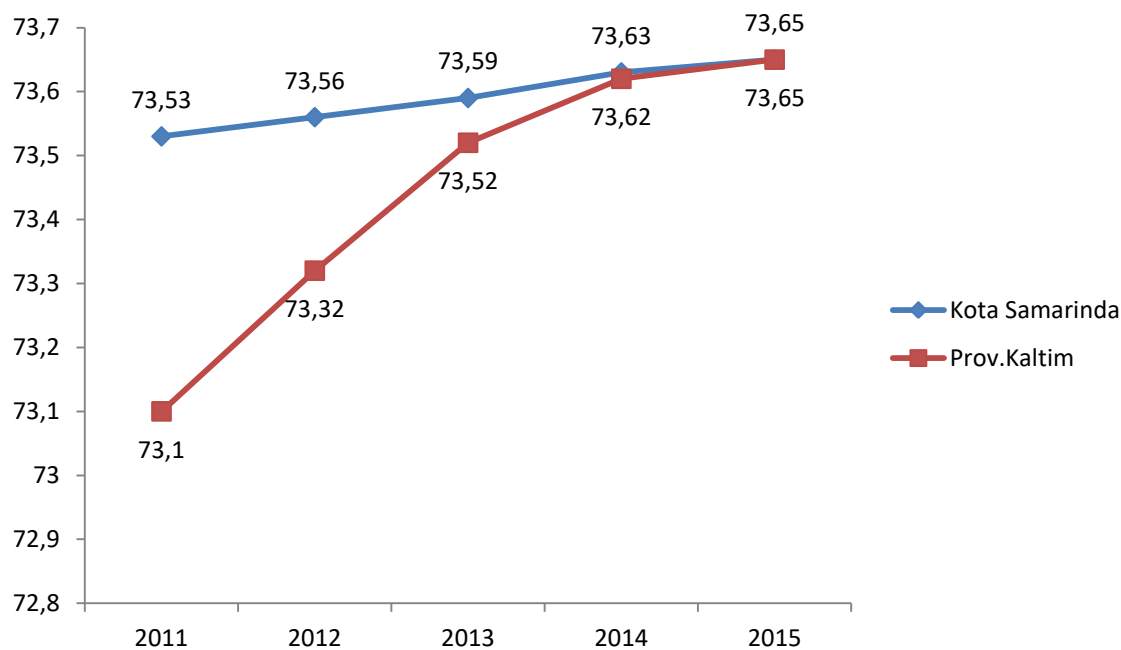
2. Kesehatan

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun Kota Samarinda semakin baik yaitu pada tahun 2012 mencapai usia 71,62 tahun dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 73,63 tahun, yang artinya setiap bayi yang lahir memiliki harapan hidup sampai usia 73-74 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar kesehatan sudah menyentuh pada sasaran yang lebih baik. Dampak dari meningkatnya derajat kesehatan serta pendidikan yang baik pada masyarakat ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda.



Gambar 2.13.
Angka Harapan Hidup Kota Samarinda
Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Tabel 2.31
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Kota Samarinda, Tahun 2015

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.971	0	1.971
Tidak/Belum Tamat SD	28.913	151	29.064
Sekolah Dasar	47.565	1.977	49.542
Sekolah Menengah Pertama	58.895	5.780	64.675
Sekolah Menengah Atas	89.942	6.850	96.792





Sekolah Menengah Atas Kejuruan	64.039	3.163	67.202
Diploma I/II/III/Akademi	10.228	477	10.705
Universitas	42.314	2.044	44.358
Jumlah	343.867	20.442	364.309

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, sebanyak 343.867 penduduk Kota Samarinda mempunyai pekerjaan dimana sebagian besar (153.981 penduduk) merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas baik umum maupun kejuruan. Seiring dengan data tersebut, jumlah pengangguran terbesar juga berada pada tingkat pendidikan menengah.

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, pada tahun 2015 sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 124.266 jiwa, walaupun pada tahun 2013 sempat menurun di angka 94.130 penduduk. Hal ini berbanding positif dengan tingginya kontribusi sektor tersebut dalam membentuk struktur perekonomian Kota Samarinda. Selain itu, sebagian besar penduduk juga bekerja pada sektor jasa-jasa yang mencapai 71.713 jiwa.

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
Kota Samarinda, Tahun 2011-2015

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	17.408	15.787	18.724	12.415	12.932
Pertambangan & Penggalan	24.313	25.816	31.289	31.471	18.067
Industri Pengolahan	30.805	39.074	31.811	37.013	25.317
Listrik, Gas,&Air Bersih	1.973	3.122	668	925	2.837
Konstruksi	30.074	29.246	32.591	28.577	36.653
Perdagangan, Hotel , & Restoran	102.441	100.439	94.130	105.147	124.266
Pengangkutan & Komunikasi	20.176	18.055	22.076	25.064	33.914
Keuangan, Sewa,& Js. Perush.	12.093	19.231	19.867	15.351	18.168
Jasa-jasa	78.955	73.746	74.356	74.464	71.713
Jumlah	318.238	324.516	325.514	330.427	343.867

Sumber: Data diolah, 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum ini akan menjelaskan terkait perkembangan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan daerah agar tercapai target-target pembangunan. Pada aspek ini terdapat dua fokus layanan yakni wajib yang merupakan kinerja wajib bagi pemerintah kota dan layanan pilihan yang merupakan urusan pemerintah



untuk melengkapi layanan wajib sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan Pemerintah Kota Samarinda yang harus diselenggarakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah karena terkait pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan dan perbaikan pada pelayanan wajib ini akan memberi efek positif pada output program dan kegiatan sehingga penerapan yang optimal diperlukan dalam pelayanan ini.

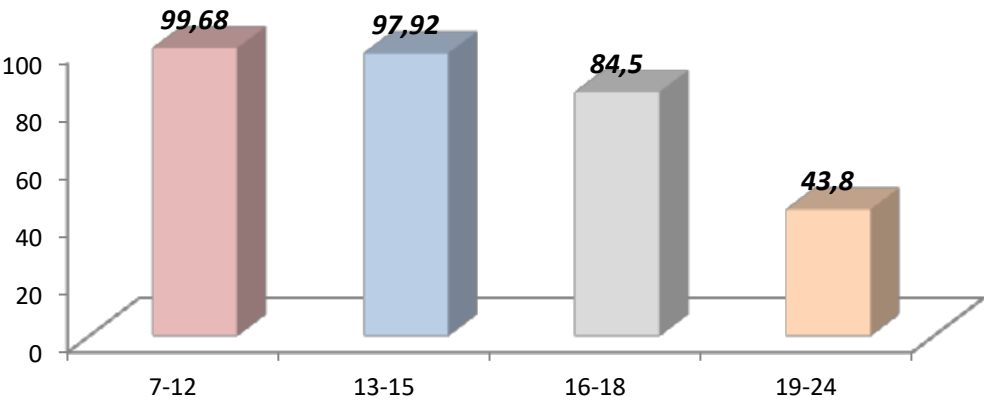
1. Pendidikan

1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Angka partisipasi sekolah di Kota Samarinda pada kelompok umur pendidikan 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah masyarakat pada kelompok tersebut. Hal ini mengindikasikan hampir 100 persen penduduk berpartisipasi sekolah hingga tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Begitu juga untuk partisipasi di jenjang Sekolah Menengah Atas pada kelompok umur 16-18 tahun yang menunjukkan sebanyak 84,50 persen penduduk yang mengenyam pendidikan.

Gambar 2.14.
Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2015



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda, 2015





1.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan usianya diluar batas yang telah ditetapkan. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK SD/MI	103,87	106,13	107,84	117,80	109,34
2	APK SMP/MTs	100,57	94,22	94,75	87,80	111,32
3	APK SMA/MA/SMK	72,52	89,28	85,65	80,10	91,28

Sumber : Data diolah, 2016

Memperhatikan pertumbuhan penduduk Samarinda yang cukup tinggi terdapat korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah yang sudah tentu akan menyumbang pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar baik tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Jumlah Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI pada tahun 2015 mencapai 109,34% menurun dari tahun 2014 yang saat itu sebesar 117,80% yang mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya diusia SD tepat pada usia 7 tahun mulai meningkat, hal ini ditunjang akses yang memadai serta Program Wajib 9 Tahun yang semuanya dibiayai oleh Pemerintah. Perkembangan APK SMP/MTs justru menunjukkan fluktuasi, dalam tahun 2012-2014 menunjukkan angka di bawah 100% yang artinya masih ditemukan penduduk tidak bersekolah diusia SMP/MTs. Namun berkat dukungan pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun, APK SMP/MTs mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada angka 111,32%.

Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang baik dan relative stabil pada tahun 2015 mencapai 91,28%, mengalami peningkatan drastis dari tahun 2014 yaitu 80,10%. Bila dilihat dari tahun 2011 yang saat itu masih 72,52%, maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 2011-



2015. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah Kota Samarinda dibidang pendidikan seperti rehabilitasi sekolah, peningkatan jumlah sekolah terutama sekolah kejuruan, dan pemenuhan tenaga pendidik berkualifikasi.

1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Untuk Kota Samarinda pada tahun 2015 APM SD/MI mencapai 93,63%. Sementara capaian untuk APM SMP/MTs Kota Samarinda tahun 2015 berada di posisi 84,96%. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan upaya peningkatan APM SMP/MTs adalah ketersediaan sarana prasarana penunjang belajar, rasio ruangan dengan siswa, pemerataan penyebaran guru.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	APM SD/MI	89,72	90,27	90,44	93,10	93,63
2	APM SMP/MTs	70,10	65,35	72,53	75,90	84,96
3	APM SMA/MA/SMK	54,41	56,87	65,38	67,00	76,40

Sumber : Data diolah, 2016

APM SMA/MA untuk Kota Samarinda pada tahun 2015 mencapai 76,40% dan menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2011-2015. Pertumbuhan positif ini ditunjang program Wajar 12 tahun dan perbaikan sarana prasarana penunjang proses belajar, serta program peningkatan jumlah strata pendidikan setara SMA/SMK/MA dengan pertumbuhan 1 : 10 untuk strata SMK.

1.4 Angka Pendidikan Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan ditamatkan menunjukkan ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia 10 tahun ke atas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Tabel 2.35
Perkembangan Angka Pendidikan Ditamatkan (APT)
Kota Samarinda, 2011-2014
(persen)

NO	APT	2011	2012	2013	2014
1.	SD/MI	20,40	18,14	18,38	18,96
2.	SMP/MTs	19,61	18,72	20,05	22,00
3.	SMA/MA/Kejuruan	35,39	39,51	39,36	37,08
4.	Diploma I/II/III	12,41	3,62	2,11	2,60
5.	Diploma IV/S1		7,07	6,77	6,90
6.	S2/S3		0,66	1,06	0,69

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sebanyak 39,51% penduduk usia 10 tahun ke atas memiliki ijazah tertinggi SMA/MA/Kejuruan, selanjutnya pada tahun 2013 mencapai 39,36%, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 37,08%. Penurunan ini bukanlah sebuah prestasi buruk, mengingat ada peningkatan yang cukup besar pada ijazah tertinggi diploma I/II/III yang mencapai 2,60% dan diploma IV/S1 sebesar 6,90%. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Samarinda usia 10 tahun ke atas memiliki ijazah tertinggi pendidikan menengah hingga pascasarjana (S2/S3). Tingginya capaian ini menunjukkan masyarakat Kota Samarinda memiliki kesadaran tinggi mengenai pendidikan.

1.5 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana angka ini akan memperlihatkan kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka beban mengajar guru semakin berat sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan guru hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio guru terhadap murid secara umum, Kota Samarinda memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup dimana pada tahun ajaran 2013/2014 rasio guru terhadap murid untuk Sekolah Dasar/ sederajat mencapai 20,85 (seseorang guru mengajar 20-21 murid), Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar 14,26 (seseorang guru



mengajar 14-15 murid), dan untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat mencapai 11,24 (seorang guru mengajar 11-12 murid).

Tabel 2.36
Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru
Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2014/2015

Indikator	Jenjang Sekolah		
	SD	SLTP/MTs	SLTA/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sekolah	236	117	101
Jumlah Ruang Kelas	2.043	1.158	1.118
Jumlah Guru	4.333	2.724	3.108
Jumlah Murid	91.939	40.475	35.691
Rasio Guru Murid	21	15	12

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

2. Kesehatan

2.1 Fasilitas Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1987 tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam urusan kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan sarana utama pelayanan dasar kesehatan di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, sarana dan prasarana kesehatan sudah terdistribusi merata dan akses menuju fasilitas kesehatan sudah jauh lebih baik. Diharapkan dengan terpenuhinya fasilitas kesehatan ini, derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik. Selain persebaran fasilitas kesehatan sudah merata, jumlah dan kualitas baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan pun juga ditingkatkan demi pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Tabel 2.37
Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda
Tahun 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rumah Sakit Umum	7	7	7	9	9
2.	Rumah Sakit Bersalin	5	4	5	6	6





3.	Dokter Praktek	143	182	535	546	-
4.	Jumlah Puskesmas	21	23	24	24	26
5.	Jumlah Poliklinik	16	84	84	84	84
6.	Jumlah Pustu	43	43	43	43	41
7.	Jumlah Penduduk	727.500	756.697	764.908	781.015	797.006
8.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0,029	0,030	0,031	0,031	0,033
9.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0,022	0,111	0,110	0,108	0,105
10.	Rasio Pustu persatuan penduduk(per 1.000 penduduk)	0,059	0,057	0,056	0,055	0,051
11.	Rata-rata Pelayanan Pengobatan Melalui Puskesmas	350.449	521.233	771.462	860.728	-

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

Tabel 2.38
Statistik Tenaga Kesehatan Kota Samarinda
Tahun 2014

Rumah Sakit	Tenaga Dokter			Tenaga Medis			Tenaga Non Medis
	Umum	Spesialis	Gigi	Bidan	Perawat	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RS Umum Pemerintah	62	68	15	73	503	48	486
RS Umum Swasta	48	75	5	91	613	93	550
RS Bersalin	19	20	-	41	39	18	71
RS Jiwa	14	13	-	-	138	39	116

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Bayi Gizi Buruk

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah dapat dilihat dari angka kematian bayi. Angka kematian bayi diukur melalui jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun setiap 1000 kelahiran hidup (KH). Semakin rendah angka kematian bayi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan bayi mulai dari kandungan hingga persalinan semakin tinggi yang semuanya tentu tidak terlepas dari intervensi pemerintah,



melalui penempatan bidan dan tenaga persalinan hingga pembangunan puskesmas secara merata ke seluruh kawasan di Kota Samarinda.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin rendahnya angka kematian bayi yang pada tahun 2011 masih berada pada 4,14 per 1000 KH menjadi 0,70 per 1000 KH pada tahun 2015. Atau dengan kata lain bahwa setiap 1000 kelahiran hidup masih terdapat 1 bayi yang berpeluang mati.

Tabel 2.39
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Samarinda, 2011-2015

Tahun	JUMLAH KEMATIAN BAYI USIA DIBAWAH 1 TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKB per 1000 KH	AKHB
2011	54	13.038	4,14	995,86
2012	56	12.548	4,46	995,54
2013	59	14.574	4,05	995,95
2014	13	16.400	0,79	999,21
2015	13	18.514	0,70	999,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2016

Berbeda dengan angka kematian bayi yang menunjukkan perkembangan positif, gizi buruk di Kota Samarinda justru menunjukkan angka yang fluktuatif. Terjadi peningkatan dari tahun 2011 yang saat itu masih 21 bayi teridentifikasi gizi buruk menjadi 65 bayi pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun program-program pemantauan terhadap kesehatan ibu dan anak pasca melahirkan.

Tabel 2.40
Bayi Gizi Buruk Kota Samarinda
2011-2015

Tahun	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	GIZI BURUK
2011	13.038	21
2012	12.548	53
2013	14.574	71
2014	16.400	30
2015	18.514	65

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka, 2016





3. Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 2.41
Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kondisi Baik	327,09	420,64	430,00	450,50	351,89	159,63
2.	Kondisi Sedang	199,34	114,39	102,90	81,25	444,79	247,34
3.	Kondisi Rusak	9,90	144,55	180,60	184,15	74,55	152,07
4.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	704,62	847,78	880,61	883,99	871,34	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2009 hingga 2012, panjang jalan keseluruhan Nasional, Provinsi dan Kota mengalami peningkatan panjang jalan hingga mencapai 883,99 km pada tahun 2012. Namun pada tahun-tahun berikutnya, panjang jalan menurun hingga mencapai 721,34 km pada tahun 2014. Hal yang perlu dicermati lebih lanjut berkenaan dengan data diatas adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah jalan dengan kondisi rusak dan penurunan jumlah jalan dengan kondisi jalan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak ada pemeliharaan jalan yang baik, sehingga kondisi jalan yang sebelumnya baik dapat menjadi rusak dan sedang.

Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kewenangan jalan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dilihat dari tabel dibawah ini, jalan Nasional mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 54,740 km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.



Tabel 2.42
Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan

No.	Jenis Jalan	Panjang (km)			
		2011	2012	2013	2014
1	Jalan Nasional	52,38	53,36	43,00	54,740
2	Jalan Provinsi	114,73	114,73	114,73	3,100
3	Jalan Kota	713,50	715,90	713,50	593,502
Jumlah		880,63	883,99	871,23	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan , 2015

3.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan yang positif terhadap jumlah persentase penduduk yang memiliki akses air minum bersih dan jamban dengan tanki septik. Untuk jamban dengan tanki septik, Kota Samarinda telah meningkat dari 85,35 persen di tahun 2009 menjadi 95,36 persen atau meningkat sebesar 10,01 persen dalam 5 (lima) tahun. Hal ini akan terus diprediksikan meningkat pada tahun 2014 menjadi 96,62 persen atau meningkat 1,26 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 1,88 persen/tahun.

Hal serupa terjadi pula pada persentase air bersih yang terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir dimana data dari tahun 2009 yaitu 94,32 persen meningkat menjadi 99,07 persen pada tahun 2013 atau meningkat sebanyak 4,75 persen. Penggunaan air minum bersih ini akan diprediksikan terus meningkat ke angka 99,42 persen di tahun 2014 atau meningkat sebesar 0,35 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.

Tabel 2.43
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Air minum bersih	96,92	96,63	98,48	99,07	99,40
2.	Jamban dengan tanki septik	91,92	89,06	95,70	95,36	96,81

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda, 2015



3.3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tabel 2.44
Rasio Tempat Ibadah
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	Bangunan tempat ibadah	2011			2015		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1.	Mesjid	1.131	737.691	652,25	984	862.872	876,90
2.	Gereja	78	62.727	804,19	150	77.733	518,22
3.	Pura	3	1.089	363,00	3	1.365	455,00
4.	Vihara	6	8.583	1.430,50	5	9.659	1.931,80
5.	Kelenteng	1	266	266,00	3	296	98,67
	Jumlah	1.217	811.956	667,18	1.276	952.983	746,85

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2016

Dalam rangka menciptakan suasana Kota Samarinda yang religius, maka pemerintah Kota Samarinda terus berupaya menyediakan tempat ibadah yang jumlahnya proporsional dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Sampai pada tahun 2015, terdapat total 1.276 tempat ibadah yang diperuntukkan bagi 952.983 jiwa penduduk Kota Samarinda. Seiring dengan mayoritas penduduk Kota Samarinda yang memeluk agama Islam, maka penyediaan tempat ibadah pun mayoritas adalah masjid yang pada tahun 2015 mencapai 984 unit.

3.4 Tempat Pemakaman Umum

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda tentu saja berimplikasi pada kebutuhan lahan baik lahan untuk perumahan maupun untuk pemakaman. Seringkali pemerintah fokus pada penyediaan lahan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan mobilisasi masyarakat, namun terlewatkan dengan kebutuhan lahan pemakaman yang sebenarnya tidak kalah penting.

Pemerintah Kota Samarinda secara rutin sejak tahun 2011 hingga 2015 melakukan peningkatan luasan lahan untuk pemakaman di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Samarinda Ilir dari 7,45 hektar (2011) menjadi 15,95 hektar (2015), kecamatan Samarinda Utara dari 21,21 hektar (2011) menjadi 21,79 hektar (2015), Kecamatan Samarinda Ulu dari 9,96 hektar (2011) menjadi 10,96 hektar (2015), dan kecamatan Palaran dari 13,22 hektar



(2011) menjadi 16,22 hektar (2015). Hal ini mengakibatkan ada peningkatan signifikan pada total lahan pemakaman yang semula 88,8 hektar (2011) menjadi 101 hektar (2015).

Tabel 2.45
Luas Tempat Pemakaman Umum
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Samarinda Kota	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2.	Samarinda Ilir	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
3.	Sambutan	7,45	10,95	15,95	15,95	15,95
4.	Sungai Pinang	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
5.	Samarinda Utara	21,21	21,29	21,79	21,79	21,79
6.	Samarinda Ulu	9,96	9,96	9,96	9,96	10,96
7.	Sungai Kunjang	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
8.	Samarinda Seberang	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
9.	Loa Janan Ilir	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
10.	Palaran	13,22	14,72	16,22	16,22	16,22
	TOTAL	88,80	93,90	100,90	100,90	101,00

Sumber : Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Samarinda, 2016

3.5 Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan mobilisasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun kadangkala kegiatan perekonomian tidak sebanding dengan kelestarian lingkungan. Hal ini tergambar dari semakin tingginya jumlah timbunan sampah di Kota Samarinda. Untuk menghadapi kejadian ini, maka pemerintah harus berupaya menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.





Tabel 2.46
Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk
Kota Samarinda, 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPS	401	344	303	305	310
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (Ton)	1766	1700	1700	1700	1700
3.	Jumlah Penduduk	756.697	764.908	781.015	797.006	812.597
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	2,33	2,22	2,18	2,13	2,09

Sumber : Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Samarinda, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Samarinda masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, hal ini terlihat dari semakin rendahnya rasio daya tampung TPS dari 2,33 ton per 1000 penduduk pada tahun 2011 menjadi 2,09 ton per 1000 penduduk pada tahun 2015. Kedepannya pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkannya jumlah TPS terutama peningkatan daya tampungnya, khususnya pada kawasan-kawasan yang padat dengan aktivitas perdagangan.

4. Perumahan

4.1 Persentase penduduk berakses air bersih

Tabel 2.47
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	705.093	731.196	753.281	773.752	792.224
2.	Jumlah penduduk	727.500	756.697	764.908	781.015	797.006
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	96,92	96,63	98,48	99,07	99,40

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda berhasil dalam memberikan pelayanan di bidang akses air bersih. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih seiring dengan peningkatan jumlah



penduduk di tiap tahunnya. Tercatat dengan jumlah penduduk 727.500 jiwa di tahun 2010, persentase pelayanan air bersih yaitu 96,92 persen meningkat ke angka 99,07 persen di tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk menjadi 797.006 jiwa, tingkat persentase terhadap akses air minum dan jumlah penduduk akhirnya meningkat ke angka 99,40 persen atau sekitar 0,33 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.

5. Permukiman Kumuh

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan perumahan yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarananya. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan permasalahan pemukiman jika dalam pemenuhan perumahan layak tidak segera direalisasikan bagi seluruh warga. Permasalahan pemukiman pada intinya disebabkan karena kemampuan lahan yang timbal balik dengan daya kemampuan warga, sehingga menimbulkan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak adanya sinkronisasi antara pendapatan rakyat per kapita dengan kemampuan beli/sewa dan perbaikan rumah.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan berusaha memaksimalkan lahan tanpa memperhatikan keamanan, kesehatan, kenyamanan yang pada akhirnya menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda pada umumnya disebabkan karena peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa yang berada di sekitar bandaran sungai. Kondisi tata bangunan di kawasan ini tidak teratur dan fungsi sungai menjadi orientasi kawasan menjadi hilang. Selain itu, massa bangunan berhimpitan, berderet, dan belum memperlihatkan penerapan GSB sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan persyaratan dasar kesehatan rumah. Akhirnya berbagai permasalahan timbul mulai dari masalah kesehatan, bencana kebakaran, hingga kontroversi lahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermukim di Kota Samarinda.

Lokasi dan luasan Kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda telah diuraikan dalam Keputusan Walikota seperti yang terlihat pada tabel berikut:





Tabel 2.48
Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bantaran Sungai Karang Mumus (A1) Jl. Abdul Muthalib Jembatan S. Parman	90,62	Kumuh
2.	Sungai Karang Mumus (A2) Jl. S. Parman – Jl. PM Noor	202,25	Cukup Kumuh
3.	Bantaran Sungai Karang Asam Kecil (B) Kel. Teluk Lerong	30,24	Cukup Kumuh
4.	Bantaran Sungai Karang Asem Besar (C)	50,20	Cukup Kumuh
5.	Sistem Folder H Kecamatan Samarinda Ulu	2,5	Cukup Kumuh
		13,05	
		25,88	
6.	Bantaran Sungai Mahakam (D) Kecamatan Samarinda Seberang	10,36	Cukup Kumuh
7.	Lambung Mangkurat – Bandara Temindung (F) Kelurahan Pelita	30,7	Cukup Kumuh
8.	Bantaran Sungai Mahakam Palaran (G) Kawasan Pengembangan Baru	51,36	Cukup Kumuh
9.	Bantaran Sungai Mahakam Selili (E)	32,02	Cukup Kumuh
Total		539,18	

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015

6. Perhubungan

6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan dapat dijadikan tolok ukur seberapa banyak kunjungan penduduk diluar daerah ke dalam Kota Samarinda. Letak strategis Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kaltim membuat pemerintah provinsi meletakkan pusat pemerintahan provinsi di kota ini, sehingga tidak sedikit kunjungan dari luar daerah ke Kota Samarinda dalam satu tahun. Selain itu tersedianya sarana prasarana pendidikan dari tingkat



dasar, menengah hingga pendidikan tinggi membuat kunjungan ke Kota Samarinda semakin tinggi.

Dalam empat tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan umum mencapai 1,2 juta orang (2011) namun menurun setiap tahun hingga mencapai 853.989 orang (2014). Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.49
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kota Samarinda, 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penumpang Bis	1.183.544	983.628	857.432	733.058
2.	Jumlah penumpang Kereta api	0	0	0	0
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	96.754	98.022	124.014	120.931
5.	Total Jumlah Penumpang	1.280.298	1.081.650	981.446	853.989

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Samarinda

7. Lingkungan Hidup

7.1 Persentase Penanganan Sampah

Selama 4 (empat) tahun awal data (2009-2013) jumlah produksi sampah Kota Samarinda mengalami peningkatan paling besar di tahun 2012 yaitu sebanyak 995.449 m3 dengan jumlah persentase volume sampah yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 22,33 persen dari 87 (2009) ke 64,67 persen (2012). Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penggunaan lahan seperti perdagangan dan jasa, industri,dan sebagainya pada tahun tersebut.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas penggunaan lahan di Kota Samarinda, di prediksikan volume sampah pada tahun 2014 meningkat sebanyak 932.025 m³, sehingga presentase sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Samarinda diharapkan setidaknya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 88,07 persen menjadi 93,73 persen atau naik sebesar 5,66 persen. Dengan demikian, rata-rata peningkatan persentase volume sampah yang dapat ditangani selama 6 (enam) tahun adalah 1,12 persen/tahun.





Tabel 2.50
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	478.004	584.215	411.506	643.754	703.647	654.169
2.	Jumlah volume produksi sampah (m ³)	549.430	662.678	745.653	995.449	798.918	1.073.552
3.	Persentase (%)	87,00	88,16	55,19	64,67	88,07	60,94

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

7.2 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di suatu daerah. Pengawasan terhadap AMDAL merupakan salah satu langkah untuk menjamin keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi dengan aspek lingkungan. Oleh karena itu pengawasan AMDAL dari pemerintah Kota Samarinda memiliki posisi yang sangat penting.

Tabel 2.51
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Kota Samarinda, 2011-2015

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	5	6	22	2	14
2.	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	5	6	22	2	14
3.	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015



Selama 5 tahun terakhir, pemerintah Kota Samarinda secara rutin melaksanakan pengawasan terhadap AMDAL suatu perusahaan. Total dalam 5 tahun terakhir sebanyak 49 perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi, yang artinya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dapat dilaksanakan 100%. Tentunya keberhasilan ini perlu dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana di Kota Samarinda.

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

8.1 Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah

Letak Kota Samarinda yang strategis sebagai ibukota Provinsi Kaltim membuat seluruh pembangunan infrastruktur di Kaltim terpusat di daerah ini baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun dari investasi swasta. Tidak hanya pembangunan pusat-pusat perdagangan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan pun tersedia lengkap di daerah ini. Kondisi ini menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap administrasi kependudukan, maka tidak menutup kemungkinan meningkatnya jumlah permasalahan sosial.

Tabel 2.52
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
Kota Samarinda, 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Kepemilikan KTP	680.987	611.960	648.855
2.	Kepemilikan KK	298.248	241.432	269.989
3.	Kepemilikan Akte Lahir	360.536	143.216	173.601
4.	Kepemilikan Akte Nikah	396.290	354.521	369.109
5.	Jumlah Penduduk	781.015	797.006	812.597

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kota Samarinda, 2016

Dari data diatas, terlihat bahwa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup tinggi terutama pada jenjang usia 18 tahun ke atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pun menunjukkan angka yang meningkat, begitu juga akte lahir dan akte nikah. Hal ini menjadi suatu gambaran bahwa kemudahan-kemudahan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda dari tingkat kecamatan sampai kelurahan terbukti berhasil dan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum keberadaannya di Kota Samarinda.





9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Kesetaraan gender merupakan program pemerintah untuk menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga perlu adanya kebijakan dalam mengangkat derajat kaum wanita. Salah satu yang paling nyata adalah meningkatkan peran perempuan di berbagai posisi-posisi strategis baik di pemerintahan, perusahaan nasional, maupun perusahaan daerah, baik di eksekutif maupun legislatif.

Pemerintah Kota Samarinda pun sangat memperhatikan peranan kaum perempuan di pemerintahan. Hal ini terlihat nyata dengan total 443 wanita yang menduduki jabatan struktural dari eselon IV hingga eselon II. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.53
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	5	3	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	39	41	48	45	48
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	307	337	368	366	392
4	Pekerja perempuan di pemerintah	5.326	5.257	5.135	5.102	5.463

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda, 2016

10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10.1 Cakupan Peserta Program KB Aktif

Banyak kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Selain melalui pengawasan terhadap administrasi kependudukan, program keluarga berencana menjadi satu-satunya program dalam rangka pengendalian penduduk terutama untuk menekan angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dalam keluarga, maka justru akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan keluarga itu sendiri dan akan berujung pada rendahnya kualitas hidup.

Oleh karena itu demi mewujudkan kehidupan keluarga yang berkualitas, pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk meningkatkan persentase peserta program KB aktif ditengah-tengah Pasangan Usia Subur (PUS). Namun peningkatan jumlah peserta program KB aktif tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pasangan usia subur, sehingga terjadi



penurunan persentase. Pada tahun 2011, persentase peserta program KB aktif sebesar 71,86% namun pada tahun 2015 menurun menjadi 67,54%. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.54
Jumlah Peserta Program KB Aktif
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah peserta program KB aktif	89.276	91.366	91.386	95.720	94.693
2	Jumlah pasangan usia subur	124.242	130.917	130.696	135.469	140.199
3	Persentase peserta program KB aktif	71,86	69,79	69,92	70,66	67,54

Sumber : BKBKS Kota Samarinda, 2016

10.2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan program keluarga berencana akan terlihat dari peningkatan keluarga sejahtera dan penurunan jumlah keluarga prasejahtera. Jumlah keluarga sejahtera tahap 3 selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 43.889 keluarga (2011) menjadi 50.498 keluarga (2014). Keberhasilan ini semakin terlihat dengan adanya penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 5.978 keluarga (2011) menjadi 3.899 keluarga (2014).

Tabel 2.55
Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera
Kota Samarinda, 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Keluarga Prasejahtera	5.978	5.701	5.811	3.899
2	Keluarga Sejahtera Tahap 1	36.121	35.854	34.749	37.442
3	Keluarga Sejahtera Tahap 2	62.218	65.870	67.675	70.725
4	Keluarga Sejahtera Tahap 3	43.889	47.599	48.054	50.498
5	Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus	15.889	16.560	17.652	16.008

Sumber : BKBKS Kota Samarinda, 2016

11. Ketenagakerjaan

11.1 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Samarinda. Pada tahun 2015, pengangguran sebesar 5,61 persen

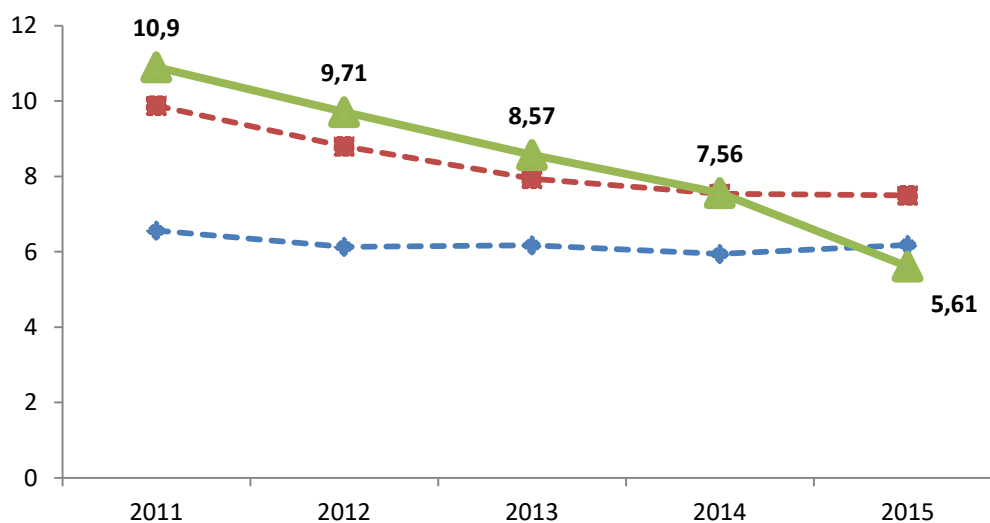




dimana angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan pada tahun 2011 pengangguran mencapai angka 10,9 persen.

Walaupun menunjukkan trend yang positif, hal ini harus menjadi perhatian pokok Pemerintah Kota Samarinda terutama dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Kajian ketenagakerjaan terutama terkait pendidikan hingga usia penduduk yang menganggur juga dapat menjadi masukan tersendiri dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.

Gambar 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Samarinda, 2011-2015



Sumber: Data diolah, 2016

11.2 Statistik Ketenagakerjaan

Kajian dan analisis ketenagakerjaan menjadi penting adanya mengingat sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan subyek pembangunan daerah terutama berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Di Kota Samarinda sendiri, penduduk yang bekerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja sebesar 94,39 persen dimana sebagian besar merupakan tenaga kerja laki-laki yang mencapai 239.851 jiwa dari 343.867 penduduk yang bekerja.

Tingkat pengangguran Kota Samarinda jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur berada sedikit di bawahnya. Tingkat pengangguran Kota Samarinda sebesar 5,61 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,5 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur,



maka pengangguran Kota Samarinda menduduki peringkat kedua terendah setelah Kutai Timur (5,14%).

Tabel 2.56
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2015

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	239.851	104.016	343.867
	Pengangguran	15.768	4.674	20.442
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	255.619	108.690	364.309
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	38.856	40.710	79.566
	Mengurus RT	5.652	131.444	137.096
	Lainnya	10.368	7.691	18.059
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	54.876	179.845	234.721
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	310.495	288.535	599.030
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	82,33	37,67	60,82
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	6,17	4,30	5,61

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016

Tabel 2.57
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2013 – 2015 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Paser	9,25	6,69	9,06
2. Kutai Barat	8,03	6,84	11,70
3. Kutai Kartanegara	7,37	7,65	10,22
4. Kutai Timur	6,09	5,65	5,14
5. Berau	5,85	10,05	5,72
6. Penajam Pasir Utara	7,97	7,52	7,28
7. Balikpapan	7,95	7,56	5,95





8. Samarinda	8,57	7,56	5,61
9. Bontang	11,19	9,38	12,07
10. Mahakam Ulu**)	-	-	-
Kalimantan Timur	7,94	7,54	7,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016

12. Penanaman Modal

Dalam meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Tabel 2.58
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	JumlahProyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	19	1.981.994	8	1.249.372
2012	7	1.454.400	4	1.782.800
2013	70	1.874.000	5	2.565.500
2014	67	1.524.000	4	2.336.000
2015	91	16.263.581	4	3.135.000

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda, 2016

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda, 2016

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

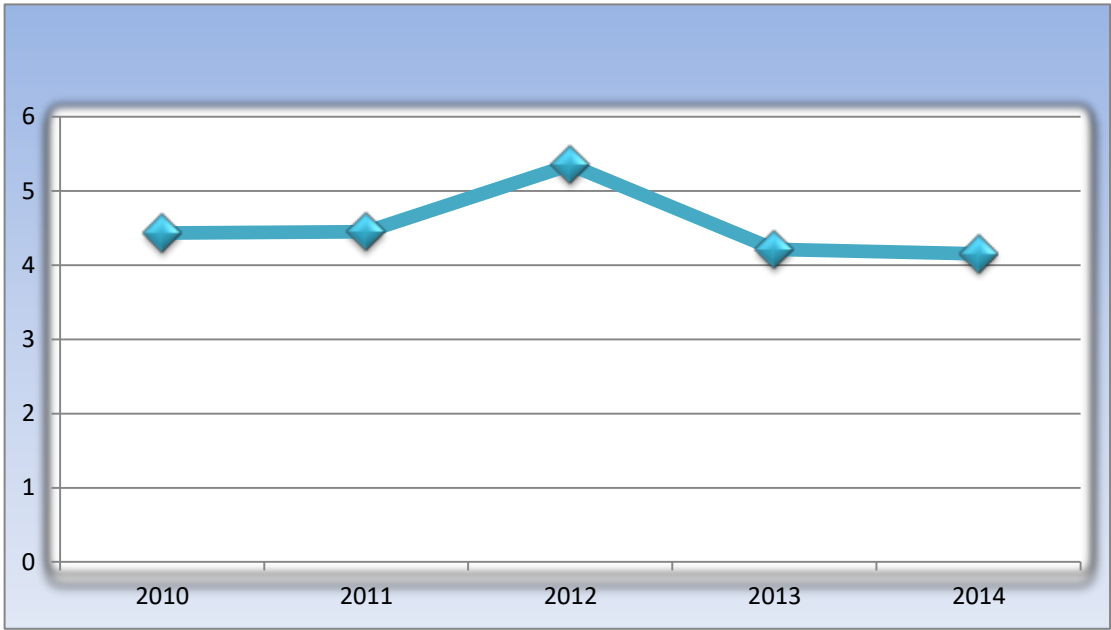
1. Pertanian

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi.



Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi, tidak memiliki peranan yang khusus dalam realisasi swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Kota Samarinda dapat berperan sebagai supporting dalam mencapai tujuan swasembada melalui beberapa terobosan program kegiatan di bidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, tergambar bahwa produktivitas padi sawah dan lading di Kota Samarinda cukup stagnan namun cenderung mengalami penurunan dimana produktivitas pada tahun 2013 mencapai 4,21 ton/ha.

Gambar 2.16.
Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2010-2014 (ton/ha)



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2015

2. Perdagangan, Akomodasi, dan Perindustrian

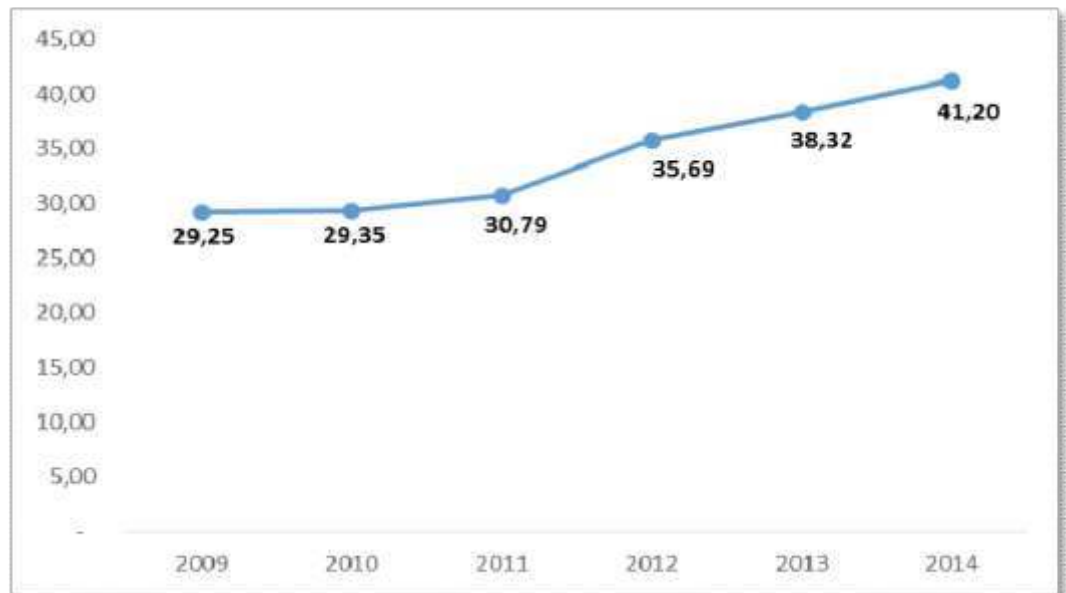
a. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi struktur perekonomian dalam pembentukan PDRB paling tinggi hingga mencapai 41,20 persen. Selain kontribusinya, pertumbuhan perekonomian sektor tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan hal tersebut berdampak positif pada perekonomian makro maupun mikro karena juga berarti semakin meningkat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor tersebut (mengurangi pengangguran).





Gambar 2.17.
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014

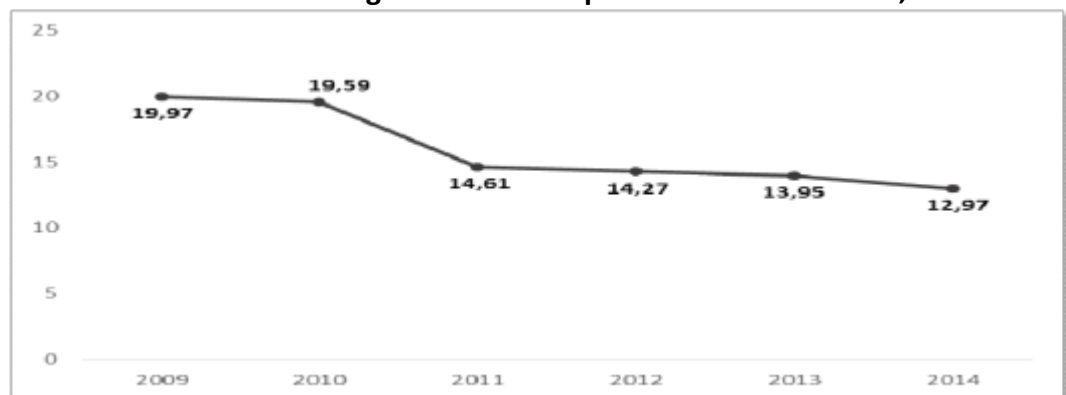


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

b. Industri Pengolahan

Lain halnya dengan industri pengolahan, sektor yang beberapa tahun lalu cukup mendominasi perekonomian Kota Samarinda semakin lama semakin mengalami penurunan dalam kontribusi perekonomian. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pula pada produksi sektor pertambangan dan penggalian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mengalami perlambatan. Pada tahun 2009, dominasi sektor industri pengolahan pada struktur ekonomi Kota Samarinda mencapai 19,97 persen, dan kini pada tahun 2014 kontribusi sektor tersebut hanya sebesar 12,97 persen.

Gambar 2.18.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015



3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung pembentukan perekonomian daerah Kota Samarinda. Hal tersebut karena Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa jenis pertambangan dan galian bumi yang cukup potensial baik bahan galian Golongan A maupun bahan galian Golongan C.

Pada sektor pertambangan, khususnya tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Samarinda karena tingginya produksi dibandingkan komoditas lain. Tambang Batubara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir, dan Sungai Pinang Dalam.

Perkembangan produksi batubara di Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bagi pengambilan kebijakan pembangunan Kota Samarinda ke depan. Peningkatan produksi batubara di Kota Samarinda terjadi pada periode 2009 hingga 2011 yang pada saat itu mencapai 11.593.843,64 ton dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,83 persen dari tahun sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang progresif dari tahun 2012 menurun sebesar 2,29 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 13,07 persen.

Tabel 2.59
Perkembangan Produksi Batubara
Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)

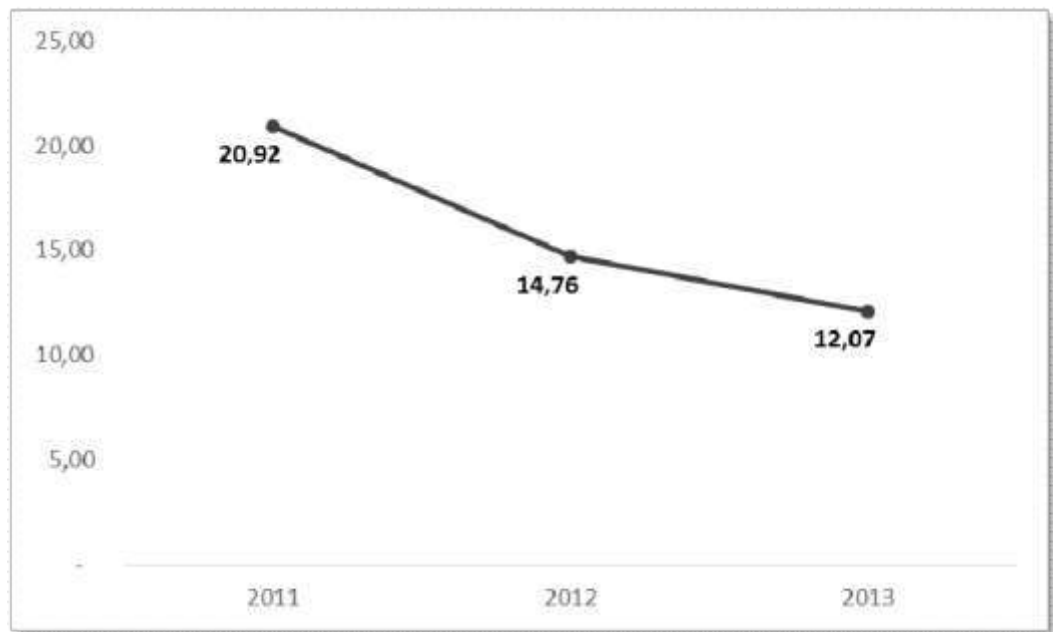
Tahun	Produksi (Ton)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)
2009	3.070.233,19	-
2010	4.630.449,81	50,82
2011	11.593.843,64	150,83
2012	11.327.858,35	-2,29
2013	9.847.170,47	-13,07

Sumber : Dinas Pertambangan Kota Samarinda





Gambar 2.19.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Bersamaan dengan penurunan produksi batubara di Kota Samarinda, terjadi pula penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan struktur perekonomian pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sebesar 14,76 persen pada tahun 2012 (sebelumnya 20,92% pada 2011) dan menurun kembali hingga mencapai 12,07 persen pada tahun 2013.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan suatu daerah. Selain itu, daya saing juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat ksejahteraan merata dan berkelanjutan.

Dalam melihat daya saing Kota Samarinda, maka perlu dipahami beberapa kondisi, yaitu: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan masuk ke suatu daerah serta menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Samarinda terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Sebagai ibukota provinsi, kemampuan perekonomian Kota Samarinda sudah termasuk baik. Hal ini terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp.1.165.269,- pada tahun 2014. Selain itu, pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pangan sehingga dapat dikatakan secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda lebih meningkat karena sudah lebih fokus pada kebutuhan sekunder dan tersier dibandingkan urusan “perut”.

Tabel 2.60
Angka Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Total Pengeluaran RT	720.351	970.468	1.056.256	1.169.800	1.237.035	1.165.269
2.	Total Pengeluaran RT Pangan	325.922	429.586	451.906	489.850	523.081	515.203
3.	Persentase Pengeluaran RT Pangan	45,24	44,27	42,78	41,87	42,29	44,21
4.	Total Pengeluaran RT non Pangan	394.429	540.882	604.350	679.950	713.954	650.066





No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.	Persentase Pengeluaran RT non Pangan	54,76	55,73	57,22	58,13	57,71	55,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Penataan Ruang

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau existing (Publik dan Privat) terhadap rencana minimal peruntukan Ruang Terbuka Hijau (sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 yaitu minimal 30 persen dari luas Kota Samarinda) hanyalah 0.25 atau hanya sebesar 7,55 persen. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, maka Kota Samarinda dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan jumlah persentase dari 7,55 persen menjadi 30 persen dalam jangka waktu 20 tahun atau minimal tercapai 15 persen dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan pada saat berakhirnya RPJP ini (yaitu tersisa 7,45% atau seluas 5.349,1 Hektar dari semula 5.418,58 Hektar).

Tabel 2.61
Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ketersediaan RTH (Hektar)	-	-	-	5.418,58	-
2.	Rencana minimal (30%) Peruntukan RTH di RTRW (Hektar)	-	-	-	21.540	-
3.	Rasio (1./2.)	-	-	-	0,25	-

Sumber: Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, Badan Lingkungan Hidup, 2013; Hasil Analisa, 2015.

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Jumlah titik genangan air di Kota Samarinda pada tahun 2004 dan 2014 adalah tetap 50 titik, yang membedakan adalah total luasan genangan yang berkurang seluas 86,30 Hektar dengan kedalaman wilayah banjir meningkat sedalam 0,087 Meter atau setinggi 8,7 cm



dalam 10 (sepuluh tahun). Luasan genangan berkurang dapat disebabkan dengan telah dibangunnya folder dan peningkatan pemeliharaan drainase. Tetapi penanganan banjir kedepannya perlu ditingkatkan pada penanganan titik-titik banjir yang mengalami peningkatan ketinggian genangan. Tantangan Pemerintah Kota Samarinda ke depan adalah untuk mengurangi jumlah titik genangan air beserta dengan luas wilayah banjir sehingga Kota Samarinda dapat menjadi Kota yang bebas genangan air terutama saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.62
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2004	2014	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	1.833,3	1.747	86,30
2.	Jumlah titik	50	50	-
3.	Rata-rata Kedalaman Wilayah Kebanjiran (meter)	0,269	0,356	0,087

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan; Laporan Akhir Penyusunan Outline Rencana Induk Drainase Kota Samarinda, 2004

2. Lingkungan Hidup

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui usaha pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Dilihat dari tabel dibawah ini, status air sungai yaitu sungai Mahakam, Karang Mukus dan Karang asam masih berstatus Tercemar Berat. Berikut ini adalah beberapa data lingkungan hidup di kota Samarinda.

Tabel 2.63
Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Status Air Sungai Mahakam Segmen Samarinda	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
2.	Status Air Sungai Karang Mumus	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
3.	Status Air Sungai Karang Asam	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat





NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
4.	Jumlah Penanganan kasus pengaduan lingkungan		16	31	33	50
5.	Penilaian untuk penghargaan Adipura	61,41	61,45	65,11	70,90	

Sumber: BLH Kota Samarinda

3. Jaringan Sumber Daya Air

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Kota Samarinda telah memberikan pelayanan yang baik di bidang penyediaan air bersih untuk warga kotanya. Terlihat pada tahun 2013 dengan tingkat pelayanan yaitu 99,07 persen telah meningkat sebanyak 4,75 persen dari tahun 2009, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah rumah tangga, sehingga jumlah penikmat air bersih menurun menjadi 204.456 rumah tangga. Pencapaian positif ini akan terus ditingkatkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 100 persen warga Kota Samarinda akan terlayani oleh air bersih.

Tabel 2.64
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Sumber Air Bersih	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	145.131	178.608	178.669	190.913	204.477	204.456
2	Jumlah Rumah Tangga	153.871	184.284	184.900	193.860	206.396	205.690
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

4. Sistem Jaringan Energi

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kota Samarinda menyentuh angka paling tinggi berada pada tahun 2012 dengan 99,85 persen. Tetapi, angka ini mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah RT di Kota Samarinda yang belum terlayani oleh listrik menjadi 99,36 persen di tahun 2013 atau sebanyak 0,49 persen



dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ditunjukkan juga pada tahun 2014, terjadi kenaikan menjadi 99,81 persen ditahun 2014 atau menaikkan sebesar 0,10 persen sebagai bagian dari usaha perbaikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana listrik wilayah.

Tabel 2.65
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	153.517	183.750	183.994	193.569	205.075	205.299
2.	Jumlah Rumah Tangga	153.871	184.284	184.900	193.860	206.396	205.690
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(3)	99,77	99,71	99,51	99,85	99,36	99,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Samarinda.

1. Kriminalitas

Sebagai ibukota provinsi sekaligus daerah perkotaan, kriminalitas merupakan hal yang sering dijumpai dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kondusivitas investasi atau penanaman modal maka perlu adanya minimalisasi tindak kriminalitas oleh aparat penegak hukum di Kota Samarinda.





Tabel 2.66
Angka Kriminalitas Masuk dan Diselesaikan
Kota Samarinda, 2015

Jenis Tindak Kriminal	Masuk	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)
Narkoba	225	169
Pembunuhan	16	14
Seksual	37	32
Penganiayaan	213	195
Pencurian	977	384
Penipuan	119	58
TOTAL	1.587	852

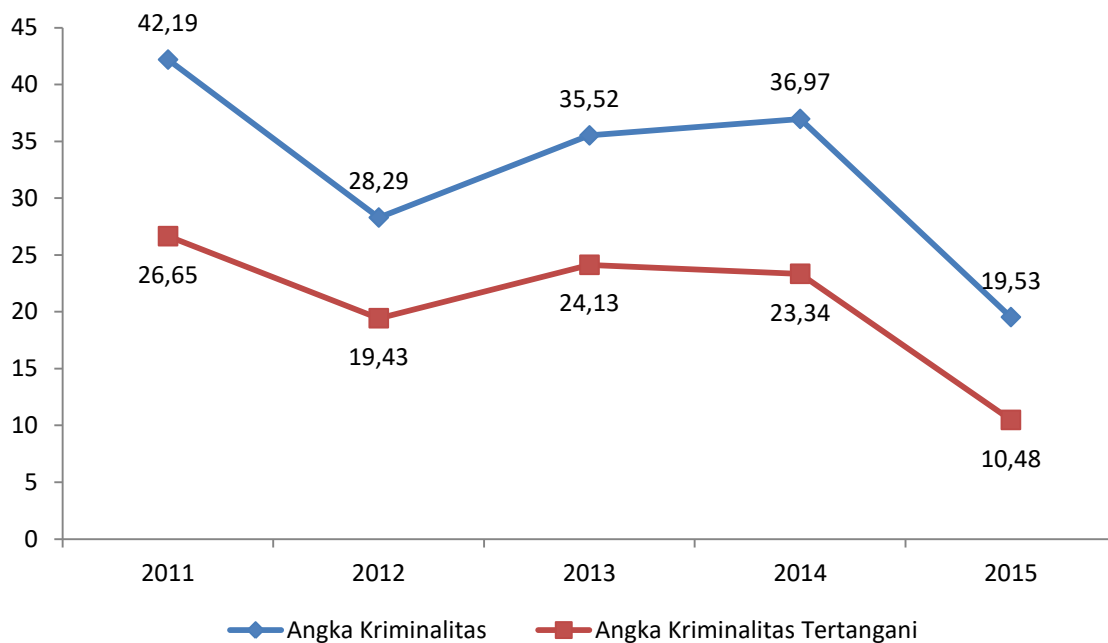
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Samarinda, 2015

Terlihat pada tabel di atas bahwa kasus pencurian merupakan tindak kriminal yang paling sering terjadi di Kota Samarinda sebanyak 977 kasus dan hanya 384 kasus yang terselesaikan. Kasus lain yang cukup tinggi angka kejadiannya adalah kasus narkoba yang mencapai 225 kasus masuk dan hanya 169 kasus yang terselesaikan. Disisi lain, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, angka kriminalitas di Kota Samarinda sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 mencapai 19,53 yang berarti dari 10.000 jiwa penduduk terdapat hampir 20 kasus kriminalitas di tengah-tengahnya. Terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani masih cukup jauh jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Samarinda.

Perlu adanya berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya tindak kriminalitas di Kota Samarinda dan peningkatan kinerja aparat yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai kasus kriminalitas yang terjadi. Hal ini menjadi perlu mengingat tren angka kriminalitas yang meningkat pada tahun 2011 hingga 2015 terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun pada tahun terakhir.



Gambar 2.20.
Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas Tertangani
Kota Samarinda, 2011-2015



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Samarinda, 2015

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing Kota Samarinda terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.





Penduduk usia 15 - 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif . Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk pada sisi demografi.

Rasio ketergantungan dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ini merupakan rasio indikator demografi yang sangat penting karena semakin tinggi persentasenya maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kota Samarinda memiliki rasio ketergantungan cukup baik yakni sebesar 42,32 pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa perbandingan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif mencapai 42,32 (diantara 100 orang penduduk usia produktif, terdapat 42-43 penduduk usia tidak produktif). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ketergantungan penduduk Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	214.466	221.946	219.847	226.779	230.446
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	16.378	16.907	19.584	20.224	17.650
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	230.844	238.853	239.431	247.003	248.096
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	524.786	542.331	566.257	583.673	564.501
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100	43,99	44,04	42,28	42,32	43,95

Sumber: Data diolah, 2016



2.5. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2011-2015

Saat ini Kota Samarinda telah tumbuh dan berkembang menjadi kota besar yang maju dengan berbagai kelengkapan fasilitas dan infrastruktur memadai di bandingkan kabupaten/kota sekitarnya, dimulai dari pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, perhotelan, hingga transportasi. Dapat dikatakan apa yang dimiliki Kota Samarinda merupakan suatu anugerah yang harus dipelihara dan dijaga bersama untuk kemajuan daerah.

Berbagai kelebihan itu tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar daerah untuk melakukan migrasi ke Kota Samarinda. Bila tidak diiringi dengan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah, maka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini akan menjadi sumber permasalahan bagi Kota Samarinda, dimulai dari permasalahan sosial (kriminalitas, pengangguran, kemiskinan), lingkungan yang tak terkendali (kekumuhan dan banjir), serta kemacetan lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali. Kondisi ini seharusnya dipandang sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah untuk terus bekerja keras dan bekerja cerdas membuktikan bahwa Kota Samarinda mampu "menyandang" status sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai strategi, kebijakan, hingga program dan kegiatan untuk menghadapi segala permasalahan tersebut telah dicanangkan dan dituangkan dalam RPJMD Kota Samarinda 2011-2015. Keberhasilan capaian program dan kegiatan tidak dapat dipandang hanya kasat mata dilapangan, namun perlu dilakukan penilaian dengan menggunakan instrumen tertentu. Penilaian tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi perencanaan khususnya dari pendekatan politik, dan pendekatan bottom-up maupun top-down. Secara politik, RPJMD mengakomodasi visi misi Walikota Samarinda periode 2011-2015, oleh karena itu dalam evaluasi ini akan dilakukan penghitungan capaian prioritas program dalam mendukung misi Walikota, sehingga dapat diperoleh persentase capaian setiap misi. Dari sisi bottom-up, prioritas program RPJMD merupakan bentuk penjabaran dari agenda maupun prioritas provinsi Kaltim dan nasional, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dukungan prioritas Kota Samarinda terhadap prioritas provinsi Kaltim dan prioritas nasional maupun top-down. Sedangkan dari sisi top-down, RPJMD dijabarkan kedalam bentuk program/kegiatan SKPD sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, oleh karena itu akan dilakukan pula evaluasi dukungan RKPD terhadap prioritas RPJMD.





Tabel 2.68

Capaian Misi 1 Menciptakan dan meningkatkan fasilitas umum dan utilitas penunjang sector industri, perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolitan

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penataan kawasan citra niaga dan pinggiran sungai mahakam secara bertahap	100% penataan wilayah	50% penataan wilayah	50%
Program peningkatan perhubungan	Revitalisasi transportasi publik	100%	Baru memasuki tahap rehabilitasi halte	0%
	Penataan parkir dengan model central parking	100%	0%	30%
Program peningkatan kualitas pemukiman	Pembangunan perumahan 1000 unit untuk relokasi masyarakat SKM	1000 unit	22 unit (sudah dipersiapkan tujuan relokasi warga SKM yaitu perumahan bengkuring idaman permai, sambutan idaman permai, sambutan asri, sambutan handil kopi, damanhuri, dan talang sari)	2,2%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Semenisasi seluruh gang dan jalan pendekat	3000 gang	3090 gang	100%
Program penataan ruang daerah	Tersedianya ruang publik pada 10 kecamatan dalam bentuk taman	10 buah	6 buah (mahakam lampion garden, teluk lerong garden, taman lampion, taman air mancur biru, taman cerdas, taman eks SMP 1 dan SMA 1)	60%

Dalam perjalanannya pembangunan Kota Samarinda selama 5 tahun terakhir sejak 2011 sampai 2015, penataan kawasan citra niaga tidak terlaksana dengan baik dikarenakan



tingginya permasalahan sosial yang muncul. Tidak terlaksananya pembangunan tersebut bukan berarti tidak ada capaian, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pemerintah Kota Samarinda dalam merelokasi PKL secara damai dari kawasan Citra Niaga ke GOR Segiri Samarinda.

Sedangkan untuk penataan pinggiran sungai mahakam yang difokuskan pada pembangunan taman dan arena hiburan anak antara lain pembangunan jembatan yang representatif dalam fungsinya sebagai arus lalu lintas maupun sebagai estetika kota yang terdapat di Jalan Gajah Mada. Sedangkan untuk penataan taman sebagai arena rekreasi anak dan keluarga telah diresmikan dan dapat dinikmati secara umum yaitu :

- a. Pembangunan taman lampion disekitar air mancur patung pesut tepat di depan kantor Gubernur Provinsi Kaltim Jl.Gajah Mada.
- b. Pembangunan Teluk Lerong Garden dan Monumen Perahu Tambangan tepat disebelah SPBU Jl.RE. Martadinata.
- c. Pembangunan Mahakam Lampion Garden Jl.Slamet Riyadi yang secara resmi dibuka pada tahun 2015.
- d. Arena bermain anak di Jl.Slamet Riyadi.

Selain tepian mahakan, pembangunan taman di pertengahan kota dan relokasi PKL juga terus menjadi perhatian pemkot. Sampai tahun 2015 capaian kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda guna meningkatkan ruang terbuka hijau adalah melalui pembangunan taman. Sampai saat ini beberapa taman sudah dibangun, antara lain:

- a. Mahakam lampion garden,
- b. Teluk lerong garden,
- c. Taman segiri, taman cerdas, taman samarendah, dan taman sejati.

Dalam rangka mewujudkan ruang kota yang layak huni, pemerintah Kota Samarinda juga melakukan Penataan dan relokasi PKL. Empat titik/lokasi yang menjadi fokus pemkot diantaranya:

- a. Merelokasi PKL pasar pagi dan pasar segiri melalui penataan tempat berjualan,
- b. PKL pasar sungai dama dilakukan relokasi ke pasar yang baru semi modern, dan
- c. PKL citra niaga telah direlokasi ke daerah GOR Segiri





Tabel 2.69
Capaian Misi 2 penanggulangan persoalan banjir secara tuntas dan menyeluruh

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir	Berkurangnya daerah rawan banjir	2% dari luas Samarinda	2,43% dari luas Samarinda (luas banjir 1747 Ha)	99,5%

Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan banjir. Bukan hanya sarana fisik seperti drainase dan folder, berbagai peralatan diadakan untuk meminimalisasi banjir. Terdapat beberapa Kawasan rawan banjir dikota Samarinda meliputi Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan banjir diantaranya:

- Penyediaan infrastruktur pengendali banjir
- Membuat polder air dan memaksimalkan polder yang ada
- Membuat drainase pada titik daerah rawan banjir dan revitalisasi pada drainase yang sudah tidak berfungsi lagi.

Melalui upaya-upaya diatas, sampai tahun 2015 luas genangan banjir di Kota Samarinda memperlihatkan penurunan dari 2,55% menjadi 2,43%, sementara target adalah menjadikan luas genangan sebesar 2% dari luas Kota Samarinda. Angka ini memperlihatkan bahwa kinerja pemkot dalam pengendalian banjir masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJM 2011 – 2015.



Tabel 2.70
Capaian Misi 3 penanggulangan persoalan kebakaran secara tuntas dan menyeluruh

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meminimkan kasus bencana kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam, instalasi listrik dan sosialisasi penanganan kebakaran secara dini kepada masyarakat*	100% perlengkapan sarana prasarana	100% perlengkapan sarana prasarana sudah dipenuhi	100%

Proteksi kebakaran adalah merupakan aspek paling utama dalam program perlindungan kebakaran. Perencanaan yang baik dalam aktifitas pencegahan kebakaran akan dapat menyelamatkan miliaran rupiah dan juga nyawa manusia akibat kebakaran. Salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran adalah tindakan tidak aman atau kondisi lingkungan yang kurang baik. Dengan memperbaiki tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan kerja maka penyebab terjadinya kebakaran dapat dikurangi.

Warga Kota Samarinda saat ini tengah dibuat gelisah dengan musibah kebakaran yang datang silih berganti, dalam jangka waktu 1-3 hari. Bahkan terdapat kejadian kebakaran dalam 1 hari di dua lokasi. Dari data yang ada pada BPDB Kota Samarinda, kerugian yang terjadi akibat kebakaran di kota Samarinda, dari bulan Januari-Juni, atau semester pertama 2015, mencapai angka Rp 10 Miliar. Angka tersebut belum ditambah dengan kerugian pada bulan Agustus, yang telah tercatat terdapat 11 kali kejadian kebakaran. Tercatat, sudah terjadi 67 kali kejadian kebakaran yang terjadi di Samarinda pada sampai Oktober 2015, dengan 684 jiwa kehilangan tempat tinggal. Jumlah tersebut merupakan setengah dari kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2014 silam, yang berjumlah 123 kejadian. Tidak hanya menghanguskan bangunan rumah, namun juga toko dan lahan.

Bila melihat penekanan program untuk mendukung misi ini adalah pemenuhan perlengkapan sarana prasarana pemadam, untuk sarana prasarana bahkan sudah dipenuhi 100%, namun masih belum memberikan efek pada penurunan bencana kebakaran, bahkan cenderung meningkat dari 67 kejadian tahun 2011 menjadi 123 kejadian tahun 2014.





Tabel 2.71
Capaian Misi 4 Penciptaan dan Peningkatan Kehidupan Kesehatan Masyarakat

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat*	100% program dilaksanakan	100% program dilaksanakan oleh DKK melalui UPTD Jamkesda	100%
Program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir	Terpenuhinya distribusi air bersih secara bertahap sampai dengan tahun 2015*	100% distribusi air bersih	99,07% rumah tangga memperoleh air bersih	99,07%

Tercapainya misi dibidang kesehatan melalui program peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jamkesda yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui UPTD Jamkesda. Hampir seluruh masyarakat samarinda yang telah terdaftar dalm program Jamkesda telah menggunakan program ini yang dapat dilihat dari tingkat partisipan dari setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit yang melayani program Jamkesda tersebut. Walaupun program ini telah berjalan 100%, fokus kita mendatang untuk mempertahankan capaian misi ini adalah menjaga konsistensi pelaksanaan Jamkesda melalui penguatan data masyarakat target/sasaran.

Salah satu program penunjang lainnya pada misi ini adalah program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir, target dari misi ini adalah terpenuhinya distribusi air secara bertahap sampai tahun 2015. Adapun capaian dari program ini adalah 99,07% rumah tangga yang memperoleh air bersih. Dalam misi ini, masih banyak kendala yang harus dihadapi dan harus diperbaiki kedepannya, masih banyak daerah di samarinda yang belum menikmati jaringan air bersih seperti Lempake, Tanah Merah, Pampang dan Sei Siring. Para stakeholder terkait harus mampu berusaha mengoptimalkan pelayanannya kepada seluruh masyarakat samarinda, sehingga target 100% distribusi air bersih dapat dirasakan seluruh masyarakat samarinda.



Tabel 2.72
Capaian Misi 5 Mengembangkan Sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Yang Professional dan Religious

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan	Rehabilitasi gedung sekolah dasar dengan bangunan kayu menjadi bangunan permanen selesai dalam 5 tahun*	100% bangunan permanen	95% bangunan permanen, namun beberapa gedung masih belum memenuhi standar minimal dan standar kelayakan	95%
	Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	9 tahun rata-rata lama sekolah	10,26 tahun rata-rata lama sekolah	100%
	Persentase sekolah yang permanen	90,63% bangunan permanen	93% bangunan permanen, tapi masih ada beberapa yang belum memenuhi kriteria standar minimal dan standar kelayakan	100%
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program pengembangan perpustakaan	100% program berjalan	49,14% sekolah memiliki perpustakaan	49,14%

Melihat capaian diatas, maka misi ini belum tercapai secara maksimal. Ini dapat dilihat dari program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator rehabilitasi gedung sekolah dasar dengan bangunan kayu menjadi bangunan permanen yang telah mencapai 95%, walaupun masih ada beberapa gedung yang belum memenuhi standar minimal dan standar kelayakan. Capaian ini sebagian besar didukung oleh program Block Grant dari APBN sejak tahun 2012 hingga sekarang yang difokuskan pada pembangunan ruang kelas permanen. Sehingga untuk APBD Kota Samarinda bisa difokuskan pada pemenuhan standar minimal dan standar kelayakan gedung sekolah, dan pembangunan gedung sekolah beserta penunjangnya.

Indikator lain dari misi ini adalah program wajib belajar 9 tahun yang telah tercapai, dan kedepannya pemerintah Kota Samarinda akan meningkatkan target menjadi wajib belajar 12 Tahun. Program pengembangan perpustakaan juga harus diperhatikan kedepannya dikarenakan program ini baru berjalan 49,14% dari target 100%. Sekolah-sekolah, baik sekolah





negeri maupun swasta harus memiliki perpustakaan yang memadai sebagai penunjang syarat-syarat akademis.

Tabel 2.73
Capaian Misi 6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Income Perkapita Masyarakat Kota Samarinda ke Tingkat Pertumbuhan Yang Lebih Tinggi Dalam Setiap Tahun

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya	Penurunan angka kemiskinan maksimum 5% tahun 2015	5% penurunan	0,65% penurunan	11,60%
Program peningkatan investasi daerah	Program peningkatan dan promosi kerjasama investasi	15% pertumbuhan investasi	28% pertumbuhan investasi	100%
Program perluasan kesempatan kerja	Penurunan angka pengangguran maksimal 5% pada tahun 2015*	5% penurunan	2,3% penurunan	46%
Program peningkatan kualitas kelembagaan KUKM	Bantuan stimulan/permodalan UMKM untuk 1000 unit/orang pertahun sampai tahun 2015*	1000 UMKM	Tidak ada capaian, karena penyaluran bantuan harus melalui BLUD, sementara untuk permodalan diarahkan ke BPR	0%

Capaian misi ini dapat dilihat melalui capaian indikator-indikatornya. Indikator program pertama peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya yaitu penurunan angka kemiskinan dengan target maksimum 5%. Walaupun dalam penerapan program tersebut, capaian yang diperoleh hanya sebesar 0,65%. Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah, kurangnya database yang valid tentang Gakin, sehingga banyak gakin yang belum terdaftar secara maksimal.

Program penunjang lainnya adalah program peningkatan investasi daerah melalui peningkatan dan promosi kerjasama investasi. Untuk pertumbuhan investasi menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana Kota Samarinda mampu tumbuh 28% dari 3,2 trilyun tahun 2011 menjadi 4,1 trilyun tahun 2014.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda pada tahun mendatang, pemerintah perlu memaksimalkan penurunan angka pengangguran hingga 5%,



memberi bantuan stimulan modal untuk UMKM yang belum berjalan sampai saat ini, serta menggali dan mengembangkan potensi daerah khususnya industri dan perdagangan. Dari angka pengangguran, pemerintah Kota Samarinda mampu menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 10,9% tahun 2011 menjadi 5,61% tahun 2014 atau turun 5,29% yang artinya melampaui target RPJMD.

Tabel 2.74
Capaian Misi 7 Peningkatan Kehidupan Beragama, Pemuda dan Olahraga Serta Sosial Budaya Yang Lebih Dinamis dan Kondusif Sehingga Tercipta Iklim Kehidupan Yang Lebih Produktif

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pemberdayaan masyarakat desa	Terwujudnya program kampung HBS (hijau, bersih, sehat) dalam mendukung Kaltim Green*	30% Kelurahan HBS	55,9% kelurahan HBS (33 kelurahan yang melaksanakan HBS dari 59 kelurahan di Kota Samarinda)	100%
Program peningkatan keamanan dan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100% program berjalan	87,24% (kegiatan pembinaan dilaksanakan rutin satu tahun sekali, melibatkan kemitraan dengan Polresta, kodim, kantor imigrasi, kementrian hukum dan HAM, serta kalangan akademis)	87,24%
Program pembinaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	12 kegiatan kepemudaan	14 kegiatan kepemudaan	100%

Capaian misi ini dapat dilihat dari capaian setiap indikator, seperti program pemberdayaan masyarakat desa melalui program HBS yang bersinergi dengan program Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kaltim Green. Program HBS ini telah mencapai 55,9% atau telah 33 Kelurahan yang melaksanakan program HBS dari 59 Kelurahan yang ada di Kota Samarinda pada tahun 2013. Selain itu, untuk mendukung misi peningkatan kehidupan beragama, pemuda, dan olahraga serta sosial budaya yang lebih dinamis dan kondusif, maka pemerintah harus meningkatkan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan pembinaan rutin satu tahun sekali yang melibatkan stakholder-stakeholder terkait, seperti aparat pemerintahan, aparat keamanan, tokoh pemuda dan tokoh agama serta kalangan





akademisi, serta secara rutin menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dan yang paling penting kedepannya pemerintah harus fokus untuk mempertahankan suasana kondusif dalam mendukung peningkatan investasi di Kota Samarinda.

Tabel 2.75
Capaian Misi 8 Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pembinaan dan penagihan pajak dan retribusi daerah	Program penyusunan dan pendokumentasian pajak dan retribusi daerah	38 pajak/retribusi	38 pajak/retribusi (11 pajak daerah, 12 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha, dan 5 retribusi perizinan tertentu)	100%
	Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah	100% program berjalan	100% program dilaksanakan (penerapan sistem pajak dan retribusi online untuk wajib pajak tertentu)	100%

Capaian misi ini mencapai target 100%, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2013 telah menerapkan sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem online terutama untuk wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebagaimana tertuang dalam Perwali Kota Samarinda No.37 Tahun 2013. Dengan semakin membaiknya prosedur administrasi yang diterapkan, maka capaian yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda telah sejalan dengan target yang dicanangkan yaitu 38 pajak/retribusi yang meliputi 11 pajak daerah, 12 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha, dan 5 retribusi perizinan tertentu. Dari upaya tersebut, Pemkot memperoleh pendapatan khusus dari sisi PAD berkisar antara 128 milyar hingga 407 milyar dengan rata-rata persentase terhadap total pendapatan adalah 12,32%. Persentase ini menunjukkan bahwa keuangan Pemkot masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari APBN maupun Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim. Untuk itu kedepannya Pemkot harus bekerja lebih keras melibatkan peran serta pihak swasta untuk pembangunan kota.



Tabel 2.76
Capaian Misi 9 peningkatan good government dan pemerintah kota yang dinamis

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan	Inovasi dan evaluasi pembangunan daerah	100% program berjalan	100% program dilaksanakan (3 tahun berturut-turut Bappeda melakukan survey publik kepuasan masyarakat atas pembangunan Kota Samarinda)	100%
Program peningkatan pelayanan perijinan	Program peningkatan sarana dan prasarana perijinan	100% program berjalan	61% perijinan sistem online	61%

Misi ini ditujukan untuk memperlihatkan sejauh mana program-program pemerintah Kota Samarinda dapat diterima masyarakat sebagai implementasi dari Good Government. Dalam periode 2011-2015, pemkot melalui Bappeda melakukan survey publik kepuasan masyarakat untuk periode pemerintahan 2011-2012 dan 2012-2013. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk periode 2011-2012 tingkat kepuasan masyarakat adalah 37,13% dengan kepuasan tertinggi ada pada misi 7 (kepuasan 56,67%).
2. Untuk periode 2012-2013 tingkat kepuasan masyarakat adalah 25,96% dengan kepuasan tertinggi ada pada misi 7 (kepuasan 53,06%).

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan Good Government di Kota Samarinda tidak berjalan dikarenakan program-programnya belum mampu memuaskan masyarakat.

2.6. Evaluasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan).

Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena





pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM menjadi sangat urgen dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Capaian pelayanan minimal di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kota Samarinda Tahun 2015

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesehatan				
1.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95	2015	95,12
		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani	80	2015	99,87
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	90	2015	95,99
		Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	2015	84,56
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yg ditangani.	80	2010	38,71
		Cakupan kunjungan bayi.	90	2010	83,61
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	2010	89,83
		Cakupan pelayanan anak balita.	90	2010	47
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin.	100	2010	100
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.	100	2010	100
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat.	100	2010	91,97
		Cakupan peserta KB Aktif.	70	2010	62,8
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit.	100	2010	73,55
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	100	2010	100
		Penemuan penderita pneumonia balita	100	2010	100
		Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100	2010	100
		Penderita DBD yang ditangani	100	2010	100
		Penemuan penderita Diare	100	2010	100
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	100	2015	100
1.2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100	2015	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Samarinda.	100	2015	100
1.3	Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	100	2015	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif.	80	2015	72
2	Sosial				
2.1	pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota.	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kota.	80	2015	355,5
2.2	pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2015	304,55
2.3	penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota.	Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015	80
2.4	penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	2015	100
2.5	bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2015	68
2.6	evakuasi korban bencana skala Kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	2015	90,00
2.7	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40	2015	100
3	Lingkungan Hidup				
3.1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2013	96
3.2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2013	100
3.3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	5
3.4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti,	100	2013	100
4	Pemerintahan Dalam Negeri				





No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	90%	2015	80%
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99%	2015	95%
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	80%	2020	18,13%
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	30%	2015	20%
4.2	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala daerah	100%	2015	100%
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3x patroli	2014	3x patroli Sehari
		Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1 Orang per RT	2014	1 Orang per RT – 0,089 = 0,911
4.3	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Samarinda	80	2015	80
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	2015	100
		Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	2015	85
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 – 5000 Liter pada WMK	90	2015	90
5	Perumahan Rakyat				
5.1	Rumah Layak Huni Dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009-2025	90,26
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2009-2025	74,17
5.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	70	2009-2025	70
6	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak				
6.1	Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	2015	100
6.2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	2015	100
6.3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2015	75



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2015	75
6.4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	2015	75
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80	2015	75
6.5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	2015	75
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	2015	75
7	Keluarga Berencanan & Keluarga Sejahtera				
7.1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 3,5%	3.5	2014	2,45
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 65%	65	2014	80,17
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5,0%	5.0	2014	9,86
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70	2014	71,89
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan 87%	87	2014	76,67
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 kelurahan	1 petugas 2 kelurahan	2014	0,92
		Ratio Pembantu Pembina KB 1 petugas di setiap kelurahan	1 Petugas di setiap kelurahan	2014	1
7.2	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30	2014	0
7.3	Penyediaan Informasi data mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	100
8	Pendidikan				
8.1	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/Kota	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	-	2014	100





No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	2014	85,43
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	-	2014	62,20
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	-	2014	89,4
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	-	2014	100
		Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	-	2014	100
		Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	85,51
		Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	-	2014	53,09
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	-	2014	35,80
		Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	79,49



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	81,71
		Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	79,71
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu saluran pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	-	2014	100
		Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	-	2014	45,83
8.2	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	-	2014	21,03
		Setiap SMP/MTs menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	-	2014	9,76
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	-	2014	50,93
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	-	2014	46,91
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	-	2014	40,01
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	-	2014	59,97
		- Kelas I – II: 18 Jam per minggu	-		





No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Kelas III: 24 Jam per minggu	-		
		- Kelas IV – VI: 27 Jam per minggu	-		
		- Kelas VII – IX: 27 Jam per minggu	-		
		Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	-	2014	96,62
		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	-	2014	81,26
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	-	2014	74,65
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	-	2014	48,17
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	-	2014	81,31
		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau kantor Kementerian Agama di kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	-	2014	96,53
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	-	2014	77,85
9	Ketenagakerjaan				
9.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	2016	100
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	2016	75
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	2016	47,62
9.2	Pelayanan Penempatan Tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	2016	71,45
9.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	2016	78,64



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	2016	71,45
9.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45	2016	96,15
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50	2016	100
10	Komunikasi & Informatika				
10.1	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	100	2015	75
		Media baru seperti website (media online);	100	2015	50
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100	2015	75
		Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya; dan/atau	100	2015	75
10.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	100	2015	50
11	Ketahanan Pangan				
11.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100	2015	85
		Penguatan Cadangan pangan			
11.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			
		Stabilitas harga dan pasokan pangan			
11.3	Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			
11.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan			
12	Perhubungan				
12.1	Angkutan Jalan				
12.1.1	Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	2014	100
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60	2014	100
12.1.2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	2014	98





No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	2014	77,78
12.1.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60	2014	87,67
12.1.4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60	2014	100
12.1.5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50	2014	93,67
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	2014	50
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40	2014	85,67
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100	2014	40
12.1.6	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.2	Angkutan Sungai dan danau.				
12.2.1	Jaringan Pelayanan Angkutan	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75	2014	100
		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40	2014	100
12.2.2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60	2014	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.2.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100	2014	90
12.2.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50	2014	75,48
12.3	Angkutan Penyeberangan				
12.3.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota.	60	2014	60
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.3.2	Jaringan Prasarana angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60	2014	60
12.3.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.3.4	Sumber daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	50	2014	50
12.4	Angkutan Pelayanan Laut				
12.4.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90	2014	90





No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100	2014	100
12.4.2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60	2014	60
12.4.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.4.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	100	2014	100
13	Penanaman Modal				
13.1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedia informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2015	0
13.2	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 (satu) kali/tahun	2015	13
13.3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaraanya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2015	0
13.4	Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2015	2
13.5	Izin Lokasi/penetapan Lokasi	Terselenggaranya pelayanan perizinan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi	80	2015	80
13.6	Izin Peruntukan Penggunaan Lahan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	80	2015	80
13.7	Izin Pematangan Lahan	Terselenggaranya pelayanan perizinan izin pematangan lahan	80	2015	80
13.8	Izin sosial	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan	100	2015	100
		- Izin operasional organisasi sosial		2015	
		- Tanda daftar organisasi		2015	
13.9	Izin Limbah	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan	80	2015	80
		- Izin Pembuangan air limbah		2015	
		- Izin Tempat Penyimpanan		2015	
13.10	Surat izin tempat usaha	Surat izin tempat usaha	100	2015	100
13.11	Surat Izin usaha kepariwisataan	Surat Izin usaha kepariwisataan	100	2015	100
13.12	Izin mendirikan bangunan	Izin mendirikan bangunan	100	2015	100
13.13	Surat izin usaha perdagangan	Surat izin usaha perdagangan	100	2015	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.14	Tanda daftar perusahaan	Tanda daftar perusahaan	100	2015	100
13.15	Tanda daftar gudang	Tanda daftar gudang	100	2015	100
13.16	Tanda daftar industri	Tanda daftar industri	100	2015	100
13.17	Surat izin usaha penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi	Surat izin usaha penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi	100	2015	100
13.18	Izin reklame	Izin reklame	100	2015	100
13.19	Surat izin usaha jasa konstruksi	Surat izin usaha jasa konstruksi	100	2015	100
13.20	Izin usaha ketenagalistrikan	Izin usaha ketenagalistrikan	100	2015	100
13.21	Izin bahan bakar minyak	Izin bahan bakar minyak	100	2015	100
13.22	Izin penumpukan kayu bundaran, kayu masak dan bahan bangunan lainnya	Izin penumpukan kayu bundaran, kayu masak dan bahan bangunan lainnya	100	2015	100





BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, diatur tentang Keuangan Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak, daerah dan retribusi daerah; pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia



untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Samarinda periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	182.560.000.000,00	1.914.290.354.872,00	9,54
2012	228.445.500.000,00	2.312.250.128.138,00	9,88
2013	286.904.776.836,46	2.697.071.997.283,01	10,64
2014	577.555.670.510,00	3.048.932.183.316,26	18,94
2015	819.500.000.000,00	3.615.371.904.433,00	22,67
Rata-rata	418.993.189.469,29	2.717.583.313.608,45	15,42

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kota Samarinda masih sangat kecil yaitu rata-rata 15,42 persen, namun setiap tahun persentase derajat desentralisasi fiskal daerah naik setiap tahunnya. Diharapkan di tahun – tahun mendatang, pemerintahan kota Samarinda dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, APBD Kota Samarinda mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kota Samarinda yang tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 2
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Tahun 2011-2015 (*Juta Rupiah*)

URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)													
Pendapatan	1.914.290	2.068.470	108,0 ₅	2.312.250	2.713.208	117,34	2.697.072	2.567.633	95,20	3.048.932	2.845.036	93,31	3.615.372	2.859.356	61,90
Belanja	1.856.326	1.475.902	79,51	2.677.738	2.005.650	74,90	3.841.357	2.869.580	74,70	3.890.929	3.201.663	82,29	4.063.843	3.237.541	53,65
Surplus (Defisit)	57.965	592.568	1.022,29	(365.488)	707.557	-193,59	(1.144.285)	(301.974)	26,39	(841.996)	(356.627)	42,35	(449.864)	(379.205)	-12,69
Penerimaan Pembiayaan	133.561	54.061	40,48	497.014	497.014	100,00	1.172.785	1.172.785	100,00	842.496	842.496	100,00	485.536	485.536	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	191.526	149.616	78,12	131.527	31.787	24,17	28.500	28.334	99,42	500	334	66,71	35.673	32.874	92,15
Pembiayaan Netto	(57.965)	(95.554)	164,8 ₅	365.488	465.227	127,29	1.144.285	1.144.451	100,01	841.996	842.163	100,02	449.864	452.662	100,62
SILPA	54.061	54.061		497.014	497.014		1.172.785	1.172.785		842.496	842.496		485.536	73.458	



Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa selama lima tahun terakhir APBD Kota Samarinda selalu mengalami defisit, tetapi untuk tahun awal 2011 dan 2012 terjadi surplus. Realisasi APBD pada tahun 2011 mengalami surplus sebesar 592,57 milyar, begitu juga tahun 2012 yang mengalami surplus mencapai 707,56 milyar. Hal berbeda terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dimana terjadi defisit berturut-turut 301,97 milyar, 356,63 milyar, dan 379,20 milyar.

Dengan SILPA yang sedemikian besar tiap tahun maka isu penting ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat.

Tabel 3. 3
Pertumbuhan Realisasi APBD (Rupiah)

Tahun	Pendapatan	%	Belanja	%
2011	2.068.470.073.728,48		1.475.901.584.953,97	
2012	2.713.207.587.342,69	31,17	2.005.650.172.493,47	35,89
2013	2.567.632.606.693,65	-5,37	2.869.579.631.651,84	43,07
2014	2.845.036.423.374,66	10,8	3.201.662.936.936,86	11,57
2015	2.859.356.289.674,01	0,503	3.237.540.741.278,13	1,12
Rata-rata (%)		9,28		22,92

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2011-2015 tidak sebanding dengan pertumbuhan belanja. Dari sisi pendapatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,28 persen per tahun dan disaat bersamaan belanja justru mengalami pertumbuhan sebesar 22,92 persen. Di sini terlihat bahwa pendapatan masih belum mampu memenuhi pencapaian sasaran pembangunan. Melihat kondisi ini, maka pemerintah perlu memperhatikan PAD agar proporsinya terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat perilaku (*behaviour*) dari pendapatan maka tabel 3.4 berikut akan menunjukkan perkembangan dari komponen pendapatan secara lebih rinci.



Tabel 3. 4
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2011-2015
(Juta Rupiah)

URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	1.914.290	2.068.470	1,08	2.312.250	2.713.208	1,17	2.697.072	2.567.633	0,95	3.048.932	2.845.036	0,93	3.615.372	2.859.356	0,62
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.560	188.813	1,03	228.449	273.741	1,20	286.905	338.158	1,18	577.556	435.499	0,75	819.500	419.745	0,42
Pajak	101.179	109.429	1,08	132.810	159.828	1,20	180.738	197.815	1,09	224.902	238.512	1,06	257.845	244.079	0,76
Retribusi	47.851	48.808	1,02	69.696	56.956	0,82	52.702	55.566	1,05	65.277	66.908	1,02	73.542	61.824	0,70
Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yg. dipisahkan	11.650	7.075	0,61	7.000	6.122	0,87	10.375	5.824	0,56	41.119	5.097	0,12	20.833	4.776	0,23
Lain-Lain PAD yang Sah	21.880	23.502	1,07	18.940	50.835	2,68	43.089	78.953	1,83	246.257	124.983	0,51	467.280	109.066	0,20
B. DANA PERIMBANGAN	1.154.803	1.300.897	1,13	1.275.539	1.582.261	1,24	1.442.844	1.465.391	1,02	1.525.622	1.538.150	1,01	1.841.760	1.542.418	0,76
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	757.128	903.133	1,19	752.299	1.059.021	1,41	846.612	876.762	1,04	890.352	917.512	1,03	1.153.958	854.615	0,74

URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015		
	ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
DAU	397.675	397.764	1,00	518.878	518.878	1,00	579.635	579.635	1,00	614.367	614.367	1,00	590.234	590.234	0,83
DAK	0	0	0	4.361	4.361	1	16.596	8.994	0,54	20.903	6.271	0,3	97.569	97.569	0,56
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	576.928	578.760	1,00	808.266	875.206	1,08	967.324	764.083	0,79	945.754	871.387	0,92	954.112	897.194	0,52
Hibah	0	0	0	28	28	1	14	14	1	0	14		0	14	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	203.621	227.453	1,12	196.984	253.241	1,29	386.934	322.935	0,83	363.106	288.725	0,80	371.782	314.850	0,38
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.799	113.799	1,00	98.942	98.942	1,00	150.925	150.925	1,00	183.623	183.623	1,00	208.551	208.551	0,80
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah	259.507	237.507	0,92	512.312	504.994	0,99	429.450	290.210	0,68	399.025	399.025	1,00	373.779	373.779	0,49

Sumber: BPKAD Kota Samarinda



Dari tabel perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan di atas terlihat bahwa secara umum realisasi pendapatan lebih besar dari anggarannya berturut-turut selama 2 tahun yaitu tahun 2011 dan 2012, sedangkan tahun 2013 hingga 2015 pendapatan daerah belum mampu mencapai target.

Bila dilihat lebih jauh pada struktur pembentuk pendapatan daerah, tidak tercapainya target-target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-beda setiap tahunnya yang dijabarkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013, secara totalitas PAD dan dana perimbangan mampu mencapai target. Sedangkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum mencapai target terutama pada bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi.
- Pada tahun 2014, hanya dana perimbangan yang mampu mencapai target. Sedangkan pada PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum mampu mencapai target terutama pada dana bagi hasil pajak dari provinsi.
- Pada tahun 2015, secara keseluruhan pembentuk pendapatan daerah belum mampu mencapai target.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan daerah Kota Samarinda yang bergantung pada bagi hasil pajak baik dari provinsi maupun pusat dalam 2 tahun terakhir selalu tidak mencapai target, hal ini karena adanya ketergantungan dengan penerimaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga untuk kedepannya, pemerintah Kota Samarinda perlu memaksimalkan sumber-sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini dan perlu lebih giat lagi menggali sumber-sumber PAD baru.

Lebih jauh, pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Rata-rata Pertumbuhan Rincian Realisasi Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2011-2015
(Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan	2.068.470	2.713.208	2.567.633	2.845.036	2.859.356	9,28
A. Pendapatan Asli Daerah	188.813	273.741	338.158	435.499	419.746	23,42
Pajak	109.429	159.828	197.815	238.512	244.079	23,18
Retribusi	48.808	56.956	55.566	66.908	61.824	6,77
Hasil Pengelolaan Kek. Daerah Yg. Dipisahkan	7.075	6.122	5.824	5.097	4.776	-9,28



Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lain-Lain PAD Yang Sah	23.502	50.835	78.953	124.983	109.066	54,29
B. Dana Perimbangan	1.300.897	1.582.261	1.465.391	1.538.150	1.542.417	4,87
Bagi Hasil Pajak Pusat	903.133	1.059.021	876.762	917.512	854.615	-0,54
DAU	397.764	518.878	579.635	614.367	590.234	11,06
DAK	-	4.361	8.994	6.271	97.569	510,61
C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	578.760	875.206	764.083	871.387	897.193	13,88
Hibah	-	28	14	14	14	-16,67
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemda Lainnya	227.453	253.241	322.935	288.725	314.850	9,33
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	113.799	98.942	150.925	183.623	208.551	18,68
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah	237.507	504.994	290.210	399.025	373.779	25,31

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Dari tabel di atas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kota Samarinda yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,28 persen.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Proporsi Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kota Samarinda Tahun 2011-2015
(Juta Rupiah)

No. Urut	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1	Belanja Tidak Langsung	677.611	801.032	981.566	1.135.497	1.215.138	15,86
5.1.1	Belanja Pegawai	590.639	682.464	925.792	973.772	1.038.927	15,77
5.1.2	Belanja Bunga	169	129	89	50	10	-44,70





No. Urut	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5.1.4	Belanja Hibah	69.743	116	53.568	159.146	173.705	11.593,67
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.964	794	1.335	1.592	680	-16,23
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Partai Politik	0	939	781	839	1.020	4,07
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.097	1.177	0	98	796	206,91
5.2	Belanja Langsung	798.291	1.204.618	1.888.014	2.066.166	2.006.356	28,54
5.2.1	Belanja Pegawai	352.843	206.878	240.166	238.571	272.014	-2,98
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	164.352	289.748	367.304	504.938	525.264	36,14
5.2.3	Belanja Modal	281.096	707.993	1.280.544	1.322.656	1.209.077	56,86

Sumber: BPKAD

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kota Samarinda periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami perkembangan yang positif seiring dengan perkembangan APBD Kota Samarinda pada periode tersebut. Perkembangan positif ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Kota Samarinda pada periode tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 3. 7
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Samarinda 2011-2015 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	ASSET					
	ASSET LANCAR					
	Jumlah Asset Lancar	874.974	1.614.314	1.110.179	799.426	215.849
	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Non-Permanen					
	Investasi Dalam Dana Bergulir	9.042	7.351	6.737	4.769	4.807
	Investasi Non Permanen Lainnya					
	Investasi Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Pada BUMD	247.654	290.638	416.217	350.695	368.903
	Investasi Permanen Lainnya					
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	256.696	297.989	422.954	355.463	373.710
	ASSET TETAP					
	Tanah	3.672.155	3.803.773	3.497.220	5.159.006	5.453.879
	Peralatan dan Mesin	322.010	483.079	282.230	692.225	757.172
	Gedung dan Bangunan	692.153	991.969	503.634	1.451.621	1.763.954
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	780.598	1.107.781	756.475	2.069.809	2.535.089
	Asset tetap Lainnya	8.621	14.142	8.251	16.664	17.499



NO	URAIAN		2011	2012	2013	2014	2015
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	390.461	500.960	450.550	1.418.925	2.410.782
		Akumulasi Penyusutan					
		Jumlah Asset tetap	5.865.999	6.901.704	5.498.359	10.808.250	10.929.989
		ASET LAINNYA					
		Tagihan Penjualan Angsuran	2.141	1.613	1.032	640	449
		Tuntutan Ganti Rugi					
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga	94.975	94.975	94.975	94.975	94.975
		Kas Yang dibatasi Penggunaannya	10.464				
		Aset Tak Berwujud	4.144	5.577	11.936	11.936	15.341
		Aset Lain-lain	1.794	3.391	148.060	148.060	148.957
		Jumlah Aset Lainnya	113.519	105.556	255.611	255.611	253.899
2		KEWAJIBAN					
		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4	23	63	10
		Utang Jangka Pendek Kepada Pihak Ketiga	75.970	118.841	451.738	451.692	797.716
		Utang Bunga					
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	334	334	334	167	-
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	76.304	119.679	452.095	451.922	797.731
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
		Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat					
		Utang Jangka Panjang Lainnya	834	500	167	104.367	104.367
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	834	500	167	104.367	104.367
		JUMLAH KEWAJIBAN	77.137	119.679	452.261	556.289	902.098
3		EKUITAS DANA					
		EKUITAS DANA LANCAR					
		Sisa LebihPembiayaan Anggaran (SILPA)	497.014	1.172.785	842.496	485.536	
		Pendapatan yang ditangguhkan	33	42			
		Cadangan Piutang	361.337	393.158	250.353	296.761	
		Cadangan Persediaan	5.919	19.460	9.353	15.367	
		Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	10.671	28.866	7.954	1.697	
		Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(65.839)	(119.175)	(452.072)	(451.858)	
		Jumlah Ekuitas Dana Lancar	809.135	1.495.136	658.085	347.504	
		EKUITAS DANA INVESTASI					
		Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	256.696	297.989	422.954	355.463	
		Diinvestasikan dalam asset tetap	5.865.999	6.901.704	8.809.306	10.808.250	
		Diinvestasikan dalam asset lainnya	103.054	1.055.551	138.239	255.611	
		Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(834)	(500)	(167)	(104.367)	
		Jumlah Ekuitas dana Investasi	6.224.915	7.304.749	9.370.332	11.314.957	
		EKUITAS DANA CADANGAN					
		Diinvestasikan dalam dana cadangan					
		Jumlah Ekuitas Dana Cadangan					
		JUMLAH EKUITAS DANA	7.034.050	8.799.884	10.028.417	11.662.461	10.871.349
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.111.188	8.919.563	10.480.678	12.218.750	11.773.447

Sumber: BPKAD Kota Samarinda





Untuk menganalisis neraca Kota Samarinda periode tahun 2011-2015 digunakanlah beberapa analisis rasio sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kota Samarinda adalah rasio lancar dengan rumusan seperti di bawah ini:

Rasio Lancar = $\frac{\text{aktiva lancar}}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar.

Tabel 3. 8
Rasio Lancar Kota Samarinda Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aktiva lancar	874.974	1.614.314	1.110.179	799.426	215.849
Kewajiban jangka pendek	76.303	119.679	452.094	451.922	797.731
Rasio Lancar	11,47	13,49	2,46	1,77	0,27

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Tabel diatas menunjukkan rasio lancar Kota Samarinda berada di atas 0 (nol) meskipun adanya penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 0,27 pada tahun 2015. Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kota Samarinda sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai 0,27 terhadap aktiva lancarnya.

2. Ratio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah:



a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 3. 9
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kewajiban	77.137	119.679	452.261	556.289	902.098
Ekuitas	7.034.050	8.799.884	10.028.416	11.662.461	10.871.349
Total Debt to equity Ratio	0,011	0,014	0,045	0,048	0,088

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Rasio total hutang terhadap modal (ekuitas) seperti yang ditunjukkan oleh tabel diatas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dengan angka yang berada jauh dibawah 0 (nol) dapat disimpulkan bahwa nilai hutang masih jauh dibawah modal yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda. Meskipun demikian, pemerintah Kota Samarinda harus memperhatikan adanya kenaikan pada hutang (kewajiban) terutama hutang jangka pendek.

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kota Samarinda memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Total Aktiva}}$$





Tabel 3. 10
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kewajiban	77.137	119.679	452.261	556.289	919.207
Aktiva	6.854.492	8.621.574	6.864.150	12.218.750	11.773.447
Total Debt to Total Asset Ratio	0,011	0,014	0,066	0,046	0,077

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Menurut tabel diatas, rasio hutang terhadap total aktiva tertinggi berada pada tahun 2015 yang mencapai 0,077. Namun keseluruhan angka tersebut menunjukkan bahwa posisi keuangan Kota Samarinda sangat sehat dimana keseluruhan aset sebesar 0,999 atau 99,9 persen tidak dibebani oleh utang.

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Dikarenakan adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Kota Samarinda yang dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam mengukur rasio aktivitas laporan keuangan Kota Samarinda, yaitu:

a. Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap merupakan perbandingan antara PAD dengan aktiva tetap, dimana rasio ini dapat menggambarkan kecepatan perputaran aktiva tetap dalam suatu periode tertentu.

Rasio perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva Tetap}} \times 100$$



Tabel 3. 11
Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAD	188.813	273.741	338.158	435.498	419.746
Aktiva Tetap	5.865.998	6.901.703	5.498.359	10.808.250	10.929.989
Rasio Perputaran aktiva tetap	3,22	3,97	6,15	4,03	3,84

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Dengan rasio perputaran aktiva tetap sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan angka mencapai 3,84 persen pada tahun 2015. Namun angka tersebut menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Samarinda, bahkan hanya memberikan kontribusi sebesar 3,84 persen.

b. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Tabel 3. 12
Rasio Perputaran Total Aktiva (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAD	188.813	273.741	338.158	435.498	419.746
Aktiva	6.854.491	8.621.574	6.864.149	12.218.750	11.773.447
Rasio Perputaran Total Aktiva	2,75	3,18	4,93	3,56	3,57

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Dengan rasio perputaran total aktiva sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva masih rendah dengan angka 3,57 persen. Namun hal ini dapat dipahami karena sebagian besar asset tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung dalam menghasilkan PAD.





3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggungjawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2011-2015 BPKAD menyusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kota Samarinda. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKAD.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Kota Samarinda dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kota Samarinda pada Tabel 3.12.



Tabel 3. 13
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kota Samarinda Tahun 2011-2015

Tahun	Opini BPK
(1)	(2)
2011	Disclaimer
2012	WDP
2013	WDP
2014	WTP
2015	WTP

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Target ke depan pada periode berikutnya, Kota Samarinda harus mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Samarinda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan fokus terus berusaha membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan Keuangan Daerah.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Bila memperhatikan tabel 3.2, bahwa dalam APBD Kota Samarinda terlihat adanya selisih yang cukup besar antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari sisi pembiayaan guna menutup defisit riil anggaran. Perhatikan defisit riil anggaran Kota Samarinda pada tabel berikut :

Tabel 3. 14
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Samarinda
(Juta Rp)

NO	URAIAN	2013	2014	2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.567.633	2.845.036	2.859.356
	Dikurangi realisasi:	-	-	-
2.	Belanja Daerah	2.869.580	3.201.663	3.238.561
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	28.334	334	32.874
4.	Defisit Riil	(330.281)	(356.960)	(412.078)

Sumber: BPKAD Kota Samarinda





Memperhatikan tabel diatas, terlihat bahwa defisit riil di Kota Samarinda terjadi pada tahun 2013 sebesar 330 milyar dan 2014 mencapai 356 milyar. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pada sisi belanja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan dari sisi pendapatan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2015, pemerintah Kota Samarinda mengalami defisit sebesar 412 milyar. Untuk menutup defisit riil tersebut, maka dilakukan penyusunan komposisi penutup defisit riil anggaran pemerintah Kota Samarinda dalam tabel berikut :

Tabel 3. 15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Samarinda
(Juta Rp)

NO	Uraian	2013	2014	2015	Pertumbuhan (%)
1	Defisit riil	(330.281)	(356.960)	(412.078)	11,76
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1.172.785	842.496	485.536	-35,27
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
8	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.172.785	842.496	485.536	-35,27
9	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	842.504	485.536	73.458	-63,62

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Tabel diatas memperlihatkan bahwa defisit riil yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 330 milyar dapat ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar 1,17 trilyun, sehingga bila dihitung selisihnya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang mencapai 842 milyar, begitu juga dengan defisit riil yang terjadi pada tahun 2014. Kondisi yang sama ditunjukkan tahun anggaran 2015, yang mana defisit sebesar 412 milyar dapat ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar 485 milyar.

Pelaksanaan anggaran harus memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pertahunnya. SiLPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SiLPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kota Samarinda dimana hal tersebut menggambarkan belanja



pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun terjadinya SILPA dipengaruhi karena beberapa faktor, secara rinci perhatikan realisasi SILPA pada tabel berikut :

Tabel 3. 16
SILPA Kota Samarinda Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013		2014		2015		Rata-rata pertumbuhan
		Juta Rp	% SILPA	Juta Rp	% SILPA	Juta Rp	% SILPA	
1.	Jumlah SILPA	1.172.785		842.496		485.536		-35,27
2.	Pelampauan penerimaan PAD	45.296	3,86	51.254	6,08	15.254	3,14	-28,54
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	306.722	26,15	22.547	2,68	59.114	12,18	34,77
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	48.939	4,17	-	-	-	-	-100,00
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	672.088	57,31	768.529	91,22	380.085	78,28	-18,10
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Tabel di atas memperlihatkan bahwa SILPA yang terjadi di Kota Samarinda selama tahun 2013 sampai 2015 lebih 50 persen disebabkan karena sisa penghematan belanja. Sedangkan sisanya karena adanya pelampauan penerimaan dari sisi pendapatan, baik PAD maupun perimbangan. Secara keseluruhan SILPA di Kota Samarinda rata-rata menurun sebesar 35,27 persen setiap tahun.

3.2.2. Analisis kemandirian keuangan daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendanaan sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa model, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan daerah:

Rasio kemandirian keuangan daerah= $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100$





Tabel 3. 17
Rasio Kemandirian Keuangan Kota Samarinda

Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah	Rasio PAD/Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	188.813.379.533,48	1.625.517.111.893,03	11,62
2012	273.741.456.947,69	2.037.437.229.820,53	13,44
2013	338.158.272.078,65	2.897.913.178.370,90	11,67
2014	435.498.980.673,66	3.201.996.486.655,92	13,60
2015	419.745.787.641,33	3.271.435.107.059,60	12,83

Sumber : data diolah

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 terjadi rasio kemandirian keuangan tertinggi mencapai 13,60 dikarenakan adanya penurunan total pengeluaran daerah yang bersumber dari belanja modal. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan rasio kemandirian Kota Samarinda mampu diatas 10%.

Rendahnya rasio keuangan ini dapat terjadi karena peningkatan pengeluaran relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan peningkatan PAD. Meningkatnya pengeluaran akan menambah efisiensi biaya operasional pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi serta kebutuhan sosial, seperti prasarana transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2016-2021 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

a. Kerangka Penerimaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut proyeksi penerimaan daerah Kota Samarinda periode 2016-2021:



Tabel 3. 18
Proyeksi Pendapatan Daerah
(Juta Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penerimaan	2.937.243	2.905.289	2.892.157	2.895.064	2.921.166	2.960.990
	Pendapatan	2.937.243	2.905.289	2.892.157	2.895.064	2.921.166	2.960.990
A	Pendapatan Asli Daerah	436.345	456.664	480.819	506.333	540.514	573.895
	Pajak Daerah	261.795	277.511	296.103	313.533	335.287	347.923
	Retribusi Daerah	63.315	64.582	66.529	68.515	71.940	79.134
	Hasil Peng. Kekayaan Daerah dipisahkan	8.700	8.961	9.409	10.068	11.074	12.403
	Lain-Lain PAD Sah	102.534	105.610	108.779	114.218	122.213	134.434
B	Dana Perimbangan	1.666.076	1.577.057	1.501.054	1.437.642	1.386.538	1.347.604
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	950.917	902.182	857.751	817.365	780.790	747.807
	DAU	590.234	531.210	478.089	430.280	387.252	348.527
	DAK	124.925	143.664	165.214	189.996	218.495	251.270
C.	Lain-Lain Pendapatan Sah	834.823	871.568	910.284	951.089	994.113	1.039.492
	Hibah	0	0	0	0	0	0
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	304.986	326.335	349.179	373.621	399.775	427.759
	Dana Penyesuaian	209.877	214.074	218.356	222.723	227.177	231.721
	Bantuan Keuangan Provinsi	319.960	331.159	342.749	354.746	367.162	380.012

Sumber: BPKAD Kota Samarinda



b. Kerangka Belanja

Tabel 3. 19
Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kota Samarinda Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

NO	URAIAN	DATA TAHUN DASAR 2016	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
				2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	937.627	3,69	758.410	777.676	795.691	812.632	828.638
2	Tambahan Penghasilan PNS	304.822	7,16	209.336	207.976	207.109	205.864	205.069
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.052	-2,72	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
4	Belanja Bunga	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.393	-28,60	988	988	988	988	988
6	Belanja Bagi Hasil	0	0,00	0	0	0	0	0
B	Belanja Langsung							
1	Belanja Honorarium PNS Khusus Untuk Guru dan Medis	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	26,28	806	817	848	887	906
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya	60.184	9,83	41.255	43.022	44.614	46.067	47.407

NO	URAIAN	DATA TAHUN DASAR 2016	TINGKAT PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
				2017	2018	2019	2020	2021
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	6.309	10,61	4.944	5.092	5.221	5.334	5.435
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.404	65,69	1.971	2.108	2.145	2.169	2.203
C	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.315.791	1,99	1.222.247	1.256.763	1.279.951	1.300.004	1.320.486

Sumber: BPKAD Kota Samarinda



Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan rumusan total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan daerah di Kota Samarinda.

c. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil merupakan kemampuan sesungguhnya pemerintah Kota Samarinda untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbagi kedalam prioritas I, prioritas II, dan prioritas III. Melihat pertumbuhan SiLPA selama 3 tahun terakhir yang menunjukkan penurunan rata-rata 35 persen, maka untuk dengan angka pertumbuhan yang sama dapat dihitung proyeksi SiLPA dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Proyeksi SiLPA Kota Samarinda 2017-2021

No.	Uraian	Tahun Dasar (2016)	Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	56.235	-35,27	36.403	23.565	15.255	9.875	6.392
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-

. Kapasitas riil keuangan Kota Samarinda yang digunakan untuk mendanai program pembangunan prioritas I, II dan III tersaji pada tabel 3.19, berikut ini:



Tabel 3. 21
Proyeksi Kapasitas Riil Kota Samarinda Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	2.905.289	2.892.157	2.895.064	2.921.166	2.960.990
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	36.403	23.565	15.255	9.875	6.392
	Total penerimaan	2.941.692	2.915.722	2.910.319	2.931.041	2.967.383
	Dikurangi:	-	-	-	-	-
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.222.247	1.256.763	1.279.951	1.300.004	1.320.486
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.719.445	1.658.959	1.630.367	1.631.036	1.646.897

Sumber: BPKAD Kota Samarinda

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan wakil walikota. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritasw II, dan prioritas dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah priortas di atasnya terpenuhi.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Walikota terpilih sebagaimana dijanjikan pada kampanye pemelukada. Selain itu, alokasi anggaran juga harus disesuaikan dengan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti di bidang pendidikan mendapat alokasi dana 20 persen dari belanja daerah.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, serta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi sehingga memberikan dampak luas pada masyarakat sesuai dengan capaian visi dan misi. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menyederhanakan perhitungan, pendanaan prioritas I akan dihitung sesuai pagu total program pembangunan daerah atau program prioritas untuk mencapai sasaran RPJMD sebagaimana diuraikan di bab VII.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan



penjabaran dari analisis pada tiap bidang urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat. Program/kegiatan unggulan ini harus disesuaikan dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

Tabel 3. 22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Samarinda
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.719.445,03	1.658.958,87	1.630.367,30	1.631.036,34	1.646.896,62
	Rencana alokasi prioritas I dan II					
II	Belanja Langsung seluruh bidang urusan	1.461.528,28	1.410.115,04	1.385.812,21	1.386.380,89	1.399.862,12
II.a	Belanja langsung wajib mengikat	96.136,05	107.514,26	138.601,94	183.701,70	199.249,46
II.b	Jumlah prioritas I (Agenda Prioritas)	831.486,09	874.442,76	931.367,16	901.773,67	914.197,00
II.c	Sisa belanja langsung untuk prioritas II (II-II.a-II.b)	533.906,13	428.158,01	315.843,10	300.905,52	286.415,67
III	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Jumlah prioritas III (I-II-III)	257.916,75	248.843,83	244.555,10	244.655,45	247.034,49
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah.

Melalui penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, pemerintah Kota Samarinda dapat memberi prediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat Kota Samarinda. Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kota Samarinda. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional merupakan kesatuan permasalahan maupun peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat dan peluang yang harus dimanfaatkan sebagai penghambat lajunya pembangunan untuk kemudian dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan.

Hal tersebut akan menjadikan poin utama dalam merumuskan kebijakan sehingga perencanaan pembangunan mampu menjadi poros untuk menentukan prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda dalam periode jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi setiap permasalahan yang ada. Penuntasan permasalahan merupakan esensi tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah



mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Permasalahan pembangunan di Kota Samarinda dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Samarinda yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah kota akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Kota Samarinda. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking* dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama Kota Samarinda adalah **“belum diimplementasikannya pembangunan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh beberapa permasalahan pokok kota Samarinda sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal;
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional;
3. Rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda;
4. Masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan Kota Samarinda dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah:





Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kota Samarinda



Pengelolaan potensi sumber daya yang berada di Kota Samarinda merupakan realisasi dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah) dalam penyelenggaraan efisiensi pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun manusia harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang melingkupi pencapaian pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dan akan mampu disempurnakan dengan berbagai tahapan evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Permasalahan pokok pembangunan daerah akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:



1. Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal

Pemerintahan Kota Samarinda sebagai pelaksana inti perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas sebagai agen perubahan menuju sebuah reformasi pemerintahan berupa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, antisipasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pemerintahan, hingga peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur negara terutama pegawai pemerintahan Kota Samarinda. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN. Permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Opini BPK

Pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government*) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi dasar Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penilaian (opini) sebagai hasil kinerja pengelolaan keuangan Kota Samarinda.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selama lima tahun terakhir, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Samarinda menunjukkan tren yang mulai membaik. Hal ini dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 4. 1
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kota Samarinda Tahun 2011-2015

Tahun	Opini BPK
(1)	(2)
2011	Disclaimer





2012	WDP
2013	WDP
2014	WTP
2015	WTP

Tren positif yang ditunjukkan tidak semata-mata menandai bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Samarinda sempurna, dikarenakan banyak catatan yang kurang memadai terutama pada pengelolaan dan pelaporan aset. Hal inilah yang menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah Kota Samarinda untuk kedepannya.

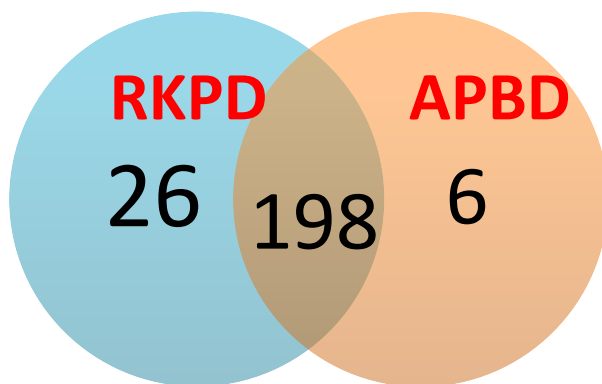
b. Belum terlaksananya perencanaan yang valid dan terukur terhadap pengelolaan keuangan daerah, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Persentase kesesuaian RKPD dengan PPAS

Pentingnya sebuah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perencanaan dan sisi penganggaran. Dari sisi perencanaan, RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan lebih rinci program-program jangka menengah walikota ke dalam program/kegiatan tahunan serta menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan sektoral. Dari sisi penganggaran, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS yang merupakan cikal bakal dari APBD, sehingga sinkronisasi antara kedua dokumen ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda baik dari sisi program maupun kegiatan.

Pada RKPD 2015 terdapat 224 program dan pada APBD terdapat 204 program, namun dari jumlah tersebut yang sama antara keduanya adalah 198 program (yang sesuai). Dengan demikian terdapat 6 program yang tidak ada pada RKPD. Keadaan tersebut dapat gambarkan pada tampilan diagram irisan dibawah ini:

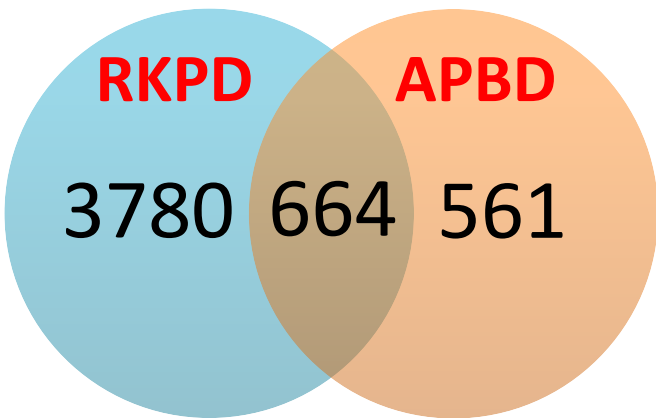
Gambar 4.2
Kesesuaian Program RKPD dan APBD
Kota Samarinda, 2015





Jika dipersentasekan, maka 97% program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD. Angka tersebut merupakan angka persentase dengan nilai yang tinggi dan menunjukkan bahwa level konsistensi dalam hal perencanaan program juga tinggi atau sangat baik. Namun konsistensi itu tidak berlaku pada level kegiatan. Dalam RKPD 2015 terdapat 4444 kegiatan dan pada APBD terdapat 1225 kegiatan, namun dari jumlah tersebut yang sama antara keduanya adalah 664 kegiatan (yang sesuai). Dengan demikian terdapat 561 kegiatan yang tidak ada pada RKPD. Keadaan tersebut dapat gambarkan pada tampilan diagram irisan dibawah ini:

Gambar 4.3
Kesesuaian Kegiatan RKPD dan APBD
Kota Samarinda, 2015



Jika dipersentasekan, maka 54,2% kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD. Angka tersebut merupakan angka persentase dengan nilai yang rendah dan menunjukkan bahwa level konsistensi dalam hal perencanaan kegiatan juga rendah. Dengan kata lain, pemerintah Kota Samarinda belum mampu menjaga konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD, dan hal inilah yang memicu permasalahan terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang cenderung bias dan tidak tepat sasaran.

- c. Rendahnya kualitas pelayanan publik, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat
- Inti dari diberlakukannya otonomi daerah adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Kesejahteraan masyarakat menjadi hasil akhir dari program-program pemerintah Kota Samarinda yang keseluruhannya dijabarkan



ke dalam berbagai kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat (publik). Oleh karena itu puas atau tidaknya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pelayanan dasar sangat berkaitan erat dengan urusan pemerintahan, dalam hal ini adalah urusan pemerintahan wajib. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa "urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda atas kualitas pelayanan yang diberikan, sudah seyogyanya seluruh urusan tersebut dilakukan penilaian melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Samarinda, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda, akuntabilitas merupakan salah satu asas yang harus di pegang teguh. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk menjamin kosistensi dan komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan asas akuntabilitas, maka setiap tahun seluruh stakeholder wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai dari level kecamatan hingga level kota yang selanjutnya dinilai oleh pemerintah pusat. Namun capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Samarinda dalam 5 tahun terakhir tidak memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 4. 2
Nilai LAKIP Kota Samarinda 2011-2014

Tahun	Nilai LAKIP
(1)	(2)
2011	DD
2012	C
2013	CC
2014	CC
2015	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda, 2014



Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3
Rumusan Permasalahan : Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal

Masalah	Akar Masalah
(1) Pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN perlu ditingkatkan	1. Tidak semua perangkat daerah melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi administrasi keuangan secara internal 2. Manajemen pengelolaan aset daerah belum terkelola dengan efektif dan efisien
(2) Belum terlaksananya perencanaan yang valid dan terukur terhadap pengelolaan keuangan daerah	1. Pembagian anggaran belanja pada SKPD masih belum menyesuaikan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan kota 2. Rendahnya peran PAD dalam menopang pendapatan daerah secara keseluruhan 3. Kesalahan fokus pemerintah yang masih menerapkan "<i>money follow function</i>"
(3) Rendahnya kualitas pelayanan publik masyarakat	1. Kurang optimalnya penggunaan <i>Standart Operational & Procedure</i> (SOP) dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik 2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan profesional di unit-unit pelayanan publik 3. Tidak meratanya sarana prasarana pelayanan publik yang representatif di kelurahan dan kecamatan
(4) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Samarinda	1. Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel 2. Tidak semua aparatur daerah mengerti target program dan kegiatan di unit kerjanya 3. Belum di terapkan secara nyata <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas capaian target yang mendukung program pemerintah 4. Masih banyaknya aparatur di tingkat pejabat eselon yang masih bekerja berbasis pada keluaran (<i>output</i>), bukan hasil (<i>outcome</i>) 5. Rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, RPJMD, dan RTRW) 6. Pembangunan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan RTRW

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional

Salah satu inti dari berdirinya suatu negara adalah adanya jaminan atas masyarakat yang berada di dalamnya mampu memenuhi kebutuhan agar tercapai kehidupan yang





sejahtera dari sisi sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan menyeluruh dan merata menjadi poin penting dalam perwujudan kehidupan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial ekonomi sehingga terjalin rasa kebersamaan dalam pemerataan menikmati hasil pembangunan.

Rendahnya daya saing SDM Kota Samarinda memiliki masalah inti yakni kualitas SDM yang belum berdaya saing. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kota Samarinda di nasional dan internasional. Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauhmana SDM Kota Samarinda dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di lingkup nasional. Kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda sampai saat ini mampu bersaing pada level provinsi, hal ini dapat terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempati peringkat dua di Kaltim dengan poin sebesar 78,39.

Perkembangan positif IPM Kota Samarinda tidak serta merta menjadikan pembangunan sumber daya manusia berhenti, namun beberapa kualitas di aspek lain harus ditingkatkan demi pemerataan kualitas di beberapa bidang atau sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kota Samarinda pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan dan kesehatan, terutama dari segi kualitas maupun infrastruktur penunjangnya.

Tabel 4. 4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30
2. Kutai Barat	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34
3. Mahakam Ulu	-	-	63,81	64,32	64,89
4. Kutai Kartanegara	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78
5. Kutai Timur	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76
6. Berau	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72
7. PPU	66,92	67,17	68,07	68,60	69,26



Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Balikpapan	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18
9. Samarinda	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69
10. Bontang	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78
Provinsi Kalimantan Timur	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia dipicu oleh akar masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

a. Tingginya pertumbuhan penduduk. Permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Kepadatan dan pertumbuhan penduduk

Permasalahan sosial yang menjadi fokus pemerintahan adalah mengenai permasalahan demografi di Samarinda. Kota Samarinda sebagai kota besar dan ibukota provinsi tentunya memiliki berbagai fasilitas yang paling lengkap dibanding kota-kota lainnya di provinsi Kaltim, mulai dari pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, hingga berbagai hiburan. Tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar daerah untuk dapat merasakan berbagai fasilitas tersebut, sehingga tidak mengherankan bila semakin tahun penduduk Kota Samarinda semakin bertambah dengan signifikan bahkan menjadi kota dengan penduduk terpadat di Kaltim. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 4. 5
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Paser	262.301	11.192,93	23,64
2	Kutai Barat	145.838	15.630,60	10,64
3	Mahakam Ulu	25.970	15.315,00	1,34
4	Kutai Kartanegara	717.789	26.348,95	27,62

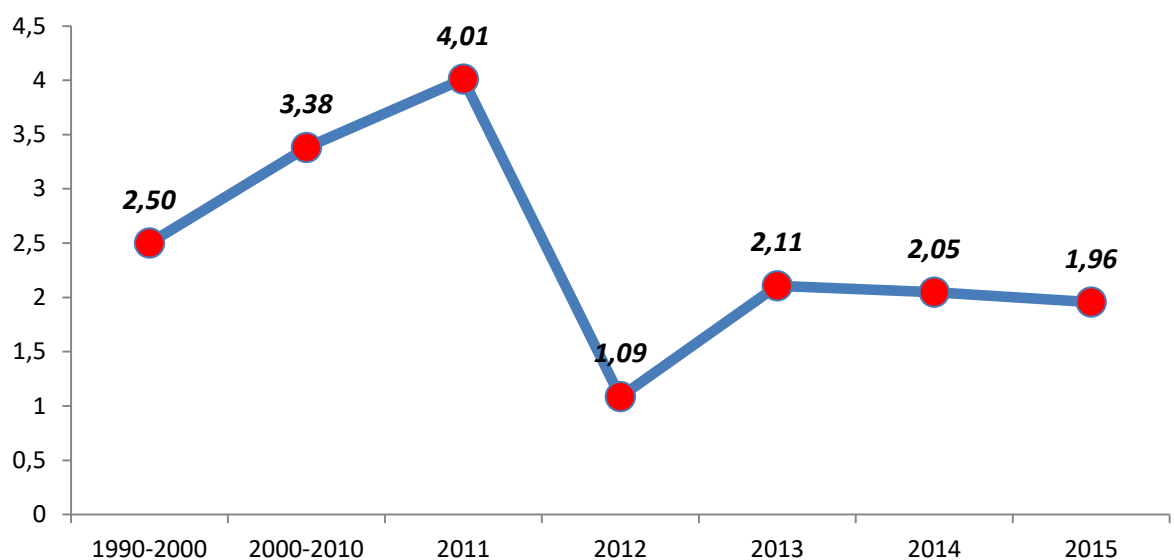




No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kutai Timur	320.115	31.896,49	10,31
6	Berau	208.893	22.200,33	9,61
7	PPU	154.235	3.211,55	52,75
8	Balikpapan	615.574	561,28	1.201,72
9	Samarinda	812.597	718,00	1.134,08
10	Bontang	163.326	192,56	1.001,13
Kalimantan Timur		3.426.638	127.267,52	26,91

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Gambar 4.4
Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda, 1990-2014



Dilihat dari tabel diatas, kepadatan penduduk di kota Samarinda menduduki peringkat kedua se Kalimantan Timur setelah Balikpapan. Jumlah penduduk di Samarinda sebanyak 812.597 jiwa, yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah Samarinda yang hanya 718 km², sehingga kepadatan penduduk mencapai 1.134,08 jiwa/km². Hal ini disebabkan banyaknya pendatang/imigran yang menetap di Samarinda untuk mencari pekerjaan. Namun bila mayoritas pendatang tidak memiliki cukup keahlian untuk masuk ke pasar kerja, maka dalam jangka panjang akan berkontribusi pada tingginya angka pengangguran.

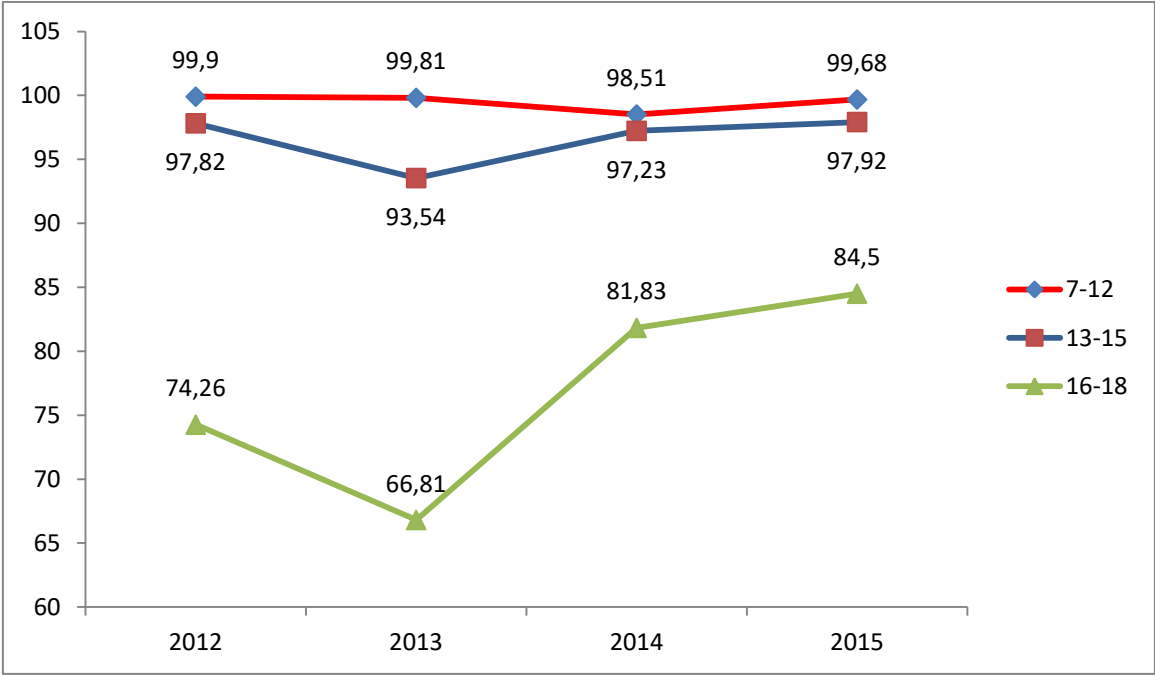


b. Belum meratanya pelayanan pendidikan. Permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Angka partisipasi sekolah

Daerah yang memiliki sumber daya manusia yang bermutu tentunya memiliki masyarakat yang berpartisipasi pada bidang pendidikan sesuai dengan rentang usianya. Banyak angka-angka yang dapat menggambarkan sejauh mana Kota Samarinda mampu memberikan pelayanan pendidikan yang merata keseluruhan masyarakatnya, salah satunya adalah Angka Partisipasi Sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) mampu menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah, semakin rendah APS pada jenjang usia tertentu, maka semakin rendah pula daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia tersebut. Pada tahun 2014 APS usia 7-12 tahun sebesar 98,51%, ini berarti masih ada sekitar 1,49% penduduk usia 7 tahun sampai 12 tahun yang tidak sekolah. Secara lengkap perhatikan gambar berikut :

Gambar 4.5
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kota Samarinda, Tahun 2012-2015



Melihat perkembangan diatas, maka pemerintah Kota Samarinda masih memiliki permasalahan pada penduduk usia 16-18 tahun, karena angka yang ditunjukkan adalah 84,5% yang artinya 15,5% penduduk dari usia 16 tahun sampai 18 tahun sedang tidak bersekolah. Maka dari itu sudah seyogyanya pemerintah Kota Samarinda memberikan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah diseluruh jenjang usia dengan





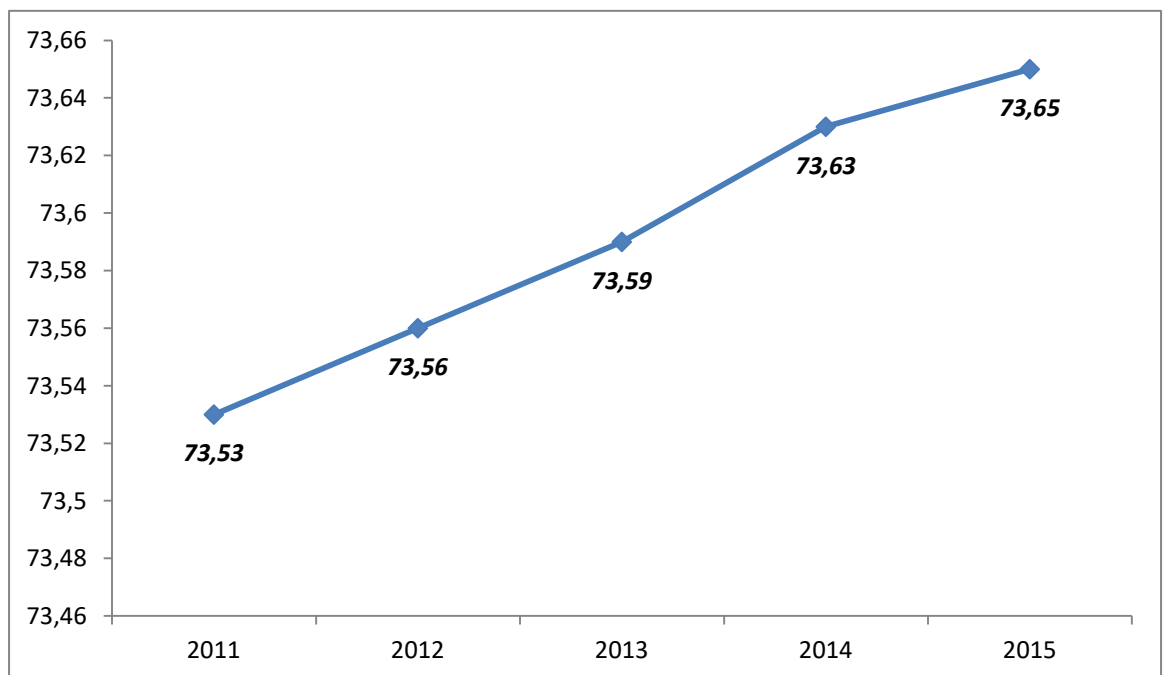
melakukan pemerataan sarana & prasarana sekolah serta tetap memperhatikan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.

- c. Kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih belum optimal. Permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1) Angka harapan hidup

Peningkatan setiap tahun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Samarinda menunjukkan keberhasilan program maupun kebijakan pemerintah terkait dalam bidang pembangunan kesehatan. Angka Harapan Hidup Kota Samarinda mencapai angka 73,65 tahun yang mengindikasikan bahwa setiap bayi yang lahir hidup pada tahun 2015 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 73-74 tahun.

Gambar 4.6
Angka Harapan Hidup Kota Samarinda, Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Samarinda adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masih kurangnya jumlah dokter spesialis dan distribusi jumlah dokter yang berkualitas kurang merata di beberapa wilayah menjadi salah satu permasalahan mengingat Samarinda menjadi rujukan kesehatan bagi Kabupaten/Kota lain. Jumlah dokter praktek pada tahun 2013 sebanyak 546. Pada tahun 2012, terdapat 24 puskesmas di Kota Samarinda dan hanya bertambah 2 sehingga terdapat 26 puskesmas pada tahun 2014. Jumlah poliklinik pada tahun 2011 sebesar 84 dan tidak ada penambahan jumlah poliklinik sampai tahun 2014 sehingga masih perlu peningkatan jumlah puskesmas dan poliklinik untuk menjembatani pelayanan dasar



kesehatan. Selain persebaran fasilitas kesehatan, jumlah dan kualitas baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan demi pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan. Diharapkan dengan semakin terpenuhinya fasilitas kesehatan, derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6
Rumusan Permasalahan: Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional

Masalah	Akar Masalah
1) Tingginya pertumbuhan penduduk Kota Samarinda	1. Banyaknya jumlah pendatang/migran ke Kota Samarinda 2. Belum banyak keluarga yang menerapkan program KB 3. Pendataan jumlah penduduk yang belum valid
2) Belum meratanya pelayanan pendidikan di Kota Samarinda	1. Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualitas berskala nasional 2. Tenaga pendidik dan kependidikan belum mengedepankan kualitas dan profesionalisme mengajar 3. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di setiap wilayah 4. Sarana prasarana penunjang pendidikan belum memenuhi standar minimal dan standar kelayakan secara nasional
3) Kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih belum optimal	1. Kurangnya tenaga kesehatan, tenaga medis, dan paramedis di puskesmas 2. Masih kurangnya dokter spesialis dan penempatan di tiap puskesmas 3. Masih perlu peningkatan jumlah Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu untuk menjembatani pelayanan dasar kesehatan pada masyarakat 4. Minimnya sosialisasi mengenai tindakan pencegahan penyakit oleh pemerintah terutama pada lingkungan-lingkungan kumuh 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyakit 6. Masih ditemukannya kasus balita kurang gizi, kematian ibu melahirkan, dan kematian bayi 7. Penerapan jaminan kesehatan yang ditujukan pada keluarga tidak mampu masih bias, dan cenderung tidak tepat sasaran





3. Rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda

Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan efektif. Selama 4 (empat) tahun awal data (2009-2013) jumlah produksi sampah Kota Samarinda mengalami peningkatan paling besar di tahun 2012 yaitu sebanyak 995.449 m³ dengan jumlah persentase volume sampah yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 22,33 persen dari 87 (2009) ke 64,67 persen (2012). Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penggunaan lahan seperti perdagangan dan jasa, industri, dan sebagainya pada tahun tersebut.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas penggunaan lahan di Kota Samarinda, volume sampah pada tahun 2014 meningkat sebanyak 932.025 m³, sehingga presentase sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Samarinda diharapkan setidaknya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 88,07 persen menjadi 93,73 persen atau naik sebesar 5,66 persen. Dengan demikian, rata-rata peningkatan persentase volume sampah yang dapat ditangani selama 6 (enam) tahun adalah 1,12 persen/tahun.

Tabel 4. 7
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	584.215	411.506	643.754	703.647	654.169
2.	Jumlah volume produksi sampah (m ³)	662.678	745.653	995.449	798.918	1.073.552
3.	Persentase (%)	88,16	55,19	64,67	88,07	60,94

Permasalahan lain yang memicu rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda adalah minimnya antisipasi bencana alam terkait penataan kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko ‘tinggi’.



Tabel 4. 8
Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi	Rangking Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda	94	Tinggi	1	39
Balikpapan	89	Tinggi	2	56
Kutai Kartanegara	65	Tinggi	3	175
Pasir	57	Tinggi	4	232
Tarakan	57	Tinggi	5	235
Kutai Barat	51	Tinggi	6	285
Kutai Timur	47	Tinggi	7	308
Nunukan	44	Tinggi	8	345
Bontang	34	Sedang	9	402
Penajam Paser Utara	33	Sedang	10	409
Malinau	29	Sedang	11	424
Berau	24	Sedang	12	433
Bulungan	24	Sedang	13	434
Tana Tidung	5	Rendah	14	475

Sumber: Profil Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2011

Permasalahan lainnya berkaitan penataan lingkungan kota adalah masih tingginya jumlah pemukiman kumuh sebagai dampak dari tingginya arus migrasi masuk ke Samarinda. Pemukiman kumuh di Samarinda telah terdata dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015.

Tabel 4. 9
Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1. Bantaran Sungai Karang Mumus (A1) Jl. Abdul Muthalib Jembatan S.Parman	90,62	Kumuh
2. Sungai Karang Mumus (A2) Jl.S.Parman-Jl.PM.Noor	202,25	Cukup Kumuh
3. BantaranSungai KarangAsamKecil(B) Kel.TelukLerong	30,24	Cukup Kumuh
4. BantaranSungai KarangAsemBesar(C)	50,20	Cukup Kumuh
5. SistemFolderHKecamatan Samarinda	2,50	Cukup Kumuh





Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Ulu	13,05 25,88	
6. BantaranSungai Mahakam(D) Kecamatan Samarinda Seberang	10,36	Cukup Kumuh
7. Lambung Mangkurat– Bandara Temindung(F)KelurahanPelita	30,70	Cukup Kumuh
8. BantaranSungai MahakamPalaran (G) KawasanPengembangan Baru	51,36	Cukup Kumuh
9. BantaranSungai MahakamSelili(E)	32,02	Cukup Kumuh
TOTAL	539,18	

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 413.2/028/HK-KS/I/2015

Untuk mempermudah dalam menyusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan Rendahnya Kualitas Penataan Lingkungan Kota Samarinda, maka perlu diperhatikan masalah pokok dan akar permasalahannya sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Rumusan Permasalahan: Rendahnya Kualitas Penataan Lingkungan Kota Samarinda

Masalah	Akar Masalah
(1) Titik banjir belum menunjukkan penurunan yang signifikan	1. Drainase perkotaan maupun lingkungan perumahan masih belum tertata dengan baik 2. Daya serap tanah semakin berkurang karena tingginya eksploitasi lahan di daerah hulu yang mayoritas karena usaha properti 3. Infrastruktur pengendali banjir belum berfungsi maksimal dalam menyelesaikan masalah banjir 4. Relokasi penduduk bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai bagian dari penanggulangan banjir belum terlaksana maksimal
(2) Minimnya antisipasi bencana kebakaran dan longsor	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari bahaya bencana kebakaran dan longsor 2. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran 3. Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap instalasi listrik lingkungan perumahan terutama pada kawasan perdagangan masih jarang dilakukan 4. Belum adanya upaya pengawasan dan peringatan dini pada wilayah-wilayah rawan longsor
(3) Belum diberlakukannya sistem antisipasi dampak negatif usaha perekonomian	1. Rehabilitasi wilayah eksploitasi tambang tidak berjalan sebagaimana mestinya 2. Pembuangan limbah berbagai sektor usaha yang belum sesuai AMDAL
(4) Masih terlihat permukiman kumuh di	1. Tidak terlaksananya penataan tepi SKM 2. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-



Masalah	Akar Masalah
bantaran sungai	kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang tepi sungai
(5) Pengelolaan persampahan belum berjalan dengan efektif	1. Belum idealnya proporsi peningkatan volume sampah dibanding sarana dan prasarana pengangkutan sampah 2. Belum maksimalnya pelaksanaan 3R (<i>Reuse, Recycle, Reduce</i>)

4. Masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai barometer perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Kaltim dalam menjalankan pergerakan roda perekonomian wilayah. Mengingat Kota Samarinda memiliki posisi wilayah yang strategis sehingga pemberdayaan setiap potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat dioptimalkan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah tentang PDRB ADHB Migas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur pada rentang 2011-2015. Berdasarkan tabel tersebut nilai PDRB Kota Samarinda berturut-turut sebesar 41,65 trilyun (2011); 41,24 trilyun (2012); 44,82 trilyun (2013); 48,25 trilyun (2014); dan 51,20 trilyun (2015). Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun tentu tidak melihat adanya masalah karena PDRB Kota Samarinda mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan daerah sekitar di dalam Provinsi Kalimantan Timur, PDRB Kota Samarinda masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah yaitu Kutai kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, dan Bontang.

Tabel 4. 11
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah)
Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	PDRB				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	33.744.783	35.093.422	36.916.267	39.249.886	38.274.547
2	Kutai Barat	18.423.951	21.500.739	21.956.103	21.265.561	21.088.071
3	Kutai Kartanegara	149.645.794	167.314.214	161.634.301	156.702.870	128.531.932
4	Kutai Timur	88.497.036	92.109.092	98.411.527	97.028.452	93.492.172
5	Berau	20.609.804	24.907.139	28.044.279	29.754.689	30.435.468
6	Penajam Pasir Utara	5.931.974	6.437.387	6.981.002	7.686.231	7.423.069
7	Mahakam Uu		1.526.012	1.573.480	1.775.786	1.938.663
8	Balikpapan	57.175.458	58.695.646	64.292.573	71.613.952	74.066.264



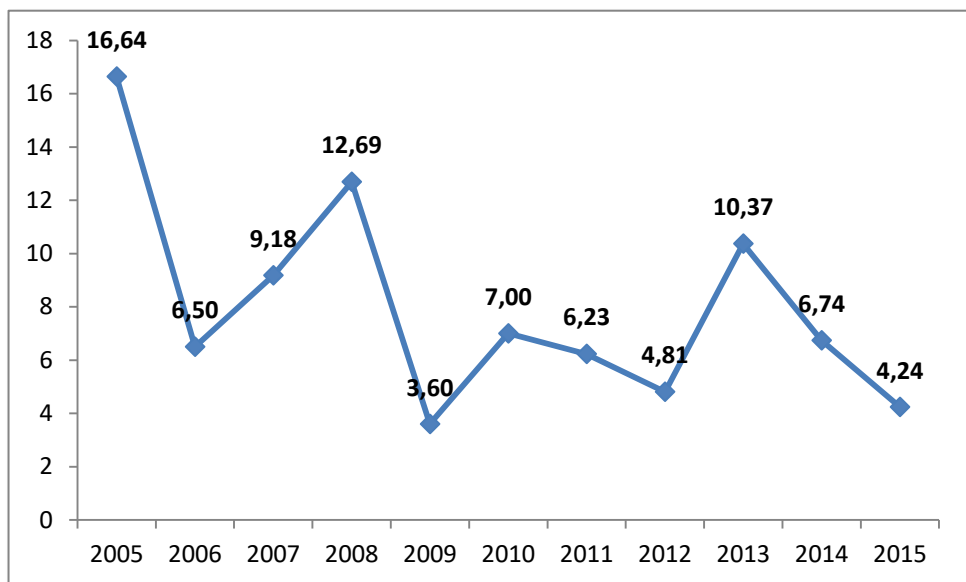


No	Kabupaten/Kota	PDRB				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Samarinda	41.648.707	41.242.818	44.824.302	48.250.237	51.195.737
10	Bontang	55.625.376	54.511.514	56.278.079	58.904.184	57.634.567

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2016

Laju inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu di suatu wilayah dengan memperhatikan pergerakan Indeks Harga Konsumen. Sebagai salah satu kota besar yang cukup tergantung dari komoditas luar daerah, Kota Samarinda memiliki pergerakan harga yang relatif cepat dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, laju inflasi tahunan Kota Samarinda cukup fluktuatif dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 laju inflasi mencapai 4,24 persen padahal tahun sebelumnya masih berada pada level 6,74 persen. Efek dari tingginya fluktuasi inflasi (harga) di Kota Samarinda akan berdampak pada spekulasi harga dan tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama kalangan bawah atau yang sering disebut rumah tangga miskin.

Gambar 4.7
Laju Inflasi Kota Samarinda, 2005-2015



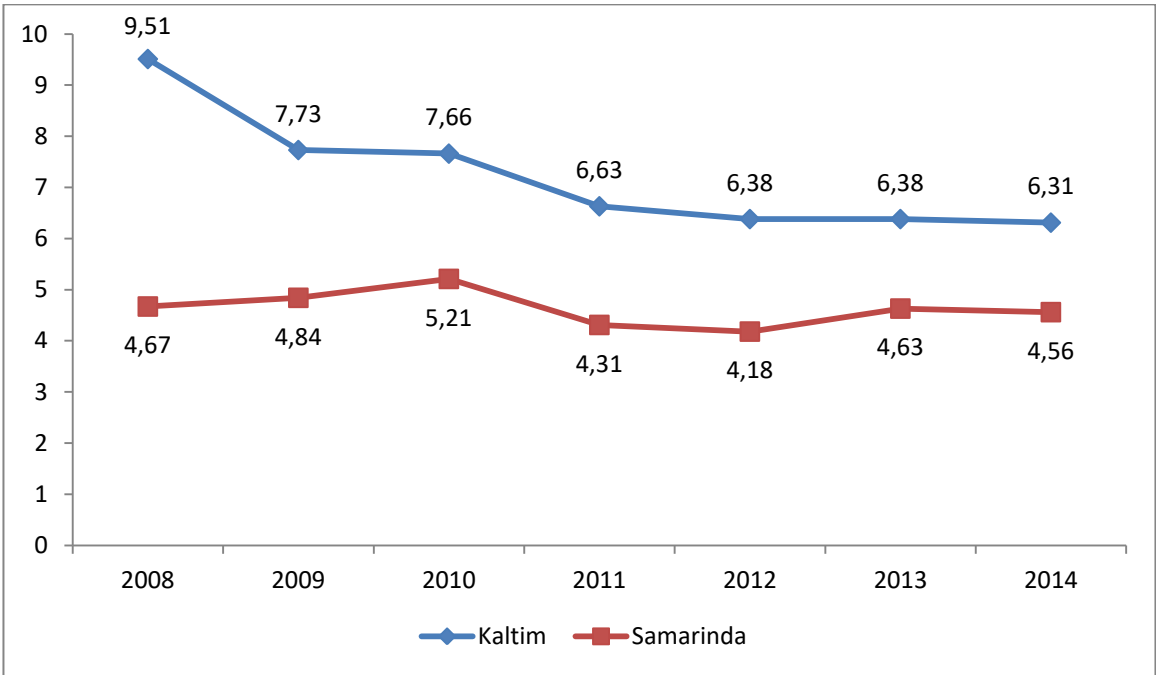
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pada gambar di bawah dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kota Samarinda masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Namun jika dilihat secara seksama maka tingkat kemiskinan di Kota Samarinda justru mengalami kenaikan walaupun masih di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan sebuah



masalah, karena dengan meningkatnya tingkat kemiskinan secara otomatis meningkat pula jumlah masyarakat Kota Samarinda yang berada di garis kemiskinan.

Gambar 4.8
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, 2008-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim, 2015

Pergerakan investasi dalam roda perekonomian di Samarinda cenderung masih lambat dan fluktuatif. Secara umum, selama periode 2010-2014, jumlah investasi baik PMDN maupun PMA meningkat sampai tahun 2013, namun menurunkembali pada tahun 2014. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kota Samarinda saat ini harus dapat memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Tabel 4. 12
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	19	1.981.994	8	1.249.372
2012	7	1.454.400	4	1.782.800
2013	70	1.874.000	5	2.565.500
2014	67	1.524.000	4	2.336.000
2015	91	16.263.581	4	3.135.000

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda, 2016





Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 13
Rumusan Permasalahan: Masih Rendahnya Peranan Perekonomian Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Masalah	Akar Masalah
(1) Kualitas perekonomian masyarakat miskin (kurang mampu) sulit berkembang	1. Sebagai daerah perkotaan, laju inflasi Kota Samarinda masih sangat fluktuatif di setiap bulannya 2. Efek domino kemiskinan terstruktur menurunkan kualitas tenaga kerja (minim skill) 3. Mindset masyarakat miskin yang ingin menjadi buruh/pekerja dan tidak memiliki keinginan untuk usaha mandiri (tidak mengerti masalah kewirausahaan) 4. Bantuan dan perlindungan sosial masyarakat miskin hanya berfungsi untuk menopang kehidupan primer dan tidak meningkatkan kesejahteraan secara umum 5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap sektor perdagangan terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat
(2) Masih rendahnya pendapatan masyarakat jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Samarinda	1. Masih banyaknya perusahaan yang menerapkan penggajian/upah di bawah standar UMK (Upah Minimum Kota) 2. Minimnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sehingga pembayaran upah rendah
(3) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum maksimal	1. Belum optimalnya pendampingan terhadap pelaksanaan UMKM oleh pemerintah 2. Masih terbatasnya investasi pada UMKM produk unggulan daerah 3. Minimnya pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan mandiri masyarakat
(4) Masih terjadi gejolak pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun	1. Masih cukup tinggi efek dari penurunan produksi sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan 2. Produktivitas sektor unggulan daerah belum ditingkatkan secara maksimal 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan potensi berbagai sektor lapangan usaha
(5) Pergerakan investasi dalam roda perekonomian cenderung masih lambat	1. Belum tercapainya iklim investasi sehat berskala nasional dan internasional 2. Monitoring dan pengawasan investor belum sepenuhnya berjalan dengan efisien terutama pelaku industri (transparansi, produk, keuangan, dan regulasi) serta investor sektor eksploitasi SDA
(6) Konektivitas pada beberapa wilayah	1. Penataan parkir belum efektif dan menyeluruh 2. Program rehabilitasi dan perbaikan jalan rusak belum



Masalah	Akar Masalah
cenderung tidak lancar	dapat diselesaikan secara keseluruhan, terutama di wilayah pinggiran kota 3. Banyaknya titik kemacetan di Kota Samarinda

4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang krusial terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Namun sebaliknya, jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki keterkaitan tak terpisahkan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan menjadi acuan untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan ku. Draft Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG s) untuk 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.





3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. alitas lingkungan yang baik.

B. *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *green economic global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Local Government on*



Blue Economy. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh pemerintah daerah Surabaya.

Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air.

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

C. Ancaman krisis ekonomi global

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbas pada krisis ekonomi. Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang, dikhawatirkan akan terjadi krisis yang sebentar lagi menghempaskan perekonomian Negara Indonesia. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Negara Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi sebuah negara, dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

D. Sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).





Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi.

E. Antisipasi menipisnya cadangan mineral dunia

Pada era pembangunan sekarang ini mineral sangat dibutuhkan dalam setiap pembangunan seperti emas, tembaga, timah, batubara, bijih besi, dan sebagainya. Mineral ini merupakan *supporting* bahan dalam pembangunan sehingga dengan banyaknya pembangunan yang sedang berlangsung di semua Negara, kebutuhan mineral akan semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi terhadap perkembangan perekonomian tanpa mengindahkan kualitas lingkungan hidup menjadi pembangunan berkelanjutan yang tidak menghilangkan etika pembangunan kualitas lingkungan.

F. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

4.2.2 Telaahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.



Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.





5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai ajaran Trisakti, untuk mewujudkan kesejahteraan yang nyata, kemerdekaan yang hakiki harus menghasilkan kedaulatan bidang politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Implementasi dalam penyelenggaraan perubahan diterjemahkan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA).

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan tahapan pelaksanaan. Pada dokumen perencanaan pembangunan nasional (pusat) terdapat prioritas atau agenda pembangunan (NAWA CITA) yang dalam pelaksanaan prioritas pembangunan ini harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Sehingga dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan pusat akan tercapai melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sembilan agenda prioritas pembangunan tersebut antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) diimplementasikan ke dalam berbagai sasaran yang terukur, serta dijabarkan ke dalam kegiatan strategis tersebar di seluruh wilayah NKRI,



tanpa terkecuali Kota Samarinda yang menjadi salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Adapun kegiatan strategis nasional yang berlokasi di Kota Samarinda adalah :

1. Pembangunan jalur KA antara Balikpapan-Samarinda;
2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda;
3. Pengembangan Bandara Samarinda Baru;
4. Pengembangan terminal peti kemas Palaran;
5. Pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan;
6. Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda;
7. Pembangunan jaringan gas kota di Samarinda;
8. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda;
9. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda;
10. Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda;
11. Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu-IPA Lok Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda;
12. Pengembangan Politeknik Negeri Samarinda (penguatan Program Studi Nautika);
13. Pengembangan puskesmas 24 jam menjadi RS Pratama (Diusulkan untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (lokasi perbatasan));
14. Pembangunan TPA Sanitary Landfill dan IPAL Kota Samarinda;
15. Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi, salah satunya Kawasan Sasamba (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kab.Kutai Kartanegara)

4.2.3 Isu atau Kebijakan Strategis Provinsi

Berdasarkan komitmen gubernur dan wakil gubernur terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS
AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”**

Kondisi yang ingin dicapai melalui pokok-pokok visi diatas adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Elemen Visi





Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan Visi. Selain itu, Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, isu strategis Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

- 1) Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- 2) *Mainstreaming* ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Sumber energi (BBM, Listrik, Air Minum, dsb) mulai menipis;
- 4) Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- 5) Kurangnya pengendalian ijin eksploitasi sumber daya alam;
- 6) peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- 7) Pencapaian MDG's; dan
- 8) Pencapaian MP3EI.

pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kedua belas prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:



1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pengembangan agribisnis;
8. Peningkatan produksi pangan;
9. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Seluruh agenda prioritas provinsi Kaltim menjadi strategis dalam pencapaian sasaran jangka menengah. Oleh karena itu agenda prioritas Kaltim kemudian dijabarkan kedalam kebijakan strategis yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim, terutama di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi. Adapun kebijakan strategis provinsi yang berlokasi di Kota Samarinda adalah :

1. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda sebagai salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
2. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda sebagai salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kota Samarinda menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda (Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan-KAPET SASAMBA), dan kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kota Samarinda diarahkan menjadi:

1. Kawasan Lindung Provinsi: Kebun Raya Samarinda;
2. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
3. Kawasan Industri;
4. Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
5. Kawasan Pariwisata;





6. Kawasan Perkotaan;
7. Kawasan Perdesaan.

4.2.4 Isu atau Kebijakan Strategis Kota Samarinda

1) Telaah RPJPD Kota Samarinda

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah yang harus diejawantahkan dalam sasaran dan arah kebijakan. Sasaran dan arah kebijakan akan menuntun pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan melalui penyelenggaraan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis yang relevan. Sasaran pembangunan perencanaan jangka panjang pada dasarnya adalah target kinerja dalam kurun waktu 20 tahun yang dicapai melalui *milestone* 5 (lima) tahunan sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahapan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan merupakan agenda yang menjadi fokus pembangunan lima tahunan dengan menguraikan sasaran pokok di setiap tahapannya.

Sasaran pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi RPJPD yang menjelaskan target indikator pembangunan jangka panjang pada akhir periode RPJPD. Sasaran akan menunjukkan capaian pokok pembangunan jangka panjang guna menjawab permasalahan pembangunan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, sasaran dapat menunjukkan wujud nyata dari apa yang dicita-citakan masyarakat dalam pembangunan jangka panjang sesuai visi dan misi yang disepakati bersama. Visi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda tahun 2005-2025 adalah :

“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”

Berdasarkan visi telah ditetapkan, dirumuskan misi untuk menunjang tercapainya visi RPJPD Kota Samarinda. Misi RPJPD kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. **Misi pertama, Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum**
2. **Misi kedua, Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah**
3. **Misi ketiga, Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri**

Prioritas pembangunan pemerintahan Kota Samarinda Tahap ketiga (2016-2021) dokumen RPJPD 2005-2025 adalah **pemantapan sektor unggulan daerah dengan pembangunan berkelanjutan** melalui arah kebijakan sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan
2. Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
4. Pertumbuhan produk perdagangan daerah
5. Peningkatan manajemen perkotaan menuju *smart city*
6. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha
7. Peningkatan ekspor komoditi unggulan
8. Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu
9. Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja
10. Pengarustamaan gender
11. Pembinaan Keluarga Berencana
12. Optimalisasi tata kelola jalan raya
13. Penyiapan Pembangunan infrastruktur pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman
14. Efektivitas pengendalian pencemaran udara di daerah aglomerasi perkotaan
15. Peningkatan kualitas sistem penanggulangan bencana alam
16. Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang Sustainable
17. Penerapan konsep *water front city* dengan membangun infrastruktur sungai
18. Pengembangan sistem drainase perkotaan
19. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi serta pasca eksploitasi lahan
20. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
21. Perbaikan jalan rusak
22. Pemerataan air bersih untuk rumah tangga
23. Efektivitas manajemen lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan
24. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi aktivitas masyarakat

Pencapaian pembangunan daerah khususnya pada tahap ketiga (2016-2021) diukur dengan indikator-indikator sasaran dan sasaran pokok yang telah tertuang di RPJPD Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Dengan adanya target pencapaian pada tiap indikator maka kegagalan dan keberhasilan pembangunan dapat terlihat. Terdapat 17 indikator sasaran beserta target capaian pembangunan tahap ketiga yang dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 4. 14
Indikator Sasaran dan Target Capaian Tahap Ketiga (2016-2021)
RPJPD 2005-2025

No	Indikator	Target Tahap 3 (2016-2021)
(1)	(2)	(3)
1	IPM	80,34
2	Angka melek huruf	100%
3	Rata-rata lama sekolah	11,21 tahun
4	Angka harapan hidup	73,44 tahun
5	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	Rp.1.883.974 per kapita
6	Persentase sektor perdagangan terhadap PDRB	46%
7	Persentase sektor jasa terhadap PDRB	12,72%
8	Tingkat inflasi	5%
9	Angka kemiskinan	3,67%
10	Angka pengangguran	6,49%
11	Nilai indeks gini	0,29
12	Nilai Adipura	Skor 72,90
13	Indeks pencemaran udara	51-100
14	Indeks pencemaran air sungai	11-30 cemar sedang
15	Jumlah lokasi banjir	40
16	Persentase ruang terbuka hijau	≥ 10%
17	Persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW	≥ 30%

Sumber : RPJPD Kota Samarinda 2005-2025

2) Isu Strategis Kota Samarinda

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus



dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Kota Samarinda siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Kota Samarinda setara dengan kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun International. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM ini adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Samarinda dapat diminimalisir.

b. Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan pada hakekatnya adalah pembangunan pada sektor ekonomi yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, untuk mendukung deklarasi Kaltim Green sebagai cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan, maka dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Samarinda harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup terutama “pengereman” eksploitasi pertambangan dan penggalian. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

c. Pemerataan kesejahteraan masyarakat (sosial ekonomi)

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan





sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdorong dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

d. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Kota Samarinda dikarenakan berkurangnya lahan pertanian karena pengalihan fungsi lahan yang potensial terhadap bahan pangan menjadi lahan untuk sektor industri maupun sektor pertambangan (batu bara). Selain pada masalah lahan, Keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan perlu alur pendistribusian yang didukung dengan infrastruktur memadai sehingga memperlancar pendistribusian pangan dari produsen ke konsumen.

e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan maupun perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional.

Kerusakan lingkungan hidup telah hadir di perumahan seperti kelangkaan air bersih, pencemaran air dan udara, banjir dan kekeringan, serta energi yang semakin mahal. Individu/masyarakat yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar-sektor, antar-aktor, antar-institusi, antar-wilayah dan bahkan antar-negara.

Seiring perjalanan waktu, masyarakat Kota Samarinda harus mengenal tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan yang mampu membawa masyarakat secara merata memperoleh kebutuhan hidupnya, baik materiil atau spiritual, termasuk kualitas lingkungan yang layak huni.

f. Penataan ruang kota dan wilayah termasuk infrastruktur di dalamnya

Penataanruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap suatu wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Melirik dinamika yang sedang berkembang pada problematika Kota Samarinda, penataan pola tata ruang kota dan wilayah perlu dioptimalkan lagi sehingga Kota Samarinda sebagai ibu kota Kota Samarinda akan mengefisiensikan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan



penataan ruang kota dan wilayah dan pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat, pergerakan segala aspek kehidupan masyarakat Kota Samarinda dapat lebih optimal.

g. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

h. Rehabilitasi kawasan strategis kota (wisata, niaga, jasa, hingga klaster industri kreatif)

Kota Samarinda merupakan wilayah yang berada dalam pusat pemerintahan sebagai ibu kota Kota Samarinda. Melihat urgensinya, pembangunan Kota Samarinda tidak mungkin terelakan dengan beberapa sorotan capaian pembangunan terutama pembangunan kawasan strategis Kota Samarinda seperti sektor pariwisata, niaga, jasa dan klaster industry yang belum berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, menilik posisi Kota Samarinda yang menjadi salah satu poros penting, maka perlu adanya rehabilitasi pada kawasan strategis Kota Samarinda. Hal ini disebabkan karena pada kawasan inilah perekonomian dari lapisan bawah hingga atas dapat ikut berkembang sehingga rehabilitasi kawasan strategis Kota Samarinda akan mampu mendukung konsistensi perekonomian masyarakat Kota Samarinda.

Tabel 4. 15
Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Jangka Menengah Kota Samarinda

Permasalahan	Isu Strategis	
Reformasi birokrasi belum berjalan optimal	1	Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh
Rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional	2	Peningkatan SDM





Permasalahan	Isu Strategis	
Rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda	3	Penataan ruang kota dan wilayah termasuk infrastruktur di dalamnya
	4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5	Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan
	6	Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan
	7	Pemerataan kesejahteraan masyarakat (sosial ekonomi)
	8	Rehabilitasi kawasan strategis kota (wisata, niaga, jasa, hingga klaster industri kreatif)



BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, visi misi dalam RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan arah kebijakan tahap ketiga RPJPD yaitu : ***“Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan”***.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

5.1 VISI

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Sehingga diharapkan seluruh stake holder yang ada di Kota Samarinda bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya khususnya kepada seluruh SKPD terkait untuk menyelaraskan dan mensinergikan program-program yang dimilikinya dalam mewujudkan visi RPJMD Kota Samarinda 2016-2021.

5.1.1. Penjelasan VISI

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah **Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan**. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah



penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025. Oleh karena itu, metropolitan yang diharapkan dapat terwujud di Kota Samarinda dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Aspek Sosial

Pembangunan aspek sosial di Kota Samarinda pada dasarnya ditujukan untuk penguatan masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan, yang dapat menempati fungsi sebagai subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan sehingga menjadi tolok ukur daya saing.

Aspek sosial yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang di Kota Samarinda harus sejalan dengan kondisi yang diharapkan dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025, yang garis besarnya adalah :

- Peningkatan derajat kesehatan baik individu, keluarga, maupun lingkungan
- Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun keterampilan/skill yang menunjang pengembangan potensi diri
- Peningkatan perekonomian diri dan keluarga melalui pendapatan yang sesuai untuk mencapai hidup layak
- Peningkatan modal sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti akhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter moral individu

2. Aspek Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasinya, maka dalam periode lima tahun mendatang pemerintah Kota Samarinda harus melaksanakan program pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi.

Kondisi yang diharapkan dalam pembangunan ekonomi lima tahun mendatang antara lain :

- Pergerakan yang konsisten pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada besaran kontribusi nilai tambah per sektor maupun pertumbuhan sektoralnya





- Kelancaran dan kenyamanan distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien untuk mengontrol inflasi
- Adanya komoditi-komoditi unggulan yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan

3. Aspek Lingkungan

Pembangunan lingkungan di Kota Samarinda didasarkan pada tingginya pengaruh keasrian dan kenyamanan lingkungan dalam pencapaian aspek ekonomi dan aspek sosial. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi segenap elemen pembangunan di Kota Samarinda dalam menerapkan wawasan lingkungan pada setiap program pembangunan lima tahun mendatang.

Pembangunan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat mewujudkan kondisi berikut :

- Rendahnya pencemaran lingkungan pada sungai dan udara
- Adanya sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan
- Pengendalian pembangunan berdasarkan RTRW

4. Aspek *Good Governance* dan keuangan daerah

Aspek ini memiliki daya dorong yang besar terhadap pembangunan secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan pada aspek *good governance* dan keuangan daerah merupakan hasil dari komitmen aparatur pemerintah Kota Samarinda dalam membangun kultur Transparansi dan kultur Profesionalisme. Kedua kultur ini yang menjadi dasar untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dalam pembangunan lima tahun mendatang pemerintah Kota Samarinda dapat memaksimalkan peran *stakeholder* pembangunan yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan swasta.

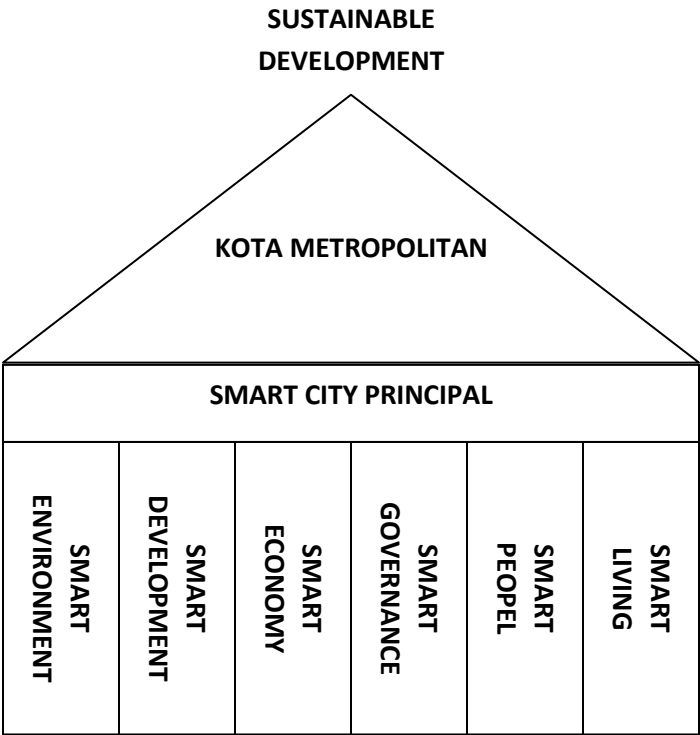
Pembangunan pada aspek *good governance* dan keuangan daerah diharapkan dapat mewujudkan kondisi berikut :

- Tersedianya aparatur yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan prima
- Adanya kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam membuat perencanaan yang taat asas dan melaksanakan pembangunan yang saling bersinergis, sehingga kesenjangan (*gap*) antara perencanaan dan pelaksanaan semakin rendah
- Keuangan daerah yang semakin mandiri dan fokus pada program prioritas (*money follow priority programs*)



Proses mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berpondasikan smart city untuk periode 2016-2021 dapat dilihat pada hubungan berikut :

Gambar 5.1.
Keterkaitan Smart City Principal, Kota Metropolitan, dan Sustainable Development

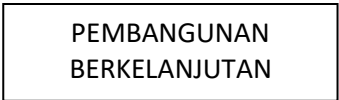


Pembangunan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan diarahkan pada 2 (dua) pokok pembangunan yaitu kota metropolitan yang berdaya saing, dan kota metropolitan yang berwawasan lingkungan sebagaimana digambarkan berikut :





Gambar 5.2.



Penjelasan dua pokok pembangunan sebagai visi pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kota Metropolitan yang berdaya saing

Kota Metropolitan yang berdaya saing memberi pandangan bahwa Kota Samarinda pada lima tahun mendatang berupaya untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi dan aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan, dan mengusahakan untuk keduanya berjalan secara komprehensif. Daya saing tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial hanya akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga pada akhirnya menurunkan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan apabila pembangunan kota hanya di fokuskan pada pembangunan manusia saja tanpa diimbangi dengan pembangunan ekonomi maka akan menyebabkan roda perekonomian bergerak lambat, bahkan cenderung tidak berputar karena minimnya investasi swasta sebagai penyerap sumber daya manusia.

Kota Metropolitan yang berdaya saing pada intinya adalah upaya pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa, yang merupakan sektor tersier





setelah pertanian (primer) dan manufaktur (sekunder), melalui ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh masyarakat kota yang sehat, cerdas, berkualitas dan berkarakter. Kolaborasi ini diharapkan kedepannya dapat menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM secara bersama-sama memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

2. Kota Metropolitan yang berwawasan lingkungan

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan aspek lingkungan di Kota Samarinda ditujukan untuk menciptakan tatanan lingkungan yang nyaman sebagai penunjang produktivitas masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan fisik kota sebagai dampak pembangunan ekonomi.

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan menjadi dasar pemerintah Kota Samarinda untuk terus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara. Selain itu, kota metropolitan berwawasan lingkungan dijadikan prinsip pembangunan baik pembangunan yang berasal dari masyarakat, swasta maupun dari pemerintah sendiri, sehingga jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru merusak kualitas air, tanah dan udara. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar pembangunan yang dilakukan sekarang dapat pula dirasakan oleh generasi yang akan datang.

5.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut :





- 1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL DAN INOVATIF**
- 2. MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
- 3. MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI**
- 4. MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN**
- 5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL**
- 6. MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**

Penjelasan masing-masing dari arahan misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif

Pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan dasar dalam mengungkit kesuksesan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menerapkan 14 prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- 1) Wawasan ke Depan
- 2) Keterbukaan dan Transparansi
- 3) Partisipasi Masyarakat
- 4) Tanggung Gugat
- 5) Supremasi Hukum
- 6) Demokrasi
- 7) Profesionalisme dan Kompetensi
- 8) Daya Tanggap
- 9) Keefisienan dan Keefektifan
- 10) Desentralisasi
- 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
- 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan



13) Komitmen pada Lingkungan Hidup

14) Komitmen Pasar yang Fair

Gambaran perilaku pemerintah terlihat dari perilaku aparaturnya sebagai penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam proses perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda, harus dimulai terlebih dahulu dengan menyiapkan aparatur yang berintegritas, profesional dan inovatif kemudian diikuti dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sehingga menjadi sebuah sistem dalam pelayanan prima. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kepastian hukum dan akuntabilitas yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berhenti pada aparatur dan kelembagaan, namun lebih jauh lagi adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pengembangan IPTEK. Kolaborasi antara kualitas aparatur, kelembagaan, dan teknologi yang tinggi inilah merupakan gambaran Smart Government yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung Kota Metropolitan.

2. Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan

Dalam pasal 58 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 disebutkan "dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa upaya yakni:

1. Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan azas proporsionalitas, adil dan merata;
2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik ;





3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi azas manfaat ;
4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik ;
5. Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

3. Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian untuk mewujudkan Kota Samarinda yang Layak Huni diperlukan Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut: “Perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam penentuan tata ruang tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa ruang kota yang layak huni yang disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda diarahkan kepada penyediaan gambaran fisik kota yang representatif sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menempatinnya. Adapun gambaran ruang Kota Samarinda yang layak huni kedepannya harus memenuhi aspek berikut :

1. Ekonomi

- Transportasi umum yang memadai dan mudah ditemukan untuk mendukung produktivitas masyarakat

2. Sosial

- Tersedianya fasilitas umum dan sosial yang memadai bagi setiap orang

3. Lingkungan

- Minimnya bencana sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya
- Terbebas dari polusi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai (air bersih, sampah, limbah, dll).



- Mengurangi dampak pembangunan berupa emisi gas rumah kaca, urban sprawl, pemborosan sumber daya alam dan kerusakan alam.

4. Memantapkan Sektor Jasa dan perdagangan Sebagai Sektor Unggulan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki Kota Samarinda yang bertitik tolak pada sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

5. Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas Serta Berdaya Saing Nasional Dan Internasional

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kota Samarinda harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan





teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkannya berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kota Samarinda baik pendidikan formal disekolah maupun pendidikan informal diluar sekolah. Namun, masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga masyarakat berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kota Samarinda yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kota Samarinda bersifat komprehensif yang telah memertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah

6. Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda Yang Harmoni, Berbudaya Dan Religius

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral, berbudaya serta religius dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan

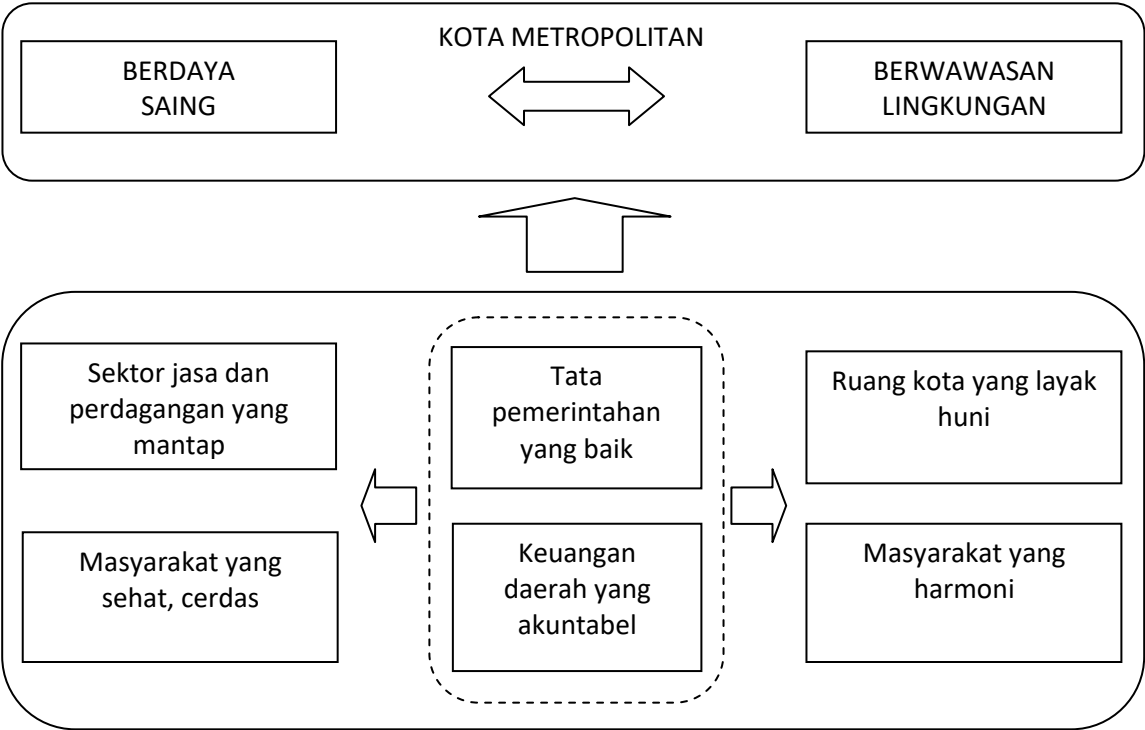


kombinasi antar nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri daerah tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah, Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan presentasi olah raga.

Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Samarinda menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarahannya budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

Untuk melihat konsistensi antara visi dan misi Kota Samarinda, maka dibuat keterkaitan elemen visi dan elemen misi sebagaimana yang diperlihatkan gambar berikut :

Gambar 5.3.
Keterkaitan Elemen Misi dengan Elemen Visi
Kota Samarinda





5.3 AGENDA PRIORITAS

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu adalah :

P1. Optimalisasi pengendalian banjir;

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas tinggi tersebut disebabkan oleh tidak tertampungnya limpasan air permukaan oleh jaringan pematusan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Bencana banjir di Indonesia sendiri merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Kota Samarinda merujuk dari RTRW tahun 2014-2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai. Selain itu, curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa titik jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sampah diparit-parit sehingga menghambat aliran air jika terjadi banjir/genangan. Kecamatan di Kota Samarinda yang termasuk wilayah tersebut, antara lain : Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu. Sumber genangan (banjir) di Kota Samarinda khususnya pada daerah hilir, dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Banjir kiriman, aliran banjir yang datang dari daerah hulu di luar kawasan yang tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya sehingga terjadi limpasan. Sebagai contoh lokasi yang sering mendapat banjir kiriman adalah daerah sekitar jalan Panglima Antasari. Banjir yang terjadi di daerah atas (hulu) yaitu di DAS Manggis dengan durasi 3–4 jam akan dapat menyebabkan banjir di daerah Jl. Antasari. Banjir yang terjadi akibat dari kapasitas alur sungai yang terbatas. Waktu tiba banjir yaitu perjalanan banjir dari daerah hulu sampai dengan terjadinya genangan di wilayah ini sekitar 4–5 jam.
2. Banjir lokal, genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Pada banjir lokal, ketinggian genangan air antara 0.2-0.7 m dan lama genangan bisa mencapai 3-5 jam. Tinggi genangan maupun lama genangan akan semakin besar apabila



pada saat hujan bersamaan dengan pasang sungai Mahakam. Kejadian banjir seperti ini hampir terjadi disemua daerah rendah.

3. Banjir akibat pasang sungai Mahakam, banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang dan/atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang. Banjir pasang merupakan banjir rutin akibat muka air sungai Mahakam pasang. Daerah yang mendapat pengaruh langsung dari air pasang sungai Mahakam tentunya daerah yang mempunyai ketinggian dibawah muka air pasang sekitar +1,58. Ketinggian genangan antara 0,20-0,50 m dengan lama genangan antara 2 hingga 4 jam.

Pada sepuluh tahun terakhir, banjir yang terjadi di Kota Samarinda semakin meningkat, baik besaran maupun frekuensinya. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya limpasan permukaan dari daerah tangkapan air, berkurangnya kapasitas saluran akibat sedimentasi dan hilangnya tampungan banjir alamiah berupa rawa-rawa.

Saat ini sebagian besar wilayah berkembang di Kota Samarinda telah terlayani oleh jaringan drainase. Konstruksi saluran drainase yang ada sebagian sudah berupa saluran dengan pasangan batu dan sebagian saluran tanpa konstruksi batu atau saluran tanah. Dari panjang saluran drainase yang ada di Kota Samarinda banyak saluran yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan sudah tidak berfungsi sebagai sarana pematuan air limpasan permukaan.

Beberapa masalah yang terkait dengan saluran drainase Kota Samarinda, seperti berikut :

1. Banyak saluran drainase yang pada saat perencanaan dahulu didesain mampu untuk mengalirkan air dari daerah tangkapan air namun sekarang kapasitas yang direncanakan tersebut sudah tidak mampu lagi. Dalam permasalahan ini kapasitas desain sudah tidak sesuai dengan debit limpasan yang terjadi.
2. Penurunan kapasitas alir saluran drainase akibat sedimentasi dan sampah yang masuk di saluran drainase. Kondisi ini banyak kita jumpai hampir diseluruh jaringan drainase yang ada. Sedimen yang ada di saluran berasal baik dari sekitar lokasi namun juga berasal dari daerah hulu terangkut aliran dan mengendap di lokasi hilir. Material sampah baik itu sampah organik maupun sampah non organik banyak menyumbat saluran drainase. Permasalahan ini tidak saja akan menghambat laju aliran namun juga mengurangi kapasitas saluran.
3. Hambatan utilitas kota juga merupakan salah satu permasalahan besar dalam sistem drainase Kota Samarinda. Banyak utilitas kota yang menghambat laju aliran drainase bahkan mengurangi kapasitas alir saluran drainase. Contoh yang mudah ditemui adalah



adanya tiang listrik milik PLN yang berada di dalam alur saluran drainase seperti yang ada di saluran drainase Jl. P. Antasari. Pipa air minum juga merupakan salah satu pengambat laju aliran dan mengurangi kapasitas saluran, khusus untuk pipa air minum biasanya akan menghambat laju aliran akan masuk gorong-gorong. Pemasangan pipa air khusus yang melintas gorong-gorong sepertinya tidak memperhitungkan dimensi dari gorong-gorong ataupun box culvert. Akibat dari kecerobohan ini pemasangan pipa tersebut tidak hanya menghambat laju aliran namun juga mengurangi kapasitas dimana akibat dimensi pipa tersebut maupun akibat sampah yang menyangkut pada pipa air tersebut.

4. Banyaknya bangunan infrastruktur baik itu yang sifatnya bangunan individu/pribadi maupun kelompok bangunan yang tidak dilengkapi dengan sarana drainase yang memadai/mencukupi. Kondisi yang demikian ini akan menyebabkan permasalahan kelancaran aliran permukaan dilokal area tersebut.
5. Masih belum tertatanya sistem drainase yang baik, dalam hal ini dimaksudkan bahwa tingkatan fungsi saluran belum tertata dengan baik, sebagai contoh saluran drainase primer dapat berfungsi sebagai saluran drainase lingkungan, belum adanya pemisah antara drainase permukaan dengan saluran air kotor dari rumah tangga. Selain itu saluran drainase yang ada banyak tertutup oleh plat jembatan rumah/toko, sehingga akan menyulitkan pemeliharaan saluran.
6. Masih sedikitnya fasilitas pendukung dalam sistem drainase kota seperti pintu-pintu air untuk memproteksi dampak kenaikan muka air di sungai terhadap saluran drainase, fasilitas pompa banjir yang masih sangat minim serta minimnya kegiatan operasi dan pemeliharaan fasilitas drainase.

Beberapa jenis bangunan/konstruksi yang dapat dikategorikan sebagai bangunan pengendali banjir antara lain :

1. WADUK BENANGGA

Waduk Benangga yang terletak di Sungai Karangmumus di desa Sei Siring, Kecamatan Samarinda Utara berjarak ± 15 Km dari Kota Samarinda arah ke Bontang. Konstruksi tanggul/tubuh bendungan dari urugan tanah homogen dengan puncak tanggul rata-rata pada elevasi +8,50, mempunyai 1 pelimpah utama dengan lebar 15 m dan sebuah pelimpah bantuan (darurat) dengan lebar 40 m serta sebuah intake irigasi. Pada awalnya waduk untuk suplai air irigasi, namun secara tidak langsung waduk ini berfungsi sebagai waduk/tampungan untuk mereduksi banjir yang masuk Kota Samarinda.



Luas daerah tangkapan air waduk ini sebesar 195 km² atau hampir 2/3 luas DAS Karangmumus. Mencermati kondisi yang ada saat ini daya reduksi banjir dari waduk Benangga masih dapat ditingkatkan, sehingga ancaman banjir ke daerah hilir lebih dapat diminimalisasi.

2. NORMALISASI SUNGAI

Kegiatan normalisasi sungai dapat dilakukan dengan cara penambahan kapasitas alir sungai maupun dengan pembenahan alur sungai yaitu dengan pelurusan, sudetan maupun penanggulan. Beberapa kegiatan normalisasi yang telah dilakukan terhadap sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda antara lain:

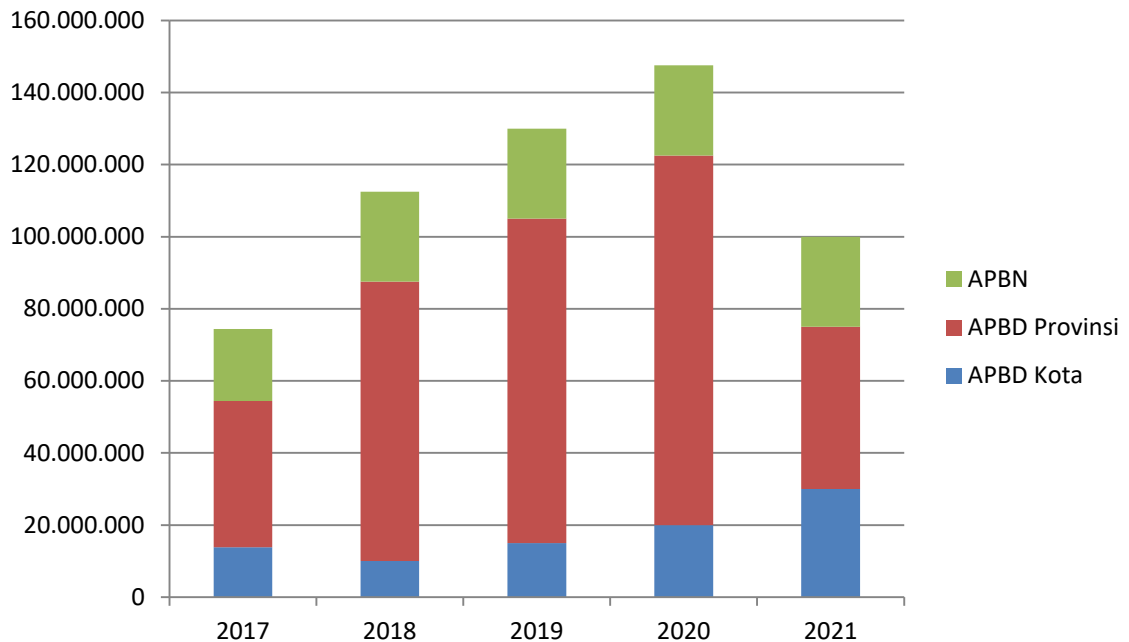
- a. Normalisasi sungai Karangmumus, yaitu dengan memperluas penampang basah alur yaitu dengan pengerukan dan juga pembenahan alur dengan pelurusan dan konstruksi parapet. Pembenahan ini dimulai dari daerah hilir sampai dengan Jembatan III.
- b. Normalisasi sungai Karang Asam Kecil, seperti halnya Sungai Karangmumus normalisasi sungai Karang Asam Kecil dilakukan dengan menambah kapasitas alir dan perkuatan tebing sungai dengan pasangan batu. Pembenahan alur sungai Karang Asam Kecil dilakukan di daerah tengah. Pembenahan di daerah hilir sangat dipengaruhi permasalahan sosial yang cukup berat.
- c. Normalisasi sungai Karang Asam Besar dilakukan dengan pembenahan alur sungai pada bagian tengah yaitu dengan pembersihan tanaman liar di alur sungai dan juga pengerukan pada daerah endapan.
- d. Normalisasi sungai Loa Bakung dilakukan dengan pembenahan alur sungai pada bagian hilir (di daerah perumahan Loa Bakung), yaitu dengan perkuatan tebing dari pasangan batu yang di plester. Namun demikian bagian hilir sungai Loa Bakung belum dilakukan pembenahan seperti pada bagian tengah. Mencermati kondisi yang demikian ini maka besar potensi terjadi pelambatan arus akibat kapasitas alur yang tidak memadai.

Adapun rencana kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan banjir melalui normalisasi sungai dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 5.4.
Rencana Kebutuhan Pembiayaan untuk Normalisasi Sungai



3. KOLAM RETENSI

Di wilayah Kota Samarinda terdapat 2 buah sistem kolam retensi yaitu kolam retensi Vorvo dan kolam retensi Air hitam. Kolam Retensi ini bertujuan untuk menampung sementara limpasan banjir yang berada pada kawasan tersebut sebelum masuk ke sungai alam.

Berdasarkan pengamatan saat terjadi banjir di wilayah ini, kinerja dari kolam retensi ini masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang ada yaitu masih terjadinya genangan di daerah ini serta waktu genangan masih cukup lama saat terjadi banjir, demikian juga aliran yang ada di saluran kurang lancar karena kapasitas kolam yang terbatas.

Kolam retensi Air Hitam terletak di kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Utara. Daerah tangkapan yang akan direduksi oleh kolam Air Hitam seluas 4,5 Km². Kolam mempunyai luas daerah genangan 9 Ha, volume tampungan 195.000 m³ yang dilengkapi dengan kolam/kantong lumpur.

Terdapat dua inlet yaitu untuk jalan air masuk dari daerah tangkapan air sepanjang saluran Jl. A.W. Syahrani dan sebuah inlet untuk menangkap air dari saluran Jl. Kadrie Oning. Kolam dilengkapi dengan sistem pompa dan outlet berupa pelimpah dan pintu pengatur. Daya reduksi banjir kolam Air Hitam terhadap ancaman banjir di sekitar



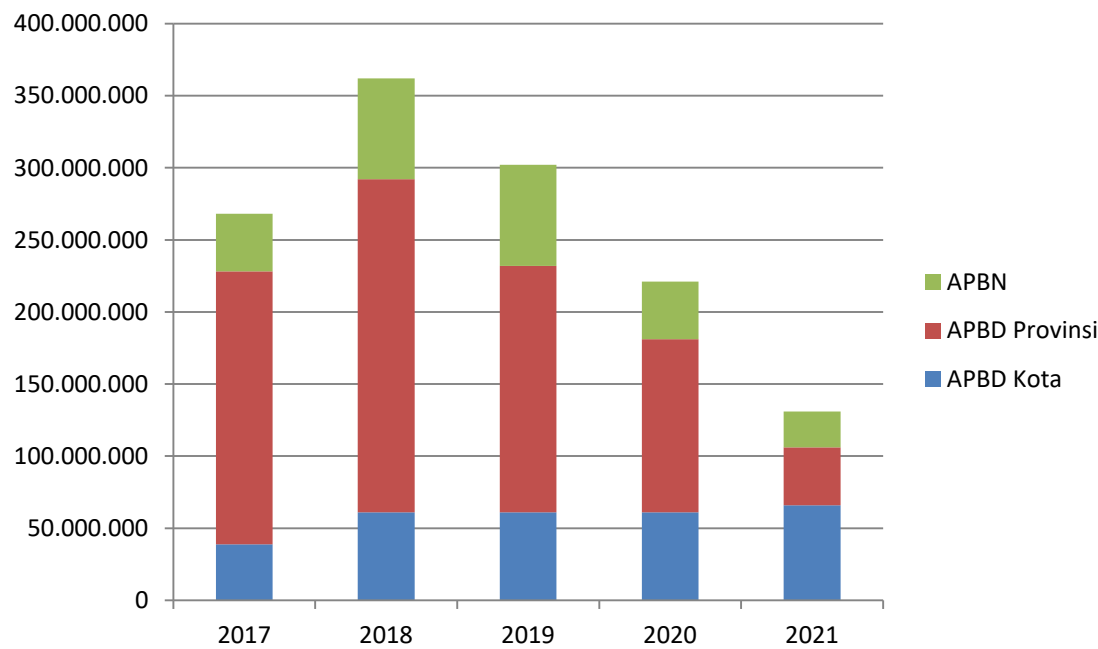
kawasan Air Hitam direncanakan sebesar 85%. Keluaran air dari kolam ini akan masuk ke sistem sungai Karang Asam Kecil. Pada saat studi ini dilakukan konstruksi kolam retensi Air Hitam masih dilaksanakan. Dengan selesainya konstruksi kolam ini diharapkan nantinya beban banjir yang masuk sungai Karang Asam Kecil akan dapat dikurangi

4. SALURAN BANJIR

Terdapat sebuah saluran banjir yang ada di Kota Samarinda yaitu saluran Banjir untuk mengurangi beban banjir sungai Sempaja di wilayah Stadion Madya Sempaja, yaitu saluran Jl. Palingma M. Noor. Pada awal perencanaan saluran ini dilengkapi dengan kolam tampungan banjir sementara di dekat muara saluran yaitu pertemuan saluran dengan sungai Karangmumus. Kolam ini sebagai tampungan sementara pada saat air dari sungai Sempaja tidak dapat masuk ke Sungai Karangmumus saat banjir atau air di Sungai Karang Mumus tinggi.

Adapun rencana kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan banjir melalui normalisasi saluran banjir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.5.
Rencana Kebutuhan Pembiayaan untuk Normalisasi Saluran Banjir



Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 1 yaitu **Optimalisasi pengendalian banjir** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir, dengan sasaran :
 - Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM





P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada pengetahuan mereka tentang kesehatan yang berguna sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Selain itu ketika sakit, maka sejauh mana mereka mendapat pengobatan secara cepat dan berkualitas. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Indikasi seseorang sejahtera antara lain memiliki tubuh yang sehat dan hidup dilingkungan yang sehat pula. Pemerintah kota samarinda berkomitmen mewujudkan Samarinda sebagai Kota Sehat dan Bebas Narkoba, oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan bahaya narkoba serta lebih mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan agar tindakan medis dapat lebih mudah menjangkau masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 2 yaitu **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran :
 - Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba

P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius;

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) oleh Pemerintah Kota Samarinda, baik melalui upaya pendidikan maupun latihan ditujukan untuk menghasilkan SDM yang Profesional karena memiliki kualitas dan etos kerja, Berkarakter karena berintegritas dan berdedikasi, serta Religius karena telah dibekali ilmu agama yang cukup dan sanggup mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan SDM yang profesional, berkarakter dan religius ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta serta pendidikan lainnya yang memiliki kearifan lokal seperti Pesantren.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 3 yaitu **Pengembangan Bidang Pendidikan untuk Menghasilkan SDM yang Profesional, Berkarakter dan Religius** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau serta berdaya saing, dengan sasaran :
 - Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas



- Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
- Fasilitas bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren

P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

Pembangunan infrasturuktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di daerah. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu pembangunan di sektor ini, menjadi fondasi dari pembangunan infrastruktur di daerah.

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti : Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Dalam setiap pembangunan jenis infrastruktur tidak dapat terlepas begitu saja terhadap infrastruktur yang sudah ada maupun kemungkinannya untuk rencana pengembangan kedepan.

Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 4 yaitu **pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan** memiliki tujuan sebagai berikut :





- Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, dengan sasaran :
 - Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota
- Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih
- Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan, dengan sasaran :
 - Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)

P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendahnya kesempatan kerja yang ada. Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Sebab UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 5 yaitu **Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
 - Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya



P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif;

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memberikan amanat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Selanjutnya Tanggungjawab pemerintah daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 6 yaitu **Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengurangi dampak resiko bencana, dengan sasaran :
 - Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana

P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan;

Pada prioritas pembangunan ini dimaksudkan mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan melibatkan secara optimal segenap lapisan masyarakat untuk berperan aktif pada organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang tumbuh dilingkungannya. Setiap masyarakat didorong agar dapat berperan sebagai subyek pembangunan, khususnya pada bidang-bidang keagamaan, seni budaya, keolahragaan, pengarusutamaan gender dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Jika setiap masyarakat dapat menjadi subyek dalam pergerakan roda pembangunan, maka pada tahap berikutnya diharapkan mereka akan menjelma sebagai agen perubahan kearah yang lebih baik dilingkungan masing-masing. Agar pemberdayaan





segenap lapisan masyarakat dapat terwujud, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang ada serta menyiapkan regulasi yang jelas agar peran serta masyarakat berjalan di jalur yang benar demi kebaikan dan kemajuan bersama.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 7 yaitu **Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana
 - Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif

P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah;

Dalam mewujudkan pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan, daerah dituntut bukan hanya kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun juga dituntut untuk melakukan pembenahan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien & akuntabel. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pola anggaran yang tertuang dalam APBD memiliki dua komponen, yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 8 yaitu **Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan, dengan sasaran :



- Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel

P9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum: Peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkhis, serta memastikan perda yang ada dijalankan dan ditegakkan melalui pengawasan serta penegakan hukum bagi yang melanggar.
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Pemerintah Kota Samarinda dengan segenap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan harus senantiasa terjalin suatu hubungan keteraturan dan keseimbangan antar lembaga. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi *conflict of interest* (benturan kepentingan) dan *conflict of authority* (benturan tugas dan kewenangan). Kondisi ini akan diwujudkan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui pertemuan secara rutin dalam bentuk FGD maupun pertemuan non formal lainnya.
- 3) Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas ini sangat urgen untuk diterapkan khususnya pada berbagai sektor pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan,





pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pendidikan di kota Samarinda. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintah Kota Samarinda secara perlahan menyediakan arapatur yang profesional dan kompeten. Hal ini merupakan langkah pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan kultur profesionalisme dalam seluruh pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pendukung pelayanan publik, pemerintah Kota Samarinda kedepannya akan menerapkan pelayanan publik berbasis IT melalui *e-government*.

- 4) Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Setelah era reformasi mulai bergulir sejak 1998, tuntutan yang terbesar dari penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah keterbukaan (transparency). Oleh sebab itu asas keterbukaan ini juga harus dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penerapan kultur transparansi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 9 yaitu

Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan sebagai berikut :

- Memantapkan reformasi birokrasi, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, keterkaitan antara misi dengan agenda prioritas Kota Samarinda tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5.6.
Keterkaitan Misi dan Agenda Prioritas Jangka Menengah



Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berbagai pendekatan. Oleh karena itu, penentuan agenda prioritas, tujuan dan sasaran selain sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah, harus juga memerhatikan dokumen-dokumen di atasnya, dalam hal ini adalah RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018 dan RPJMN 2014-2019. Berdasarkan agenda prioritas, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat dilihat keterkaitan antara sasaran dan agenda prioritas pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Kaltim, dan pembangunan Kota Samarinda





sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Nasional, Provinsi Kaltim, dan Kota Samarinda

Sasaran Utama Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim	Sasaran Pembangunan Kota Samarinda
Sasaran Makro	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas
	Meningkatnya Pendapatan per Kapita	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang pariwisata & ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan, serta usaha jasa lainnya
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
	Menurunnya Indeks Gini	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah	- Meningkatnya pendidikan yang berkualitas - Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah - Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren
	Meningkatnya Angka Melek Huruf	
	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas Kota
	Tercapainya swasembada pangan	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang pariwisata & ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan, serta usaha jasa lainnya
	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan & Kota ramah lingkungan (Taman & RTH)
	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	
Sasaran Dimensi Pemerataan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang



Sasaran Utama Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim	Sasaran Pembangunan Kota Samarinda
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	pariwisata & ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan, serta usaha jasa lainnya
Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	- Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih - Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi tepi SKM - Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas Kota - Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	- Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan Akuntabel dan bebas korupsi - Meningkatnya Pendapatan & pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien & akuntabel
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	

Tabel 5.2
Keterkaitan Agenda Prioritas Jangka Menengah Pembangunan Nasional, Provinsi Kaltim, dan Kota Samarinda

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	- Optimalisasi pengendalian banjir - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan - Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif





Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Pengembangan Agribisnis	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Percepatan Transformasi Ekonomi	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Peningkatan Produksi Pangan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Optimalisasi pengendalian banjir - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan



Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda
		utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Melakukan revolusi karakter bangsa	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	- Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik - Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah - Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan

5.4 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

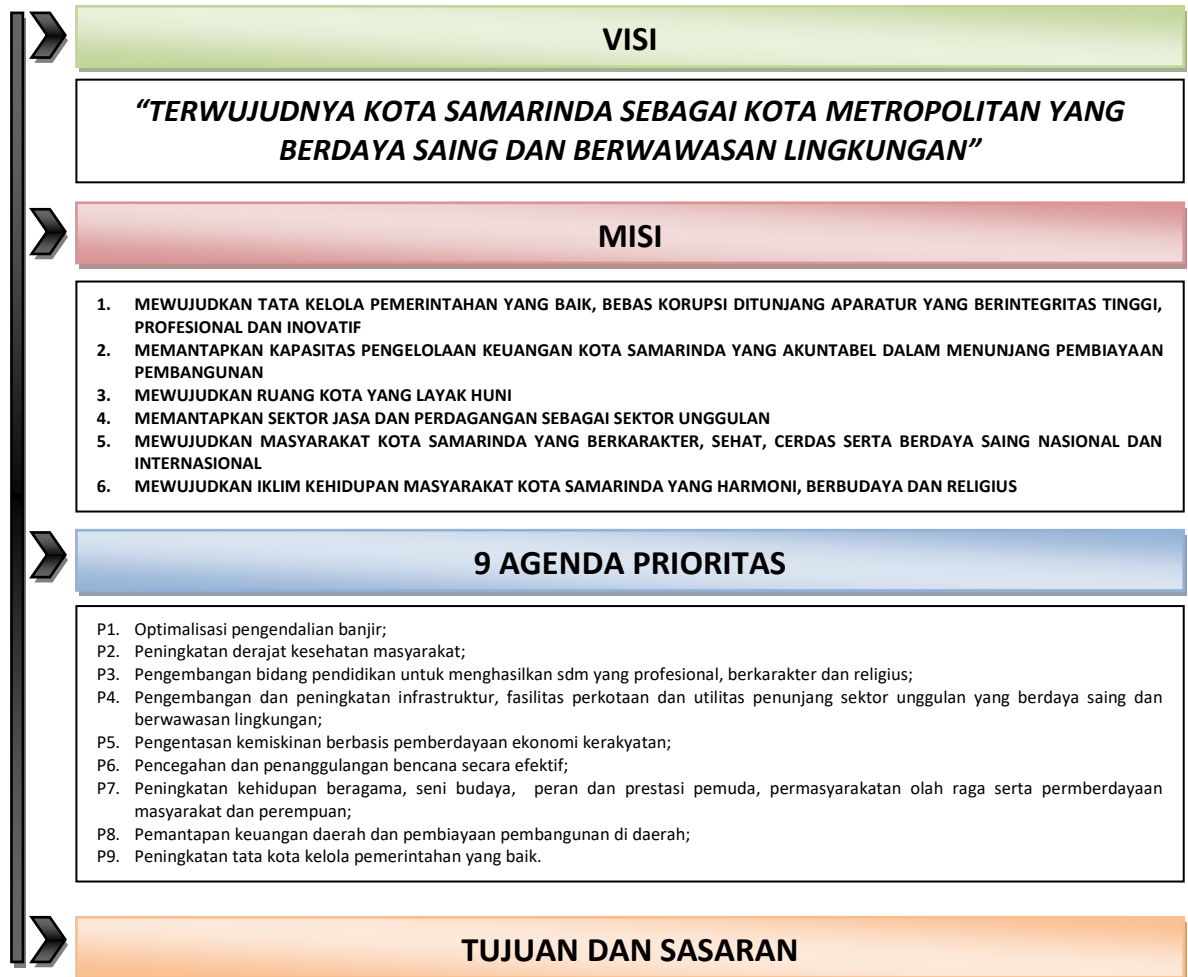
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi, agenda prioritas dengan perumusan tujuan dan sasaran, dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 5.7.
Skema Keterkaitan antara Visi, Misi, Agenda Prioritas
dengan Perumusan Tujuan & Sasaran



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.



Berdasarkan visi, misi, dan agenda prioritas sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi;
2. Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan;
3. Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir;
4. Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif;
5. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih;
6. Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan;
7. Mengurangi dampak resiko bencana;
8. Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan;
9. Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat;
10. Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau;
11. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Visi Kota Samarinda 2016-2021:
“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF										
P9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Memantapkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	0 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	73-100%	73-100%	73-100%	73-100%	73-100%	73-100%	73-100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
			Nilai LAKIP	CC	CC	B	BB	BB	A	A
			Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN										
P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah	Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhtadap LapKeu Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,03%	18,03%	19%	20%	25%	30%	30%
			Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	97,05% program, 54,20% kegiatan	98,07% program, 57,01% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100%
Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI										
P1. Optimalisasi pengendalian banjir	Mewujudkan Kota Samarinda bebas	Terlaksananya pengendalian banjir &	relokasi kaw.kumuh tepi SKM	0 segmen	0 segmen	1 segmen	1 segmen	2 segmen	2 segmen	6 segmen

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
	banjir	relokasi Tepi SKM	Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			titik lokasi banjir	50 titik	48 titik	46 titik	44 titik	42 titik	40 titik	40 titik
P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	65%	70%	75%	80%	90%	90%	90%
			Indeks Gini	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Berkurangnya titik kemacetan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60 %
			Meningkatnya produktivitas pertanian		3%	3%	3%	3%	3%	15 %
			Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW		5%	5%	5%	5%	10%	30 %
	Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Persentase RTH		≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
			Adipura	70,90	71,30	71,70	72,10	72,50	72,90	72,90
			Indeks Pencemaran Udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Pencemaran Sungai	≤ -31 Cemar berat	-11 s/d - 30 cemar sedang	-11 s/d - 30 cemar sedang	-11 s/d - 30 cemar sedang	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan
P6. Pencegahan dan	Mengurangi dampak resiko	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan	Menurunnya jumlah kasus kebakaran	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 25%

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
penanggulangan bencana secara efektif	bencana	penanggulangan bencana	Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 25%
Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN										
P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Pertumbuhan Ekonomi	4,59%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%
			Tingkat Inflasi	4,24%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%
		Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	Rp. 1.128.167	Rp. 1.150.600	Rp. 1.161.275	Rp. 1.171.950	Rp. 1.193.300	Rp. 1.203.975	Rp. 1.203.975
			Pendapatan Per Kapita	55,8 juta	61,7 juta	63,7 juta	67,6 juta	71,6 juta	75,6 juta	75,6 juta
			Angka kemiskinan	4,56%	4,22%	4,00%	3,86%	3,76%	3,67%	3,67%
			Angka Pengangguran	5,61%	4,86%	4,0-4,5%	3,5-4,0%	3,5-4,0%	3,0-3,5%	3,0-3,5%
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		16,32%	16,29%	16,29%	16,31%	16,36%	16,36%
			kontribusi sektor jasa terhadap PDRB		19,23%	20,72%	22,39%	24,29%	26,43%	26,43%
Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL										
P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Angka Harapan Hidup	73,63 tahun	73,66 tahun	73,73 tahun	73,76 tahun	73,80 tahun	73,87 tahun	73,87 tahun
			Kota Sehat	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara
			Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	46,86 2,42	76,19 2,17	68,57 1,95	68,03 1,75	67,49 1,57	66,96 1,41	66,96 1,41

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	75%	75%	80%	90%	95%	100%	100%
			Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
			Prevalensi Narkoba							
P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius	Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,16 tahun	14,63 tahun	14,89 tahun	15,16 tahun	15,43 tahun	15,99 tahun	15,99 tahun
			Angka Melek Huruf	98,62%	98,91%	99,14%	99,36%	99,58%	100%	100%
			IPM	78,39	78,47	78,82	79,17	79,53	80,34	80,34
			Rata-rata Lama Sekolah	10,26 tahun	10,47 tahun	10,54 tahun	10,65 tahun	10,70 tahun	11,21 tahun	11,21 tahun
			Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4	81,69% (SD); 90,94% (SMP)	82,09% (SD); 91,39% (SMP)	82,50% (SD); 91,84% (SMP)	82,91% (SD); 92,29% (SMP)	83,32% (SD); 92,75% (SMP)	83,73% (SD); 93,21% (SMP)	83,73% (SD); 93,21% (SMP)
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)
		Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0	0	100 Orang	150 Orang	175 Orang	200 Orang	200 Orang
Misi 6 :MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS										

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Wirausahawan Muda	25 orang	30 orang	33 orang	35 orang	38 orang	40 orang	40 orang
			Pertumbuhan penduduk	3,38%	3,78%	2,48%	2,18%	1,88%	1,51%	≤ 4%
			Peserta KB	123.386 orang	124.386 orang	130.886 orang	136.886 orang	142.886 orang	148.886 orang	148.886 orang
			Cakupan Fasilitas Seni Budaya	57%	65%	70%	80%	90%	100%	100%
		Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Angka kriminalitas	Turun 3%	Turun 5%	Turun 7%	Turun 9%	Turun 11%	Turun 13%	Turun 13%



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

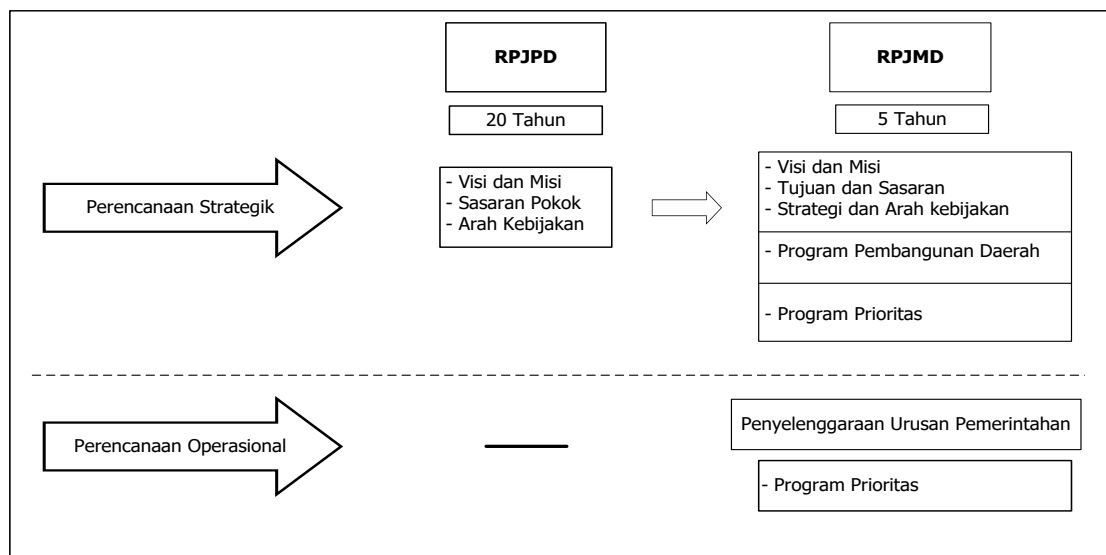
Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6.1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional





Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan Kota Samarinda periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategii yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memprhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD Kota Samarinda.

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan kelembagaan, struktur organisasi, dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi.
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan manajemen pengelolaan PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah.
5. Mengurangi titik banjir dan lama genangan air.
6. Menata tepi SKM untuk mendukung pengendalian banjir serta konsep Waterfront City.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dalam mendukung mobilitas masyarakat.
8. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat.





9. Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh kawasan.
10. Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW.
11. Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan.
12. Mengurangi pencemaran lingkungan.
13. Meningkatkan upaya preventif dalam mitigasi bencana.
14. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
15. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern.
16. Memberikan kemudahan investasi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan SDM di pasar kerja.
17. Melakukan penataan PKL dan sektor informal lainnya pada kawasan perdagangan.
18. Meningkatkan kelembagaan koperasi aktif dan UMKM, serta peran bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
19. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat.
20. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
21. Memberantas narkoba dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat luas.
22. Meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan formal dan nonformal sejak usia dini hingga tingkat dasar.
23. Revitalisasi gedung sekolah sesuai standar kelayakan secara nasional.
24. Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas santri di pesantren.
25. Mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal.
26. Memberikan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, kegiatan komunitas minat dan hobi, serta pemasyarakatan olahraga.
27. Meningkatkan pembangunan yang responsif gender berbasis pemberdayaan masyarakat.
28. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana ke seluruh lapisan masyarakat.
29. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban kota.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya untuk mencapai agenda prioritas, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan program prioritas pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi

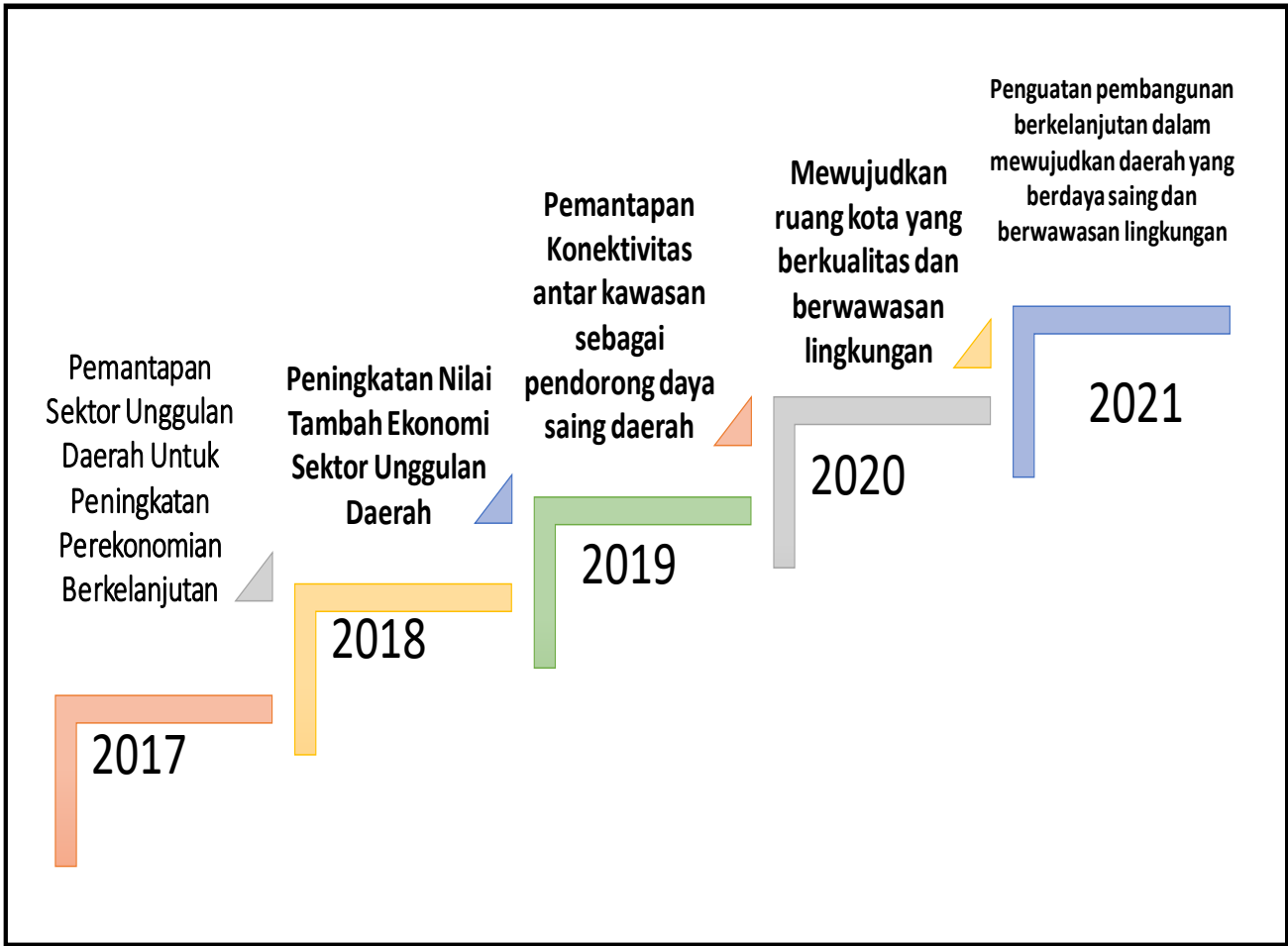




hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Sebuah rumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang diputuskan dengan seksama untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai rasionalisasi pelaksanaan strategi-strategi pembangunan, arah kebijakan memiliki fokus atau tema pokok di setiap tahapannya. Penekanan fokus atau tema di setiap tahapan selama periode RPJMD Kota Samarinda memiliki kesinambungan dan keselarasan dalam mencapai visi, misi, agenda prioritas, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Samarinda setiap tahun pada periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 6.2
Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda, Tahun 2016-2021





6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama merupakan langkah awal untuk meningkatkan daya saing Kota Samarinda terutama dari sisi ekonomi. Berdasarkan sektor pembentuk PDRB Kota Samarinda, perekonomian Kota Samarinda didominasi secara berturut-turut oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan. Namun bila melihat struktur besar ekonomi Kota Samarinda, perekonomian didominasi oleh sektor jasa yang merupakan sektor tersier. Hal ini menandakan bahwa Kota Samarinda memiliki potensi yang besar pada sektor jasa dan perdagangan untuk menggantikan sektor pertambangan yang kian menurun kontribusinya.

Sebagai ibukota provinsi Kaltim, sudah sewajarnya Kota Samarinda memiliki produk-produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah pada sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, pada arah kebijakan tahun pertama RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 akan difokuskan pada proses identifikasi komoditi-komoditi yang memiliki potensi untuk menjadi "brand" atau produk khas Kota Samarinda, serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk proses pengembangannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar dan berkelanjutan pada perekonomian Kota Samarinda. Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2017) adalah **Pemantapan Sektor Unggulan Daerah untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan**.

Selain pemantapan pada sektor unggulan, perencanaan dan penganggaran Kota Samarinda tetap diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar kota, terutama banjir. Dalam upaya penuntasan banjir, pada tahun pertama (2017) akan memaksimalkan pemeliharaan drainase yang sudah ada berdasarkan titik-titik banjir yang telah diidentifikasi, mendukung program pengendalian banjir pemerintah provinsi Kaltim melalui penyediaan lahan, memaksimalkan peran Tim Pengendali Banjir, serta melakukan relokasi penduduk tepi DAS Sungai Karang Mumus (SKM) pada satu segmen.

6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2018)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama (2017) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Pada tahun kedua (2018) ini difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota





Samarinda. Kondisi ini memungkinkan Kota Samarinda untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, terutama dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Untuk mewujudkannya, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahap kedua (2018) yaitu **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan Daerah**. Pelaksanaan arah kebijakan tahap pertama (2017) yang kemudian dilanjutkan tahap kedua (2018) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan ekonomi kerakyatan ini nantinya memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak perekonomian secara nasional.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, permasalahan menahun Kota Samarinda harus memperoleh porsi pada pembangunan tahap kedua (2018) ini, yaitu permasalahan banjir sebagai lanjutan dari penyelesaian masalah banjir pada tahap pertama (2017). Titik banjir yang menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda adalah titik yang menjadi akses pada pusat-pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda agar permasalahan banjir nantinya tidak berpengaruh besar pada perekonomian kota.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2019)

Peningkatan daya saing tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, namun konektivitas antara wilayah juga dapat mendorong daya saing daerah. Secara keseluruhan, konektivitas antar wilayah di Kota Samarinda sudah terhubung, namun yang patut menjadi perhatian adalah masalah kelancaran perpindahan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena dapat berpengaruh besar pada inflasi. Berbagai permasalahan yang selama ini mengganggu kelancaran konektivitas antar wilayah adalah banjir. Banjir baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil pada munculnya permasalahan seperti penurunan kualitas jalan, kemacetan, hingga berimbas pada permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Permasalahan banjir menjadi agenda prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD 2016-2021, sehingga perlu langkah-langkah komprehensif dari seluruh sektor untuk menyelesaikannya. Penyediaan lahan, memaksimalkan sistem pengendali banjir, relokasi SKM, serta upaya terpadu pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang telah dilaksanakan sejak arah kebijakan pertama (2017) harus sudah menunjukkan hasil pada tahun ketiga (2019) ini melalui penurunan titik banjir.

Sementara itu untuk mendorong daya saing daerah, pemantapan konektivitas perlu



menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda pada tahun ketiga (2019). Pemantapan konektivitas dapat berupa pemantapan kualitas jalan kota, pemantapan kualitas jalan penghubung antar kawasan produksi dengan kawasan kegiatan, serta penyelesaian penyebab titik-titik kemacetan. Oleh karena itu pada tahun ketiga (2019) ini, pemerintah Kota Samarinda harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui arah kebijakan **Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah.**

6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat merupakan lanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya, dan berusaha memastikan kesinambungan dari tahun pertama (2017) hingga tahun ketiga (2019). Pemantapan konektivitas yang telah dilakukan pada tahun keempat (2019) merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas di Kota Samarinda. Adanya komoditi unggulan yang didukung dengan komitmen pengendalian banjir serta konektivitas yang lancar oleh pemerintah Kota Samarinda, diharapkan dapat mendorong terwujudnya ruang kota yang berkualitas dan berkarakter di Kota Samarinda.

Ruang kota yang berkualitas dan berkarakter harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya melalui kualitas udara, air, dan tanah yang baik untuk menunjang kehidupan. Ruang kota yang berkualitas dapat diwujudkan melalui pengembangan ruang publik bagi masyarakat yang dapat mendukung peningkatan rasio RTH di Kota Samarinda, melakukan penataan pada kawasan-kawasan kumuh agar menjadi lebih rapi, serta pengendalian pencemaran. Oleh karena itu, pada tahun keempat (2020) ini ditetapkan arah kebijakan pembangunan **Mewujudkan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.**

6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2021)

Arah kebijakan tahun kelima merupakan akumulasi dan kesinambungan dari hasil melaksanakan kebijakan tahun pertama (2017) hingga keempat (2020). Pada tahun kelima (2021) ini pemerintah Kota Samarinda harus dapat memaduserasikan pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditunjang dengan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga dapat menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang pada arah kebijakan tahap 3 RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 serta mampu menggambarkan visi Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai Kota Metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun kelima (2021) ini arah kebijakan





pemerintah Kota Samarinda adalah **Penguatan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.**

Selanjutnya tema pembangunan RPJMD Kota Samarinda di terjemahkan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Keterkaitan Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda

No.	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan penataan kelembagaan, struktur organisasi, dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel	Penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas, fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan tidak tumpang tindih	√	√	√	√	√
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT	√	√	√	√	√
		Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman (RPJPD)			√	√	√
3.	Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (RPJPD)	√	√	√	√	√
4.	Meningkatkan manajemen pengelolaan PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan	√	√	√	√	√
5.	Mengurangi titik banjir dan lama genangan air	Pengembangan sistem pengendalian banjir	√	√	√	√	√
		Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan (RPJPD)	√	√	√	√	√
6.	Menata tepi SKM untuk mendukung pengendalian banjir serta konsep	Penerapan Konsep Water Front City dengan Membangun		√	√	√	√



No.	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
	Waterfront City	Infrastruktur Sungai (RPJPD)					
		relokasi pemukiman Tepi DAS Karang Mumus	√	√	√	√	√
		Pengamanan Jalur Hijau dan Lahan Kritis	√	√	√	√	√
7.	Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dalam mendukung mobilitas masyarakat	Peningkatan manajemen perkotaan menuju smart city (RPJPD)		√	√	√	√
		Optimalisasi Tata Kelola Jalan Raya (RPJPD)		√	√	√	√
		Perbaikan Jalan Rusak (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Efektivitas Manajemen Lalu Lintas untuk Meminimalisir Kemacetan (RPJPD)	√	√	√	√	√
		pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkeadilan	√	√	√	√	√
8.	Menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian (dalam arti luas)	√	√	√	√	√
9.	Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh kawasan	Pemerataan Air Bersih untuk Rumah Tangga (RPJPD)	√	√	√	√	√
10.	Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW	Pemanfaatan Lahan-Lahan Terdegradasi Serta Pasca Eksploitasi Lahan (RPJPD)			√	√	√
		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi Aktifitas Masyarakat (RPJPD)	√	√	√	√	√
11.	Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana	√	√	√	√	√



No.	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
	berkelanjutan	pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan ramah lingkungan					
12.	Mengurangi pencemaran lingkungan	Efektivitas Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Aglomerasi Perkotaan (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Penerapan Konsep dan Strategi Pembangunan Ekonomi (Green Economy) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang Sustainable (RPJPD)	√	√	√	√	√
13.	Meningkatkan upaya preventif dalam mitigasi bencana	Pengembangan sistem peringatan dini pada titik-titik rawan kebakaran dan rawan bencana lainnya	√	√	√	√	√
14.	Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas Sistem Penanggulangan Bencana Alam (RPJPD)	√	√	√	√	√
15.	Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern	Pertumbuhan produk perdagangan daerah (RPJPD)	√	√	√		
16.	Memberikan kemudahan investasi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan SDM di pasar kerja	Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Peningkatan Investasi PMA/PMDN	√	√	√	√	√
17.	Melakukan penataan PKL dan sektor informal lainnya pada kawasan perdagangan	Penyediaan ruang bagi berkembangnya PKL dan sektor informal lainnya sesuai zonasi-zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW			√	√	√



No.	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
18.	Meningkatkan kelembagaan koperasi aktif dan UMKM, serta peran bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan untuk mendukung ekonomi kerakyatan	Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
		Peningkatan ekspor komoditi unggulan (RPJPD)	√	√			
		Penyediaan pangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan	√	√	√	√	√
19.	Memberikan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu (RPJPD)	√	√	√	√	√
20.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan (RPJPD)	√	√	√	√	√
		Peningkatan akses pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan	√	√	√	√	√
21.	Memberantas narkoba dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat luas	Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan formal & nonformal, serta seluruh lapisan masyarakat	√	√	√	√	√
22.	Meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan formal dan nonformal sejak usia dini hingga tingkat dasar	Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan (RPJPD)	√	√	√	√	√



No.	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
23.	Revitalisasi gedung sekolah sesuai standar kelayakan secara nasional	Peningkatan kualitas gedung dan sarana prasarana sekolah yang layak dan sesuai standar minimal nasional	√	√	√	√	√
24.	Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas santri di pesantren	peningkatan kerjasama pemerintah kota dengan pesantren dalam upaya pembentukan santri yang berkualitas dan berkarakter	√	√	√	√	√
25.	Mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal	Fasilitasi berkembangnya kesenian dan kebudayaan lokal	√	√	√	√	√
26.	Memberikan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, kegiatan komunitas minat dan hobi, serta pemasyarakatan olahraga	Fasilitasi aktivitas positif kepemudaan, komunitas minat dan hobi, serta olahraga	√	√	√	√	√
27.	Meningkatkan pembangunan yang responsif gender berbasis pemberdayaan masyarakat	Pengarustamaan gender (RPJPD)	√	√	√	√	√
28.	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana ke seluruh lapisan masyarakat	Pembinaan Keluarga Berencana (RPJPD)	√	√	√	√	√
29.	Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban kota	Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat	√	√	√	√	√

6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan



adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023 (tabel 5.5), membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 6. 2
Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah 2013	Rencana Distribusi Penduduk	
			2017	2023
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
	Jumlah	805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2013-2033

Arah pembangunan kawasan perkotaan yang tertuang dalam RPJPD pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan, pemenuhan standar pelayanan perkotaan, dan keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan wilayah terpadu dalam jangka panjang. Pembangunan Wilayah Terpadu adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:





➤ **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

- **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.

Jaringan dan Layanan Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.



Stasiun Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

Tatanan Kepelabuhan terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.

Alur Pelayaran meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

➤ **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari: 1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pembangkit Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.

Gardu Induk terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.





Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota. 7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;



- 4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
- 5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

Tabel 6. 3
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loajanan Ilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan IIdi Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota; 5. Pusat Lingkungan V di





Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
		Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir; 6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan; 7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang; 8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir; 9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; 10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di



Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini:



Tabel 6. 4
Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi. b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian. b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor. b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), kawasan pengolahan ikan, Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
2.	Samarinda Ilir	a. Rencana Sistem Pusat	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Pelayanan Kota	pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan V Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), kawasan rawan bencana alam (longsor) b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri (kecil dan makro, sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjirdan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)
3.	Samarinda Kota	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota , Kelurahan Bugis. b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat) b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.
4.	Samarinda Seberang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)
		c. Rencana Pola	a) Kawasan Lindung

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Ruang Wilayah	Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).
5.	Samarinda Utara	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian,

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan II

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan). b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VI Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		d. Rencana Pola	a) Kawasan Lindung

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Ruang Wilayah	Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).
9.	Palaran	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).
10.	Loa Janan Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).



Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 5
Potensi Pengembangan Kota Samarinda

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M² per unit;b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M² per unit; danc. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M² per unit. b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha. c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha. d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu. b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa. c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang; b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara. b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang. c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.
5.	Kawasan Peruntukan Industri	a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir. c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi:1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir

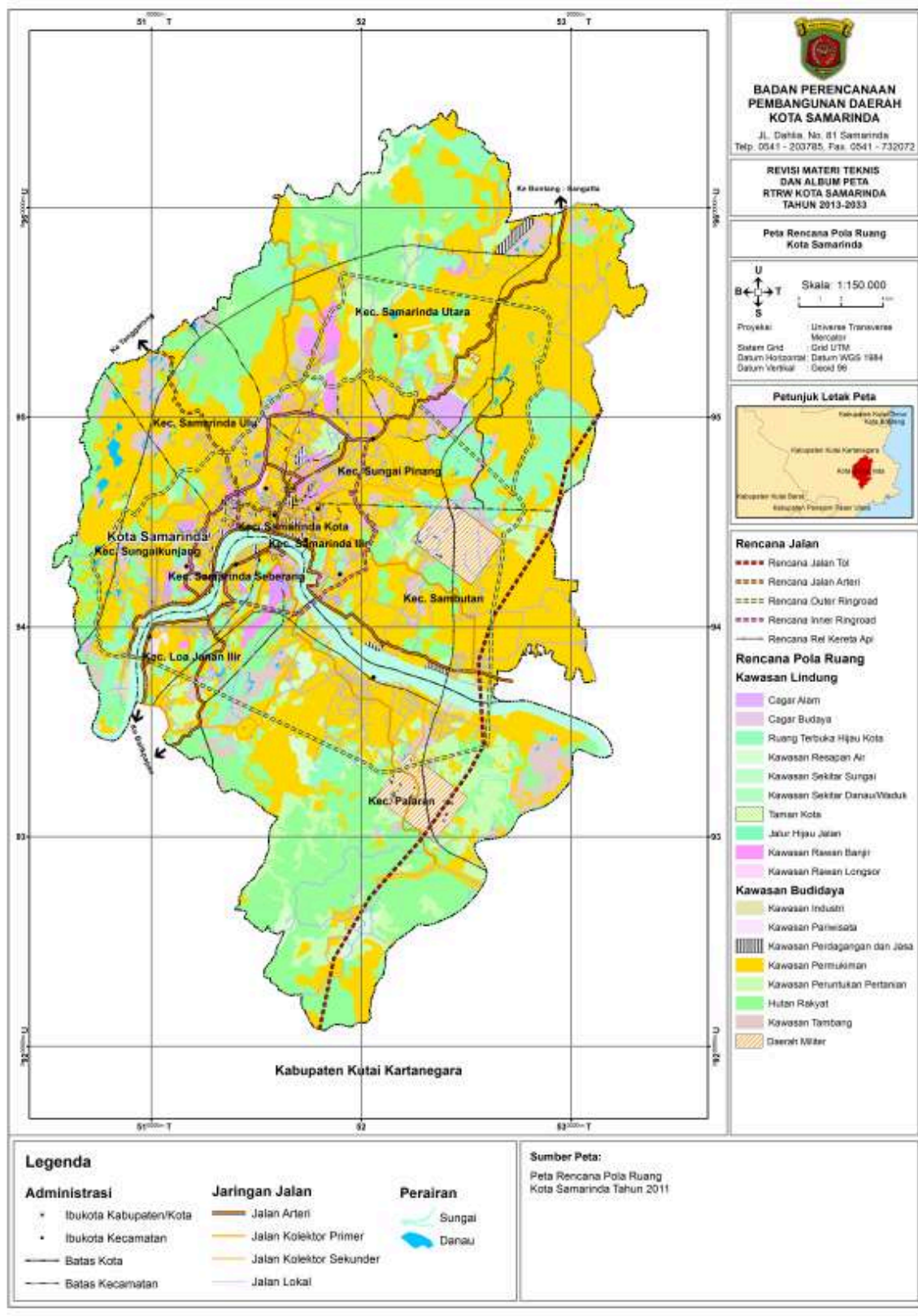


No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		sungai yang terletak di Kecamatan Loajanan Ilir dan Sambutan. b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara. c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/ Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.
9.	Kawasan Strategis Kota	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang. c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda. d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034



Gambar 6.3
Peta Pola Ruang Kota Samarinda



Tabel 6. 6
Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Perwujudan Struktur Ruang									
1	Perwujudan Pusat Kegiatan									
1.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota								
1.1.1	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan					
2)	Penyusunan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Permukiman					
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim					
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000							
	DLL									
	1.2. Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan									
	1.2.1. Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman					
	1.2.2. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	APBD Kab. Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman					
	1.2.3. Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertum-buhan sehingga Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman					
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah									
	2.1. Transportasi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	a	Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan					
	b	Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan					
	c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan Pengairan					
	d	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM					
	1)	Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM					
	2)	Pembangunan Prasarana DAN Sarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM					
	2.2.	Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan					
	2.3.	Penyusunan Masterpaln Telematika Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan					
B	Perwujudan Pola Ruang										
1	Perwujudan Kawasan Lindung										
	1.1.	Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2. Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000							
	1.3. Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
	1.4. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD					
	1.5. Pengembangan Pertanian lahan lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian					
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			APBD Kota Samarinda						
	2.1. Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim					
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000							
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000							
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000							
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000							
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000							
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000							
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000							
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000							
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000							
	2.2. Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim					
	2.3. Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan					
B	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten									
	1.1. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata					
	1.2. Penataan Kawasan Strategis Kota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag					



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda Tahun 2016-2021 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Walikota ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Walikota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah :

1. Stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif
2. Prioritas pengendalian banjir dan relokasi tepi SKM
3. Infrastruktur (jalan, jembatan, flyover, outer ring road & semenisasi gang) dalam mengurangi kemacetan dan peningkatan kapasitas & distribusi air bersih (PDAM)
4. Kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (taman & ruang terbuka hijau)
5. Pendidikan berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana sekolah termasuk beasiswa bagi santri di pesantren dan sekolah agama
6. Samarinda kota sehat (pelayanan dasar, rumah sakit, jamkesda) dan kota bebas narkoba
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta, pasar tradisional, UMKM, pariwisata & ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
8. Pemberdayaan masyarakat, pemuda, perempuan dan sukses keluarga berencana dalam pengentasan kemiskinan
9. Pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota diatas telah dijabarkan ke dalam agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi, dan agenda prioritas maka dirumuskan strategi sebagai sarana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan



kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kota Samarinda untuk periode 2016-2021. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi walikota namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD.



Tabel 7. 1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Dalam Rangka Pencapaian Agenda Prioritas Walikota Samarinda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
Agenda Prioritas 1. Optimalisasi pengendalian banjir								
1.	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	Mengurangi titik banjir dan lama genangan air	Pengembangan sistem pengendalian banjir	Program pengendalian Banjir	Jumlah titik banjir	50 titik	40 titik	PU & Penataan ruang
			Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan (RPJPD)	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60%	80%	PU & Penataan ruang
		Menata tepi SKM untuk mendukung pengendalian banjir serta konsep <i>Waterfront City</i>	Penerapan Konsep <i>WaterFront City</i> dengan Membangun Infrastruktur Sungai (RPJPD)	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	15%	35%	PU & Penataan ruang
					Pembangunan turap di wilayah aliran sungai (SKM)	250 meter	250 meter	PU & Penataan ruang
			relokasi pemukiman Tepi DAS Karang Mumus	Program pengembangan Perumahan	Persentase kawasan kumuh	0,39%	0%	Perumahan rakyat & kawasan permukiman
			Pengamanan jalur hijau dan lahan kritis	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 perda	25 perda	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap	100%	100%	PU & Penataan ruang

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang,			
Agenda Prioritas 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat								
2.	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan (RPJPD)	Program pembinaan upaya kesehatan dasar	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	100%	100%	Kesehatan
					Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	100%	100%	Kesehatan
				Program farmasi dan alat kesehatan	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	80%	100%	Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Persentase balita gizi kurang	11,5%	8%	Kesehatan
					Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	80%	98%	Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	45%	70%	Kesehatan
				Program Pengendalian penyakit menular langsung	Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	100%	100%	Kesehatan
					Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	100%	140%	Kesehatan
					Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%	90%	Kesehatan
				Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	91%	95%	Kesehatan
				Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia	Persentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Cakupan	91%	96%	Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)			
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	40%	80%	Kesehatan
					Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Persentase puskesmas	75%	100%	Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja			
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	90%	90%	Kesehatan
					Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	60%	100%	Kesehatan
				Program upaya kesehatan rujukan	Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	100%	100%	Kesehatan
					Rasio rumah sakit per satuan penduduk	9 unit	11 unit	Kesehatan
			Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	100%	100%	Kesehatan
					Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	100%	100%	Kesehatan
				Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	60%	85%	Kesehatan
				Program Pengembangan	Persentase rumah	30%	100%	Perumahan rakyat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
				Perumahan dan Kawasan Permukiman	tinggal bersanitasi			& kawasan permukiman
		Memberantas narkoba dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat luas	Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan formal & nonformal, serta seluruh lapisan masyarakat	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	26 kasus	16 kasus	Kepemudaan & Olahraga
				Program pelayanan kesehatan jiwa	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	32%	64%	Kesehatan
Agenda Prioritas 3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius								
3.	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan formal dan nonformal sejak usia dini hingga tingkat dasar	Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan (RPJPD)	Program pendidikan anak usia dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41,85%	42,41%	Pendidikan
				Program pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	100%	100%	Pendidikan
					Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	99,10%	100%	Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	93,85%	95,73%	Pendidikan
					Angka Partisipasi	67,96%	69,31%	Pendidikan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB			
					Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,09%	83,73%	Pendidikan
					Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,39%	93,21%	Pendidikan
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	Pendidikan
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	90,52%	100%	Pendidikan
					Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	92,31%	100%	Pendidikan
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	revitalisasi gedung sekolah sesuai standar kelayakan secara nasional	Peningkatan kualitas gedung dan sarana prasarana sekolah yang layak dan sesuai standar minimal nasional	Program pendidikan Dasar	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	80%	100%	Pendidikan
					Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	89,02%	90,79%	Pendidikan
					Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	57,49%	80%	Pendidikan
					Persentase SMP/MTs dan yang memiliki	67,49%	83%	Pendidikan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Sarpras dengan kondisi baik			
5.	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas santri di pesantren	peningkatan kerjasama pemerintah kota dengan pesantren dalam upaya pembentukan santri yang berkualitas dan berkarakter	Program pendidikan Dasar	Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	40 orang	200 orang	Pendidikan
Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan								
6.	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dalam mendukung mobilitas masyarakat	Peningkatan manajemen perkotaan menuju <i>smart city</i> (RPJPD)	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	30%	100%	PU & Penataan ruang
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	70%	90%	Perhubungan
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase ketersediaan angkutan kota	50,72%	66,67%	Perhubungan
					Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	51,18%	53,22%	Perhubungan
					Persentase kendaraan yang	90%	90%	Perhubungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					telah melakukan uji			
			Optimalisasi Tata Kelola Jalan Raya (RPJPD)	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	81,20%	98%	PU & Penataan ruang
			Perbaikan Jalan Rusak (RPJPD)	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	19%	2%	PU & Penataan ruang
			Efektivitas Manajemen Lalu Lintas untuk Meminimalisir Kemacetan (RPJPD)	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	60%	86%	Perhubungan
			pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkeadilan	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan yang memiliki trotoar	45%	80%	Perhubungan
		Menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian (dalam arti luas)	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	1 : 0,17	1 : 0,07	PU & Penataan ruang
					persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	0%	100%	PU & Penataan ruang
7.	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh	Pemerataan Air Bersih untuk Rumah Tangga (RPJPD)	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air	68%	100%	PU & Penataan ruang

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
		kawasan			minum layak			
				Program Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	85%	98%	Kesehatan
8.	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW	Pemanfaatan Lahan-Lahan Terdegradasi Serta Pasca Eksploitasi Lahan (RPJPD)	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	2%	10%	Kehutanan
			Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi Aktifitas Masyarakat (RPJPD)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penyediaan RTH Publik	3%	10%	Lingkungan Hidup
		Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan ramah lingkungan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengangkutan dan pengolahan timbulan sampah di TPA	64%	90%	Lingkungan Hidup
					Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	10%	55%	Lingkungan Hidup
		Mengurangi pencemaran lingkungan	Efektivitas Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Aglomerasi Perkotaan (RPJPD)	Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Status Kualitas udara ambien perkotaan	Baik	Baik	Lingkungan Hidup
			Penerapan Konsep dan Strategi Pembangunan Ekonomi (<i>Green Economy</i>) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (RPJPD)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	15 kegiatan	35 kegiatan	Perencanaan Pembangunan
			Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang Sustainable (RPJPD)	Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air badan air	Cemar berat (≤ -90)	Tidak Tercemar	Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan								
9.	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern	Pertumbuhan produk perdagangan daerah (RPJPD)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar daerah yang dikelola	14 pasar	14 pasar	Perdagangan
					Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	4 pasar	12 pasar	Perdagangan
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	6 kali	30 kali	Otda
				Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	4 sidak	20 sidak	Otda
		memberikan kemudahan investasi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan SDM di pasar kerja	Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja (RPJPD)	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	3.000 orang	3.500 orang	Penanaman Modal
				Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	Ketenagakerjaan
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	Ketenagakerjaan
					Besaran tenaga kerja yang	100%	100%	Ketenagakerjaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
			Peningkatan Investasi PMA/PMDN	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	175 perusahaan	185 perusahaan	Penanaman Modal
					Jumlah investor PMA	13 perusahaan	17 perusahaan	Penanaman Modal
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	6,65 trilyun rupiah	33,9 trilyun rupiah	Penanaman Modal
					Jumlah nilai investasi PMA	2,35 trilyun rupiah	12,6 trilyun rupiah	Penanaman Modal
					Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	50%	100%	Penanaman Modal
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	2 kecamatan	10 kecamatan	Penanaman Modal
10.	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	melakukan penataan PKL dan sektor informal lainnya pada kawasan perdagangan	Penyediaan ruang bagi berkembangnya PKL dan sektor informal lainnya sesuai zonasi-zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW	Program Penataan Struktur Industri	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda	20%	100%	Perindustrian
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang	60 pedagang	300 pedagang	Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					dibina			
		meningkatkan kelembagaan koperasi aktif dan UMKM, serta peran bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan untuk mendukung ekonomi kerakyatan	Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha (RPJPD)	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	80%	84%	Koperasi & UMKM
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang dibina	100 unit	300 unit	Koperasi & UMKM
				Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	0	0	Pemberdayaan masyarakat & desa
			Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	8 obyek	23 obyek	Pariwisata
				Program Pengembangan dan pembinaan pengrajin-pengrajin berbasis ekonomi kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	12 produk	30 produk	Pariwisata
			Peningkatan ekspor komoditi unggulan (RPJPD)	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	1 komoditi	2 komoditi	Perdagangan
			Penyediaan pangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi pertanian tanaman pangan utama	14.722 ton	16.438 ton	Pertanian
				Program Pengembangan	Produksi	1.595,8 ton	10.971 ton	Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
				Budidaya Perikanan	perikanan budidaya			
				Program peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	15.000,7 ton	76.825 ton	Pertanian
				Program peningkatan populasi dan produksi peternakan	Produksi daging	10.559,85 ton	12.835,56 ton	Pertanian
				Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan	Penguatan cadangan pangan	42,16%	60%	Pangan
		memberikan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu (RPJPD)	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase terlaksananya penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat adminitrasi	15.976 RTS	15.976 RTS	Adm.Pemerintahan
				Program penguatan JKN	Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	25%	100%	Kesehatan
				Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	38,45%	50,00%	Sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					(SPM)			
					Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	50%	100%	Sosial
					Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	7.602 orang	38.010 orang	Sosial
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Prosentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	16,73%	83,65%	Sosial
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	14%	20%	Sosial
				Program pelayanan Dan	Persentase (%)	100%	100%	Sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
				Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat			
Agenda Prioritas 6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif								
11.	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya preventif dalam mitigasi bencana	Pengembangan sistem peringatan dini pada titik-titik rawan kebakaran dan rawan bencana lainnya	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	100%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas Sistem Penanggulangan Bencana Alam (RPJPD)	Program kedaruratan dan logistik	Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
					Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Agenda Prioritas 7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan								
12.	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal	Fasilitasi berkembangnya kesenian dan kebudayaan lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Misi Kesenian (SPM)	6 kali	37 kali	Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Cakupan Kajian Seni (SPM)	40%	100%	Kebudayaan
					Cakupan Fasilitasi Seni (SPM)	65%	100%	Kebudayaan
					Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (SPM)	70%	100%	Kebudayaan
					Cakupan Organisasi seni (SPM)	75%	100%	Kebudayaan
					Cakupan Tempat umum (SPM)	100%	100%	Kebudayaan
					Cakupan Gelar Seni (SPM)	100%	100%	Kebudayaan
				Program pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	Kebudayaan
					Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	7 buah	17 buah	Kebudayaan
		Memberikan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, kegiatan komunitas minat dan hobi, serta pemasyarakatan olahraga	Fasilitasi aktivitas positif kepemudaan, komunitas minat dan hobi, serta olahraga	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga	Lapangan olahraga per 1000 penduduk	0,620 buah	0,621 buah	Kepemudaan & Olahraga
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	7 cabang	11 cabang	Kepemudaan & Olahraga
					Jumlah klub olahraga	310 kelompok	310 kelompok	Kepemudaan & Olahraga
					Jumlah organisasi	65 kelompok	69 kelompok	Kepemudaan &

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					olahraga			Olahraga
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	98 kelompok	98 kelompok	Kepemudaan & Olahraga
				Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausahawan Muda	30 orang	40 orang	Kepemudaan & Olahraga
		Meningkatkan pembangunan yang responsif gender berbasis pemberdayaan masyarakat	Pengarustamaan gender (RPJPD)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	17%	50%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
				Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	40%	52%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog. Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	21%	29%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
				Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Cakupan perempuan dan anak korban	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM)			
					Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
					Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
				Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	PKK aktif	70%	100%	Pemberdayaan Masyarakat & Desa
					Posyandu aktif	710 unit	710 unit	Pemberdayaan Masyarakat & Desa
					Persentase Posyandu	10,8%	36%	Pemberdayaan Masyarakat & Desa

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Purnama dan Mandiri			
					Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Meningkatkan pelayanan keluarga berencana ke seluruh lapisan masyarakat	Pembinaan Keluarga Berencana (RPJPD)	Program keluarga berencana	KB Aktif	97.474 orang	117.974 orang	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
					Laju Pertumbuhan Penduduk	1,83%	1,50%	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
				Program pelayanan kontrasepsi	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	61,82%	64,33%	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
				Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Jumlah PPKBD	59 kelompok	59 kelompok	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
				Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS	128 kelompok	136 kelompok	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
				Program pengembangan Model Operasional BKB-	Jumlah BKB	85 unit	90 unit	Pengendalian penduduk &

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
				Posyandu-PAUD				keluarga berencana
13.	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban kota	Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
					Jumlah konflik sosial di masyarakat	60 kasus	40 kasus	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	30%	70%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Agenda Prioritas 8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah								
14.	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (RPJPD)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	80%	90%	Keuangan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	100%	100%	Perencanaan
				Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan	100%	100%	Perencanaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (outcome)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
					Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)			
		Meningkatkan manajemen pengelolaan PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	100%	100%	Keuangan
Agenda Prioritas 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik								
15.	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Meningkatkan penataan kelembagaan, struktur organisasi, dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel	Penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas, fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan tidak tumpang tindih	Program penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	CC	A	Adm.Pemerintahan
				Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Adm.Pemerintahan
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	1 dokumen	1 dokumen	Adm.Pemerintahan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	15%	100%	Adm.Pemerintahan
				Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	1 aplikasi	1 aplikasi	Komunikasi & Informatika

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator (<i>outcome</i>)	Target Kinerja		Bidang Urusan
						Awal (2017)	Akhir (2021)	
			Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman (RPJPD)	Program Rehab / Pembangunan Bangunan Gedung Dinas / Kantor	Luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemeritahan baru			PU & Penataan ruang



7.2. Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan SKPD Kepada Masyarakat

Visi dan misi Walikota merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang secara teknis dijabarkan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan dan melekat kepada SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan program di SKPD haruslah memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota, serta dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tabel berikut ini akan ditampilkan seluruh program SKPD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk pencapaian visi misi walikota maupun pencapaian SPM :

Tabel 7. 2
Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan SKPD

No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	30	150
6	Program pendidikan anak usia dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	41,71	42,41
		Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,75	100,00
		Persentase lembaga PNF terakreditasi	%	36,15	100,00
		Rasio asesor PNF terhadap bidang keahlian	%	20,59	21,11
		Persentase jumlah TK/RA yang terakreditasi	%	25,98	26,64
7	Program pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	%	111,58	100,00



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Dasar	SD/MI/Paket A/SDLB			
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	98,80	100,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	93,40	95,73
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	67,63	69,31
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,69	83,73
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,94	93,21
		Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	78,21	100,00
		Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	88,58	90,79
		Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	55,34	80,00
		Persentase SMP/MTs dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	65,34	83,00
		Rasio siswa per guru SD	Orang	20	18
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,00
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	66,26	76,00
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	Nilai	55,00	68,00
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,90	100,00
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00
		Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh	orang	0	200



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		bantuan			
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	%	88,36	100,00
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	%	89,74	100,00
		Persentase sekolah penyelenggara PPDB online	%	100	100
		Persentase sekolah penyelenggara UNBK	%	50	100
Kesehatan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pembinaan sumber daya aparatur	bulan	12	60
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	farmasi dan alat kesehatan	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	100	100
		Persentase pemenuhan standar mutu kefarmasian di puskesmas	%	75	90
7	pembinaan upaya kesehatan dasar	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	%	100	100
		Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	%	100	100
		Persentase pemeriksaan laboratorium di	%	18	12



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Labkesda yang dilayani			
		Persentase pengawasan distribusi pangan yang beredar di masyarakat	%	100	100
		Persentase Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100	100
		Persentase pangan siap saji yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	100	100
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	%	100	100
		Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	%	100	100
9	Program pencegahan penyakit berpotensi wabah	Persentase kelurahan yang mendapatkan dukungan analisa resiko krisis kesehatan	%	67,8	100
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	%	100	100
		Persentase balita gizi kurang	%	12	8
		Persentase balita pendek (stunting)	%	30	25
		Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	80	98
		Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	45	70
11	Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	85
		Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	%	80	98
		Persentase Kelurahan melaksanakan STBM	%	80	98
		Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	80	98
12	Program Pengendalian penyakit menular langsung	Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah			
		Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	%	100	140
		Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	50	90
		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	%	100	100
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	3	30
		Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	80	90
		Cakupan penemuan dan penanganan balita penderita ISPA (Pneumonia)	%	100	100
		Angka Prevalensi Kusta	%	100	100
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita hepatitis	%	100	100
13	Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	%	91	95
		Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	91	93
14	Program pengendalian penyakit bersumber binatang	IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	53,5	53,1
		Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100	100
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	0,1	0,1
		Cakupan penderita	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		filariasis yang ditangani			
		Cakupan penderita flu burung yang ditangani	%	100	100
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Non Polio	%	100	100
15	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Dokumen standar pelayanan publik di UPTD	%	100	100
		Akreditasi fasyankes	%	41,67	100
		Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	50	100
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	90	90
16	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	orang	56,3 per 100.000 penduduk	60 per 100.000 penduduk
		Rasio tenaga bidan dan perawat per satuan penduduk	orang	114,7 per 100.000 penduduk	124 per 100.000 penduduk
		Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	90
17	Program upaya kesehatan rujukan	Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	%	100	100
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	unit	9	11
		Persentase RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus	%	100	100
18	Program penguatan JKN	Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	%	25	100
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	%	91	96
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	91	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		(SPM)			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (SPM)	%	72	100
		Persentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil (SPM)	%	95	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM)	%	95	100
		Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	%	100	100
		Cakupan pelayanan nifas	%	95	95
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95	95
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	%	40	80
		Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (SPM)	%	90	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	90	100
		Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90	95
		Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	%	91	96
		Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	75	100
20	Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	%	30	100
21	Program pengelolaan komunikasi publik	Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan pada masyarakat	%	7.514	7.955
22	Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	33,33	96
23	Program pembinaan kesehatan tradisional	Persentase puskesmas yang	%	20,83	92



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	dan komplementer	menyelenggarakan kesehatan tradisional			
24	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	96	100
25	Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase puskesmas terakreditasi	%	41,67	100
		Persentase RSUD yang tersertifikasi secara nasional	%	100	100
26	Program pelayanan keperawatan dan keteknisian medis	Persentase puskesmas yang menerapkan perkesmas	%	100	100
27	Program pelayanan kesehatan jiwa	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	%	25	64
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	bulan	12	60
6	Program pembangunan Gedung Pemerintah	Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dalam kondisi baik	%		
		Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Kesehatan dalam kondisi baik	%		
		Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Olahraga dalam kondisi baik	%		
		Proporsi Unit Bangunan	%		



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Gedung Pemeritah dalam kondisi baik.			
7	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus	Jumlah Unit Bangunan Gedung pada Kawasan Khusus	unit		
8	Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan	Jumlah Unit Bangunan Gedung Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan Baru	unit		
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan persampahan Kota Samarinda	Jumlah Unit Bangunan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)	unit		
		Jumlah Unit Penyediaan TPA	unit		
		Jumlah Unit Pembangunan TPST	unit		
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	94	100
		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	94	100
11	Program Pengendalian penataan bangunan	Tersedianya dokumen data bangunan	dokumen	0	5
		Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	kecamatan	0	4
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Perubahan alih fungsi lahan	Ha	100	100
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang,	%	100	100
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tataruang (RTR) wilayah kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	20	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
14	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,6	98
		Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	35	80
		persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	10	100
15	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	20	2
16	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	%	0	35
		Pembangunan turap di wilayah aliran sungai (SKM)	meter	0	1.250,00
17	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55	80
18	Program pengendalian Banjir	Jumlah titik banjir yang tersisa	titik	50	40
19	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	km:km2	1 : 0,27	1 : 0,07
		persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	0	100
20	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi			0	100
21	Program Perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur / jasa konstruksi			0	100
Perumahan rakyat & Kawasan Permukiman					
1	Program Pelayanan	Kelancaran	bln	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bln	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Disiplin Aparatur	bln	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	bln	12	60
5	Prog. Peningkt. Kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	orang	20	100
6	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	30	100
		Persentase kawasan kumuh	%	0,49	0,00
		Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	%	100	100
7	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)	Luas layanan sanitasi	%	60	100
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	60	100
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penyediaan RTH Publik	%	2,5	10,0
10	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	275	375
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan	Ketersediaan laporan keuangan	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Capaian Kinerja dan Keuangan				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan	orang	50	318
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	orang per RT	0,101	0,129
		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	2,2	3,14
		Persentase Linmas yang memiliki kemampuan dalam mencegah konflik sosial	%	40,0	100,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Piket Pengamanan Petugas Satpol PP	kali/hari/kecamatan	1	1
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	40	100
		Deteksi dini penanganan kasus ganuan ketentraman dan tratibum	kecamatan	10	10
8	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Perda	5	25
		Penurunan angka kriminalitas	%	3	13
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan pembinaan	Orang	50	470
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem.	Ketersediaan laporan keuangan	Bulan	12	60





No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah yang mengikuti pelatihan	Orang	0	50
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah konflik sosial di masyarakat	kasus	60	40
		Persentase penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0	70
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	10	60
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	46	75
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kualitas sumber daya aparatur sipil negara	%	30	300
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Cakupan regulasi dalam pengurangan risiko bencana	%	28,57	100
		Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	%	100	100
		Cakupan kelurahan tangguh bencana	%	20	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
7	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	%	100	100
		Persentase Pemulihan trauma pasca bencana	%	0	100
8	Program kedaruratan dan logistik	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
		Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	%	100	100
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kualitas sumber daya aparatur sipil negara	%	30	300
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	90	100
		Persentase penurunan jumlah kejadian kebakaran	%	0	25
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	15,63	100
		Cakupan mobil/mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada	%	50	85



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		WMK			
Sosial					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya Manusia yang meningkat kapasitas kompetensinya	Bulan	0	50
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	17	50
7	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100
		Persentase pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial	%	100	100
		Persentase Veteran yang mendapat pembinaan	%	100	100
8	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang menerima peayananan sosial	%	100	100
9	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PMKS yang tertangani	%	14,34	93,68
		Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	38,45	50,00
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	50	100
		Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	orang	7602	38010
10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fiisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	%	16,73	83,65
11	Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)	Persentase terbinanya eks. Penyandang penyakit sosial	%	29,41	6,07
12	Program Pembinaan	Persentase tertangani	%	12	20





No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Anak Terlantar	anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan			
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	orang	0	100
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	100
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100
		Persentase lembaga pelatihan kerja swasta terbina	%	85	90
7	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	%	67	79
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61,2	63,58
		Tingkat pengangguran terbuka	%	5,5	4,4
		Rasio penduduk yang bekerja	%	94,50	95,60
8	Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	85	85
		Besaran pekerja/buruh	%	61,13	71,15



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan			
		Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	80	88
Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang	5	25
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	12	50
		Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	%	100	100
7	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	37	52
		persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog. Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	%	19	29
		Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	%	97	100
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37	52
8	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	anak dan perempuan	mendapatkan penanganan pengaduan			
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100	100
		Tertanganinya pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100
		Terselenggaranya informasi pencegahan kekerasan terhadap anak	%	100	100
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	%	100	100
Pangan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	orang	0	60
6	Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	3017	3250
		Ketersediaan protein perkapita	Gram/kap/hr	86,66	91
		Penguatan cadangan pangan	%	42,16	60,00
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	77,00	90,00
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	75	85
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	85
7	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,70	90,00
		Persentase Keamanan	%	85,00	90,00



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Pangan			
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85,00	85,00
8	Program Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Peta Pemantauan Kerawanan Pangan Kota Samarinda	Peta	0,00	4,00
Pertanahan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya manusia yang meningkat kompetensinya	orang	0	125
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	kecamatan	0	10
		Terlaksana koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	SKPD	0	15
		Jumlah SKPD peserta sosialisasi	SKPD	0	47
7	Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	%	0	
		Permohonan warga masyarakat untuk pensertifikatan tanah melalui program pemerintah	sertifikat	0	2500
		Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	%	0	100
8	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terlaksananya fasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	kasus	10	50
Lingkungan Hidup					



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM memiliki pendidikan dan latihan di bidang LH pada Dinas Lingkungan Hidup	%	0	24,34
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	%	0	100
7	Program Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air badan air	Status	Cemar berat ($\leq$ - 100)	Tidak tercemar
		prosestase kerusakan lingkungan terhadap luas kota	%	0	15
		Indeks Status Kualitas udara ambien perkotaan	nilai	Baik	Baik
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengangkutan dan pengolahan timbunan sampah di TPA	%	64	90
		Persentase Pengurangan Timbunan Sampah	%	5,70	55,00
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya Manusia yang meningkat kapasitas kompetensinya	Orang	10	125
6	Program penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP-elektronik per satuan penduduk	%	45	100
		Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	75	98
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	97
		Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim)	%	70	95
		Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	40	95
		Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	65	90
		Persentase kepemilikan kartu Identitas Anak	%	0	90
Pemberdayaan Masyarakat & Desa					
1	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	PKK aktif	%	70	70
		Posyandu aktif	unit	698	710
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	5	36
		Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	%	100	100
2	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	0	0
3	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100
Pengendalian penduduk & keluarga berencana					
1	Program Pelayanan	Kelancaran	Bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Disiplin Aparatur	Bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Bulan	12	60
5	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya manusia yang meningkat kompetensinya	orang	0	61
6	Program Keluarga Berencana	KB Baru	orang	25.912,00	30.912,00
		KB Aktif	orang	97.474,00	117.974,00
		MKJP Baru	orang	6.000,00	6.500,00
		Unmed Need	%	18,00	13,00
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	1,50
7	Program pelayanan kontrasepsi	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	%	60,48	64,33
8	Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Jumlah PPKBD	Kelompok	59,00	59,00
		Jumlah Sub PPKBD	Kelompok	1.913,00	1.950,00
9	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Jumlah PIK KRR di Kota	Kelompok	66,00	95,00
		Angka Kelahiran Pada Remaja	%	32,00	26,00
10	Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah BKB	unit	84,00	90,00
11	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Kehamilan yang tidak diinginkan (gagal ber- KB)	%	6,20	5,60
12	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah Penderita HIV di Samarinda	orang	1.400,00	1.200,00



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
13	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Usia Kawin Pertama	orang	66.372	61.372
14	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase BKB	%	73,26	84,88
		Persentase BKL	%	75,34	89,04
		Persentase BKR	%	84,62	100,00
		Jumlah kelompok UPPKS	kelompok	128,00	136,00
Perhubungan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	60
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	60
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	60
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang	0	150
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sub terminal dalam Kondisi baik	%	75	100
		Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	%	90	100
		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda	%	0,00	100,00
7	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar	%	65	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Pelayanan Minimal			
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	unit	1	1
		Persentase ketersediaan angkutan kota	%	48,76	66,67
		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	50,69	53,22
		Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	197.156	1.903.797
		Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	63,86	86,15
		Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	unit	63.636	102.487
		Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100
		Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	%	90	90
		Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	5,22	5,16
		Persentase kapal yang bersertifikasi	%	81	86
		Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	%	100	100
		Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad)	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		berijin			
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	85	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	0	90
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Berkurangnya titik kemacetan	%	48,57	60,00
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	%	56	86
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, ZOSS dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota :			
		- rambu	%	45	100
		- marka	%	16	22
		- ZOSS	%	40	80
		- Guardrill	%	44	100
11	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan operasional kendaraan bermotor	kali	0	60
12	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton) dan Penumpang (orang)	ton & orang	0	48.702.272 & 1.652.483
Komunikasi & Informatika					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	0	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	0	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	0	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas	orang	0	155



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		sumber daya aparatur			
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	0	60
6	Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah OPD Yang Menyediakan DIP	unit	0	50
7	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM bidang TIK	orang	0	47
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terjalannya Kerjasama dengan pihak media massa dan tersalurnya informasi melalui Lembaga Informasi Publik	buah	0	100
		Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional	kali	0	33
9	Program pengembangan Infrastruktur komunikasi,informasi dan media massa	Persentase capaian pengembangan Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Kota Samarinda	%	0	100
10	Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	aplikasi	0	1
Koperasi & UKM					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang terlatih	%	10	40
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Keuangan				
6	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	79,64	84
		Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	20	90
7	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran promosi produk	unit	15	70
8	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UMKM	%	88	90
9	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang dibina	unit	100	300
Penanaman Modal					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur PNS yang mengikuti diklat/bimtek/pelatihan	orang	0	240
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	60
6	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	event	3	18
		Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	orang	2.650	3.500
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	perusahaan	173	185
		Jumlah investor PMA	perusahaan	11	17
		Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta Rp.	6.500.000	33.900.000



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		(PMDN)			
		Jumlah nilai investasi PMA	Juta Rp.	2.250.000	12.600.000
		Jumlah bangunan ber-IMB	unit	18.301	26.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan perijinan	%	80	90
		Rasio Rumah ber IMB	%	40	65
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	Kecamatan	0	10
Kepemudaan & Olahraga					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	84
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber daya Manusia yang meningkat kapasitas kompetensinya	%	100	100
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	98	98
		Jumlah Pemuda berprestasi dan Pramuka Berprestasi	orang	12	107
7	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	kali	18	23
8	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	kasus	30	16
9	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausahawan Muda	orang	25	40



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
10	Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah klub olahraga	kelompok	310	310
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	6	11
		Jumlah organisasi olahraga	kelompok	64	69
		Jumlah kegiatan olahraga	kali	39	44
11	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	11,11	17,78
12	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga	Jumlah Gedung Olahraga	unit	9	17
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	unit	2	2
		Lapangan olahraga per 1000 penduduk	buah	0,619	0,621
Statistik					
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Data Tumbuh	%	0	15
		Persentase Keterisian Data	%	70	100
Persandian					
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Pembinaan dan pengawasan jaringan komunikasi dan sandi daerah	kali	0	10
Kebudayaan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	0	110



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Daya Aparatur				
6	Program pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100
		Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	kelompok	5	17
		Jumlah lembaga adat yang dibina	kelompok	5	15
		Terlaksananya secara berkesinambungan kegiatan pelestarian budaya dan tersedianya kebijakan pelestarian budaya daerah	kelompok		10
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	10	80,00
		Jumlah Misi Kesenian	kali	5	37
		Jumlah grup kesenian	grup	57	80
		Jumlah gedung kesenian	gedung	1	1
		Cakupan Kajian Seni	%	33	100
		Cakupan Fasilitas Seni	%	57	100
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	57	100
		Cakupan Organisasi seni	%	67	100
		Cakupan Tempat umum	%	100	100
		Cakupan Gelar Seni	%	100	100
8	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah dokumentasi tentang Seni dan Budaya Kota Samarinda	dokumen	1	3
		Terlaksananya misi kesenian dan tersedianya Kelompok Binaan	kali	0	15
Perpustakaan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	90
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum/masyarakat	unit	306	310
		Jumlah pengunjung (pemustaka) perpustakaan	orang	20.000	106.000
		Jumlah buku yang dapat di akses masyarakat melalui E Book	Judul Buku	0	18
7	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan	Jumlah pembinaan dan peningkatan SDM yang diikuti pustakawan	orang	10	11
		Sistem informasi perpustakaan	aplikasi	0	1
8	Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan melalui multimedia	Naskah	0	2
		Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Terpelihara	Buku	0	2.500
Kearsipan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	90
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Capaian Kinerja dan Keuangan				
6	Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikat	dokumen	0	1.500
		Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	arsip	0	1.000
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi mengikuti diklat	orang	1	10
		Jumlah pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi	orang	1	200
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	Jumlah SKPD / sekolah yang Arsipnya terkelola secara baku	SKPD/ Sekolah	20	50
		Jumlah arsip daerah yang bernilai	arsip	0	15
URUSAN PILIHAN					
Kelautan & Perikanan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	penyediaan sarana prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	100
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	12	72
6	Program pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	14.822,9	76.825,4
		Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	kelompok	30	42
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	1.296,6	10.971
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan	orang	57	67
		Jumlah Unit	orang	25	30



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Pembenihan Rakyat (UPR)			
Pariwisata					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	155
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	obyek	6	23
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100
		Kunjungan wisata :			
		Wisman	orang	644	7.477
		Wisnus	orang	316.998	2.856.852
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%		
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	produk	9	30
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	0	30
9	Program Pengembangan Kemitraan	jumlah SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif	orang	0	120
		jumlah kelompok sadar wisata	kelompok	0	11
Pertanian					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan	Pelaksanaan disiplin	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Disiplin Aparatur	aparatur			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	170
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan modern	orang	60	84
		Panjang saluran irigasi tersier dengan kondisi baik	km	0,75	1
		Panjang jalan pertanian yang bisa dilalui kendaraan	km	1	5
7	Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utama	%	3	15
		Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	14.294	16.438
		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama			
		- Cabe besar	ton	96	110
		-Cabe Rawit	ton	133	152
		- Durian	ton	261	287
		- Tomat	ton	69	79
		- Jamur	kg	15.532	17.861
		- Pisang	ton	3.784	4.176
		- Pepaya	ton	435	480
		- Jahe	ton	29.752	34.488
		- Melati	kg	36.929	42.808
		Produksi komoditas perkebunan utama			
		Karet	ton	149,10	172,85
		Kelapa Dalam (ton)	ton	156,35	181,25
		Kelapa Sawit	ton	7.094,25	8.224,18
		Lada	ton	30,00	34,77
		Kemiri	ton	18,00	20,87
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	10	153
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil	persentase kegiatan Promosi hasil produksi	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Produksi Pertanian/ Perkebunan	pertanian & perkebunan yang diikuti			
10	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi sapi	ekor	3.968	4.048
		Produksi daging	ton	10.057,00	12.835,56
		Konsumsi Daging perkapita	kg	14,4	14,9
11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah kelompok yang sudah memenuhi standarisasi Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	kelompok	0	20
		Jumlah produk peternakan yang dapat bersaing pada skala nasional	kali	0	30
12	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeriksaan kesakitan hewan/ternak besar	sampel	500	700
13	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	kelompok	0	11
14	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	kelompok	0	62
		Jumlah BPP/kecamatan yang meningkat Kapasitasnya	orang	2	4
		Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	orang	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14
Kehutanan					
1	Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Persentase rehabilitasi lahan kritis	%	0	10
Energi & Sumber Daya Mineral					
1	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	dokumen	0	40
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	Program Peningkatan				



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Sarana dan Prasarana Aparatur				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Perdagangan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	220
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	pedagang	60	300
		Persentase Ketersediaan harga dan stok barang	%	100	100
7	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	komoditi	0	2
		Ekspor bersih perdagangan	Juta (US\$)	3.070,18	16.296,89
8	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	lokasi	25	26
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	100	100
9	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Jumlah pasar daerah yang dikelola	pasar	12	14
		Peningkatan sarana dristribusi perdagangan pasar	tipe	12 pasar type D	4 pasar type D, 3 pasar type





No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
					C, 4 pasar type B, 3 pasar type A
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	pasar	2	12
		Kebersihan (Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik)	pasar	12	12
10	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	%	100	100
Perindustrian					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	72
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (bulan)	bulan	12	60
6	Program pengembangan industri Kecil Dan menengah	Pertumbuhan nilai Investasi Di Bidang Industri	%	2,34	3,38
		Pertumbuhan IKIM (Industri kecil & Industri Menengah)	%	2,86	2,86
7	Program peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra yang dibina	sentra	1	7
8	Program Penataan Struktur Industri	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda	%	0	100
		Persentase Peningkatan jumlah legalitas usaha dibidang industri	%	2,75	4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
Administrasi Pemerintahan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	60
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Terlaksananya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	orang	0	100
6	Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	dokumen	1	1
7	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	%	10	100
8	Program penguatan Ketatalaksanaan	Persentase SKPD yang telah menyusun SOP dan SP	%	10	100
9	Program penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	Kategori	CC	A
10	Program penguatan Pengawasan	Persentase penyeenggara negara yang wajib LHKPN	%	5	100
11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan	%	100	100





No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		jasa			
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase paket pengadaan B/J dilingkungan pemerintah Kota Samarinda melalui ULP	%	100	100
		Prosentase pegawai kehumasan yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan dan protokol	%	100	100
		Jumlah kerjasama antara pemkot dengan pers	media massa	7	7
		Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	kali	6	30
13	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda	%	100	100
14	Program pengendalian dan pelaporan pembangunan	Persentase peningkatan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	%	75	80
15	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Keputusan Walikota	buah	425	2.740
		Jumlah Peraturan Daerah	buah	7	57
		Jumlah Peraturan Walikota	buah	15	122
		Prosentase Penyelesaian Kasus konflik Pertanahan	%	100	100
		Persentase penyediaan produk-produk hukum daerah dan terbentuknya jaringan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi	%	100	100
16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Samarinda dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi serta Kerjasama Dalam dan	MoU	4	47



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Luar Negeri			
17	Program Penataan Daerah otonomi baru	evaluasi perkotaan sebagai tindak lanjut pertemuan APEKSI	Wilayah	9	45
18	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	Kecamatan	2	10
19	Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	tepat/tidak tepat	Tepat	Tepat
		Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	Kategori	ST	ST
		Banyaknya Kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	kecamatan	5 Kecamatan	10 Kecamatan
20	Program Bina Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Samarinda	dokumen	2	6
21	Program Fasilitas Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	dokumen	1	1
22	Penataan Wilayah Adm. Penegasan Batas Daerah dan Toponimi	Tersedianya Dokumen (Gasetir) Nama-Nama Rupabumi Kota Samarinda	dokumen	1	1
23	Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyampaian Laporan Penerimaan Bantuan Sosial dan Hibah bidang Keagamaan	%	100	100
		Prosentase Penyampaian Laporan Koordinasi bidang agama dan pendidikan; bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB; dan bidang pemuda, olahraga, dan kesbangpol	%	100	100



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Persentase terlaksananya evaluasi pelaksanaan program raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat	RTS	15.976	15.976
		Urusan yang terfasilitasi	Urusan	0	7
		Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	sidak	4	20
		Jumlah terlaksananya evaluasi dan pelaporan penghematan penggunaan energi dan air	Unit kerja	118	118
24	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase meningkatnya perkembangan asset dan laba Perusda	%	50	100
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	perusda	3	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	pelatihan / bimtek bagi anggota Dewan dan staf DPRD	orang	45	45
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase capaian Prolegda	%	80	80
		PERDA yang ditetapkan	buah	9	45
		Jumlah PERDA yang	buah	0	0



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		dibatalkan			
		RAPERDA yang disetujui DPRD	buah	19	95
		Tersedianya Tenaga ahli Utk Anggota DPRD	orang	6	30
		Terselenggaranya rapat-rapat DPRD	bulan	12	60
		Jumlah Keputusan DPRD	buah	19	95
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang per kecamatan	10	50
6	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	%	73-100	73-100
Pengawasan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang meningkat kapasitas kompetensinya	orang	0	25
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	Persentase laporan yang baik dari SKPD.	%	60	90



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat	orang	10	30
Perencanaan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparaturngawasan	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparaturngawasan	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturngawasan	orang	0	250
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	%	100	100
		Jumlah SKPD memiliki dokumen Renstra dan Renja SKPD	SKPD	48	48
		Persentase penyerapan usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diserap dalam Renja SKPD.	%	30	30
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Program	319	319
		Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	%	97,05 program, 54,20 kegiatan	100 program, 100 kegiatan
		Persentase keselarasan dokumen renstra SKPD dengan RPJMD dan RKPD	%		100
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase keterisian data sistem informasi pembangunan daerah	%	66,88	90



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	%	100	100
		Pembangunan data center	%	0	100
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	0	90
		Masterplan Green Economy	dokumen	0	1
8	Program perencanaan sosial budaya	Persentase dokumen perencanaan bidang sumberdaya manusia sesuai amanat pemerintah	%	40	100
		Persentase dokumen perencanaan pemerintahan dan aparatur sesuai amanat pemerintah	%	10	90
9	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen kajian bidang perencanaan prasarana wilayah	%	75	100
		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perencanaan Ekonomi	dokumen	0	1
10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase dokumen penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	%	0	99,99
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah sesuai amanat pemerintah	%	75	450
		Persentase Pendampingan perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	%	0	100
Keuangan					
1	Program Pelayanan Administrasi	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Perkantoran				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Belanja Langsung terhadap total APBD	%	62,46	58,15
		Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	11,71	6,85
		Rasio SILPA thdp total pendapatan	%	13,26	7
		Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	79	90
		Waktu penetapan PERDA APBD	tepat/tidak tepat	tepat	Tepat
		Belanja untuk pelayanan dasar	Milyar Rp.	2.185,30	13.489,34
		Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Milyar Rp.	1.064,20	6.174,42
		Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	%	84,00	95,00
		Belanja Publik terhadap DAU	%	335	425
		Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	opini	WTP	WTP
		Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	58,90	90,00
		Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	37,57	39,00
		Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	32,08	34,00
1	Program Pelayanan	Terlaksananya	bulan	12	60



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	bulan	12	60
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang Terlatih (%)	bulan	12	60
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (bulan)	bulan	12	60
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	100	100
		Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	%	100	100
		Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD pd RPJMD	%	70	100
		Persentase Peningkatan PAD	%	6,90	6,17
		Besarnya pendapatan daerah dari sumber lain yang sah terhadap APBD	Milyar Rp.	834,82	994,11
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan teknis fungsional	orang	800	2.470



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
		Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	orang	214	2.290
		Jumlah aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	orang	1086	2.840
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang akan pensiun	orang	56	308
6	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai Kompetensinya	%	50	100
		Persentase Pengelolaan Administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	90	99
		Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda	%	95	99
Penelitian dan Pengembangan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	60
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	60
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan teknis fungsional	orang	0	80
6	Program Litbang Bidang SDA dan Teknoogi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang SDA dan Teknoogi	kali	0	9
7	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	kali	0	19
8	Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Kesra dan Kemasyarakatan	kali	0	9
9	Program Litbang	Jumlah penelitian dan	kali		5



No.	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	
				Awal (2016)	Akhir (2021)
	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	pengembangan bidang Pemerintahan dan Aparatur			
10	Program Penguatan Sistem Inovasi daerah (SiDa)	Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	kali		1

Catatan :
Program bercetak tebal merupakan program prioritas yang masuk dalam Prioritas Walikota





BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kota Samarinda berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, program prioritas selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini. Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota diatas telah dijabarkan ke dalam agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi, dan agenda prioritas maka dirumuskan strategi sebagai sarana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program



pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kota Samarinda untuk periode 2016-2021. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi walikota namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 8.1
Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif
Kota Samarinda

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Pendidikan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	1.774,60	12	4.497,35	12	5.525,85	12	5.066,38	12	5.066,38	12	5.526,80	60	25.682,76
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	364,85	12	945,60	12	1.005,60	12	1.065,00	12	1.085,00	12	1.085,00	60	5.186,20
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	120,40	12	120,40	12	120,40	12	120,40	12	120,40	60	602,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	457,00	12	457,00	12	457,00	12	457,00	12	457,00	60	2.285,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselengganya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	30	0,00	30	240,00	30	240,00	30	320,00	30	400,00	30	480,00	150	1.680,00
6	Program pendidikan anak usia dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	41,71	100,00	41,85	4.614,00	41,99	5.834,00	42,13	6.144,00	42,27	6.174,00	42,41	6.209,00	42,41	28.975,00
		Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,75		93,75		95,75		97,75		99,75		100,00		100,00	
		Persentase lembaga PNF terakreditasi	%	36,15		50,15		64,15		78,15		92,15		100,00		100,00	
		Rasio asesor PNF terhadap bidang keahlian	%	20,59		20,69		20,80		20,90		21,00		21,11		21,11	
		Persentase jumlah TK/RA yang terakreditasi	%	25,98		26,11		26,24		26,37		26,50		26,64		26,64	
7	Program pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Pak	%	111,58	64.894,66	100,00	216.378,08	100,00	194.879,33	100,00	198.569,33	100,00	200.669,33	100,00	203.719,33	100,00	1.014.215,40

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		et A/SDLB															
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	98,80		99,10		99,40		99,70		100,00		100,00		100,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pak et A/SDLB	%	93,40		93,85		94,32		94,79		95,26		95,73		95,73	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	67,63		67,96		68,29		68,63		69,97		69,31		69,31	
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,69		82,09		82,50		82,91		83,32		83,73		83,73	
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,94		91,39		91,84		92,29		92,75		93,21		93,21	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	78,21		80,00		89,10		92,73		96,36		100,00		100,00	
		Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	88,58		89,02		89,46		89,90		90,34		90,79		90,79	
		Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	55,34		57,49		59,64		61,79		63,94		80,00		80,00	
		Persentase SMP/MTs dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	65,34		67,49		69,64		71,79		73,94		83,00		83,00	
		Rasio siswa per guru SD	Orang	20		20		19		19		18		18		18	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	66,26		68,00		70,00		72,00		74,00		76,00		76,00	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	Nilai	55,00		60,00		62,00		64,00		66,00		68,00		68,00	
		Angka Melanjutka n (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,90		99,39		99,88		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Angka Melanjutka n (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/ MA	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	orang	0		40		40		40		40		40		200	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI terakreditas i B dan A.	%	88,36	0,00	90,52	5.429,48	94,83	4.525,00	96,98	4.950,00	99,14	4.875,00	100,00	4.925,00	100,00	24.704,48
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditas i B dan A.	%	89,74		92,31		94,87		97,44		98,72		100,00		100,00	
		Persentase sekolah penyelengg ara PPDB online	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase sekolah penyelengg ara UNBK	%	50		75		100		100		100		100		100	
Kesehatan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	20.591,37	12	23.162,66	12	24.384,34	12	26.209,27	12	30.353,83	12	30.647,72	60	134.757,82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapa n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	2.166,88	12	3.351,92	12	3.524,67	12	3.567,01	12	3.610,05	12	3.658,93	60	17.712,57

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	843,60	12	843,60	12	843,60	12	843,60	12	843,60	60	4.218,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pembinaan sumber daya aparatur	bulan	12	0,00	12	2.485,00	12	2.510,00	12	2.710,00	12	2.930,00	12	3.172,00	60	13.807,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	1.166,00	12	1.151,00	12	1.233,00	12	1.334,00	12	1.400,00	60	6.284,00
6	farmasi dan alat kesehatan	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	100	12.677,00	80	61.725,00	85	54.155,00	85	68.160,00	90	91.830,00	90	873.215,00	100	1.149.085,00
		Persentase pemenuhan standar mutu kefarmasian di puskesmas	%	75		75		80		80		85		90		90	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	pembinaan upaya kesehatan dasar	Persentase puskesmas memberika n pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	%	100	0,00	100	300,00	100	325,00	100	350,00	100	400,00	100	450,00	100	1.825,00
		Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase pemeriksaa n laboratoriu m di Labkesda yang dilayani	%	18		16		15		14		13		12		12	
		Persentase pengawasan distribusi pangan yang beredar di masyarakat	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase pangan siap saji yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	100		100		100		100		100		100		100	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	%	100	0,00	100	3.267,00	100	3.531,00	100	3.858,54	100	4.110,00	100	4.395,75	100	19.162,29
		Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	%	100		100		100		100		100		100		100	
9	Program pencegahan penyakit berpotensi wabah	Persentase kelurahan yang mendapatkan dukungan analisa resiko krisis kesehatan	%	67,8	0,00	84,7	2.500,00	100	2.600,00	100	2.750,00	100	2.900,00	100	3.050,00	100	13.800,00
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat	%	100	0,00	100	5.946,14	100	6.950,00	100	7.160,00	100	7.221,80	100	7.235,45	100	34.513,39

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		perawatan (SPM)															
		Persentase balita gizi kurang	%	12		11,5		11		10		9		8		8	
		Persentase balita pendek (stunting)	%	30		29		28		27		26		25		25	
		Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	80		80		85		90		95		98		98	
		Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	45		45		50		55		60		70		70	
11	Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	0,00	60	2.077,00	65	2.117,00	75	2.297,10	80	2.501,23	85	2.736,60	85	11.728,93
		Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	%	80		85		87		90		93		98		98	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Kelurahan melaksanak an STBM	%	80		84		89		92		94		98		98	
		Persentase tempat- tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	80		82		85		88		92		98		98	
12	Program Pengendalian penyakit menular langsung	Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kseiapsiaga an dalam penanggula ngan kedarurata n kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	%	100	0,00	100	3.700,00	100	3.950,00	100	4.300,00	100	4.350,00	100	4.900,00	100	21.200,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	%	100		100		110		120		130		140		140	
		Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	50		50		60		70		80		90		90	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	3		3		5		10		20		30		30	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Angka Kesembuha n TB Paru (CR)	%	80		80		80		90		90		90		90	
		Cakupan penemuan dan penanganan balita penderita ISPA (Pneumonia)	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Angka Prevalensi Kusta	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita hepatitis	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
13	Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunizati on (UCI) (SPM)	%	91	160,00	91	4.360,00	92	3.463,00	93	3.490,00	94	3.500,00	95	3.510,00	95	18.323,00
		Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	91		91		91,5		92		92,5		93		93	
14	Program pengendalian penyakit bersumber binatang	IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	53,5	0,00	53,5	1.000,00	53,4	1.500,00	53,3	1.700,00	53,2	1.700,00	53,1	1.700,00	53,1	7.600,00
		Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
		Cakupan penderita filariasis yang ditangani	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Cakupan penderita flu burung yang ditangani	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Non Polio	%	100		100		100		100		100		100		100	
15	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Dokumen standar pelayanan publik di UPTD	%	100	13.027,09	100	69.585,10	100	96.432,45	100	92.788,50	100	98.372,35	100	100.149,59	100	457.327,99
		Akreditasi fasyankes	%	41,67		62,50		83,33		100		100		100		100	
		Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	50		60		70		80		90		100		100	
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	90		90		90		90		90		90		90	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
16	Program pengembang an dan pemberdayaa n SDM kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	orang	56,3 per 100.000 pendud uk	0,00	57 per 100.000 pendud uk	1.300,00	57,7 per 100.000 pendud uk	3.234,25	58,3 per 100.000 pendud uk	3.264,25	59 per 100.000 pendud uk	3.297,25	60 per 100.000 pendud uk	3.333,55	60 per 100.000 pendud uk	14.429,30
		Rasio tenaga bidan dan perawat per satuan penduduk	orang	114,7 per 100.000 pendud uk		116 per 100.000 pendud uk		118 per 100.000 pendud uk		120 per 100.000 pendud uk		122 per 100.000 pendud uk		124 per 100.000 pendud uk		124 per 100.000 pendud uk	
		Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat yang ditingkatkan kompetensi nya	%	0		60		65		70		80		90		90	
17	Program upaya kesehatan rujukan	Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	%	100	2.140,70	100	10.290,41	100	10.590,41	100	11.639,45	100	12.793,40	100	14.062,74	100	59.376,41
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	unit	9		9		10		10		11		11		11	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus	%	100		100		100		100		100		100		100	
18	Program penguatan JKN	Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	%	25	10.000,00	25	170.854,99	50	17.535,00	75	18.208,50	90	18.426,35	100	19.201,09	100	244.225,93
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	%	91	0,00	91	2.800,00	92	3.010,00	94	3.238,89	95	3.488,49	96	3.760,87	96	16.298,25
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SPM)	%	91		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (SPM)	%	72		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil (SPM)	%	95		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM)	%	95		100		100		100		100		100		100	
		Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan nifas	%	95		95		95		95		95		95		95	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95		95		95		95		95		95		95	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	%	40		40		50		60		70		80		80	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (SPM)	%	90		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	90		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90		90		95		95		95		95		95	
		Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	%	91		91		92		94		95		96		96	
		Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	75		75		85		90		95		100		100	
20	Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui	%	30	0,00	30	2.550,00	50	2.600,00	70	2.650,00	90	2.675,00	100	2.700,00	100	13.175,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		SIKDA															
21	Program pengelolaan komunikasi publik	Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan pada masyarakat	%	7.514	0,00	7.614	300,00	7.727	400,00	7.840	450,00	7.950	500,00	7.955	550,00	7.955	2.200,00
22	Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	33,33	0,00	41,67	200,00	58,33	225,00	75	250,00	80	260,00	96	270,00	96	1.205,00
23	Program pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	20,83	0,00	32	100,00	48	150,00	64	200,00	72	250,00	92	250,00	92	950,00
24	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	96	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.250,00	100	1.500,00	100	1.750,00	100	6.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
25	Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase puskesmas terakreditasi i	%	41,67	61.474,72	62,50	63.376,00	83,33	16.228,86	100	16.715,73	100	17.217,20	100	17.733,71	100	131.271,50
		Persentase RSUD yang tersertifikasi secara nasional	%	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.300,00	100	3.630,00	100	3.993,00	100	4.392,30	100	18.315,30
26	Program pelayanan keperawatan dan keteknisian medis	Persentase puskesmas yang menerapka n perkesmas	%	100	0,00	100	100,00	100	125,00	100	150,00	100	175,00	100	200,00	100	750,00
27	Program pelayanan kesehatan jiwa	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	%	25	0,00	32	125,00	40	150,00	45	175,00	56	200,00	64	200,00	64	850,00
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	0,00	12	2.145,00	12	2.345,00	12	2.345,00	12	2.450,00	12	2.460,00	60	11.745,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	2.435,50	12	8.215,00	12	22.028,00	12	29.520,00	12	21.236,00	12	21.678,00	60	102.677,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	0,00	12	96,00	12	96,00	12	96,00	12	96,00	12	96,00	60	480,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	601,99	12	1.050,00	12	1.050,00	12	1.050,00	12	1.050,00	12	1.100,00	60	5.300,00
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	bulan	12	0,00	12	1.500,00	12	1.600,00	12	2.600,00	12	1.650,00	12	1.650,00	60	9.000,00
6	Program pembangunan Gedung Pemerintah	Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dalam kondisi baik	%		0,00		953.497,02		1.129.081,82		1.054.156,82		1.160.581,82		1.129.081,82		5.426.399,32

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Kesehatan dalam kondisi baik	%														
		Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Olahraga dalam kondisi baik	%														
		Proporsi Unit Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik.	%														
7	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus	Jumlah Unit Bangunan Gedung pada Kawasan Khusus	unit		0,00		141.950,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		201.950,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
8	Program Pembanguna n Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan	Jumlah Unit Bangunan Gedung Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan Baru	unit		0,00		92.570,00		92.570,00		92.570,00		92.570,00		92.570,00		462.850,00
9	Program Pengembang an Lingkungan Sehat dan persampahan Kota Samarinda	Jumlah Unit Bangunan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)	unit		0,00		35.000,00		45.000,00		50.000,00		55.000,00		60.000,00		245.000,00
		Jumlah Unit Penyediaan TPA	unit														
		Jumlah Unit Pembangun an TPST	unit														
10	Program pengembang an kinerja pengelolaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjut an terhadap air minum layak	%	94	0,00	96	427.346,25	98	769.455,75	100	770.500,75	100	659.650,00	100	653.874,25	100	3.280.827,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		persentase penduduk yang mendapatk an akses air minum yang aman	%	94		96		98		100		100		100		100	
11	Program Pengendalian penataan bangunan	Tersedianya dokumen data bangunan	dokumen	0	0,00	1	1.175,00	1	1.210,00	1	1.245,00	1	1.280,00	1	1.315,00	5	6.225,00
		Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	kecamatan	0		4		4		4		4		4		4	
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Perubahan alih fungsi lahan	Ha	100	0,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	3.500,00
		Terlaksanak annya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang,	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tataruang (RTR) wilayah kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	20	0,00	80	13.470,00	100	9.380,00	100	9.390,00	100	9.400,00	100	9.410,00	100	51.050,00
14	Program pembanguna n Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,6	345.630,6 2	81,2	886.170,45	85,8	740.700,00	90,4	521.090,00	95	376.500,00	98	237.500,00	98	2.761.960,4 5
		Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	35		45		55		65		75		80		80	
		persentase terhubungn ya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/	%	10		30		50		70		90		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		kota															
15	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	20	5.227,81	19	47.120,00	15	80.200,00	10	69.000,00	5	65.250,00	2	74.250,00	2	335.820,00
16	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	%	0	0,00	15	46.000,00	20	78.500,00	25	88.000,00	30	41.000,00	35	27.000,00	35	280.500,00
		Pembangunan turap di wilayah aliran sungai (SKM)	meter	0	0,00	250	25.000,00	250	25.000,00	250	25.000,00	250	25.000,00	250	25.000,00	1.250,00	125.000,00
17	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55	188.550,00	60	164.331,92	65	190.500,00	70	229.500,00	75	133.800,00	80	118.000,00	80	836.131,92

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
18	Program pengendalian Banjir	Jumlah titik banjir yang tersisa	titik	50	67.762,28	48	430.170,68	46	520.750,00	44	465.550,00	42	422.250,00	40	210.500,00	40	2.049.220,68
19	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik Dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	km:km2	1 : 0,27	5.543,33	1 : 0,17	261.470,00	1 : 0,12	190.770,00	1 : 0,09	207.920,00	1 : 0,08	165.920,00	1 : 0,07	129.220,00	1 : 0,07	955.300,00
		persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	0		0		15		33		67		100		100	
20	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi			0	0,00	100	850,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	4.050,00
21	Program Perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur / jasa konstruksi			0	0,00	100	23.795,00	100	23.120,00	100	24.275,00	100	26.925,00	100	28.140,00	100	126.255,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
Perumahan rakyat & Kawasan Permukiman																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	bln	12	0,00	12	9.944,00	12	9.995,50	12	10.007,50	12	10.049,50	12	10.071,50	60	50.068,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bln	12	0,00	12	6.100,00	12	6.128,00	12	5.807,96	12	5.840,02	12	5.874,32	60	29.750,30
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Disiplin Aparatur	bln	12	0,00	12	212,00	12	212,00	12	212,00	12	212,00	12	212,00	60	1.060,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	bln	12	0,00	12	1.625,00	12	850,00	12	860,00	12	970,00	12	880,00	60	5.185,00
5	Prog. Peningkt. Kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	orang	20	0,00	20	400,00	20	400,00	20	400,00	20	400,00	20	400,00	100	2.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
6	Program Pengembang an Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	30	0,00	30	240.670,00	61	487.725,00	100	610.075,00	100	686.485,00	100	718.406,45	100	2.743.361,4 5
		Persentase kawasan kumuh	%	0,49		0,39		0,29		0,19		0,09		0,00		0,00	
		Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	%	100		100		100		100		100		100		100	
7	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)	Luas layanan sanitasi	%	60	0,00	68	11.650,00	76	12.750,00	84	13.500,00	92	15.000,00	100	18.750,00	100	71.650,00
8	Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjut an terhadap air minum layak	%	60	0,00	68	85.264,60	76	39.414,60	84	39.414,60	92	39.414,60	100	39.417,00	100	242.925,40
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penyediaan RTH Publik	%	2,5	10.496,78	3,0	67.073,86	5,0	74.850,00	6,0	78.566,59	8,0	87.015,04	10,0	91.338,72	10,0	398.844,21

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
10	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	275	0,00	275	7.500,00	300	19.650,00	325	18.800,00	350	19.000,00	375	14.200,00	375	79.150,00
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	11.033,03	12	12.023,47	12	12.057,93	12	12.057,93	12	12.057,93	12	12.057,93	60	60.255,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	1.386,08	12	2.410,85	12	2.410,85	12	2.458,67	12	2.507,44	12	2.507,44	60	12.295,26
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	121,60	12	270,50	12	300,00	12	300,00	12	300,00	60	1.292,10
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan keuangan	bulan	12	0,00	12	700,00	12	700,00	12	900,00	12	900,00	12	900,00	60	4.100,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan	orang	50	0,00	18	1.100,00	51	1.100,00	85	1.100,00	64	1.100,00	100	1.100,00	318	5.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
6	Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindunga n Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	orang per RT	0,101	0,00	0,101	250,00	0,108	6.842,00	0,115	7.342,00	0,122	850,00	0,129	7.342,00	0,129	22.626,00
		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	2,2		2,45		2,62		2,79		2,97		3,14		3,14	
		Persentase Linmas yang memiliki kemampuan dalam mencegah konflik sosial	%	40,0		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Piket Pengamana n Petugas Satpol PP	kali/hari/k ecamatan	1	850,00	1	1.750,00	1	3.387,77	1	3.387,77	1	3.387,77	1	3.387,77	1	15.301,08
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentrama n masyarakat	%	40		60		70		80		90		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Deteksi dini penanganan kasus gangguan ketentraman dan tratibum	kecamatan	10		10		10		10		10		10		10	
8	Program pemeliharaaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Perda	5	350,00	5	500,00	5	607,50	5	607,50	5	607,50	5	607,50	25	2.930,00
		Penurunan angka kriminalitas	%	3		5		7		9		11		13		13	
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan pembinaan	Orang	50	0,00	70	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	470	1.250,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	1.570,56	12	1.850,96	12	1.850,96	12	1.850,96	12	1.850,96	12	1.850,96	60	9.254,80
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	256,30	12	256,90	12	256,90	12	256,90	12	256,90	12	256,90	60	1.284,50

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparat	Bulan	12	0,00	12	30,80	12	30,80	12	30,80	12	30,80	12	30,80	60	154,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan keuangan	Bulan	12	0,00	12	450,00	12	450,00	12	450,00	12	450,00	12	450,00	60	2.250,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah yang mengikuti pelatihan	Orang	0	0,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	50	500,00
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah konflik sosial di masyarakat	kasus	60	0,00	60	3.920,90	55	3.920,90	50	3.920,90	45	3.920,90	40	3.920,90	40	19.604,50
		Persentase penangan an kasus gangguan ketenteram an dan ketertiban umum	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0	0,00	30	7.796,93	40	8.090,37	45	8.090,37	60	7.890,70	70	8.040,37	70	39.908,74
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	10	0,00	60	5.373,78	60	5.053,78	60	4.053,78	60	4.053,78	60	4.053,78	60	22.588,92
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	46		60		75		75		75		75		75	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	250,00	12	765,00	12	780,50	12	791,00	12	801,50	12	812,00	60	3.950,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	439,37	12	504,37	12	519,37	12	519,37	12	519,37	12	519,37	60	2.581,86

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	20,00	12	22,50	12	22,50	12	22,50	12	22,50	60	110,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	Tingkat kualitas sumber daya aparatur sipil negara	%	30	0,00	40	80,00	50	80,00	60	80,00	70	80,00	80	80,00	300	400,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	150,00	12	150,00	12	200,00	12	250,00	12	300,00	60	1.050,00
6	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Cakupan regulasi dalam pengurangan risiko bencana	%	28,57	0,00	57,14	2.249,88	85,71	3.135,86	100	3.120,00	100	2.420,00	100	2.540,00	100	13.465,74
		Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan kelurahan tangguh bencana	%	20		30		50		70		85		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	%	100	0,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	4.000,00
		Persentase Pemulihan trauma pasca bencana	%	0		100		100		100		100		100		100	
8	Program kedaruratan dan logistik	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	64,00	100	3.012,15	100	2.200,00	100	2.200,00	100	2.200,00	100	2.200,00	100	11.812,15

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100		100		100		100		100		100		100	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	3.085,02	12	3.600,00	12	6.727,30	12	6.727,80	12	6.728,30	12	6.728,80	60	30.512,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	1.741,89	12	1.420,00	12	1.460,00	12	1.460,00	12	1.700,00	12	1.700,00	60	7.740,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	152,00	12	152,00	12	152,00	12	152,00	12	152,00	60	760,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kualitas sumber daya aparatur sipil negara	%	30	0,00	40	80,00	50	80,00	60	80,00	70	80,00	80	80,00	300	400,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	60	2.500,00
6	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	90	0,00	100	21.228,32	100	9.882,74	100	14.982,74	100	14.182,74	100	14.882,74	100	75.159,28
		Persentase penurunan jumlah kejadian kebakaran	%	0		5		5		5		5		5		25	
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	15,63		31,25		53,13		75		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Cakupan mobil/mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	%	50		50		55		65		75		85		85	
Sosial																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	809,63	12	1.349,58	12	1.230,60	12	1.283,60	12	1.333,60	12	1.383,60	60	6.580,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	312,52	12	442,00	12	352,00	12	355,00	12	377,00	12	380,00	60	1.906,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	0,00	12	34,00	12	34,00	12	34,00	12	34,00	12	34,00	60	170,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya Manusia yang meningkatkan kapasitas kompetensinya	Bulan	0	0,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	50	400,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0,00	12	150,00	12	150,00	12	200,00	12	150,00	12	150,00	60	800,00
6	Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	17	123,55	25	1.250,00	30	1.300,00	40	1.400,00	50	1.500,00	50	1.650,00	50	7.100,00
7	Program pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediaka n sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	0,00	100	4.050,00	100	4.500,00	100	4.850,00	100	5.250,00	100	5.450,00	100	24.100,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Veteran yang mendapat pembinaan	%	100		100		100		100		100		100		100	
8	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	225,00	100	5.730,00	100	5.875,00	100	6.350,00	100	6.600,00	100	6.800,00	100	31.355,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase (%) penyandang disabiitas yang menerima peayananan sosial	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PMKS yang tertangani	%	14,34	0,00	14,34	3.000,00	16,3	2.320,00	17,39	2.445,00	21,74	2.595,00	23,91	2.645,00	93,68	13.005,00
		Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	38,45		38,45		40		45		48		50		50,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	50		50		62,5		78,12		87,5		100		100	
		Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	orang	7602		7602		7602		7602		7602		7602		38010	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandan g cacat fiisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	%	16,73	0,00	16,73	1.050,00	16,73	775,00	16,73	775,00	16,73	775,00	16,73	775,00	83,65	4.150,00
11	Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)	Persentase terbinanya eks. Penyandang penyakit sosial	%	29,41	0,00	20,71	450,00	7,72	500,00	8,64	600,00	14,4	700,00	6,07	700,00	6,07	2.950,00
12	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	%	12	0,00	14	850,00	8	850,00	8,33	900,00	9,09	900,00	10	950,00	20	4.450,00
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Tenaga Kerja																	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	2.093,61	12	2.476,11	12	2.576,11	12	2.597,99	12	2.597,99	12	2.597,99	60	12.846,18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	326,50	12	1.029,04	12	1.029,04	12	938,13	12	938,13	12	938,13	60	4.872,48
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	60	160,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	orang	0	0,00	0	0,00	25	250,00	25	250,00	25	250,00	25	250,00	100	1.000,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	50,00	12	650,00	12	330,00	12	330,00	12	430,00	12	230,00	60	1.970,00
6	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	0,00	100	2.600,00	100	2.950,00	100	1.411,00	100	1.475,00	100	1.570,00	100	10.006,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0		100		100		100		100		100		100	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase lembaga pelatihan kerja swasta terbina	%	85		85		75		87		85		90		90	
7	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	%	67	0,00	64	3.530,00	69	1.925,00	73	2.175,00	78	2.375,00	79	2.575,00	79	12.580,00
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61,2		61,71		62,17		62,63		63,1		63,58		63,58	
		Tingkat pengangguran terbuka	%	5,5		5,2		5		4,8		4,6		4,4		4,4	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Rasio penduduk yang bekerja	%	94,50		94,80		95,00		95,20		95,40		95,60		95,60	
8	Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	85	0,00	85	1.575,00	85	1.275,00	85	950,00	85	975,00	85	1.025,00	85	5.800,00
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	61,13		62,62		64,12		66,09		68,46		71,15		71,15	
		Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	80		82		84		85		86		88		88	
Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	674.5	12	870,00	12	875,00	12	880,00	12	885,00	12	890,00	60	4.400,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	173.6	12	235,37	12	220,37	12	220,37	12	220,37	12	220,37	60	1.116,85
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	0,00	12	24,00	12	24,00	12	24,00	12	24,00	12	24,00	60	120,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggara nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang	5	0,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	25	200,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	186,05	12	552,92	12	608,21	12	625,00	12	650,00	12	695,00	60	3.131,12
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Presentasi kelembagaa n PUG yang aktif	%	12	357,50	17	400,00	23	425,00	32	450,00	40	475,00	50	500,00	50	2.250,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	%	100		100		100		100		100		100		100	
7	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	37	0,00	40	1.100,00	43	1.175,00	46	1.300,00	49	1.375,00	52	1.500,00	52	6.450,00
		persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog. Keberdayaan dalam wirausahaan guna penguatan ekonomi keluarga	%	19		21		23		25		27		29		29	
		Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	%	97		97,5		98		98,5		99		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37		40		43		46		49		52		52	
8	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100,00	100	4.125,00	100	3.050,00	100	4.300,00	100	4.450,00	100	4.550,00	100	20.475,00
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Tertanganin ya pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Terselengga ranya informasi pencegahan kekerasan terhadap anak	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100,00	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatk an layanan bantuan hukum.	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan layanan pemulanga n bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100		100		100		100	
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	%	100	0,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	1.750,00

Pangan

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	146,40	12	979,00	12	1.130,40	12	1.130,40	12	1.130,40	12	1.130,40	60	5.248,42
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	0,00	12	85,00	12	92,00	12	92,00	12	92,00	12	92,00	60	1.191,59
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	35,00	12	35,00	12	35,00	12	35,00	12	35,00	60	162,49
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	345,00	12	345,00	12	345,00	12	345,00	12	345,00	60	1.868,63
5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	orang	0	0,00	0	259,54	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	60	1.868,63
6	Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	3017		3050	1.050,00	3100	1.050,00	3150	1.050,00	3200	1.050,00	3250	1.050,00	3250	5.250,00
		Ketersediaan protein	Gram/kap/hr	86,66		87		87		88		90		91		91	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		perkapita															
		Penguatan cadangan pangan	%	42,16		42,16		54,00		56,00		58,00		60,00		60,00	
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	77,00		80,00		83,00		87,00		88,00		90,00		90,00	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	75		78		80		81		82		85		85	
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70		75		78		78		80		85		85	
7	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,70	700,00	90,00	4.425,00	90,00	2.785,00	90,00	4.145,00	90,00	5.955,00	90,00	3.665,00	90,00	20.975,00
		Persentase Keamanan Pangan	%	85,00		85,00		85,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
		Pengawasan dan pembinaan kewanman	%	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		pangan															
8	Program Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Peta Pemantauan Kerawanan Pangan Kota Samarinda	Peta	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	600,00
Pertanahan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	0,00	12	3.960	12	4.135	12	4.340	12	4.545	12	4.750	60	21.730,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	0,00	12	950	12	2.450	12	1.100	12	850	12	1.000	60	6.350,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Bulan	12	0,00	12	65	12	65	12	65	12	65	12	65	60	325,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya manusia yang meningkat kompetensinya	orang	0	0,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	125	5.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0,00	12	500	12	500	12	500	12	500	12	500	60	2.500,00
6	Pembinaan dan Pengembang an Kawasan Perkotaan	Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	kecamata n	0	0,00	2	1.700,00	2	1.700,00	2	1.700,00	2	1.700,00	2	1.700,00	10	8.500,00
		Terlaksana koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	SKPD	0	0,00	15		15		15		15		15		15	
		Jumlah SKPD peserta sosialisasi	SKPD	0	0,00	47		47		47		47		47		47	
7	Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pemanfaata n Tanah Kosong	%	0	0,00		2.100,00		2.125,00		2.150,00		2.575,00		2.600,00		11.550,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Permohona n warga masyarakat untuk pensertifika tan tanah melalui program pemerintah	sertifikat	0		500		500		500		500		500		2500	
		Pensertifika tan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	%	0		100		100		100		100		100		100	
8	Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	Terlaksanan ya fasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	kasus	10	0,00	10	200,00	10	250,00	10	300,00	10	350,00	10	400,00	50	1.500,00
Lingkungan Hidup																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	0,00	12	33.090,95	12	41.143,39	12	51.494,31	12	64.976,97	12	80.791,34	60	271.496,97
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpelihara nya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	0,00	12	13.621,84	12	15.806,20	12	18.452,44	12	21.622,93	12	25.422,52	60	94.925,93

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Bulan	12	0,00	12	1.194,25	12	1.194,25	12	1.194,25	12	1.194,25	12	1.194,25	60	5.971,25
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM memiliki pendidikan dan latihan di bidang LH pada Dinas Lingkungan Hidup	%	0	0,00	5,12	500,00	9,40	600,00	14,00	650,00	19,00	700,00	24,34	750,00	24,34	3.200,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0,00	12	300,00	12	300,00	12	300,00	12	300,00	12	300,00	60	1.500,00
6	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	%	0	0,00	21,3	3.100,00	55	4.950,00	76	3.000,00	89	1.950,00	100	1.550,00	100	14.550,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air badan air	Status	Cemar berat (≤ -100)	0,00	Cemar berat (≤ -90)	2.470,00	Cemar sedang (≥ -30)	2.875,00	Cemar sedang (≥ -20)	3.125,00	Cemar ringan (≥ -10)	3.475,00	Tidak tercemar	3.575,00	Tidak tercemar	15.520,00
		prosestase kerusakan lingkungan terhadap luas kota	%	0		25		22		20		18		15		15	
		Indeks Status Kualitas udara ambien perkotaan	nilai	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengangkutan dan pengolahan timbulan sampah di TPA	%	64	0,00	64	93.945,50	65	26.548,07	69	31.648,07	80	35.198,07	90	37.473,07	90	224.812,78
		Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%	5,70		10,00		15,00		25,00		40,00		55,00		55,00	
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	1.867,43	12	3.792,94	12	4.591,00	12	4.709,00	12	4.809,00	12	4.965,00	60	22.866,94

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	367,01	12	601,89	12	657,89	12	709,89	12	761,89	12	851,89	60	3.583,45
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	50,00	12	50,00	12	50,00	12	50,00	12	50,00	60	250,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	500,00	12	550,00	12	550,00	12	600,00	12	650,00	60	2.850,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya Manusia yang meningkat kapasitas kompetensinya	Orang	10	0,00	15	350,00	20	350,00	25	400,00	30	500,00	35	600,00	125	2.200,00
6	Program penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP-elektronik per satuan penduduk	%	45	128,50	60	14.500,00	70	14.425,00	80	15.700,00	90	17.075,00	100	18.660,00	100	80.360,00
		Persentase bayi berakute	%	75		80		85		90		95		98		98	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		kelahiran															
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75		80		85		90		95		97		97	
		Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim)	%	70		75		80		85		90		95		95	
		Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	40		50		75		85		90		95		95	
		Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	65		70		75		80		85		90		90	
		Persentase kepemilikan kartu Identitas Anak	%	0		50		75		80		85		90		90	
Pemberdayaan Masyarakat & Desa																	
1	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	PKK aktif	%	70	160,00	70	1.050,00	70	1.500,00	70	1.750,00	70	2.000,00	70	2.000,00	70	8.300,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Posyandu aktif	unit	698		710		710		710		710		710		710	
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	5		10,8		14,45		21,7		28,9		36		36	
		Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	%	100		100		100		100		100		100		100	
2	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	0	0,00	0	1.750,00	0	1.000,00	0	1.200,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	6.950,00
3	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	1.349,00	100	2.000,00	100	2.200,00	100	2.700,00	100	2.550,00	100	2.900,00	100	12.350,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
Pengendalian penduduk & keluarga berencana																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	12	836,67	12	1.691,07	12	1.833,50	12	1.966,00	12	2.099,50	12	2.225,00	60	9.815,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	18,48	12	486,67	12	490,00	12	494,00	12	498,00	12	501,00	60	2.469,67
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Disiplin Aparatur	Bulan	12	0,00	12	58,50	12	58,50	12	58,50	12	58,50	12	58,50	60	292,50
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Bulan	12	0,00	12	200,00	12	300,00	12	400,00	12	500,00	12	600,00	60	2.000,00
5	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya manusia yang meningkat kompetensinya	orang	0	0,00	11	110,00	11	110,00	12	120,00	13	130,00	14	140,00	61	610,00
6	Program Keluarga Berencana	KB Baru	orang	25.912,00	0,00	26.912,00	2.800,00	27.912,00	3.000,00	28.912,00	3.700,00	29.912,00	4.400,00	30.912,00	5.100,00	30.912,00	19.000,00
		KB Aktif	orang	97.474,		97.474,		102.974		107.974		112.974		117.974		117.974	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
				00		00		,00		,00		,00		,00		,00	
		MKJP Baru	orang	6.000,0 0		6.100,0 0		6.200,0 0		6.300,0 0		6.400,0 0		6.500,0 0		6.500,0 0	
		Unmed Need	%	18,00		17,00		16,00		15,00		14,00		13,00		13,00	
		Laju Pertumbuh an Penduduk	%	1,93		1,83		1,74		1,71		1,61		1,50		1,50	
7	Program pelayanan kontrasepsi	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	%	60,48	0,00	61,82	800,00	62,44	900,00	63,06	1.000,00	63,69	1.100,00	64,33	1.200,00	64,33	5.000,00
8	Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Jumlah PPKBD	Kelompok	59,00	0,00	59,00	2.769,28	59,00	4.313,48	59,00	5.017,68	59,00	8.715,16	59,00	9.468,16	59,00	30.283,76
		Jumlah Sub PPKBD	Kelompok	1.913,0 0		1.913,0 0		1.985,0 0		1.985,0 0		1.985,0 0		1.985,0 0		1.950,0 0	
9	Program Pengembang an Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Jumlah PIK KRR di Kota	Kelompok	66,00	0,00	75,00	500,00	80,00	600,00	85,00	700,00	90,00	800,00	95,00	900,00	95,00	3.500,00
		Angka Kelahiran Pada	%	32,00		32,00		30,00		28,00		24,00		22,00		26,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Remaja															
10	Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah BKB	unit	84,00	0,00	85,00	500,00	86,00	600,00	87,00	700,00	88,00	800,00	90,00	900,00	90,00	3.500,00
11	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Kehamilan yang tidak diinginkan (gagal ber-KB)	%	6,20	500,00	6,00	2.000,00	5,90	5.000,00	5,80	6.000,00	5,70	7.100,00	5,60	10.000,00	5,60	30.100,00
12	Program Peningkatan Penanggulan gan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah Penderita HIV di Samarinda	orang	1.400,00	199,00	1.375,00	500,00	1.350,00	600,00	1.305,00	700,00	1.250,00	800,00	1.200,00	900,00	1.200,00	3.500,00
13	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Usia Kawin Pertama	orang	66.372	0,00	65.372	500,00	64.372	1.800,00	63.372	2.100,00	62.372	2.400,00	61.372	2.700,00	61.372	9.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
	Anak																
14	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase BKB	%	73,26	0,00	75,58	700,00	77,91	850,00	80,23	1.000,00	82,56	1.150,00	84,88	1.300,00	84,88	5.000,00
		Persentase BKL	%	75,34		78,08		80,82		83,56		86,30		89,04		89,04	
		Persentase BKR	%	84,62		88,46		92,31		96,15		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah kelompok UPPKS	kelompok	128,00		128,00		130,00		132,00		134,00		136,00		136,00	
Perhubungan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	8.065,08	12	29.871,96	12	34.693,86	12	38.772,28	12	43.085,21	12	47.656,12	60	194.079,44
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapa n sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	1.104,28	12	1.560,30	12	1.732,00	12	1.932,00	12	2.082,00	12	2.182,00	60	9.488,30

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan disiplin aparat	Pelaksanaan disiplin aparat	Bulan	12	0,00	12	417,34	12	700,00	12	750,00	12	800,00	12	850,00	60	3.517,34
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Terselengganya peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Orang	0	0,00	30	300,00	30	300,00	30	300,00	30	300,00	30	300,00	150	1.500,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0,00	12	800,00	12	900,00	12	1.000,00	12	1.100,00	12	1.200,00	60	5.000,00
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sub terminal dalam Kondisi baik	%	75	100,00	80	16.328,50	80	39.048,05	83	5.300,00	83	4.800,00	100	4.800,00	100	70.276,55
		Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	%	90		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Ketersediaa n Dokumen Rencana Bidang Perhubunga n Kota Samarinda	%	0,00		40,00		60,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	%	65	600,00	70	14.442,05	75	8.400,00	80	7.600,00	90	8.600,00	100	9.000,00	100	48.042,05
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubunga n Bermotor minimal 4000 (empat ribu)	unit	1	861,66	1	12.734,13	1	7.695,30	1	7.725,00	1	7.938,80	1	8.200,80	1	44.294,03

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		kendaraan wajib uji															
		Persentase ketersediaan angkutan kota	%	48,76		50,72		52,63		54,76		58,70		66,67		66,67	
		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	%	50,69		51,18		51,68		52,19		52,70		53,22		53,22	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	197.156		593.776		564.088		846.132		1.269.198		1.903.797		1.903.797	
		Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	63,86		70,24		76,63		81,45		84,59		86,15		86,15	
		Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	unit	63.636		70.000		77.000		84.700		93.170		102.487		102.487	
		Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	%	90		90		90		90		90		90		90	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	5,22		5,22		5,22		5,22		5,22		5,16		5,16	
		Persentase kapal yang bersertifikas i	%	81		82		83		84		85		86		86	
		Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program Pembanguna n Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	85	0,00	87	1.000,00	92	1.000,00	95	1.000,00	97	6.000,00	100	1.000,00	100	10.000,00
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubunga n dalam Kondisi Baik	%	0		70		75		80		90		90		90	
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Berkurangn ya titik kemacetan	%	48,57	867,50	50,00	39.723,67	51,43	43.075,00	52,86	42.200,00	55,71	48.885,00	60,00	49.910,00	60,00	223.793,67
		Persentase Pelaksanaa n Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	%	56		60		62		68		76		86		86	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, ZOSS dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/ Kota :															
		- rambu	%	45		55		65		75		90		100		100	
		- marka	%	16		17		18		19		21		22		22	
		- ZOSS	%	40		50		60		70		80		80		80	
		- Guardrill	%	44		56		67		78		89		100		100	
11	Program peningkatan kelaikan pengoperasia n kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan operasional kendaraan bermotor	kali	0	750,00	22	2.900,00	30	2.900,00	40	2.900,00	50	2.900,00	60	2.900,00	60	14.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
12	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton) dan Penumpang (orang)	ton & orang	0	0,00	48.702.272 & 1.652.483	105.710,00									48.702.272 & 1.652.483	105.710,00
Komunikasi & Informatika																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	0	0,00	12	1.610,44	12	1.610,44	12	1.660,44	12	1.660,44	12	1.660,44	60	8.202,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	0	0,00	12	253,32	12	253,32	12	253,32	12	253,32	12	253,32	60	1.266,60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	0	0,00	12	52,50	12	52,50	12	75,00	12	80,00	12	85,00	60	345,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggara nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	10	100,00	15	150,00	30	300,00	40	450,00	60	600,00	155	1.600,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	0	0,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00
6	Program pengembang an komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah OPD Yang Menyediakan DIP	unit	0	0,00	10	500,00	20	600,00	30	700,00	40	800,00	50	900,00	50	3.500,00
7	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM bidang TIK	orang	0	0,00	5	450,00	7	525,00	10	615,00	15	685,00	10	800,00	47	3.075,00
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terjalannya Kerjasama dengan pihak media massa dan tersalurnya informasi melalui Lembaga Informasi Publik	buah	0	0,00	15	1.050,00	30	1.700,00	50	2.400,00	75	3.000,00	100	3.500,00	100	11.650,00
		Penyebarlua san Informasi Melalui	kali	0		2		4		6		9		12		33	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Media Tradisional															
9	Program pengembang an Infrastruktur komunikasi,in formasi dan media massa	Persentase capaian pengemban gan Program Infrastrukt u r Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Kota Samarinda	%	0	0,00	20	1.450,00	30	950,00	50	950,00	70	950,00	100	750,00	100	5.050,00
10	Program pengembang an Aplikasi Teknologi Informatika	Terselengga ranya e-government yang terintegrasi	aplikasi	0	0,00	1	2.692,32	1	1.849,00	1	2.089,00	1	2.365,00	1	2.682,00	1	11.677,32
Koperasi & UKM																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	623,89	12	636,89	12	636,89	12	636,89	12	636,89	12	636,89	60	3.184,45
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapa n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	252,71	12	221,90	12	221,90	12	221,90	12	221,90	12	221,90	60	1.109,49

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	0,00	12	28,00	12	28,00	12	28,00	12	28,00	60	112,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang terlatih	%	10	0,00	10	800,00	20	250,00	30	300,00	40	300,00	40	300,00	40	1.950,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00
6	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	79,64	0,00	80	4.750,00	81	2.050,00	82	2.150,00	83	2.205,00	84	2.400,00	84	13.555,00
		Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	20		20		40		60		80		90		90	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program pengembang an sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran promosi produk	unit	15	100,00	40	400,00	45	400,00	50	400,00	55	400,00	70	400,00	70	2.000,00
8	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UMKM	%	88	100,00	88,2	400,00	88,4	400,00	88,6	400,00	88,8	400,00	90	500,00	90	2.100,00
9	Program pengembang an kewirausaha an dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang dibina	unit	100	0,00	100	400,00	150	400,00	200	500,00	200	500,00	300	500,00	300	2.300,00
Penanaman Modal																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	0,00	12	3.965,78	12	4.840,78	12	4.895,78	12	4.295,78	12	4.395,78	60	22.393,88
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkap n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	0,00	12	788,13	12	798,13	12	803,13	12	803,13	12	803,13	60	3.995,66

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	60,00	12	60,00	12	60,00	12	60,00	12	60,00	60	300,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur PNS yang mengikuti diklat/bimtek/pelatihan	orang	0	0,00	28	808,00	48	478,00	48	528,00	58	588,00	58	688,00	240	3.090,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	60	1.000,00
6	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	event	3	0,00	8	8.000,00	12	8.045,00	14	8.100,00	13	8.140,00	18	8.200,00	18	40.485,00
		Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMD N	orang	2.650		3.000		3.250		3.250		3.500		3.500		3.500	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	perusahaan	173	4.600,00	175	5.575,00	177	5.375,00	180	4.640,98	183	5.325,00	185	4.924,50	185	25.840,48
		Jumlah investor PMA	perusahaan	11		13		13		15		17		17		17	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Juta Rp.	6.500.000		6.650.000		6.650.000		6.750.000		6.850.000		7.000.000		33.900.000	
		Jumlah nilai investasi PMA	Juta Rp.	2.250.000		2.350.000		2.350.000		2.500.000		2.650.000		2.750.000		12.600.000	
		Jumlah bangunan ber-IMB	unit	18.301		20.500		22.500		24.000		25.250		26.500		26.500	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan perijinan	%	80		82		84		86		88		90		90	
		Rasio Rumah ber IMB	%	40		45		50		55		60		65		65	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	Kecamata n	0	0,00	2	650,00	2	650,00	2	650,00	2	650,00	2	650,00	10	3.250,00
Kepemudaan & Olahraga																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	4.615,62	12	6.030,66	12	6.963,96	12	6.971,46	12	6.978,46	12	7.010,96	60	33.955,51
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengka n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	288,39	12	311,00	12	335,00	12	336,00	12	336,00	12	338,00	60	1.656,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaa n disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	36,40	12	45,50	12	45,50	12	45,50	36,40	45,50	84	218,40
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber daya Manusia yang meningkat kapasitas kompetensi nya	%	100	0,00	100	525,00	100	525,00	100	525,00	100	525,00	100	525,00	100	2.625,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	300,00	12	350,00	12	400,00	12	450,00	12	500,00	60	2.000,00
6	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	98	100,00	98	5.370,00	98	5.575,00	98	5.700,00	98	5.850,00	98	5.850,00	98	28.345,00
		Jumlah Pemuda berprestasi dan Pramuka Berprestasi	orang	12		17		19		21		24		26		107	
7	Program Pengembang an dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaa n	kali	18	0,00	19	550,00	20	0,00	21	700,00	22	0,00	23	800,00	23	2.050,00
8	Program upaya pencegahan penyalahgun aan narkoba	Jumlah kasus penyalahgu naan narkoba	kasus	30	0,00	26	550,00	22	700,00	20	700,00	18	700,00	16	700,00	16	3.350,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausahaan Muda	orang	25	0,00	30	600,00	33	650,00	35	700,00	38	750,00	40	800,00	40	3.500,00
10	Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Jumlah klub olahraga	kelompok	310	400,00	310	19.637,35	310	20.540,00	310	34.673,00	310	14.639,00	310	16.523,00	310	106.012,35
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	6		7		8		9		10		11		11	
		Jumlah organisasi olahraga	kelompok	64		65		66		67		68		69		69	
		Jumlah kegiatan olahraga	kali	39		40		41		42		43		44		44	
11	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	11,11	0,00	13,33	930,00	13,33	1.382,00	15,56	1.598,00	15,56	1.726,00	17,78	1.804,00	17,78	7.440,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
12	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga	Jumlah Gedung Olahraga	unit	9	1.609,15	13	26.500,00	14	21.950,00	15	19.850,00	16	18.450,00	17	19.550,00	17	106.300,00
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	unit	2		2		2		2		2		2		2	
		Lapangan olahraga per 1000 penduduk	buah	0,619		0,62		0,62		0,62		0,621		0,621		0,621	
Statistik																	
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Peresentase Data Tumbuh	%	0	0,00	2	1.950,00	5	2.050,00	7	2.050,00	10	2.150,00	15	2.150,00	15	10.350,00
		Peresentase Keterisian Data	%	70		75		80		100		100		100		100	
Persandian																	
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Pembinaan dan pengawasan jaringan komunikasi dan sandi daerah	kali	0	0,00	2	700,00	2	700,00	2	700,00	2	700,00	2	700,00	10	3.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
Kebudayaan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	0,00	12	1.330,44	12	1.330,44	12	1.440,44	12	1.550,44	12	1.660,44	60	7.312,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaa n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	0,00	12	210,00	12	210,00	12	210,00	12	210,00	12	210,00	60	1.050,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	20,00	12	20,00	12	20,00	12	20,00	12	20,00	60	100,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	0	0,00	10	40,00	10	40,00	20	40,00	30	40,00	40	40,00	110	200,00
6	Program pengembang an Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	%	100	0,00	100	750,00	100	850,00	100	1.000,00	100	1.150,00	100	1.300,00	100	5.050,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		dilestarikan															
		Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	kelompok	5		7		10		12		15		17		17	
		Jumlah lembaga adat yang dibina	kelompok	5		6		8		10		12		15		15	
		Terlaksananya secara berkesinambungan kegiatan pelestarian budaya dan tersedianya kebijakan pelestarian budaya daerah	kelompok			8		10		10		10		10		10	
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	10		12	1.100,00	14	3.170,00	16	4.320,00	18	5.520,00	20	6.720,00	80,00	20.830,00
		Jumlah Misi Kesenian	kali	5		6		7		8		8		8		37	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Jumlah grup kesenian	grup	57		60		65		70		75		80		80	
		Jumlah gedung kesenian	gedung	1		1		1		1		1		1		1	
		Cakupan Kajian Seni	%	33		40		50		65		70		100		100	
		Cakupan Fasilitas Seni	%	57		65		70		80		90		100		100	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	57		70		75		80		90		100		100	
		Cakupan Organisasi seni	%	67		75		80		85		90		100		100	
		Cakupan Tempat umum	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Gelar Seni	%	100		100		100		100		100		100		100	
8	Program Pengembang an Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah dokumentasi tentang Seni dan Budaya Kota Samarinda	dokumen	1		3	500,00	3	500,00	3	650,00	3	800,00	3	950,00	3	3.400,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Terlaksananya misi kesenian dan tersedianya Kelompok Binaan	kali	0		3		3		3		3		3		15	
Perpustakaan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	0,00	12	1.383,44	12	1.155,34	12	1.191,84	12	1.219,34	12	1.221,84	60	6.171,80
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	0,00	12	345,60	12	394,00	12	425,00	12	436,00	12	447,00	60	2.047,60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	22,50	12	22,50	12	22,50	12	22,50	12	22,50	60	112,50
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	18	200,00	18	200,00	18	200,00	18	200,00	18	200,00	90	1.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	100,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	700,00
6	Program pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaa n umum/mas yarakat	unit	306	0,00	306	545,00	307	630,00	308	820,00	309	820,00	310	820,00	310	3.635,00
		Jumlah pengunjung (pemustaka) perpustakaa n	orang	20.000		21.000		21.100		21.200		21.300		21.400		106.000	
		Jumlah buku yang dapat di akses masyarakat melalui E Book	Judul Buku	0		0		0		6		6		6		18	
7	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan	Jumlah pembinaan dan peningkatan SDM yang diikuti pustakawan	orang	10	0,00	0	405,00	0	465,00	0	465,00	0	465,00	1	465,00	11	2.265,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Sistem informasi perpustakaa n	aplikasi	0		1		1		1		1		1		1	
8	Program penyelamata n dan pelestarian koleksi perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialihmedia kan melalui multimedia	Naskah	0	0,00	0	40,00	0	40,00	0	75,00	0	75,00	1	75,00	2	305,00
		Jumlah Bahan Perpustakaa n Yang Terpelihara	Buku	0		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
Kearsipan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	0,00	12	1.383,44	12	1.155,34	12	1.191,84	12	1.219,34	12	1.221,84	60	6.171,80
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapa n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	0,00	12	144,23	12	339,60	12	395,00	12	404,00	12	413,00	60	1.695,83
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	22,50	12	22,50	12	22,50	12	22,50	12	22,50	60	112,50

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggara ranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	18	180,00	18	180,00	18	180,00	18	180,00	18	180,00	90	900,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	100,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	700,00
6	Program Penyelamata n Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ar sip daerah yang diduplikat	dokumen	0	0,00	0	365,00	1.000	480,00	1.200	535,00	1.300	585,00	1.500	630,00	1.500	2.595,00
		Jumlah arsip yang dimusnahka n sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	arsip	0		100		150		200		250		300		1.000	
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi mengikuti diklat	orang	1	0,00	2	190,00	2	215,00	2	240,00	2	265,00	2	290,00	10	1.200,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Jumlah pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi	orang	1		40		40		40		40		40		200	
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	Jumlah SKPD / sekolah yang Arsipnya terkelola secara baku	SKPD/ Sekolah	20	67,75	10	1.109,00	25	720,00	30	1.050,00	40	810,00	50	1.080,00	50	4.769,00
		Jumlah arsip daerah yang bernilai	arsip	0		0		5		10		12		15		15	
URUSAN PILIHAN																	
Kelautan & Perikanan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	836,86	12	1.480,94	12	1.015,28	12	1.194,87	12	1.263,87	12	1.333,87	60	6.288,83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	penyediaan sarana prasarana aparatur	bulan	12	445,15	12	310,11	12	316,11	12	339,97	12	353,19	12	418,22	60	1.737,58
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	0,00	12	40,00	12	40,00	12	40,00	12	40,00	60	160,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggara nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	20	200,00	20	200,00	20	200,00	20	200,00	20	200,00	100	1.000,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	12	500,00	12	550,00	12	600,00	12	600,00	12	650,00	12	750,00	72	3.150,00
6	Program pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	14.822,9	1.180,00	15.000,7	5.500,00	15.180,7	2.550,00	15.362,9	3.000,00	15.547,3	3.450,00	15.733,8	3.900,00	76.825,4	18.400,00
		Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	kelompok	30		34		36		38		40		42		42	
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	1.296,6	500,00	1.595,8	2.705,00	1.895,1	1.400,00	2.194,3	1.495,00	2.493,5	1.600,00	2.792,7	1.700,00	10.971	8.900,00
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan	orang	57		59		61		63		65		67		67	
		Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	orang	25		26		27		28		29		30		30	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
Pariwisata																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.256,56	12	1.610,44	12	1.610,44	12	1.660,44	12	1.660,44	12	1.660,44	60	8.202,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	238,32	12	253,32	12	253,32	12	253,32	12	253,32	12	253,32	60	1.266,60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	52,50	12	52,50	12	75,00	12	80,00	12	85,00	60	345,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	10	100,00	15	150,00	30	300,00	40	450,00	60	600,00	155	1.600,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan	bulan	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
6	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	obyek	6	0,00	8	4.300,00	11	2.950,00	14	3.750,00	18	3.550,00	23	3.850,00	23	18.400,00
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	0,00	100	2.000,00	100	4.000,00	100	2.200,00	100	2.300,00	100	2.400,00	100	12.900,00
		Kunjungan wisata :															
		Wisman	orang	644		773		1.005		1.307		1.830		2.562		7.477	
		Wisnus	orang	316.998		364.548		419.230		503.076		653.999		915.999		2.856.852	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%														
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	produk	9	0,00	12	2.770,00	16	2.770,00	19	2.920,00	24	3.020,00	30	3.020,00	30	14.500,00
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	0		12		16		19		24		30		30	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program Pengembang an Kemitraan	jumlah SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif	orang	0	0,00	80	1.250,00	90	1.250,00	100	1.350,00	110	1.450,00	120	1.550,00	120	6.850,00
		jumlah kelompok sadar wisata	kelompok	0		3		5		7		9		11		11	
Pertanian																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.966,25	12	3.048,85	12	3.020,39	12	3.020,67	12	3.020,95	12	3.034,85	60	15.145,72
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengka n Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	328,09	12	1.055,00	12	1.055,00	12	1.055,00	12	1.055,00	12	1.055,00	60	5.275,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	49,20	12	72,00	12	72,00	12	72,00	12	72,00	12	72,00	60	360,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselengga ranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	34	340,00	34	340,00	34	340,00	34	340,00	34	340,00	170	1.700,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	12	500,00	60	2.500,00
6	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Jumlah petani yang menerapka n teknologi pertanian/p erkebunan modern	orang	60	5.695,00	78	6.729,00	78	6.739,00	80	6.760,00	82	6.765,00	84	6.795,00	84	33.788,00
		Panjang saluran irigasi tersier dengan kondisi baik	km	0,75		1		1		1		1		1		1	
		Panjang jalan pertanian yang bisa dilalui kendaraan	km	1		1		1		1		1		5		5	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
7	Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utama	%	3	260,00	3	3.444,14	3	3.614,14	3	3.683,91	3	3.753,83	3	3.873,89	15	18.369,91
		Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	14.294		14.722		15.163		15.617		16.085		16.438		16.438	
		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama															
		- Cabe besar	ton	96		98		100		103		106		110		110	
		-Cabe Rawit	ton	133		136		140		144		148		152		152	
		- Durian	ton	261		266		271		276		281		287		287	
		- Tomat	ton	69		71		73		75		77		79		79	
		- Jamur	kg	15.532		15.998		16.478		16.972		17.481		17.861		17.861	
		- Pisang	ton	3.784		3.859		3.936		4.014		4.094		4.176		4.176	
		- Pepaya	ton	435		444		453		462		471		480		480	
		- Jahe	ton	29.752		30.644		31.563		32.509		33.484		34.488		34.488	
		- Melati	kg	36.929		38.036		39.177		40.352		41.562		42.808		42.808	
		Produksi komoditas perkebunan															

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		utama															
		Karet	ton	149,10		153,57		158,18		162,93		167,81		172,85		172,85	
		Kelapa Dalam (ton)	ton	156,35		161,04		165,87		170,85		175,97		181,25		181,25	
		Kelapa Sawit	ton	7.094,2 5		7.307,0 8		7.526,2 9		7.752,0 8		7.984,6 4		8.224,1 8		8.224,1 8	
		Lada	ton	30,00		30,90		31,83		32,78		33,76		34,77		34,77	
		Kemiri	ton	18,00		18,54		19,10		19,67		20,26		20,87		20,87	
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	10	1.400,00	17	2.350,00	34	2.200,00	34	3.210,00	34	3.410,00	34	2.820,00	153	13.990,00
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	persentase kegiatan Promosi hasil produksi pertanian & perkebunan yang diikuti	%	100	250,00	100	1.800,00	100	1.550,00	100	1.750,00	100	1.750,00	100	1.850,00	100	8.700,00
10	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi sapi	ekor	3.968	480,00	4.008	2.550,00	4.018	3.450,00	4.028	4.450,00	4.038	5.400,00	4.048	6.350,00	4.048	22.200,00
		Produksi daging	ton	10.057, 00		10.559, 85		11.087, 84		11.642, 23		12.224, 35		12.835, 56		12.835, 56	
		Konsumsi Daging perkapita	kg	14,4		14,5		14,6		14,7		14,8		14,9		14,9	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah kelompok yang sudah memenuhi standarisasi Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	kelompok	0	417,49	7	5.650,00	10	3.800,00	13	3.950,00	16	2.100,00	20	2.250,00	20	17.750,00
		Jumlah produk peternakan yang dapat bersaing pada skala nasional	kali	0		4		5		6		7		8		30	
12	Program Pencegahan dan penanggulan gan penyakit ternak	Pemeriksaa n kesakitan hewan/tern ak besar	sampel	500	68,20	600	1.000,00	600	1.050,00	600	1.200,00	600	1.250,00	700	1.350,00	700	5.850,00
13	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang menerapka n teknologi peternakan	kelompok	0	0,00	11	1.290,00	11	1.290,00	11	1.300,76	11	1.300,76	11	1.300,76	11	6.482,28

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
14	Program pemberdayaa n penyuluh pertanian/pe rkebunan lapangan	Jumlah kelembagaa n petani yang meningkat kapasitasny a	kelompok	0	1.000,00	25	3.200,00	61	3.350,00	61	3.595,00	61	3.445,00	62	3.620,00	62	17.210,00
		Jumlah BPP/kecama tan yang meningkat Kapasitasny a	orang	2		4		4		4		4		4		4	
		Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasny a	orang	PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14		PPL PNS 46, THL 14	
Kehutanan																	
1	Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Persentase rehabilitasi lahan kritis	%	0	0,00	2	3.150,00	2	3.150,00	2	3.150,00	2	3.150,00	2	3.150,00	10	15.750,00
Energi & Sumber Daya Mineral																	
1	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	dokumen	0	0,00	8	700,00	8	725,00	8	750,00	8	775,00	8	800,00	40	3.750,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
Perdagangan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	1.157,96	12	9.097,00	12	9.167,00	12	9.167,00	12	9.167,00	12	9.167,00	60	45.765,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	690,92	12	1.738,30	12	1.738,30	12	1.738,30	12	1.738,30	12	1.738,30	60	8.691,50

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	88,00	12	88,00	12	88,00	12	88,00	12	88,00	60	440,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggara ranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	44	440,00	44	440,00	44	440,00	44	440,00	44	440,00	220	2.200,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00
6	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	pedagang	60	200,00	60	1.150,00	60	1.520,00	60	1.290,00	60	1.410,00	60	1.430,00	300	6.800,00
		Persentase Ketersediaa n harga dan stok barang	%	100		100		100		100		100		100		100	
7	Program Peningkatan Dan pengembang an Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	komoditi	0	0,00	1	800,00	1	1.250,00	1	1.400,00	1	1.450,00	2	1.450,00	2	6.350,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Ekspor bersih perdagangan	Juta (US\$)	3.070,18		3.131,58		3.194,22		3.258,10		3.323,26		3.389,73		16.296,89	
8	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	lokasi	25	0,00	38	1.100,00	40	1.700,00	40	3.450,00	40	2.150,00	40	2.150,00	26	10.550,00
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	100		100		100		100		100		100		100	
9	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Jumlah pasar daerah yang dikelola	pasar	12	1.838,71	14	3.090,13	14	7.922,00	14	10.511,70	14	9.248,87	14	11.602,36	14	42.375,06
		Peningkatan sarana dristribusi perdagangan pasar	tipe	12 pasar type D		14 pasar type D		11 pasar type D, 3 pasar type C		7 pasar type D, 4 pasar type C, 3 pasar type B		4 pasar type D, 3 pasar type C, 7 pasar type B		4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A		4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	pasar	2		4		6		8		10		12		12	
		Kebersihan (Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik)	pasar	12		12		12		12		12		12		12	
10	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	%	100	155,00	100	450,00	100	848,50	100	665,85	100	737,44	100	813,68	100	3.515,46
Perindustrian																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	bulan	12	1.839,69	12	1.973,57	12	2.044,07	12	2.044,07	12	2.045,07	12	2.046,57	60	10.153,35

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpelihara nya Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	bulan	12	690,92	12	1.038,30	12	1.038,30	12	1.038,30	12	1.038,30	12	1.038,30	60	5.191,50
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksanan ya Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	bulan	12	0,00	12	30,80	12	34,65	12	34,65	12	34,65	12	34,65	60	169,40
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselengga ranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang	0	0,00	10	110,00	15	165,00	15	165,00	15	165,00	17	187,00	72	792,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan (bulan)	bulan	12	50,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	12	150,00	60	750,00
6	Program pengembang an industri Kecil Dan menengah	Pertumbuha n nilai Investasi Di Bidang Industri	%	2,34	0,00	2,91	7.600,00	2,91	7.675,00	2,91	8.350,00	2,91	9.100,00	3,38	9.750,00	3,38	42.475,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Pertumbuha n IKIM (Industri kecil & Industri Menengah)	%	2,86		2,85		2,91		2,9		2,88		2,86		2,86	
7	Program peningkatan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra yang dibina	sentra	1	367,83	1	2.900,00	1	2.500,00	1	2.000,00	2	0,00	2	0,00	7	7.400,00
8	Program Penataan Struktur Industri	Pembentuk an Kawasan Industri di kota samarinda	%	0	0,00	20	2.000,00	40	1.250,00	60	1.100,00	80	1.100,00	100	1.100,00	100	6.550,00
		Persentase Peningkatan jumlah legalitas usaha dibidang industri	%	2,75		3		3,25		3,5		3,75		4		4	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
Administrasi Pemerintahan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	15.414,76	12	18.675,00	12	19.950,00	12	22.850,00	12	23.900,00	12	25.850,00	60	111.225,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	5.741,43	12	7.000,00	12	7.000,00	12	6.600,00	12	7.100,00	12	7.700,00	60	35.400,00
3	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	12	200,00	60	1.000,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksanan ya disiplin aparatur di lingkungan sekretariat daerah	bulan	12	0,00	12	250,00	12	250,00	12	300,00	12	300,00	12	300,00	60	1.400,00
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Terlaksanan ya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	bulan	12	600,00	12	800,00	12	800,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.200,00	60	4.800,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	orang	0	0,00	60	270,00	60	270,00	60	270,00	60	270,00	60	270,00	100	1.350,00
6	Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	dokumen	1	0,00	1	2.450,00	1	2.465,00	1	1.615,00	1	1.510,00	1	2.460,00	1	10.500,00
7	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	%	10	0,00	15	1.200,00	20	1.200,00	25	1.200,00	30	1.200,00	100	1.200,00	100	6.000,00
8	Program penguatan Ketatalaksanaan	Persentase SKPD yang telah menyusun SOP dan SP	%	10	40,00	15	2.050,00	20	1.600,00	25	1.600,00	30	1.600,00	100	1.600,00	100	8.450,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	Kategori	CC	150,00	CC	2.080,00	B	2.660,00	BB	2.660,00	BB	2.205,00	A	2.250,00	A	11.855,00
10	Program penguatan Pengawasan	Persentase penyeengga ra negara yang wajib LHKPN	%	5	0,00	15	700,00	20	700,00	25	700,00	35	700,00	100	700,00	100	3.500,00
11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalia n pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	%	100	500,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	8.000,00
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase paket pengadaan B/J dilingkunga n pemerintah Kota Samarinda	%	100	1.200,00	100	7.909,36	100	7.984,36	100	8.109,36	100	8.209,36	100	8.309,36	100	40.521,80

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		melalui ULP															
		Prosentase pegawai kehumasan yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan dan protokol	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Jumlah kerjasama antara Pemkot dengan pers	media massa	7		7		7		7		7		7		7	
		Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	kali	6		6		6		6		6		6		30	
13	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda	%	100	0,00	100	1.700,00	100	1.700,00	100	1.700,00	100	1.700,00	100	1.700,00	100	8.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
14	Program pengendalian dan pelaporan pembangunan	Persentase peningkatan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	%	75	800,00	80	3.904,55	80	4.693,50	80	5.023,50	80	5.353,50	80	5.683,50	80	24.658,55
15	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Keputusan Walikota	buah	425	500,00	500	3.000,00	530	3.000,00	570	3.500,00	570	3.500,00	570	3.500,00	2.740	16.500,00
		Jumlah Peraturan Daerah	buah	7		9		9		12		12		15		57	
		Jumlah Peraturan Walikota	buah	15		20		20		26		26		30		122	
		Prosentase Penyelesaian Kasus konflik Pertanahan	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase penyediany a produk-produk hukum daerah dan terbentukny a jaringan dokumentas i informasi hukum yang terintegrasi	%	100		100		100		100		100		100		100	
16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Samarinda dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi serta Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	MoU	4	100,00	9	4.350,00	9	3.800,00	9	3.300,00	10	3.300,00	10	3.300,00	47	18.050,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
17	Program Penataan Daerah otonomi baru	evaluasi perkotaan sebagai tindak lanjut pertemuan APEKSI	Wilayah	9	460,00	9	600,00	9	600,00	9	1.700,00	9	600,00	9	600,00	45	4.100,00
18	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	Kecamatan	2	0,00	2	3.150,00	2	3.200,00	2	3.200,00	2	3.250,00	2	3.250,00	10	16.050,00
19	Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	tepat/tidak tepat	Tepat	200,00	Tepat	1.400,00	Tepat	1.830,00	Tepat	1.900,00	Tepat	1.950,00	Tepat	2.000,00	Tepat	9.080,00
		Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	Kategori	ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Banyaknya Kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	kecamatan	5 Kecamatan		6 Kecamatan		7 Kecamatan		8 Kecamatan		9 Kecamatan		10 Kecamatan		10 Kecamatan	
20	Program Bina Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Samarinda	dokumen	2	0,00	3	650,00	4	800,00	5	825,00	6	850,00	6	875,00	6	4.000,00
21	Program Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	dokumen	1	0,00	1	580,00	1	650,00	1	730,00	1	800,00	1	900,00	1	3.660,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
22	Penataan Wilayah Adm. Penegasan Batas Daerah dan Toponimi	Tersedianya Dokumen (Gasetir) Nama- Nama Rupabumi Kota Samarinda	dokumen	1	100,00	1	900,00	1	950,00	1	975,00	1	1.000,00	1	1.100,00	1	4.925,00
23	Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyampaian Laporan Penerimaan Bantuan Sosial dan Hibah bidang Keagamaan	%	100	0,00	100	1.838,37	100	10.856,00	100	10.452,00	100	10.332,00	100	10.482,00	100	43.960,37
		Prosentase Penyampaian Laporan Koordinasi bidang agama dan pendidikan; bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB; dan bidang pemuda, olahraga, dan	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		kesbangpol															
		Persentase terlaksananya evaluasi pelaksanaan program raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat	RTS	15.976		15.976		15.976		15.976		15.976		15.976		15.976	
		Urusan yang terfasilitasi	Urusan	0		7		7		7		7		7		7	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	sidak	4		4		4		4		4		4		20	
		Jumlah terlaksananya evaluasi dan pelaporan penghematan penggunaan energi dan air	Unit kerja	118		118		118		118		118		118		118	
24	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase meningkatnya perkembangan asset dan laba Perusda	%	50	400,00	60	600,00	70	800,00	80	1.000,00	90	1.200,00	100	1.400,00	100	5.000,00
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	perusda	3		3		3		3		3		3		3	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	30.037,62	12	29.006,67	12	33.576,00	12	37.111,05	12	40.765,69	12	45.110,54	60	185.569,95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	2.340,78	12	3.444,64	12	4.893,62	12	5.889,54	12	7.004,65	12	8.262,78	60	29.495,23
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	473,50	12	486,50	12	700,00	12	784,00	12	878,08	12	983,45	60	3.832,03
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	pelatihan / bimtek bagi anggota Dewan dan staf DPRD	orang	45	4.955,16	45	8.400,40	45	8.400,40	45	9.571,03	45	10.321,05	45	11.869,21	45	48.562,09
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	3.345,55	12	6.163,87	12	4.953,16	12	5.433,16	12	4.979,36	12	4.979,36	60	26.508,91
6	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase capaian Prolegda	%	80	9.771,83	80	38.074,89	80	29.979,23	80	29.991,76	80	20.344,53	80	20.396,48	80	138.786,89

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		PERDA yang ditetapkan	buah	9		9		9		9		9		9		45	
		Jumlah PERDA yang dibatalkan	buah	0		0		0		0		0		0		0	
		RAPERDA yang disetujui DPRD	buah	19		19		19		19		19		19		95	
		Tersedianya Tenaga ahli Utk Anggota DPRD	orang	6		6		6		6		6		6		30	
		Terselenggara ranya rapat-rapat DPRD	bulan	12		12		12		12		12		12		60	
		Jumlah Keputusan DPRD	buah	19		19		19		19		19		19		95	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	6.332,72	12	15.339,00	12	16.212,78	12	17.214,10	12	18.413,73	12	19.754,50	60	86.934,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapn sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	1.264,73	12	2.992,65	12	3.158,57	12	3.366,31	12	3.624,54	12	3.908,53	60	17.050,60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	625,80	12	638,30	12	645,56	12	652,82	12	660,09	60	3.222,57

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	1.198,00	12	1.233,40	12	1.277,84	12	1.309,21	12	1.340,63	60	6.359,08
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselengga ranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	orang per kecamatan n	10	0,00	10	1.499,00	10	1.511,10	10	1.523,22	10	1.535,36	10	1.547,53	50	7.616,21
6	Program mengintensif kan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	%	73-100	40.256,84	73-100	44.594,91	73-100	48.766,54	73-100	52.701,82	73-100	56.706,18	73-100	63.630,99	73-100	266.400,44
Pengawasan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	3.511,14	12	4.272,94	12	4.143,04	12	3.543,04	12	3.593,04	12	3.693,04	60	19.245,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengka p n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	586,28	12	586,28	12	594,28	12	594,28	12	594,28	12	594,28	60	2.963,40

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	12	32,00	60	160,00
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang meningkat kapasitas kompetensinya	orang	0	0,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	25	200,00
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	250,00	12	300,00	12	350,00	12	400,00	12	450,00	60	1.750,00
6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase laporan yang baik dari SKPD.	%	60	445,78	75	1.570,00	80	1.720,00	80	1.870,00	85	2.070,00	90	2.270,00	90	9.500,00
7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat	orang	10	0,00	30	50,00	30	50,00	30	50,00	30	50,00	30	50,00	30	250,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
Perencanaan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	2.320,74	12	2.882,49	12	3.165,74	12	3.443,26	12	3.683,26	12	3.913,26	60	17.088,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaa n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	746,39	12	791,69	12	831,69	12	871,69	12	911,69	12	951,69	60	4.358,43
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	45,00	12	45,00	12	45,00	12	45,00	12	45,00	60	225,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	218,67	12	800,00	12	700,00	12	900,00	12	800,00	12	1.000,00	60	4.200,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselengga ranya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	orang	0	0,00	50	500,00	50	500,00	50	500,00	50	500,00	50	500,00	250	2.500,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
6	Program Perencanaan Pembanguna n Daerah	Tingkat kelengkapa n dokumen utama perencanaaa n (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA- PPAS, KUAP- PPASP)	%	100	1.664,62	100	2.900,00	100	3.000,00	100	6.600,00	100	3.200,00	100	3.300,00	100	19.000,00
		Jumlah SKPD memiliki dokumen Renstra dan Renja SKPD	SKPD	48		48		48		48		48		48		48	
		Persentase penyerapan usulan masyarakat dalam Musrenban g yang diserap dalam Renja SKPD.	%	30		30		30		30		30		30		30	
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Program	319		319		319		319		319		319		319	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	%	97,05 progra m, 54,20 kegiata n		98,07 progra m, 57,01 kegiata n		100 progra m, 100 kegiata n		100 progra m, 100 kegiata n		100 progra m, 100 kegiata n		100 progra m, 100 kegiata n		100 progra m, 100 kegiata n	
		Persentase keselarasan dokumen renstra SKPD dengan RPJMD dan RKPD	%			80		100		100		100		100		100	
6	Program Pengembang an Data/Inform asi	Persentase keterisian data sistem informasi pembangunan daerah	%	66,88	1.165,65	70	16.600,00	75	10.770,00	80	10.880,00	85	12.040,00	90	12.850,00	90	63.140,00
		Tingkat Kelengkapa n Dokumen Utama Pengendali an dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	%	100		100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Pembangun an data center	%	0		20		40		60		80		100		100	
7	Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi	Persentase dokumen perencanaaa n ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	0	0,00	20	1.250,00	40	2.650,00	60	800,00	80	2.350,00	90	800,00	90	7.850,00
		Masterplan Green Economy	dokumen	0		0		1		0		0		0		1	
8	Program perencanaan sosial budaya	Persentase dokumen perencanaaa n bidang sumberdaya manusia sesuai amanat pemerintah	%	40	250,00	60	3.050,00	80	3.750,00	90	3.000,00	100	3.050,00	100	2.450,00	100	15.300,00
		Persentase dokumen perencanaaa n pemerintah an dan aparatur sesuai amanat pemerintah	%	10		30		50		60		70		90		90	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
9	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen kajian bidang perencanaan prasarana wilayah	%	75	0,00	80	3.850,00	85	3.400,00	90	400,00	95	400,00	100	400,00	100	8.450,00
		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perencanaan Ekonomi	dokumen	0		1		0		0		0		0		1	
10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase dokumen penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	%	0	0,00	33,33	200,00	33,33	200,00	33,33	200,00	0	200,00	0	200,00	99,99	1.000,00
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah sesuai amanat pemerintah	%	75	0,00	80	1.450,00	85	3.500,00	90	3.500,00	95	3.500,00	100	3.500,00	450	15.450,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Pendampingan perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	%	0		100		100		100		100		100		100	
Keuangan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	8.165,54	12	5.207,40	12	6.488,50	12	6.936,60	12	7.997,27	12	8.626,70	60	35.256,47
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	768,16	12	1.184,65	12	1.362,35	12	1.520,80	12	1.706,50	12	1.850,00	60	7.624,30
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	52,00	12	52,00	12	52,00	12	52,00	12	52,00	60	260,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	bulan	12	0,00	12	409,75	12	541,00	12	622,00	12	716,00	12	823,00	60	3.111,75

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	1.474,18	12	1.000,00	12	1.100,00	12	1.200,00	12	1.300,00	60	6.074,18
5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Belanja Langsung terhadap total APBD	%	62,46	3.331,15	60	109.240,88	59,85	95.065,77	57,14	107.792,13	55,2	122.307,75	58,15	138.987,21	58,15	573.393,74
		Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	11,71		10		9		8,7		7,75		6,85		6,85	
		Rasio SILPA thdp total pendapatan	%	13,26		10		9,5		8,5		8		7		7	
		Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	79		80		80,3		80,5		80,7		90		90	
		Waktu penetapan PERDA APBD	tepat/tidak tepat	tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat	
		Belanja untuk pelayanan	Milyar Rp.	2.185,30		2.360,12		2.596,13		2.751,90		2.861,98		2.919,22		13.489,34	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		dasar															
		Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Milyar Rp.	1.064,20		1.117,42		1.173,29		1.231,95		1.293,55		1.358,23		6.174,42	
		Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	%	84,00		90,00		92,00		93,50		94,00		95,00		95,00	
		Belanja Publik terhadap DAU	%	335		370		385		395		410		425		425	
		Opini BPK terhtadap LapKeu Daerah	opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	58,90		65,00		70,00		75,00		85,00		90,00		90,00	
		Rasio Belanja Modal dibanding Total	%	37,57		37,70		38,00		38,30		38,50		39,00		39,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Belanja Daerah															
		Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	32,08		33,00		35,00		31,00		33,00		34,00		34,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	bulan	12	5.223,68	12	7.831,88	12	8.140,06	12	7.345,06	12	9.285,00	12	9.700,00	60	42.302,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana & Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	bulan	12	1.669,54	12	1.953,23	12	2.343,88	12	2.546,05	12	2.750,00	12	3.050,00	60	12.643,15
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	bulan	12	0,00	12	128,70	12	154,44	12	165,50	12	198,60	12	238,32	60	885,56

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang Terlatih (%)	bulan	12	50,00	12	872,60	12	700,00	12	600,00	12	500,00	12	400,00	60	3.072,60
5	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan (bulan)	bulan	12	91,00	12	500,00	12	550,00	12	600,00	12	650,00	12	700,00	60	3.000,00
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	100	2.021,00	100	32.180,41	100	26.968,52	100	14.531,02	100	15.389,23	100	16.559,89	100	105.629,07
		Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD pd RPJMD	%	70		75		80		85		90		100		100	
		Persentase Peningkatan PAD	%	6,90		4,66		5,29		5,31		6,75		6,17		6,17	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Besarnya pendapatan daerah dari sumber lain yang sah terhadap APBD	Milyar Rp.	834,82		871,57		910,28		951,09		994,11		994,11		994,11	
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	930,36	12	1.544,00	12	1.603,85	12	1.765,70	12	1.966,00	12	2.134,50	60	9.014,05
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	399,38	12	465,69	12	466,84	12	468,11	12	469,59	12	471,29	60	2.341,54
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	40,00	12	40,00	12	40,00	12	40,00	12	40,00	60	200,00
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	60	1.250,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan teknis fungsional	orang	800	6.829,24	620	8.632,40	455	14.360,43	570	16.713,43	590	13.438,43	235	11.288,43	2.470	64.433,12
		Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	orang	214		458		458		458		458		458		2.290	
		Jumlah aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	orang	1086		702		537		652		632		317		2.840	
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang akan pensiun	orang	56		56		57		60		65		70		308	
6	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai Kompetensinya	%	50	940,01	60	13.605,00	65	13.815,00	75	13.120,68	80	14.895,45	100	14.235,00	100	69.671,13

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
		Persentase Pengelolaan Administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	90		92		94		96		98		99		99	
		Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda	%	95		96		97		98		99		99		99	
Penelitian dan Pengembangan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	980,23	12	1.290,23	12	1.358,75	12	1.359,75	12	1.410,75	12	1.410,75	60	6.830,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengka n sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	258,94	12	261,00	12	292,50	12	292,50	12	292,50	12	292,50	60	1.431,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaa n disiplin aparatur	bulan	12	0,00	12	28,00	12	28,00	12	28,00	12	28,00	12	28,00	60	140,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
4	Prog. Peningkt. Pengem. Sistem.Pelap oran Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaa n laporan kinerja dan keuangan	bulan	12	0,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	12	250,00	60	1.250,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Kepemimpi nan dan teknis fungsional	orang	0	0,00	10	100,00	15	150,00	15	150,00	20	200,00	20	200,00	80	800,00
6	Program Litbang Bidang SDA dan Teknoogi	Jumlah penelitian dan pengemban gan bidang SDA dan Teknoogi	kali	0	0,00	0	350,00	3	818,00	3	1.100,00	3	1.050,00	0	0,00	9	3.318,00
7	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembanguna n	Jumlah penelitian dan pengemban gan bidang Ekonomi dan Pembangun an	kali	0	0,00	1	400,00	9	2.350,00	7	2.850,00	1	1.150,00	1	650,00	19	7.400,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi awal (2016)		Target										Kondisi akhir (2021)	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.	target	Juta Rp.
8	Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Kesra dan Kemasyarakatan	kali	0	0,00	2	550,00	4	650,00	3	600,00	0	0,00	0	0,00	9	1.800,00
9	Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Aparatur	kali		0,00	2	350,00	0	0,00	3	900,00	0	0,00	0	0,00	5	1.250,00
10	Program Penguatan Sistem Inovasi daerah (SiDa)	Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	kali		0,00	0	740,00	1	1.020,00	1	750,00	1	230,00	1	150,00	1	2.890,00



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif **mengenai apa yang diukur** untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan “hasil” itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut :

Gambar 9.1
Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan
Pembangunan dan *Good Governance*



Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan indikator makro dan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka



indikator kinerja program pembangunan daerah juga ditetapkan dengan memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*).

Indikator makro Kota Samarinda merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja pembangunan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Oleh karena itu, maka ditetapkan target capaian indikator makro Kota Samarinda sebagai berikut :

Tabel 9.1
Target Capaian Indikator Makro Kota Samarinda
Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertumbuhan ekonomi	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%	6 ± 1%
2. Pertumbuhan penduduk	3,38%	3,78%	2,48%	2,18%	1,88%	1,51%
3. IPM	78,47	78,82	79,17	79,53	79,88	80,34
4. Tingkat pengangguran terbuka	4,86%	4,0-4,5%	3,5-4,0%	3,5-4,0%	3,0-3,5%	3,0-3,5%
5. Tingkat kemiskinan	4,22%	4,09%	3,97%	3,86%	3,76%	3,67%
6. Tingkat inflasi	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%
7. Pendapatan per kapita	61,7 juta	63,7 juta	65,7 juta	67,6 juta	71,6 juta	75,6 juta

Selain indikator makro, maka ditetapkan pula secara rinci indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021 yang diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 9.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
Pertumbuhan ekonomi	%	4,59	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1
Laju Inflasi	%	4,24	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Pendapatan per kapita	Juta Rp.	55,8	61,7	63,7	67,6	71,6	75,6	75,6
Indeks gini	Indeks	0,31	0,31	0,31	0,3	0,3	0,29	0,29
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	95,44	95,78	96,00	96,14	96,24	96,33	96,33
Penurunan angka kriminalitas	%	3	5	7	9	11	13	13
Fokus Kesejahteraan Sosial								
Pendidikan								
Angka melek huruf	%	98,62	98,91	99,14	99,36	99,58	100	100
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,26	10,47	10,54	10,65	10,70	11,21	11,21
IPM	indeks	78,39	78,47	78,82	79,17	79,53	80,34	80,34
Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,16	14,63	14,89	15,16	15,43	15,99	15,99
Kesehatan								
Angka harapan hidup	Tahun	73,63	73,66	73,73	73,76	73,8	73,87	73,87
Ketenagakerjaan								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rasio penduduk yang bekerja	%	94,39	95,14	95,5-96,0	96,0-96,5	96,0-96,5	96,5-97,0	96,5-97,0
Angka pengangguran	%	5,61	4,86	4,0-4,5	3,5-4,0	3,5-4,0	3,0-3,5	3,0-3,5
Fokus Budaya dan Olahraga								
Kebudayaan								
Jumlah grup kesenian	Grup	57	60	65	70	75	80	80
Jumlah gedung	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Pemuda dan Olahraga								
Jumlah klub olahraga	Klub	310	310	310	310	310	310	310
Jumlah gedung olahraga	Unit	9	9	10	10	10	11	11
Aspek Pelayanan Umum								
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Pendidikan								
Pendidikan dasar :								
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	111,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	98,80	99,10	99,40	99,70	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	93,40	93,85	94,32	94,79	95,26	95,73	95,73
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	67,63	67,96	68,29	68,63	69,97	69,31	69,31
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,69	82,09	82,50	82,91	83,32	83,73	83,73
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,94	91,39	91,84	92,29	92,75	93,21	93,21

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A	%	88,36	90,52	94,83	96,98	99,14	100,00	100,00
Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A	%	89,74	92,31	94,87	97,44	98,72	100,00	100,00
Fasilitas pendidikan :								
Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	78,21	80,00	89,10	92,73	96,36	100,00	100,00
Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	88,58	89,02	89,46	89,90	90,34	90,79	90,79
Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	55,34	57,49	59,64	61,79	63,94	80,00	80,00
Persentase SMP/MTs dan yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	%	65,34	67,49	69,64	71,79	73,94	83,00	83,00
Persentase sekolah penyelenggara PPDB online	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah penyelenggara UNBK	%	50	75	100	100	100	100	100
Pendidikan anak usia dini :								
Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	41,71	41,85	41,99	42,13	42,27	42,41	42,41
Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,75	93,75	95,75	97,75	99,75	100,00	100,00
Persentase lembaga PNF terakreditasi	%	36,15	50,15	64,15	78,15	92,15	100,00	100,00
Rasio asesor PNF terhadap bidang keahlian	%	20,59	20,69	20,80	20,90	21,00	21,11	21,11
Persentase jumlah TK/RA yang terakreditasi	%	25,98	26,11	26,24	26,37	26,50	26,64	26,64
Angka putus sekolah :								
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angka kelulusan :								
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	66,26	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	Nilai	55,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	68,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,90	99,39	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kesehatan								
Angka Usia Harapan Hidup	tahun							
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jiwa							
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jiwa							
Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1000 KH							
Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	100	80	85	85	90	90	100
Persentase pemenuhan standar mutu kefarmasian di puskesmas	%	75	75	80	80	85	90	90
Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase pemeriksaan laboratorium di Labkesda yang dilayani	%	18	16	15	14	13	12	12
Persentase pengawasan distribusi pangan yang beredar di masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pangan siap saji yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kelurahan yang mendapatkan dukungan analisa resiko krisis kesehatan	%	67,8	84,7	100	100	100	100	100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase balita gizi kurang	%	12	11,5	11	10	9	8	8
Persentase balita pendek (stunting)	%	30	29	28	27	26	25	25
Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	80	80	85	90	95	98	98
Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	45	45	50	55	60	70	70
Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	60	65	75	80	85	85
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	%	80	85	87	90	93	98	98
Persentase Kelurahan melaksanakan STBM	%	80	84	89	92	94	98	98

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	80	82	85	88	92	98	98
Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	%	100	100	100	100	100	100	100
Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	%	100	100	110	120	130	140	140
Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	50	50	60	70	80	90	90
Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	3	3	5	10	20	30	30
Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	80	80	80	90	90	90	90
Cakupan penemuan dan penanganan balita penderita ISPA (Pneumonia)	%	100	100	100	100	100	100	100
Angka Prevalensi Kusta	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita hepatitis	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	%	91	91	92	93	94	95	95

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	91	91	91,5	92	92,5	93	93
IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	53,5	53,5	53,4	53,3	53,2	53,1	53,1
Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cakupan penderita filariasis yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penderita flu burung yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Non Polio	%	100	100	100	100	100	100	100
Dokumen standar pelayanan publik di UPTD	%	100	100	100	100	100	100	100
Akreditasi fasyankes	%	41,67	62,50	83,33	100	100	100	100
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	50	60	70	80	90	100	100
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	90	90	90	90	90	90	90
Rasio dokter per satuan penduduk	orang	56,3 per 100.000 penduduk	57 per 100.000 penduduk	57,7 per 100.000 penduduk	58,3 per 100.000 penduduk	59 per 100.000 penduduk	60 per 100.000 penduduk	60 per 100.000 penduduk
Rasio tenaga bidan dan perawat per satuan penduduk	orang	114,7 per 100.000 penduduk	116 per 100.000 penduduk	118 per 100.000 penduduk	120 per 100.000 penduduk	122 per 100.000 penduduk	124 per 100.000 penduduk	124 per 100.000 penduduk

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	60	65	70	80	90	90
Persentase sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	unit	9	9	10	10	11	11	11
Persentase RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	%	25	25	50	75	90	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	%	91	91	92	94	95	96	96
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SPM)	%	91	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (SPM)	%	72	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil (SPM)	%	95	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM)	%	95	100	100	100	100	100	100
Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan nifas	%	95	95	95	95	95	95	95
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95	95	95	95	95	95	95
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	%	40	40	50	60	70	80	80

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100
Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90	90	95	95	95	95	95
Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	%	91	91	92	94	95	96	96
Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	75	75	85	90	95	100	100
Persentase fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	%	30	30	50	70	90	100	100
Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan pada masyarakat	%	7.514	7.614	7.727	7.840	7.950	7.955	7.955
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	33,33	41,67	58,33	75	80	96	96
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	20,83	32	48	64	72	92	92
Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	96	100	100	100	100	100	100
Persentase puskesmas terakreditasi	%	41,67	62,50	83,33	100	100	100	100
Persentase RSUD yang tersertifikasi secara nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase puskesmas yang menerapkan perkesmas	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang	%	25	32	40	45	56	64	64

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
aktif								
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang								
Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dalam kondisi baik	%							
Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Kesehatan dalam kondisi baik	%							
Proporsi Unit Bangunan Gedung Tempat Olahraga dalam kondisi baik	%							
Proporsi Unit Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik.	%							
Jumlah Unit Bangunan Gedung pada Kawasan Khusus	unit							
Jumlah Unit Bangunan Gedung Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan Baru	unit							
Jumlah Unit Bangunan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)	unit							
Jumlah Unit Penyediaan TPA	unit							
Jumlah Unit Pembangunan TPST	unit							
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	94	96	98	100	100	100	100
persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	94	96	98	100	100	100	100
Tersedianya dokumen data bangunan	dokumen	0	1	1	1	1	1	5
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	kecamatan	0	4	4	4	4	4	4
Perubahan alih fungsi lahan	Ha	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang,	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	20	80	100	100	100	100	100
Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,6	81,2	85,8	90,4	95	98	98
Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	35	45	55	65	75	80	80
persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	10	30	50	70	90	100	100
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	20	19	15	10	5	2	2
Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	%	0	15	20	25	30	35	35
Pembangunan turap di wilayah aliran sungai (SKM)	meter	0	250	250	250	250	250	1.250,00
Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55	60	65	70	75	80	80
Jumlah titik banjir yang tersisa	titik	50	48	46	44	42	40	40
Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	km:km2	1 : 0,27	1 : 0,17	1 : 0,12	1 : 0,09	1 : 0,08	1 : 0,07	1 : 0,07

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	0	0	15	33	67	100	100
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman								
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	30	30	61	100	100	100	100
Persentase kawasan kumuh	%	0,49	0,39	0,29	0,19	0,09	0,00	0,00
Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	%	100	100	100	100	100	100	100
Luas layanan sanitasi	%	60	68	76	84	92	100	100
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	60	68	76	84	92	100	100
Persentase Penyediaan RTH Publik	%	2,5	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	10,0
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	275	275	300	325	350	375	375
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	orang per RT	0,101	0,101	0,108	0,115	0,122	0,129	0,129
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	2,2	2,45	2,62	2,79	2,97	3,14	3,14
Persentase Linmas yang memiliki kemampuan dalam mencegah konflik sosial	%	40,0	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Cakupan Piket Pengamanan Petugas Satpol PP	kali/hari/kecamatan	1	1	1	1	1	1	1
Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	40	60	70	80	90	100	100
Deteksi dini penanganan kasus gangguan ketentraman dan trantibum	kecamatan	10	10	10	10	10	10	10

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Perda	5	5	5	5	5	5	25
Penurunan angka kriminalitas	%	3	5	7	9	11	13	13
Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan pembinaan	Orang	50	70	100	100	100	100	470
Jumlah konflik sosial di masyarakat	kasus	60	60	55	50	45	40	40
Persentase penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0	30	40	45	60	70	70
Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	10	60	60	60	60	60	60
Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	46	60	75	75	75	75	75
Cakupan regulasi dalam pengurangan risiko bencana	%	28,57	57,14	85,71	100	100	100	100
Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan kelurahan tangguh bencana	%	20	30	50	70	85	100	100
Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemulihan trauma pasca bencana	%	0	100	100	100	100	100	100
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	90	100	100	100	100	100	100
Persentase penurunan jumlah kejadian kebakaran	%	0	5	5	5	5	5	25
Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	15,63	31,25	53,13	75	100	100	100
Cakupan mobil/mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	%	50	50	55	65	75	85	85
Sosial								
Persentase tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	17	25	30	40	50	50	50
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Veteran yang mendapat pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
sosial selama masa tanggap darurat								
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase (%) penyandang disabilitas yang menerima peayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
PMKS yang tertangani	%	14,34	14,34	16,3	17,39	21,74	23,91	93,68
Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	38,45	38,45	40	45	48	50	50,00
Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	50	50	62,5	78,12	87,5	100	100
Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	orang	7602	7602	7602	7602	7602	7602	38010
Persentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	%	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	83,65
Persentase terbinanya eks. Penyandang penyakit sosial	%	29,41	20,71	7,72	8,64	14,4	6,07	6,07

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	%	12	14	8	8,33	9,09	10	20
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Tenaga Kerja								
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase lembaga pelatihan kerja swasta terbina	%	85	85	75	87	85	90	90
Pencari kerja yang ditempatkan	%	67	64	69	73	78	79	79
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61,2	61,71	62,17	62,63	63,1	63,58	63,58
Tingkat pengangguran terbuka	%	5,5	5,2	5	4,8	4,6	4,4	4,4
Rasio penduduk yang bekerja	%	94,50	94,80	95,00	95,20	95,40	95,60	95,60
Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	85	85	85	85	85	85	85
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	61,13	62,62	64,12	66,09	68,46	71,15	71,15
Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	80	82	84	85	86	88	88
Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak								
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	12	17	23	32	40	50	50

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	37	40	43	46	49	52	52
persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog. Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	%	19	21	23	25	27	29	29
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	%	97	97,5	98	98,5	99	100	100
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37	40	43	46	49	52	52
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100	100	100	100	100	100	100
Tertanganinya pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100	100	100
Terselenggaranya informasi pencegahan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu								
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase KDRT yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Pangan								
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	3017	3050	3100	3150	3200	3250	3250
Ketersediaan protein perkapita	Gram/kap/hr	86,66	87	87	88	90	91	91
Penguatan cadangan pangan	%	42,16	42,16	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	77,00	80,00	83,00	87,00	88,00	90,00	90,00
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	75	78	80	81	82	85	85

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	75	78	78	80	85	85
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Persentase Keamanan Pangan	%	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Pengawasan dan pembinaan kewanamanan pangan	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Peta Pemantauan Kerawanan Pangan Kota Samarinda	Peta	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pertanahan								
Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	kecamatan	0	2	2	2	2	2	10
Terlaksana koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	SKPD	0	15	15	15	15	15	15
Jumlah SKPD peserta sosialisasi	SKPD	0	47	47	47	47	47	47
Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	%	0						
Permohonan warga masyarakat untuk pensertifikatan tanah melalui program pemerintah	sertifikat	0	500	500	500	500	500	2500
Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	%	0	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya fasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	kasus	10	10	10	10	10	10	50
Lingkungan Hidup								
Persentase kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	%	0	21,3	55	76	89	100	100
Status mutu air badan air	Status	Cemar berat (≤ -100)	Cemar berat (≤ -90)	Cemar sedang (≥ -	Cemar sedang (≥ -	Cemar ringan (≥ -	Tidak tercemar	Tidak tercemar

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				30)	20)	10)		
prosestase kerusakan lingkungan terhadap luas kota	%	0	25	22	20	18	15	15
Indeks Status Kualitas udara ambien perkotaan	nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Prosentase pengangkutan dan pengolahan timbulan sampah di TPA	%	64	64	65	69	80	90	90
Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%	5,70	10,00	15,00	25,00	40,00	55,00	55,00
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil								
Persentase penduduk ber KTP-elektronik per satuan penduduk	%	45	60	70	80	90	100	100
Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	75	80	85	90	95	98	98
Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	80	85	90	95	97	97
Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim)	%	70	75	80	85	90	95	95
Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	40	50	75	85	90	95	95
Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	65	70	75	80	85	90	90
Persentase kepemilikan kartu Identitas Anak	%	0	50	75	80	85	90	90
Pemberdayaan Masyarakat & Desa								
PKK aktif	%	70	70	70	70	70	70	70
Posyandu aktif	unit	698	710	710	710	710	710	710
Persentase Posyandu Purnama dan	%	5	10,8	14,45	21,7	28,9	36	36

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mandiri								
Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	0	0	0	0	0	0	0
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Pengendalian penduduk & keluarga berencana								
KB Baru	orang	25.912,00	26.912,00	27.912,00	28.912,00	29.912,00	30.912,00	30.912,00
KB Aktif	orang	97.474,00	97.474,00	102.974,00	107.974,00	112.974,00	117.974,00	117.974,00
MKJP Baru	orang	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Unmed Need	%	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	13,00
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	1,83	1,74	1,71	1,61	1,50	1,50
Presentase Pemakaian Kontrasepsi	%	60,48	61,82	62,44	63,06	63,69	64,33	64,33
Jumlah PPKBD	Kelompok	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Jumlah Sub PPKBD	Kelompok	1.913,00	1.913,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.950,00
Jumlah PIK KRR di Kota	Kelompok	66,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
Angka Kelahiran Pada Remaja	%	32,00	32,00	30,00	28,00	24,00	22,00	26,00
Jumlah BKB	unit	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	90,00
Kehamilan yang tidak diinginkan (gagal ber-KB)	%	6,20	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60	5,60
Jumlah Penderita HIV di Samarinda	orang	1.400,00	1.375,00	1.350,00	1.305,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Usia Kawin Pertama	orang	66.372	65.372	64.372	63.372	62.372	61.372	61.372
Persentase BKB	%	73,26	75,58	77,91	80,23	82,56	84,88	84,88
Persentase BKL	%	75,34	78,08	80,82	83,56	86,30	89,04	89,04
Persentase BKR	%	84,62	88,46	92,31	96,15	100,00	100,00	100,00
Jumlah kelompok UPPKS	kelompok	128,00	128,00	130,00	132,00	134,00	136,00	136,00
Perhubungan								
Persentase sub terminal dalam Kondisi baik	%	75	80	80	83	83	100	100
Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	%	90	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda	%	0,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	%	65	70	75	80	90	100	100
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	unit	1	1	1	1	1	1	1
Persentase ketersediaan angkutan kota	%	48,76	50,72	52,63	54,76	58,70	66,67	66,67
Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	50,69	51,18	51,68	52,19	52,70	53,22	53,22

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	197.156	593.776	564.088	846.132	1.269.198	1.903.797	1.903.797
Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	63,86	70,24	76,63	81,45	84,59	86,15	86,15
Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	unit	63.636	70.000	77.000	84.700	93.170	102.487	102.487
Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	%	90	90	90	90	90	90	90
Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,16	5,16
Persentase kapal yang bersertifikasi	%	81	82	83	84	85	86	86
Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	85	87	92	95	97	100	100
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	0	70	75	80	90	90	90
Berkurangnya titik kemacetan	%	48,57	50,00	51,43	52,86	55,71	60,00	60,00
Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	%	56	60	62	68	76	86	86

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, ZOSS dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota :								
- rambu	%	45	55	65	75	90	100	100
- marka	%	16	17	18	19	21	22	22
- ZOSS	%	40	50	60	70	80	80	80
- Guardrill	%	44	56	67	78	89	100	100
Jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan operasional kendaraan bermotor	kali	0	22	30	40	50	60	60
Kuantitas Komoditas (ton) dan Penumpang (orang)	ton & orang	0	48.702.272 & 1.652.483					48.702.272 & 1.652.483
Komunikasi & Informatika								
Jumlah OPD Yang Menyediakan DIP	unit	0	10	20	30	40	50	50
Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM bidang TIK	orang	0	5	7	10	15	10	47
Terjalannya Kerjasama dengan pihak media massa dan tersalurnya informasi melalui Lembaga Informasi Publik	buah	0	15	30	50	75	100	100
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional	kali	0	2	4	6	9	12	33
Persentase capaian pengembangan Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Kota Samarinda	%	0	20	30	50	70	100	100
Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	aplikasi	0	1	1	1	1	1	1

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Koperasi & UKM								
Persentase koperasi aktif	%	79,64	80	81	82	83	84	84
Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	20	20	40	60	80	90	90
Jumlah UMKM yang mengikuti pameran promosi produk	unit	15	40	45	50	55	70	70
Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UMKM	%	88	88,2	88,4	88,6	88,8	90	90
Jumlah UMKM yang dibina	unit	100	100	150	200	200	300	300
Penanaman Modal								
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	event	3	8	12	14	13	18	18
Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	orang	2.650	3.000	3.250	3.250	3.500	3.500	3.500
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	perusahaan	173	175	177	180	183	185	185
Jumlah investor PMA	perusahaan	11	13	13	15	17	17	17
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Juta Rp.	6.500.000	6.650.000	6.650.000	6.750.000	6.850.000	7.000.000	33.900.000
Jumlah nilai investasi PMA	Juta Rp.	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.750.000	12.600.000
Jumlah bangunan ber-IMB	unit	18.301	20.500	22.500	24.000	25.250	26.500	26.500
Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan perijinan	%	80	82	84	86	88	90	90
Rasio Rumah ber IMB	%	40	45	50	55	60	65	65
Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	Kecamatan	0	2	2	2	2	2	10
Kepemudaan & Olahraga								
Jumlah organisasi pemuda	kelompok	98	98	98	98	98	98	98
Jumlah Pemuda berprestasi dan Pramuka	orang	12	17	19	21	24	26	107

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Berprestasi								
Jumlah kegiatan kepemudaan	kali	18	19	20	21	22	23	23
Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	kasus	30	26	22	20	18	16	16
Jumlah Wirausahawan Muda	orang	25	30	33	35	38	40	40
Jumlah klub olahraga	kelompok	310	310	310	310	310	310	310
Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	6	7	8	9	10	11	11
Jumlah organisasi olahraga	kelompok	64	65	66	67	68	69	69
Jumlah kegiatan olahraga	kali	39	40	41	42	43	44	44
Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	11,11	13,33	13,33	15,56	15,56	17,78	17,78
Jumlah Gedung Olahraga	unit	9	13	14	15	16	17	17
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	unit	2	2	2	2	2	2	2
Lapangan olahraga per 1000 penduduk	buah	0,619	0,62	0,62	0,62	0,621	0,621	0,621
Statistik								
Peresentase Data Tumbuh	%	0	2	5	7	10	15	15
Peresentase Keterisian Data	%	70	75	80	100	100	100	100
Persandian								
Pembinaan dan pengawasan jaringan komunikasi dan sandi daerah	kali	0	2	2	2	2	2	10
Kebudayaan								
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	kelompok	5	7	10	12	15	17	17
Jumlah lembaga adat yang dibina	kelompok	5	6	8	10	12	15	15

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya secara berkesinambungan kegiatan pelestarian budaya dan tersedianya kebijakan pelestarian budaya daerah	kelompok		8	10	10	10	10	10
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	10	12	14	16	18	20	80,00
Jumlah Misi Kesenian	kali	5	6	7	8	8	8	37
Jumlah grup kesenian	grup	57	60	65	70	75	80	80
Jumlah gedung kesenian	gedung	1	1	1	1	1	1	1
Cakupan Kajian Seni	%	33	40	50	65	70	100	100
Cakupan Fasilitas Seni	%	57	65	70	80	90	100	100
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	57	70	75	80	90	100	100
Cakupan Organisasi seni	%	67	75	80	85	90	100	100
Cakupan Tempat umum	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah dokumentasi tentang Seni dan Budaya Kota Samarinda	dokumen	1	3	3	3	3	3	3
Terlaksananya misi kesenian dan tersedianya Kelompok Binaan	kali	0	3	3	3	3	3	15
Perpustakaan								
Jumlah Perpustakaan umum/masyarakat	unit	306	306	307	308	309	310	310
Jumlah pengunjung (pemustaka) perpustakaan	orang	20.000	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400	106.000
Jumlah buku yang dapat di akses masyarakat melalui E Book	Judul Buku	0	0	0	6	6	6	18

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah pembinaan dan peningkatan SDM yang diikuti pustakawan	orang	10	0	0	0	0	1	11
Sistem informasi perpustakaan	aplikasi	0	1	1	1	1	1	1
Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan melalui multimedia	Naskah	0	0	0	0	0	1	2
Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Terpelihara	Buku	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kearsipan								
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikat	dokumen	0	0	1.000	1.200	1.300	1.500	1.500
Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	arsip	0	100	150	200	250	300	1.000
Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi mengikuti diklat	orang	1	2	2	2	2	2	10
Jumlah pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi	orang	1	40	40	40	40	40	200
Jumlah SKPD / sekolah yang Arsipnya terkelola secara baku	SKPD/ Sekolah	20	10	25	30	40	50	50
Jumlah arsip daerah yang bernilai	arsip	0	0	5	10	12	15	15
URUSAN PILIHAN								
Kelautan & Perikanan								
Jumlah produksi ikan tangkap	ton	14.822,9	15.000,7	15.180,7	15.362,9	15.547,3	15.733,8	76.825,4
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	kelompok	30	34	36	38	40	42	42
Produksi perikanan budidaya	ton	1.296,6	1.595,8	1.895,1	2.194,3	2.493,5	2.792,7	10.971
Jumlah kelompok pembudidaya ikan	orang	57	59	61	63	65	67	67

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	orang	25	26	27	28	29	30	30
Pariwisata								
Jumlah obyek wisata unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	obyek	6	8	11	14	18	23	23
Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Kunjungan wisata :								
Wisman	orang	644	773	1.005	1.307	1.830	2.562	7.477
Wisnus	orang	316.998	364.548	419.230	503.076	653.999	915.999	2.856.852
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%							
Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	produk	9	12	16	19	24	30	30
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	0	12	16	19	24	30	30
jumlah SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif	orang	0	80	90	100	110	120	120
jumlah kelompok sadar wisata	kelompok	0	3	5	7	9	11	11
Pertanian								
Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan modern	orang	60	78	78	80	82	84	84
Panjang saluran irigasi tersier dengan kondisi baik	km	0,75	1	1	1	1	1	1
Panjang jalan pertanian yang bisa dilalui kendaraan	km	1	1	1	1	1	5	5
Persentase peningkatan produksi dan	%	3	3	3	3	3	3	15

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utama								
Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	14.294	14.722	15.163	15.617	16.085	16.438	16.438
Produksi pertanian tanaman hortikultura utama								
- Cabe besar	ton	96	98	100	103	106	110	110
-Cabe Rawit	ton	133	136	140	144	148	152	152
- Durian	ton	261	266	271	276	281	287	287
- Tomat	ton	69	71	73	75	77	79	79
- Jamur	kg	15.532	15.998	16.478	16.972	17.481	17.861	17.861
- Pisang	ton	3.784	3.859	3.936	4.014	4.094	4.176	4.176
- Pepaya	ton	435	444	453	462	471	480	480
- Jahe	ton	29.752	30.644	31.563	32.509	33.484	34.488	34.488
- Melati	kg	36.929	38.036	39.177	40.352	41.562	42.808	42.808
Produksi komoditas perkebunan utama								
Karet	ton	149,10	153,57	158,18	162,93	167,81	172,85	172,85
Kelapa Dalam (ton)	ton	156,35	161,04	165,87	170,85	175,97	181,25	181,25
Kelapa Sawit	ton	7.094,25	7.307,08	7.526,29	7.752,08	7.984,64	8.224,18	8.224,18
Lada	ton	30,00	30,90	31,83	32,78	33,76	34,77	34,77
Kemiri	ton	18,00	18,54	19,10	19,67	20,26	20,87	20,87
Cakupan bina kelompok petani	kelompok	10	17	34	34	34	34	153
persentase kegiatan Promosi hasil produksi pertanian & perkebunan yang diikuti	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah populasi sapi	ekor	3.968	4.008	4.018	4.028	4.038	4.048	4.048

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Produksi daging	ton	10.057,00	10.559,85	11.087,84	11.642,23	12.224,35	12.835,56	12.835,56
Konsumsi Daging perkapita	kg	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9
Jumlah kelompok yang sudah memenuhi standarisasi Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	kelompok	0	7	10	13	16	20	20
Jumlah produk peternakan yang dapat bersaing pada skala nasional	kali	0	4	5	6	7	8	30
Pemeriksaan kesakitan hewan/ternak besar	sampel	500	600	600	600	600	700	700
Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	kelompok	0	11	11	11	11	11	11
Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	kelompok	0	25	61	61	61	62	62
Jumlah BPP/kecamatan yang meningkat Kapasitasnya	orang	2	4	4	4	4	4	4
Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	orang	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14	PPL PNS 46, THL 14
Kehutanan								
Persentase rehabilitasi lahan kritis	%	0	2	2	2	2	2	10
Energi & Sumber Daya Mineral								
Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	dokumen	0	8	8	8	8	8	40
Perdagangan								
Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	pedagang	60	60	60	60	60	60	300
Persentase Ketersediaan harga dan stok	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
barang								
Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	komoditi	0	1	1	1	1	2	2
Ekspor bersih perdagangan	Juta (US\$)	3.070,18	3.131,58	3.194,22	3.258,10	3.323,26	3.389,73	16.296,89
Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	lokasi	25	38	40	40	40	40	26
Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah pasar daerah yang dikelola	pasar	12	14	14	14	14	14	14
Peningkatan sarana dristribusi perdagangan pasar	tipe	12 pasar type D	14 pasar type D	11 pasar type D, 3 pasar type C	7 pasar type D, 4 pasar type C, 3 pasar type B	4 pasar type D, 3 pasar type C, 7 pasar type B	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A
Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	pasar	2	4	6	8	10	12	12
Kebersihan (Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik)	pasar	12	12	12	12	12	12	12
Persentase Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	%	100	100	100	100	100	100	100
Perindustrian								
Pertumbuhan nilai Investasi Di Bidang Industri	%	2,34	2,91	2,91	2,91	2,91	3,38	3,38
Pertumbuhan IKIM (Industri kecil & Industri Menengah)	%	2,86	2,85	2,91	2,9	2,88	2,86	2,86
Jumlah sentra yang dibina	sentra	1	1	1	1	2	2	7
Pembentukan Kawasan Industri di kota	%	0	20	40	60	80	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
samarinda								
Persentase Peningkatan jumlah legalitas usaha dibidang industri	%	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
Administrasi Pemerintahan								
Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	%	10	15	20	25	30	100	100
Persentase SKPD yang telah menyusun SOP dan SP	%	10	15	20	25	30	100	100
Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	Kategori	CC	CC	B	BB	BB	A	A
Persentase penyeenggara negara yang wajib LHKPN	%	5	15	20	25	35	100	100
Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase paket pengadaan B/J dilingkungan pemerintah Kota Samarinda melalui ULP	%	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase pegawai kehumasan yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan dan protokol	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah kerjasama antara pemkot dengan pers	media massa	7	7	7	7	7	7	7
Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	kali	6	6	6	6	6	6	30
Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah	%	75	80	80	80	80	80	80
Jumlah Keputusan Walikota	buah	425	500	530	570	570	570	2.740
Jumlah Peraturan Daerah	buah	7	9	9	12	12	15	57
Jumlah Peraturan Walikota	buah	15	20	20	26	26	30	122
Prosentase Penyelesaian Kasus konflik Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penyediannya produk-produk hukum daerah dan terbentuknya jaringan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Samarinda dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi serta Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	MoU	4	9	9	9	10	10	47
evaluasi perkotaan sebagai tindak lanjut pertemuan APEKSI	Wilayah	9	9	9	9	9	9	45
Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	Kecamatan	2	2	2	2	2	2	10

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ketepatan waktu penyampaian LPPD	tepat/tidak tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Banyaknya Kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan	7 Kecamatan	8 Kecamatan	9 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Samarinda	dokumen	2	3	4	5	6	6	6
Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen (Gasetir) Nama-Nama Rupabumi Kota Samarinda	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Persentase Penyampaian Laporan Penerimaan Bantuan Sosial dan Hibah bidang Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase Penyampaian Laporan Koordinasi bidang agama dan pendidikan; bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB; dan bidang pemuda, olahraga, dan kesbangpol	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terlaksananya evaluasi pelaksanaan program raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat	RTS	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan yang terfasilitasi	Urusan	0	7	7	7	7	7	7
Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	sidak	4	4	4	4	4	4	20
Jumlah terlaksananya evaluasi dan pelaporan penghematan penggunaan energi dan air	Unit kerja	118	118	118	118	118	118	118
Persentase meningkatnya perkembangan asset dan laba Perusda	%	50	60	70	80	90	100	100
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	perusda	3	3	3	3	3	3	3
Persentase capaian Prolegda	%	80	80	80	80	80	80	80
PERDA yang ditetapkan	buah	9	9	9	9	9	9	45
Jumlah PERDA yang dibatalkan	buah	0	0	0	0	0	0	0
RAPERDA yang disetujui DPRD	buah	19	19	19	19	19	19	95
Tersedianya Tenaga ahli Utk Anggota DPRD	orang	6	6	6	6	6	6	30
Terselenggaranya rapat-rapat DPRD	bulan	12	12	12	12	12	12	60
Jumlah Keputusan DPRD	buah	19	19	19	19	19	19	95
Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	%	73-100	73-100	73-100	73-100	73-100	73-100	73-100
Pengawasan								
Persentase laporan yang baik dari SKPD.	%	60	75	80	80	85	90	90
Jumlah Auditor yang mengikuti diklat	orang	10	30	30	30	30	30	30
Perencanaan								
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah SKPD memiliki dokumen Renstra dan Renja SKPD	SKPD	48	48	48	48	48	48	48
Persentase penyerapan usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diserap dalam Renja SKPD.	%	30	30	30	30	30	30	30
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Program	319	319	319	319	319	319	319
Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	%	97,05 program, 54,20 kegiatan	98,07 program, 57,01 kegiatan	100 program, 100 kegiatan	100 program, 100 kegiatan	100 program, 100 kegiatan	100 program, 100 kegiatan	100 program, 100 kegiatan
Persentase keselarasan dokumen renstra SKPD dengan RPJMD dan RKPD	%		80	100	100	100	100	100
Persentase keterisian data sistem informasi pembangunan daerah	%	66,88	70	75	80	85	90	90
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
Pembangunan data center	%	0	20	40	60	80	100	100
Persentase dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	0	20	40	60	80	90	90
Masterplan Green Economy	dokumen	0	0	1	0	0	0	1
Persentase dokumen perencanaan bidang sumberdaya manusia sesuai amanat pemerintah	%	40	60	80	90	100	100	100
Persentase dokumen perencanaan pemerintahan dan aparatur sesuai amanat	%	10	30	50	60	70	90	90

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
pemerintah								
Persentase dokumen kajian bidang perencanaan prasarana wilayah	%	75	80	85	90	95	100	100
Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perencanaan Ekonomi	dokumen	0	1	0	0	0	0	1
Persentase dokumen penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	%	0	33,33	33,33	33,33	0	0	99,99
Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah sesuai amanat pemerintah	%	75	80	85	90	95	100	450
Persentase Pendampingan perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	%	0	100	100	100	100	100	100
Keuangan								
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	62,46	60	59,85	57,14	55,2	58,15	58,15
Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	11,71	10	9	8,7	7,75	6,85	6,85
Rasio SILPA thdp total pendapatan	%	13,26	10	9,5	8,5	8	7	7
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	79	80	80,3	80,5	80,7	90	90
Waktu penetapan PERDA APBD	tepat/tidak tepat	tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
Belanja untuk pelayanan dasar	Milyar Rp.	2.185,30	2.360,12	2.596,13	2.751,90	2.861,98	2.919,22	13.489,34
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Milyar Rp.	1.064,20	1.117,42	1.173,29	1.231,95	1.293,55	1.358,23	6.174,42
Dana perimbangan yang terserap	%	84,00	90,00	92,00	93,50	94,00	95,00	95,00

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
dibanding yang direncanakan								
Belanja Publik terhadap DAU	%	335	370	385	395	410	425	425
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	58,90	65,00	70,00	75,00	85,00	90,00	90,00
Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	37,57	37,70	38,00	38,30	38,50	39,00	39,00
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	32,08	33,00	35,00	31,00	33,00	34,00	34,00
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD pd RPJMD	%	70	75	80	85	90	100	100
Persentase Peningkatan PAD	%	6,90	4,66	5,29	5,31	6,75	6,17	6,17
Besarnya pendapatan daerah dari sumber lain yang sah terhadap APBD	Milyar Rp.	834,82	871,57	910,28	951,09	994,11	994,11	994,11
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan teknis fungsional	orang	800	620	455	570	590	235	2.470
Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	orang	214	458	458	458	458	458	2.290
Jumlah aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	orang	1086	702	537	652	632	317	2.840
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang akan pensiun	orang	56	56	57	60	65	70	308

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai Kompetensinya	%	50	60	65	75	80	100	100
Persentase Pengelolaan Administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	90	92	94	96	98	99	99
Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda	%	95	96	97	98	99	99	99
Penelitian dan Pengembangan								
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang SDA dan Teknoogi	kali	0	0	3	3	3	0	9
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	kali	0	1	9	7	1	1	19
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Kesra dan Kemasyarakatan	kali	0	2	4	3	0	0	9
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Aparatur	kali		2	0	3	0	0	5
Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (SIDa) Kota Samarinda	kali		0	1	1	1	1	1
Aspek DayaSaing Daerah								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	1.165.269,00	1.287.001,42	1.323.758,50	1.356.180,55	1.385.183,05	1.411.419,01	1.435.370,56
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp.	650.066,00	738.747,90	760.989,71	780.608,39	798.157,89	814.033,35	828.526,50
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ketersediaan RTH terhadap RTRW	%	0	10	10	15	15	15	15
Titik lokasi banjir	titik	45	40	36	32	26	17	17
relokasi kaw.kumuh tepi Sungai Karang Mumus (SKM)	segmen	0	0	1	1	2	2	6
Lingkungan Hidup								
Ketersediaan RTH terhadap RTRW	%	0	10	10	15	15	15	15
Pencemaran sungai	Cemar berat	Cemar berat	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan
Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	%	100	100	100	100	100	100	100
Penegakan hukum lingkungan	Kasus	25	25	25	25	25	25	125
Penilaian untuk penghargaan Adipura	Poin	70,90	71,30	71,70	72,10	72,50	72,90	72,90
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	%	100	100	100	100	100	100	100
Komunikasi dan Informatika								
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	%	100	100	100	100	100	100	100
Fokus Iklim Berinvestasi								
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
Penurunan angka kriminalitas	%	3	5	7	9	11	13	13
Fokus Sumber Daya Manusia								
Ketenagakerjaan								
Rasio Ketergantungan	rasio	43,95	42,80	42,71	42,62	42,55	42,49	42,49



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah.

Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional.

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016–2021 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan RKPD maupun penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016–2021.

10.1. Pedoman Transisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam bagian ini perlu dinyatakan pedoman transisi. Adapun pedoman transisi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- 1) RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. RKPD tahun 2021 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan APBD tahun 2021 dibawah kepemimpinan Kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya yaitu 2021-2026.
- 2) Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan, maka Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2021, menyusun :
 - a. Draft Rancangan Awal RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat. Draft rancangan awal RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.



- b. RKPD Tahun 2022 dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia. RKPD tahun 2022 digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD tahun 2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terpilih yang merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda;
5. Penyusunan RKPD Kota Samarinda harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota;
6. RKPD Kota Samarinda harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Samarinda merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
8. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);





9. Setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Samarinda Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kota Samarinda, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil ;
10. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Bappeda Kota Samarinda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Renstra dan Renja dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Bappeda Kota Samarinda menyusun evaluasi RPJMD dan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Jl. Dahlia No. 81 Balai Kota, Samarinda - Kalimantan Timur. Telp (0541) 203785 - fax (0541) 732072
www.bappeda.samarindakota.go.id